



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGAN AKUN STANDAR

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KLASIFIKASI BAGAN AKUN STANDAR

BAB III BAGAN AKUN STANDAR

Bagian Kesatu	Akun Neraca
Bagian Kedua	Akun Pendapatan
Bagian Ketiga	Akun Belanja dan Transfer ke Daerah
Bagian Keempat	Akun Pembiayaan
Bagian Kelima	Akun Non Anggaran
Bagian Keenam	Akun APBN
Bagian Ketujuh	Akun DIPA
Bagian Kedelapan	Penjelasan Akun Pendapatan, Belanja, Transfer ke Daerah, Pembiayaan dan Non Anggaran

BAB IV DAFTAR KLASIFIKASI

Bagian Kesatu	Daftar Bagian Anggaran/Unit Organisasi
Bagian Kedua	Daftar Fungsi dan Sub Fungsi
Bagian Ketiga	Daftar Program
Bagian Keempat	Daftar Kegiatan
Bagian Kelima	Daftar Sub Kegiatan
Bagian Keenam	Daftar Kelompok Akun



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN

Reformasi manajemen keuangan negara telah dicanangkan di Indonesia melalui satu paket undang-undang di bidang keuangan negara. Reformasi ini mencakup perencanaan dan penganggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan auditing. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik telah diperkenalkan, antara lain akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, proporsionalitas, transparansi, dan profesionalitas.

Dalam rangka mendorong terwujudnya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara tersebut, dilakukan pembaharuan terhadap klasifikasi anggaran. Pasal 11 Undang-Undang No. 17 tahun 2003 (UU Nomor 17/2003) tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa APBN terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan, yang disebut ***l-account***. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagai peraturan turunan dari UU Nomor 17/2003 mengamanatkan pemerintah untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan dan menetapkan penggunaan anggaran berbasis kinerja. Untuk memenuhi ketentuan ini, setiap kementerian negara/lembaga dituntut mempunyai program dan kegiatan yang jelas dengan indikator kinerja yang terukur sehingga dapat dialokasikan sumber daya, termasuk anggaran sesuai dengan prestasi yang akan dicapai. Oleh karena itu anggaran yang disetujui DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja sebagaimana diatur dalam UU No. 17/2003 pasal 15 ayat (5).

Ketentuan tentang anggaran ini telah diatur lebih lanjut dalam PP No. 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan PP No. 21/2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Dalam Peraturan Pemerintah ini selain mengatur anggaran berbasis kinerja juga mengatur penyatuan anggaran (*unified budget*). Dengan penyatuan ini pemerintah bermaksud menyatukan anggaran rutin dan pembangunan serta mengatur keterkaitan antara kebijakan, perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban, serta evaluasi anggaran.

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu disusun suatu klasifikasi belanja Negara yang mengacu pada UU No. 17 tahun 2003 dan menyesuaikan dengan Government Finance Statistics (GFS) Manual 2001 yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan Negara yang baik (*best practices*). Klasifikasi belanja negara/belanja daerah tersebut dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Pelaksanaan anggaran yang disusun dengan klasifikasi sebagaimana diuraikan di atas harus dicatat dalam sistem akuntansi dengan klasifikasi anggaran yang sama. Hal ini diperlukan untuk pengendalian anggaran, pengukuran dan pelaporan kinerja.

Dari pelaksanaan anggaran ini kementerian negara/lembaga dituntut menyusun dan menyampaikan laporan keuangan, yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran disertai dengan informasi tentang prestasi kerja yang dicapai selama satu periode pelaporan. Di samping itu, Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara juga dituntut menyajikan Laporan Arus Kas.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Adanya pembaharuan dalam pengelolaan keuangan negara dan langkah-langkah pemerintah yang harus diambil menuju ke pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 maka perlu dilakukan penataan kembali terhadap klasifikasi anggaran maupun klasifikasi pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas yang disajikan di neraca, serta klasifikasi arus kas yang disajikan dalam Laporan Arus Kas.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan ini mencakup klasifikasi menurut organisasi, fungsi, subfungsi, program, kegiatan, subkegiatan, dan mata anggaran. Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan landasan bagi setiap instansi yang terkait dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban anggaran, dan pemeriksaan laporan keuangan.

**BAB II****KLASIFIKASI AKUN STANDAR****A. Klasifikasi berdasarkan Organisasi**

Klasifikasi belanja berdasarkan organisasi disusun berdasarkan susunan Kementerian Negara/Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Klasifikasi ini tidak bersifat permanen dan akan disesuaikan dengan susunan Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Pusat yang ada. Klasifikasi menurut organisasi ini terinci di dalam Bagian Anggaran, Eselon I, dan Satuan Kerja.

B. Klasifikasi berdasarkan Fungsi

Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Klasifikasi belanja berdasarkan fungsi diatur dalam penjelasan Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, terdiri dari 11 fungsi utama yaitu pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Penjelasan atas fungsi-fungsi tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004.

C. Klasifikasi berdasarkan Subfungsi

Subfungsi merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi. Dari 11 (sebelas) fungsi utama dirinci ke dalam 79 (tujuh puluh sembilan) subfungsi. Klasifikasi belanja berdasarkan subfungsi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004. Penggunaan Fungsi dan Subfungsi disesuaikan dengan tugas masing-masing Kementerian Negara/Lembaga/SKPD. Klasifikasi Fungsi dan Subfungsi sebagai berikut.

KODE	FUNGSI DAN SUBFUNGSI
01	PELAYANAN UMUM
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
01.02	BANTUAN LUAR NEGERI
01.03	PELAYAN UMUM
01.04	PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK
01.05	PINJAMAN PEMERINTAH
01.06	PEMBANGUNAN DAERAH
01.07	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN
01.90	PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN LAINNYA
02	PERTAHANAN
02.01	PERTAHANAN NEGARA
02.02	DUKUNGAN PERTAHANAN
02.03	BANTUAN MILITER LUAR NEGERI
02.04	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTAHANAN
02.90	PERTAHANAN LAINNYA
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.01	KEPOLISIAN
03.02	PENANGGULANGAN BENCANA
03.03	PEMBINAAN HUKUM
03.04	PERADILAN
03.05	LEMBAGA PEMASYARAKATAN
03.06	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KETERTIBAN, KEAMANAN, DAN HUKUM
03.90	KETERTIBAN, KEAMANAN, DAN HUKUM LAINNYA
04	EKONOMI
04.01	PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI, DAN UKM
04.02	TENAGA KERJA
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
04.04	PENGAIRAN
04.05	BAHAN BAKAR DAN ENERGI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

04.06	PERTAMBANGAN
04.07	INDUSTRI DAN KONSTRUKSI
04.08	TRANSPORTASI
04.09	TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
04.10	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI
04.90	EKONOMI LAINNYA
05	LINGKUNGAN HIDUP
05.01	MANAJEMEN LIMBAH
05.02	MANAJEMEN AIR LIMBAH
05.03	PENANGGULANGAN POLUSI
05.04	KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
05.05	TATA RUANG DAN PERTANAHAN
05.06	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP
05.90	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01	PENGEMBANGAN PERUMAHAN
06.02	PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PEMUKIMAN
06.03	PENYEDIAAN AIR MINUM
06.04	PENERANGAN JALAN
06.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
06.90	PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN LAINNYA
07	KESEHATAN
07.01	OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
07.02	PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN
07.03	PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
07.04	KELUARGA BERENCANA
07.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
07.90	KESEHATAN LAINNYA
08	PARIWISATA DAN BUDAYA
08.01	PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN BUDAYA
08.02	PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
08.03	PEMBINAAN PENERBITAN DAN PENYIARAN
08.04	LITBANG PARIWISATA, BUDAYA, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA
08.90	PARIWISATA DAN BUDAYA LAINNYA
09	AGAMA
09.01	PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA
09.02	KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA
09.03	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA
09.90	PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA
10	PENDIDIKAN
10.01	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
10.02	PENDIDIKAN DASAR
10.03	PENDIDIKAN MENENGAH
10.04	PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL
10.05	PENDIDIKAN KEDINASAN
10.06	PENDIDIKAN TINGGI
10.07	PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN
10.08	PENDIDIKAN KEAGAMAAN
10.09	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
10.90	PENDIDIKAN LAINNYA
11	PERLINDUNGAN SOSIAL
11.01	PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN ORANG SAKIT DAN CACAT
11.02	PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN LANSIA
11.03	PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL KELUARGA PAHLAWAN, PERINTIS KEMERDEKAAN, DAN PEJUANG
11.04	PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ANAK-ANAK DAN KELUARGA
11.05	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
11.06	PENYULUHAN DAN BIMBINGAN SOSIAL
11.07	BANTUAN PERUMAHAN
11.08	BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL
11.09	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN SOSIAL
11.90	PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

D. Klasifikasi berdasarkan Program

Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian Negara/Lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kementerian Negara/Lembaga. Rumusan program harus jelas menunjukkan keterkaitan dengan kebijakan yang mendasarinya dan memiliki sasaran kinerja yang jelas dan terukur untuk mendukung upaya pencapaian tujuan kebijakan yang bersangkutan.

E. Klasifikasi berdasarkan Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Kegiatan terdiri dari sekumpulan tindakan pengesahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

F. Klasifikasi berdasarkan Subkegiatan

Subkegiatan adalah bagian dari kegiatan yang menunjang usaha pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan tersebut. Kegiatan dapat dirinci kedalam dua atau lebih subkegiatan karena kegiatan tersebut mempunyai dua atau lebih jenis dan satuan keluaran yang berbeda satu sama lain. Kegiatan/Subkegiatan harus dengan jelas menunjukkan keterkaitan dengan program yang memayungi, memiliki sasaran keluaran yang jelas dan terukur.

G. Klasifikasi berdasarkan Jenis Belanja (ekonomi)

Klasifikasi berdasarkan jenis belanja menurut Penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Lain-Lain, dan Belanja Daerah. Secara rinci klasifikasi berdasarkan jenis belanja sebagai berikut.

a. Belanja Pemerintah Pusat

1. Belanja Pegawai

Pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

2. Belanja Barang

Pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja ini terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas.

3. Belanja Modal

Pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset Tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Pembayaran Bunga Utang

Pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) baik utang dalam maupun luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.

5. Subsidi

Pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui BUMN/BUMD dan perusahaan swasta. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.

6. Hibah

Pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa, bersifat tidak wajib yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan tidak mengikat serta tidak terus menerus kepada pemerintahan negara lain, pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan serta organisasi internasional.

7. Bantuan Sosial

Transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Pengeluaran ini dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, bersifat tidak terus menerus dan selektif.

8. Belanja Lain-Lain

Pengeluaran/belanja pemerintah pusat yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran di atas. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah.

b. Transfer ke Daerah

1. Dana Perimbangan

Pengeluaran/alokasi anggaran untuk pemerintah daerah berupa dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah.

2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

Pengeluaran/alokasi anggaran untuk pemerintah daerah berupa dana otonomi khusus dan dana penyesuaian yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah.

Klasifikasi menurut jenis belanja (ekonomi) selanjutnya akan dirinci berdasarkan kode akun.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

H. Klasifikasi Berdasarkan Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-Undang tentang APBN. Pembiayaan terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan
2. Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh Pemerintah. Klasifikasi pembiayaan selanjutnya akan dirinci menurut kode akun.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB III

BAGAN AKUN STANDAR

Untuk memenuhi amanat pasal 11 ayat (5) UU No. 17 tahun 2003, perlu dibuat bagan akun standar (BAS) sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah.

Pembentukan BAS ini bertujuan untuk:

1. Memastikan rencana keuangan (anggaran), realisasi dan pelaporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang sama;
2. Meningkatkan kualitas informasi keuangan;
3. Memudahkan pengawasan keuangan.

BAS dikelompokkan ke dalam beberapa klasifikasi yaitu:

A. AKUN NERACA

1. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam :

a. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- a) diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan; atau
- b) berupa kas dan setara kas.

Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

b. Investasi Jangka Panjang

merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya.

c. Aset Tetap

adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

d. Dana Cadangan

adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

e. Aset Lainnya

Aset yang tidak dapat diklasifikasikan dalam Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap dan Dana Cadangan. Contoh : Dana yang dibatasi penggunaan, *Trust Fund* dan sebagainya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2. KEWAJIBAN

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya.

- a. Kewajiban Jangka Pendek
Merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan ke dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- b. Kewajiban Jangka Panjang
Merupakan kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

3. EKUITAS DANA

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

- a. Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.
- b. Ekuitas Dana Investasi
Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
- c. Ekuitas Dana Cadangan
Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. AKUN OPERASIONAL

1. PENDAPATAN

- a. Penerimaan Perpajakan
Pendapatan/penerimaan yang diterima oleh pemerintah yang bersumber dari pajak, bea dan cukai yang sepenuhnya dipergunakan untuk menutupi seluruh pengeluaran.
- b. Penerimaan Negara Bukan Pajak
Pendapatan/penerimaan yang diterima oleh pemerintah yang bersumber dari penerimaan lainnya (PNBP) yang tidak dapat dikategorikan kedalam penerimaan pajak yang sepenuhnya dipergunakan untuk menutupi seluruh pengeluaran.
- c. Hibah
Penerimaan yang diterima pemerintah baik berupa uang maupun barang modal yang sumbernya berasal dari dalam dan luar negeri atau dari hibah lainnya.

2. BELANJA

- a. Belanja Pegawai
Pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

b. Belanja Barang

Pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja ini terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.

c. Belanja Modal

Pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset Tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

d. Belanja Pembayaran Bunga Utang

Pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) baik utang dalam maupun luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.

e. Belanja Subsidi

Pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui BUMN/BUMD dan perusahaan swasta. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.

f. Belanja Hibah

Pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa, bersifat tidak wajib yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan tidak mengikat serta tidak terus menerus kepada pemerintahan negara lain, pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan serta organisasi internasional.

g. Belanja Bantuan Sosial

Transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Pengeluaran ini dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, bersifat tidak terus menerus dan selektif.

h. Belanja Lain-lain

Pengeluaran/belanja pemerintah pusat yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran diatas. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah.

3. TRANSFER KE DAERAH

a. Dana Perimbangan

Pengeluaran/alokasi anggaran untuk pemerintah daerah berupa dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

b. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

Pengeluaran/alokasi anggaran untuk pemerintah daerah berupa dana otonomi khusus dan dana penyesuaian yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah.

4. PEMBIAYAAN

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah Penerimaan Negara berasal dari penarikan pinjaman, penjualan surat perbendaharaan negara / obligasi negara / surat berharga syariah negara, hasil privatisasi, penjualan aset hasil restrukturisasi dan penerimaan perbankan lainnya.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah Pengeluaran Negara untuk pembayaran cicilan utang, penarikan surat utang negara, penanaman modal negara dan investasi pemerintah lainnya serta dukungan infrastuktur.

C. NON ANGGARAN

a. Penerimaan Non Anggaran

Penerimaan pada Rekening Kas Umum Negara yang tidak dianggarkan dalam APBN. Yang termasuk dalam penerimaan Non Anggaran adalah transfer antar rekening pemerintah, penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga dan Penerimaan Pengembalian Uang persediaan.

b. Pengeluaran Non Anggaran

Pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang tidak dianggarkan dalam APBN. Yang termasuk dalam Pengeluaran Non Anggaran adalah transfer antar rekening pemerintah, Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga dan Pembayaran Uang persediaan

D. AKUN APBN **)

1. ESTIMASI PENDAPATAN

- a. Estimasi Penerimaan Perpajakan
- b. Estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
- c. Estimasi Hibah

2. APPROPRIASI BELANJA

- a. Appropriasi Belanja Pegawai
- b. Appropriasi Belanja Barang
- c. Appropriasi Belanja Modal
- d. Appropriasi Belanja Pembayaran Bunga Utang
- e. Appropriasi Belanja Subsidi
- f. Appropriasi Belanja Hibah
- g. Appropriasi Belanja Bantuan Sosial
- h. Appropriasi Belanja Lain-lain

3. APPROPRIASI TRANSFER KE DAERAH

- a. Appropriasi Dana Perimbangan
- b. Appropriasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

4. ESTIMASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAN APPROPRIASI PENGELUARAN PEMBIAYAAN

- a. Estimasi Penerimaan Pembiayaan
- b. Appropriasi Pengeluaran Pembiayaan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**) Kode akun untuk akun APBN sama dengan kode akun operasional hanya dibedakan dengan menggunakan kode transaksi.

E. AKUN DIPA ***)

1. ESTIMASI PENDAPATAN YANG DIALOKASIKAN

- a. Estimasi Penerimaan Perpajakan yang dialokasikan
- b. Estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dialokasikan
- c. Estimasi Hibah yang dialokasikan

2. ALLOTMENT BELANJA

- a. *Allotment* Belanja Pegawai
- b. *Allotment* Belanja Barang
- c. *Allotment* Belanja Modal
- d. *Allotment* Belanja Pembayaran Bunga Utang
- e. *Allotment* Belanja Subsidi
- f. *Allotment* Belanja Hibah
- g. *Allotment* Bantuan Sosial
- h. *Allotment* Belanja Lain-lain

3. ALLOTMENT TRANSFER KE DAERAH

- a. *Allotment* Dana Perimbangan
- b. *Allotment* Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

4. ESTIMASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN YANG DIALOKASIKAN DAN ALLOTMENT PENGELUARAN PEMBIAYAAN

- a. Estimasi Penerimaan Pembiayaan yang dialokasikan
- b. *Allotment* Pengeluaran Pembiayaan

***) Kode akun untuk akun DIPA sama dengan kode akun operasional hanya dibedakan dengan menggunakan kode transaksi.

Akun yang digunakan untuk penyusunan Neraca adalah:

1. Kelompok Aset (Kode 1XXXXX)
2. Kelompok Utang (Kode 2XXXXX)
3. Kelompok Ekuitas Dana (Kode 3XXXXX)

Akun yang digunakan untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran

1. Kelompok Pendapatan/Estimasi Pendapatan/Estimasi Pendapatan yang dialokasikan (4XXXXX).
2. Kelompok Belanja/Apropriasi Belanja/Allotment Belanja (5XXXXX).
3. Kelompok Belanja Daerah/Apropriasi Belanja Daerah/Allotment Belanja daerah (6XXXXX).
4. Kelompok Penerimaan Pembiayaan/Estimasi Penerimaan Pembiayaan/Penerimaan Pembiayaan yang dialokasikan (71XXXX).
5. Kelompok Pengeluaran Pembiayaan/Propriasi Pengeluaran Pembiayaan/*Allotment* Pengeluaran Pembiayaan (72XXXX).

Akun yang digunakan untuk menyusun Laporan Arus Kas.

1. Kelompok Pendapatan (4XXXXX).
2. Kelompok Belanja (5XXXXX).
3. Kelompok Belanja Daerah (6XXXXX).
4. Kelompok Penerimaan Pembiayaan (71XXXX).
5. Kelompok Pengeluaran Pembiayaan (72XXXX).
6. Kelompok Non Anggaran (8XXXXX)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

F. BAGAN AKUN STANDAR DETAIL

Bagan Akun Standar Detail untuk selanjutnya dapat dilihat pada lampiran sebagai berikut :

- a. Bagian Kesatu, Akun Neraca
- b. Bagian Kedua, Akun Pendapatan
- c. Bagian Ketiga, Akun Belanja dan Transfer ke Daerah
- d. Bagian Keempat, Akun Pembiayaan
- e. Bagian Kelima, Akun Non Anggaran
- f. Bagian Keenam, Akun APBN
- g. Bagian Ketujuh, Akun DIPA
- h. Bagian Kedelapan, Penjelasan Akun Pendapatan, Belanja, Transfer ke Daerah, Pembiayaan, dan Non Anggaran.

G. PERUBAHAN BAGAN AKUN STANDAR

Pada Bagan Akun Standar ini terdapat penyempurnaan dari bagan perkiraan standar yaitu :

1. Perubahan Bagan Perkiraan Standar menjadi Bagan Akun Standar,
2. Tidak terdapat lagi istilah MAK/MAP sehingga berubah menjadi Akun,
3. Tidak ada akun terpisah untuk mencatat transaksi pengembalian pendapatan dan pengembalian belanja. Apabila ada pengembalian pendapatan maka akun yang digunakan adalah akun pendapatan, demikian juga apabila ada pengembalian belanja maka akun yang digunakan adalah akun belanja yang terkait. Perbedaan untuk kedua transaksi tersebut terletak pada dokumen sumbernya saja. Sementara laporan pengembalian pendapatan dan pengembalian belanja tetap dibuat untuk memudahkan pembacaan laporan.
4. Selain itu untuk belanja inventaris kantor dan belanja untuk keperluan tupoksi (kontraktual) juga sudah ditiadakan, dengan catatan bahwa belanja inventaris tersebut sudah digabungkan dengan belanja keperluan perkantoran sedangkan belanja untuk keperluan tupoksi dimasukkan sesuai transaksinya masing-masing apakah belanja pembayaran honor atau belanja perjalanan.
5. Pada belanja pemeliharaan dan belanja modal terdapat penambahan yaitu belanja pemeliharaan yang dikapitalisasi dan belanja modal yang dirinci secara swakelola. Keduanya masuk dalam klasifikasi belanja modal.
6. Untuk transaksi Badan Layanan Umum dan pos-pos khusus pada neraca, diberikan akun tersendiri untuk memudahkan bagi setiap satker BLU dalam penyusunan laporan keuangan yang memiliki perbedaan kode akun dengan satker biasa.
7. Pada belanja untuk daerah yang terdiri dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian berubah bukan lagi sebagai belanja melainkan transfer ke daerah.
8. Pencatatan penerimaan atas penerusan pinjaman dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yang semula dibukukan sebagai penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Penerimaan Piutang Non Bendahara) untuk selanjutnya dibukukan sebagai Penerimaan Pembiayaan.
9. Penyediaan akun atas transaksi kiriman uang dari/ke rekening KUN dalam Valuta USD sehubungan dengan pembukaan rekening Kas Umum Negara di Bank Indonesia dalam bentuk Valuta Asing USD.
10. Serta yang paling akhir dari perubahan ini adalah penambahan penjelasan terhadap penggunaan akun pendapatan dan akun belanja.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN KESATU

KELOMPOK AKUN NERACA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KELOMPOK NERACA

AKUN ASET

1 ASET
11 ASET LANCAR
111 KAS DAN SETARA KAS
1111 Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam Rupiah
11111 Kas di Bank Indonesia
111111 Kas di Rekening BUN (502.000.000)
111112 Kas di Rekening Ditjen PBN Pusat (500.000.000)
111113 Kas di Rekening SAL
111114 Kas di Rekening Talangan Reksus Kosong
1112 Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam valuta asing
11121 Kas di Bank Indonesia
111211 Kas di Rekening KUN dalam Valuta USD (600.502.411)
111212 Kas di Rekening Penerimaan PPH dalam valuta USD
111213 Kas di Rekening Penerimaan Migas (600.000.411)
111214 Kas di rekening PHLN
1113 Rekening Pemerintah Lainnya
11131 Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Indonesia
111311 Kas Pemerintah Lainnya dalam rupiah
111312 Kas Pemerintah Lainnya dalam valuta USD
11132 Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Umum
111321 Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat
111322 Kas Pemerintah yang ada di K/L
111323 Kas Pemerintah yang ada di BLU
111324 Kas di Rekening PFK
111329 Kas lainnya
1114 Rekening Kas di KPPN
11141 Kas di Bank Indonesia
111411 Kas di Rekening Pengeluaran di Bank Tunggal
11142 Kas di Bank Umum
111421 Kas di Rekening Pengeluaran di Bank Operasional
111422 Kas di Rekening Penerimaan (Persepsi/Devisa Persepsi)
1115 Kas dalam Transito
11151 Kas dalam Transito
111511 Kas dalam Transito
1116 Kas di Bendahara Pengeluaran
11161 Kas di Bendahara Pengeluaran
111611 Kas di Bendahara Pengeluaran
1117 Kas di Bendahara Penerimaan
11171 Kas di Bendahara Penerimaan
111711 Kas di Bendahara Penerimaan
1118 Setara Kas
11181 Setara Kas
111811 Surat Berharga



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

111819	Setara Kas lainnya
1119	Kas pada Badan Layanan Umum
11191	Kas
111911	Kas dan Bank
111912	Dana yang akan Dijaminkan
111913	Dana yang akan dipadankan
111914	Dana yang akan digulirkan
11192	setara Kas
111921	Surat Berharga
111929	Setara kas Lainnya
112	UANG MUKA DARI REKENING KUN
1121	Uang Muka Dari Rekening KUN
11211	Uang Muka KUN UP
112111	Uang Muka KUN UP – PP
11212	Uang Muka KUN Non UP
112121	Uang Muka KUN Pengeluaran Ineligible
1122	Uang Muka Dari Rekening Khusus
11221	Uang Muka Reksus UP
112211	Uang Muka Reksus UP - PP Reksus
11222	Uang Muka Reksus Non UP
112221	Uang Muka Reksus Kosong
113	PIUTANG
1131	Piutang Pajak
11311	Piutang Pajak PPh Migas
113111	Piutang PPh Minyak Bumi
113112	Piutang PPh Gas Bumi
113119	Piutang PPh Migas Lainnya
11312	Piutang Pajak PPh Non Migas
113121	Piutang PPh Pasal 21
113122	Piutang PPh Pasal 22
113123	Piutang PPh Pasal 22 Impor
113124	Piutang PPh Pasal 23
113125	Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi
113126	Piutang PPh Pasal 25/29 Badan
113127	Piutang PPh Pasal 26
113128	Piutang PPh Final dan Fiskal Luar Negeri
113129	Piutang PPh Fiskal Luar Negeri
11313	Piutang Pajak PPN
113131	Piutang PPN Dalam Negeri
113132	Piutang PPN Impor
113139	Piutang PPN Lainnya
11314	Piutang Pajak PPnBM
113141	Piutang PPnBM dalam Negeri
113142	Piutang PPnBM Impor
113149	Piutang PPnBM Lainnya
11315	Piutang Pajak PBB dan BPHTB
113151	Piutang PBB Pedesaan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

113152	Piutang PBB Perkotaan
113153	Piutang PBB Perkebunan
113154	Piutang PBB Kehutanan
113155	Piutang PBB Pertambangan
113156	Piutang BPHTB
113159	Piutang PBB Lainnya
11316	Piutang Cukai dan Bea Meterai
113161	Piutang Cukai Hasil Tembakau
113162	Piutang Cukai Ethyl Alkohol
113163	Piutang Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol
113164	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai
113166	Piutang Bea Meterai
113169	Piutang Pendapatan Cukai Lainnya
11317	Piutang Pajak Lainnya
113171	Piutang Pendapatan dari Penjualan Benda Meterai
113172	Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya
113173	Piutang Bunga Penagihan PPh
113174	Piutang Bunga Penagihan PPN
113175	Piutang Bunga Penagihan PPnBM
113176	Piutang Bunga Penagihan PTLL
11318	Piutang Cukai Lainnya
113181	Piutang Bea masuk
113182	Piutang Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)
113183	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean
113184	Piutang Pendapatan Pabean Lainnya
113185	Piutang Pajak/pungutan ekspor
1132	Piutang Bukan Pajak
11321	Piutang Bukan Pajak
113211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak
113212	Piutang Lainnya
1133	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
11331	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
113311	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
1134	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
11341	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
113411	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
1135	Bagian Lancar Investasi Permanen
11351	Bagian Lancar Investasi Permanen
113511	Bagian Lancar Investasi Permanen
1136	Uang muka belanja
11361	Uang muka belanja pemerintah pusat
113611	uang muka belanja pegawai
113612	uang muka belanja barang
113613	uang muka belanja modal
113614	uang muka belanja pembayaran bunga
113615	uang muka belanja subsidi
113616	uang muka belanja hibah
113617	uang muka belanja bantuan sosial



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

11362 Uang muka belanja daerah
113621 Uang muka belanja dana perimbangan
113622 Uang muka belanja otonomi khusus dan penyesuaian
1137 Piutang
11371 Piutang Dari KUN
113711 Piutang dari BUN
113712 Piutang dari KPPN
11372 Piutang Kementerian Negara/Lembaga
113711 Piutang dari Kementerian Negara/Lembaga
1138 Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum
11381 Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa
113811 Piutang BLU Pelayanan Kesehatan
113812 Piutang BLU Pelayanan Pendidikan
113813 Piutang BLU Penunjang Konstruksi
113814 Piutang BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi
113819 Piutang BLU penyedia Barang dan JasaLainnya
11382 Piutang BLU Pengelola Wilayah/Kawasan Tertentu
113821 Piutang BLU Pengelola Kawasan Otorita
113822 Piutang BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu
113829 Piutang BLU Pengelola Kawasan Lainnya
11383 Piutang BLU Pengelola Dana Khusus Masyarakat
113831 Piutang BLU Pengelola Dana Investasi
113832 Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir
113839 Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya
11389 Piutang BLU Lainnya
113891 Piutang dari Kegiatan Operasional Lainnya
1139 Piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum
11391 Piutang Sewa
113911 Piutang Sewa Tanah
113912 Piutang Sewa Gedung
113913 Piutang Sewa Ruangan
113914 Piutang Sewa Peralatan dan Mesin
113919 Piutang Sewa Lainnya
11392 Piutang dari Penjualan Aset
113921 Piutang dari Penjualan Aset Tetap
113929 Piutang dari penjualan Aset lainnya
11399 Piutang BLU Lainnya
113991 Piutang dari kegiatan non operasional lainnya
114 INVESTASI JANGKA PENDEK
1141 Investasi dalam Deposito
11411 Investasi dalam Deposito
114111 Investasi dalam Deposito Jangka pendek
1142 Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara
11421 Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara
114211 Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

1143 Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum
11431 Deposito Jangka Pendek
114311 Deposito
114319 Investasi Lainnya
1149 Investasi Jangka Pendek Lainnya
11491 Investasi Jangka Pendek Lainnya
114911 Investasi Jangka Pendek Lainnya
115 PERSEDIAAN
1151 Persediaan
11511 Persediaan Bahan untuk Operasional
115111 Barang Konsumsi
115112 Amunisi
115113 Bahan untuk Pemeliharaan
115114 Suku Cadang
11512 Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat
115121 Pita Cukai, Materai dan Leges
115122 Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
115123 Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
115124 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
115125 Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat
115126 Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat
115127 Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat
11513 Persediaan Bahan untuk Proses Produksi
115131 Bahan Baku
115132 Barang dalam Proses
11519 Persediaan Bahan Lainnya
115191 Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga - jaga
115192 Persediaan Barang Hasil Sitaan
115199 Persediaan Lainnya
1152 Persediaan Badan Layanan Umum
11521 Persediaan BLU Penyediaan Barang dan Jasa
115211 Persediaan BLU Pelayanan Kesehatan
115212 Persediaan BLU Pelayanan Pendidikan
115213 Persediaan BLU penunjang Konstruksi
115214 Persediaan BLU Penyediaan Jasa Telekomunikasi
115219 Persediaan BLU Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya
11522 Persediaan BLU Pengelola Wilayah/Kawasan Tertentu
115221 Persediaan BLU Pengelola Kawasan Otorita
115222 Persediaan BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu
115229 Persediaan BLU Pengelola Kawasan Lainnya
11523 Persediaan BLU Pengelola Dana Khusus Masyarakat
115231 Persediaan BLU Pengelola Dana Investasi
115232 Persediaan BLU Pengelola Dana Bergulir
115239 Persediaan BLU Pengelola Dana Lainnya
12 INVESTASI JANGKA PANJANG
121 INVESTASI NON PERMANEN
1211 Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah
12111 Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah
121111 Rekening Dana Investasi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

121112	Rekening Pembangunan Daerah
1212	Dana Restrukturisasi Perbankan
12121	Dana Restrukturisasi Perbankan
121211	Dana Restrukturisasi Perbankan
1213	Dana Bergulir
12131	Program Kemitraan (PK)
121311	Program Kemitraan (PK)
12132	Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga
121321	Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga
12133	Dana Bergulir Lainnya
121331	Dana Bergulir Lainnya
1214	Investasi dalam Obligasi
12141	Investasi dalam Obligasi
121411	Investasi dalam Obligasi
1215	Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan
12151	Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan
121511	Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan
1216	Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum
12161	Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa
121611	Investasi BLU Pelayanan Kesehatan
121613	Investasi BLU Pelayanan Pendidikan
121614	Investasi BLU Penunjang Konstruksi
121615	Investasi BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi
121619	Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
12162	Investasi BLU Pengelola Wilayah/Kawasan tertentu
121621	Investasi BLU Pengelola Kawasan Otorita
121622	Investasi BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu
121629	Investasi BLU Pengelola Kawasan Lainnya
12163	Investasi BLU Pengelola Dana Khusus untuk Masyarakat
121631	Investasi BLU Pengelola Dana Investasi
121632	Investasi BLU Pengelola Dana Bergulir
121639	Investasi BLU Pengelola Dana Lainnya
1219	Investasi Non Permanen Lainnya
12191	Investasi Non Permanen Lainnya
121911	Investasi Non Permanen Lainnya
122	INVESTASI PERMANEN
1221	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah
12211	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Perusahaan Negara/Daerah
122111	Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero
122112	Penyertaan Modal Pemerintah pada PERUM
12212	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional
122121	Penyertaan Modal Luar Negeri
12213	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Lainnya



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

122131	Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Lainnya
1222	Investasi Permanen Badan Layanan Umum
12221	Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa
122211	Investasi BLU Pelayanan Kesehatan
122212	Investasi BLU Pelayanan Pendidikan
122213	Investasi BLU Penunjang Konstruksi
122214	Investasi BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi
122219	Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
12222	Investasi BLU Pengelola Kawasan
122221	Investasi BLU Pengelola Kawasan Otorita
122222	Investasi BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu
122223	Investasi BLU Pengelola Kawasan Lainnya
12223	Investasi BLU Pengelola Dana
122231	Investasi BLU Pengelola Dana Investasi
122232	Investasi BLU Pengelola Dana Bergulir
122239	Investasi BLU Pengelola Dana Lainnya
1229	Investasi Permanen Lainnya
12291	Investasi permanen Lainnya
122911	Investasi dalam Obligasi
122912	Investasi pada Otorita
122919	Investasi Lain-lain
13	ASET TETAP
131	ASET TETAP
1311	Tanah
13111	Tanah
131111	Tanah
1312	Tanah Sebelum Disesuaikan
13121	Tanah Sebelum Disesuaikan
131211	Tanah Sebelum Disesuaikan
1313	Peralatan dan Mesin
13131	Peralatan dan Mesin
131311	Peralatan dan Mesin
1314	Peralatan dan Mesin Sebelum Disesuaikan
13141	Peralatan dan Mesin Sebelum Disesuaikan
131411	Peralatan dan Mesin Sebelum Disesuaikan
1315	Gedung dan Bangunan
13151	Gedung dan Bangunan
131511	Gedung dan Bangunan
1316	Gedung dan Bangunan Sebelum Disesuaikan
13161	Gedung dan Bangunan Sebelum Disesuaikan
131611	Gedung dan Bangunan Sebelum Disesuaikan
1317	Jalan, Irigasi dan Jaringan
13171	Jalan, Irigasi dan Jaringan
131711	Jalan dan Jembatan
131712	Irigasi
131713	Jaringan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

1318 Jalan, Irigasi dan Jaringan Sebelum Disesuaikan
13181 Jalan, Irigasi dan Jaringan Sebelum Disesuaikan
131811 Jalan dan Jembatan Sebelum Disesuaikan
131812 Irigasi Sebelum Disesuaikan
131813 Jaringan Sebelum Disesuaikan
1319 Aset Tetap Lainnya
13191 Aset Tetap dalam Renovasi
131911 Aset Tetap dalam Renovasi
13192 Aset Tetap Lainnya
131921 Aset Tetap Lainnya
132 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
1321 Konstruksi Dalam Pengerjaan
13211 Konstruksi Dalam Pengerjaan
132111 Konstruksi Dalam pengerjaan
133 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP
1331 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
13311 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
133111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
13321 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
133211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
13331 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan
133311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan
133312 Akumulasi Penyusutan Jaringan dan Irigasi
13341 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
133211 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
135 Aset Tetap BLU
1351 Tanah Badan Layanan Umum
13511 Tanah
135111 Tanah
1352 Peralatan dan Mesin Tanah Badan Layanan Umum
13511 Peralatan dan Mesin
135211 Peralatan dan Mesin
13512 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
135121 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
1353 Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum
13531 Gedung dan Bangunan
135311 Gedung dan Bangunan
13532 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
135321 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
1354 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Badan Layanan Umum
13541 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
135411 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
13542 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan
135421 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan
1355 Aset Tetap Lainnya Bangunan Badan Layanan Umum
13551 Aset Tetap Lainnya



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

135511	Aset Tetap Lainnya
13552	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
135521	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
1356	Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum
13561	Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum
135611	Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum
14	DANA CADANGAN
141	DANA CADANGAN
1411	Dana Cadangan
14111	Dana Cadangan
141111	Dana Cadangan
15	ASET LAINNYA
151	PIUTANG JANGKA PANJANG
1511	Tagihan Penjualan Angsuran
15111	Tagihan Penjualan Angsuran
151111	Tagihan Penjualan Angsuran
1512	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi
15121	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
151211	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
1513	Tagihan Penjualan Angsuran-Badan Layanan Umum
15131	Tagihan Penjualan Angsuran-Badan Layanan Umum
151311	Tagihan Penjualan Angsuran-Badan Layanan Umum
1514	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi-Badan Layanan Umum
15141	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi-Badan Layanan Umum
151411	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi-Badan Layanan Umum
152	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA
1521	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
15211	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
152111	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
153	ASET TAK BERWUJUD
1531	Aset Tak Berwujud
15311	Goodwill
153111	Goodwill
15312	Hak Cipta
153121	Hak Cipta
15313	Royalti
153131	Royalti
15314	Paten
153141	Paten
15319	Aset Tak Berwujud Lainnya
153191	Aset Tak Berwujud Lainnya
1532	Aset Tak Berwujud- Badan Layanan Umum
15321	Software-Badan Layanan Umum



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

153211	Software-Badan Layanan Umum
15322	Hak Cipta BLU
15221	Hak Cipta BLU
15323	Royalti BLU
15231	Royalti BLU
15324	Paten BLU
15241	Paten BLU
15329	Aset Tak Berwujud Lainnya-Badan Layanan Umum
153291	Aset Tak Berwujud Lainnya-Badan Layanan Umum
154 ASET LAIN - LAIN	
1541	Aset Lain-lain
15411	Aset Lain-lain
154111	Aset Lain-lain
154112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan
1542	Aset Yang Dibatasi Penggunaannya
15421	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya
154211	Rekening Khusus
154212	Cadangan Dana Reboisasi
154213	Cadangan Dana Subsidi/PSO
154214	Cadangan Dana Bagi Hasil SDA
154219	Dana lainnya
15422	Trust Fund
154221	Trust Fund Aceh Nias
154222	RANTF
154223	ReKOMPAK
154224	Dana Beasiswa
1543	Dana Penjaminan
15431	Dana Penjaminan
154311	Dana Penjaminan
1544	Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum
15441	Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum
154411	Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum
154412	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan
AKUN KEWAJIBAN	
2 KEWAJIBAN	
21 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
211 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
2111 Utang Perhitungan Pihak Ketiga	
21111 Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
211111	Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 10% Gaji
211112	Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 2% Pensiun
211113	Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Beras Bulog
211114	Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Wesel Pemerintah
211115	Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tabungan Wajib Perumahan
211116	Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 2 % Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/Polri
211117	Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 2 % Iuran Kesehatan Pemda



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

211118	Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 2 % Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT
211119	Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Lain-lain
2112 Utang kepada Pihak Ketiga	
21121 Belanja pemerintah pusat yang masih harus dibayar	
211211	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
211212	Belanja barang yang masih harus dibayar
211213	Belanja modal yang masih harus dibayar
211214	Belanja hibah yang masih harus dibayar
211215	Belanja bantuan sosial yang masih harus dibayar
21122 Transfer ke daerah yang masih harus dibayar	
211221	Belanja dana perimbangan yang masih harus dibayar
211222	Belanja otonomi khusus dan penyesuaian yang masih harus dibayar
21123 Utang kepada Pihak Ketiga BLU	
211231	Utang kepada Pihak Ketiga BLU
21129 Utang kepada Pihak Ketiga lainnya	
211291	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya
2113 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	
21131 Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	
211311	Utang Kelebihan Bayar Pajak PPh
211312	Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM
211313	Utang Kelebihan Bayar Cukai
211314	Utang Kelebihan Bayar Pajak PBB
211315	Utang Kelebihan Bayar Pajak BPHTB
211316	Utang Kelebihan Bayar Bea Masuk
21132 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Non Pajak	
211321	Utang Kelebihan pembayaran Pendapatan Sumber Daya Alam
211322	Utang Kelebihan pembayaran Pendapatan Bagian Laba BUMN
211323	Utang Kelebihan pembayaran Pendapatan Non Pajak Lainnya
2114 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	
21141 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang -Pinjaman	
211411	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri
211412	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri
21142 Bagian Lancar Obligasi Negara-Rupiah	
211421	Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Rupiah
21143 Bagian Lancar Obligasi Negara-Valuta Asing	
211431	Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Valuta Asing
21144 Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara-dalam Rupiah	
211441	Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah
21145 Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara-Valuta Asing	
211451	Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing
2115 Utang Biaya Pinjaman	
21151 Utang Bunga	
211511	Utang Bunga Luar Negeri



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

211512	Utang Bunga Dalam Negeri
21152	Discounto
211521	Discount Surat Perbendaharaan Negara dalam Rupiah
211522	Discount Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Rupiah
211523	Discount Surat Perbendaharaan Negara dalam Valuta Asing
211524	Discount Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Valuta asing
21153	Premium
211531	Premium Bagian Lancar Obligasi Negara Rupiah.
211532	Premium Bagian Lancar Obligasi Negara valuta Asing
2116	Utang Subsidi
21161	Utang Subsidi
211611	Utang Subsidi
2117	Utang Surat Perbendaharaan Negara/Obligasi Negara-Jangka Pendek
21171	Utang Surat Perbendaharaan Negara/Obligasi Negara-Rupiah Jangka Pendek
211711	Surat Perbendaharaan Negara dalam Rupiah
211712	Utang Obligasi Negara dalam Rupiah
21172	Utang Surat Perbendaharaan Negara/Obligasi Negara-Valuta Asing Jangka Pendek
211721	Surat Perbendaharaan Negara dalam Valuta Asing
211722	Utang Obligasi Negara dalam Valuta Asing
21173	Utang Surat Berharga Syariah Negara-Rupiah Jangka Pendek
211731	Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah
21174	Utang Surat Berharga Syariah Negara-Valuta Asing Jangka Pendek
211741	Surat Berharga Syariah Negara dalam valuta asing
212	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK LAINNYA
2121	Uang Muka Rekening Khusus
21211	Uang Muka Rekening Khusus
212111	Uang Muka Rekening Khusus
2122	Uang Muka
21221	Uang Muka dari KUN
212211	Uang Muka dari KUN
21221	Uang Muka dari Kementerian Negara/Lembaga
212211	Uang Muka dari Kementerian Negara/Lembaga
2123	Uang Muka dari KPPN
21231	Uang Muka dari KPPN
212311	Uang Muka dari KPPN
2124	Pendapatan Yang Ditangguhkan
21241	Pendapatan Yang Ditangguhkan
212411	Pendapatan Yang Ditangguhkan
2125	Utang Kepada KUN
21251	Utang Kepada KUN
212511	Utang Kepada KUN
2129	Utang Jangka Pendek Lainnya
21291	Utang Jangka Pendek lainnya



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

212911	Utang Jangka Pendek Perbankan
212919	Utang Jangka Pendek Lain-lain
22 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
221 UTANG JANGKA PANJANG DALAM NEGERI	
2211 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	
22111	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan
221111	Utang Perbankan Jangka Panjang
2212 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Non Perbankan	
22121 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Obligasi	
221211	Utang Dalam Negeri Obligasi
22122 Discount	
221221	Discount Obligasi Negara
221222	Discount SBSN
22123 Premium	
221231	Premium Obligasi Negara
221232	Premium SBSN
2213 Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	
22131 Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	
221311	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT
2219 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	
22191 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	
221919	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya
222 UTANG JANGKA PANJANG LUAR NEGERI	
2221 Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	
22211 Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	
222111	Utang Bilateral
222112	Utang Multilateral
222113	Utang Kredit Ekspor
222114	Utang Kredit Komersial
2222 Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan	
22221 Utang Obligasi dalam Rupiah Jangka Panjang	
222211	Obligasi Negara dalam Rupiah
22222 Utang Obligasi Negara dalam Valuta Asing Jangka Panjang	
222221	Obligasi Negara dalam Valuta Asing
22223 Utang Surat Berharga Syariah Negara Rupiah Jangka Panjang	
222231	Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah
22224 Utang Surat Berharga Syariah Negara Valuta asing Jangka Panjang	
222241	Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta asing
22225 Discount	
222251	Discount Obligasi Negara dalam Rupiah
222252	Discount Obligasi Negara dalam Valuta Asing
222252	Discount SBSN dalam Valuta Asing
222254	Discount SBSN dalam Rupiah
22226 Premium	
222261	Premium Obligasi Negara dalam Rupiah
222262	Premium Obligasi Negara dalam Valuta Asing
222263	Premium SBSN dalam Valuta Asing
222264	Premium SBSN dalam Rupiah



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

22227	Utang Sewa-Beli
222271	Utang Sewa Beli
2223	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya
22231	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya
222311	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lain-lain
AKUN EKUITAS DANA	
3	EKUITAS DANA
31	EKUITAS DANA LANCAR
311	Ekuitas Dana Lancar
3111	SAL
31111	SAL
311111	SAL
3112	SILPA
31121	SILPA
311211	SILPA
311212	Koreksi pendapatan tahun anggaran yang lalu
311213	Koreksi belanja tahun anggaran yang lalu
311214	Surplus/Defisit
311215	Pembiayaan Netto
31122	Dana Lancar BLU
311221	Dana Lancar BLU
31129	Dana Lancar lainnya
311291	Dana Lancar lainnya
3113	Cadangan Piutang
31131	Cadangan Piutang
311311	Cadangan Piutang
3114	Cadangan Persediaan
31141	Cadangan Persediaan
311411	Cadangan Persediaan
3115	Pendapatan yang ditangguhkan
31151	Pendapatan yang ditangguhkan
311511	Pendapatan yang ditangguhkan
3116	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek
31161	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek
311611	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek
3117	Selisih Kurs
31171	Selisih Kurs
311711	Selisih Kurs
32	EKUITAS DANA INVESTASI
321	EKUITAS DANA INVESTASI
3211	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
32111	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
321111	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3212 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
32121 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
321211 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
3213 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya
32131 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya
321311 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya
3214 Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang
32141 Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang
321411 Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang
33 EKUITAS DANA CADANGAN
331 EKUITAS DANA CADANGAN
3311 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
33111 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
331111 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN KEDUA

KELOMPOK AKUN

PENDAPATAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KELOMPOK PENDAPATAN

4 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
41 Penerimaan Perpajakan
411 Pendapatan Pajak Dalam Negeri
4111 Pendapatan Pajak Penghasilan
41111 Pendapatan PPh Migas
411111 Pendapatan PPh Minyak Bumi
411112 Pendapatan PPh Gas Alam
411119 Pendapatan PPh Migas Lainnya
41112 Pendapatan PPh Non-Migas
411121 Pendapatan PPh Pasal 21
411122 Pendapatan PPh Pasal 22
411123 Pendapatan PPh Pasal 22 Impor
411124 Pendapatan PPh Pasal 23
411125 Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi
411126 Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan
411127 Pendapatan PPh Pasal 26
411128 Pendapatan PPh Final
411129 Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya
41113 Pendapatan PPh Fiskal
411131 Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri
4112 Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai
41121 Pendapatan PPN
411211 Pendapatan PPN Dalam Negeri
411212 Pendapatan PPN Impor
411219 Pendapatan PPN Lainnya
41122 Pendapatan PPnBM
411221 Pendapatan PPnBM dalam Negeri
411222 Pendapatan PPnBM Impor
411229 Pendapatan PPnBM Lainnya
4113 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
41131 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
411311 Pendapatan PBB Pedesaan
411312 Pendapatan PBB Perkotaan
411313 Pendapatan PBB Perkebunan
411314 Pendapatan PBB Kehutanan
411315 Pendapatan PBB Pertambangan
411319 Pendapatan PBB Lainnya
4114 Pendapatan BPHTB
41141 Pendapatan BPHTB
411411 Pendapatan BPHTB
4115 Pendapatan Cukai
41151 Pendapatan Cukai
411511 Pendapatan Cukai Hasil Tembakau
411512 Pendapatan Cukai Ethyl Alcohol
411513 Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl Alcohol
411514 Pendapatan Denda Administrasi Cukai
411519 Pendapatan Cukai Lainnya



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

4116 Pendapatan Pajak Lainnya
41161 Pendapatan Pajak Lainnya
411611 Pendapatan Bea Meterai
411612 Pendapatan dari Penjualan Benda Materai
411619 Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya
41162 Pendapatan Bunga Penagihan Pajak
411621 Pendapatan Bunga Penagihan PPh
411622 Pendapatan Bunga Penagihan PPN
411623 Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM
411624 Pendapatan Bunga Penagihan PTLL
412 Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional
4121 Pendapatan Bea Masuk
41211 Pendapatan Bea Masuk
412111 Pendapatan Bea Masuk
412112 Pendapatan Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)
412113 Pendapatan Denda Administrasi Pabean
412114 Pendapatan Bea Masuk dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
412119 Pendapatan Pabean Lainnya
4122 Pendapatan Pajak/pungutan ekspor
41221 Pendapatan Pajak/pungutan ekspor
412211 Pendapatan Pajak/pungutan ekspor
42 Penerimaan Negara Bukan Pajak
421 Penerimaan Sumber Daya Alam
4211 Pendapatan Minyak bumi
42111 Pendapatan Minyak Bumi
421111 Pendapatan Minyak Bumi
4212 Pendapatan Gas Bumi
42121 Pendapatan Gas Bumi
421211 Pendapatan Gas Bumi
4213 Pendapatan Pertambangan Umum
42131 Pendapatan Pertambangan Umum
421311 Pendapatan Iuran Tetap
421312 Pendapatan Royalti
4214 Pendapatan Kehutanan
42141 Pendapatan Dana Reboisasi
421411 Pendapatan Dana Reboisasi
42142 Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan
421421 Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan
42143 Pendapatan IIUPH (IHPH)
421431 Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Industri
421432 Pendapatan IIUPH (IHPH) Bambu
421433 Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Rotan
421434 Pendapatan IIUPH (IHPH) Hutan Alam
4215 Pendapatan Perikanan
42151 Pendapatan Perikanan
421511 Pendapatan Perikanan
4216 Pendapatan Pertambangan Panas Bumi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

42161	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi
421611	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi
422	Pendapatan Bagian Laba BUMN
4221	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN
42211	Pendapatan Laba BUMN Perbankan
422111	Pendapatan Laba BUMN Perbankan
42212	Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan
422121	Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan
423	Pendapatan PNBP Lainnya
4231	Pendapatan Penjualan dan Sewa
42311	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan
423111	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan
423112	Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan
423113	Pendapatan Penjualan Hasil Tambang
423114	Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan
423115	Pendapatan Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi Lainnya
423116	Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya
423117	Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan
423118	Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni.
423119	Pendapatan Penjualan Lainnya
42312	Pendapatan Penjualan Aset
423121	Pendapatan Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan dan Tanah
423122	Pendapatan Penjualan Kendaraan Bermotor
423123	Pendapatan Penjualan Sewa Beli
423124	Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing
423129	Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan
42313	Pendapatan Penjualan dari kegiatan Hulu Migas
423131	Pendapatan Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak
423132	Pendapatan Minyak Mentah (DMO)
423139	Pendapatan Lainnya dari kegiatan Hulu Migas
42314	Pendapatan Sewa
423141	Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri
423142	Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang
423143	Pendapatan Sewa Benda-benda Bergerak
423149	Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya
4232	Pendapatan Jasa
42321	Pendapatan Jasa I
423211	Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya
423212	Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA)
423213	Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor, SIM, STNK, dan BPKB
423214	Pendapatan Hak dan Perijinan
423215	Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan DJBC
423217	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama
423218	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan, dan Kenavigasian
42322	Pendapatan Jasa II



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
423222	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi
423223	Pendapatan Iuran Lelang untuk Fakir Miskin
423224	Pendapatan Jasa Catatan Sipil
423225	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa
423226	Pendapatan Uang Pewarganegaraan
423227	Pendapatan Bea Lelang
423228	Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara
423229	Pendapatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi
42323	Pendapatan Jasa Luar Negeri
423231	Pendapatan dari Pemberian Surat Perjalanan RI
423232	Pendapatan dari Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler
423239	Pendapatan Rutin Lainnya dari Luar Negeri
42329	Pendapatan Jasa Lainnya
423291	Pendapatan Jasa Lainnya
4233	Pendapatan Bunga
42331	Pendapatan Bunga
423311	Pendapatan Bunga atas Investasi dalam Obligasi
423312	Pendapatan PPA (eks BPPN) atas Bunga Obligasi
423313	Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman
423319	Pendapatan Bunga Lainnya
42332	Pendapatan Gain on Bond Redemption
423321	Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang
42333	Pendapatan Premium atas Obligasi Negara
423331	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah
423332	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing
4234	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan
42341	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan
423411	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan
423412	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan
423413	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)
423414	Pendapatan Hasil Denda/Tilang dan sebagainya
423415	Pendapatan Ongkos Perkara
423419	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
4235	Pendapatan Pendidikan
42351	Pendapatan Pendidikan
423511	Pendapatan Uang Pendidikan
423512	Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan
423513	Pendapatan Uang Ujian untuk Menjalankan Praktek
423519	Pendapatan Pendidikan Lainnya
4236	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi
42361	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi
423611	Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Ditetapkan Pengadilan
423612	Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara
423613	Pendapatan dari Pengembalian Penyalahgunaan Penyelenggaraan Keuangan
423614	Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan di pengadilan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

4237 Pendapatan luran dan Denda
42371 Pendapatan luran Badan Usaha
423711 Pendapatan luran Badan Usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM
423712 Pendapatan luran Badan Usaha dari kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa
423713 luran Badan Usaha di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
42372 Pendapatan Dana Pengamanan Hutan
423721 Pendapatan Dana Pengamanan Hutan
42373 Pendapatan dari Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
423731 Pendapatan luran Menangkap/Mengambil/Mengangkut Satwa Liar/Mengambil/Mengangkut Tumbuhan Alam Hidup atau Mati
423732 Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA)
423733 Pungutan Izin Pengusahaan Taman Buru (PIPTB)
423734 Pungutan Izin Berburu di taman buru dan areal buru (PIB)
423735 Pungutan Masuk Obyek Wisata Alam
423736 luran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA)
423737 luran Hasil Usaha Perburuan di Taman Buru (IHUPTB)
42374 Pendapatan Penerimaan dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan
423741 Pendapatan Penerimaan Dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan
42375 Pendapatan Denda
423751 Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan
423752 Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
423753 Pendapatan Denda Administrasi BPHTB
423754 Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal
423755 Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha
4239 Pendapatan Lain-lain
42391 Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu
423911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL
423912 Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL
423913 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL
423914 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinj. LN TAYL
423915 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah TAYL
423916 Penerimaan Kembali Belanja Swadana TAYL
423919 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL
42392 Pendapatan Pelunasan Piutang
423921 Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara
423922 Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara
42393 Pendapatan dari Penutupan Rekening
423931 Pendapatan dari Penutupan Rekening
42399 Pendapatan Lain-lain
423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji
423992 Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional
423993 Pendapatan dari Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL)
423994 Pendapatan dari Biaya Pengawasan HET Minyak Tanah
423995 Pendapatan Bagian Pemerintah dari Sisa Surplus Bank Indonesia
423999 Pendapatan Anggaran Lain-lain



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KELOMPOK PENDAPATAN BLU

424 Pendapatan Badan Layanan Umum

4241 Pendapatan Jasa Layanan Umum

42411 Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat

- 424111 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit
- 424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
- 424113 Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi
- 424114 Pendapatan Jasa Pencetakan
- 424115 Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian
- 424116 Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi
- 424117 Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran
- 424118 Pendapatan Penyediaan Barang
- 424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya

42412 Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu

- 424121 Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita
- 424122 Pendapatan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
- 424123 Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah
- 424129 Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya

42413 Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat

- 424131 Pendapatan Program Dana Penjaminan
- 424132 Pendapatan Program Dana Penjaminan Syariah
- 424133 Pendapatan Program Modal Ventura
- 424134 Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral
- 424135 Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah
- 424136 Pendapatan Investasi
- 424139 Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya

4242 Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum

42421 Pendapatan Hibah Terikat

- 424211 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan
- 424212 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha
- 424213 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda
- 424214 Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Perorangan
- 424215 Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha
- 424216 Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Negara
- 424219 Pendapatan Hibah Terikat Lainnya

42422 Pendapatan Hibah Tidak Terikat

- 424221 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan
- 424222 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha
- 424223 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda
- 424224 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Perorangan
- 424225 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha
- 424226 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Negara
- 424229 Pendapatan Hibah Tidak Terikat -Lainnya

4243 Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU

42431 Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU

- 424311 Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan
- 424312 Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha
- 424313 Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

43 Penerimaan Hibah
431 Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri
4311 Pendapatan Hibah Dalam Negeri
43111 Pendapatan Hibah Dalam Negeri
431111 Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Perorangan
431112 Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Lembaga/Badan Usaha
431119 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Lainnya
4312 Pendapatan Hibah Luar Negeri
43121 Pendapatan Hibah Luar Negeri
431211 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Perorangan
431212 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Bilateral
431213 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Multilateral
431219 Pendapatan Hibah Luar Negeri Lainnya



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN KETIGA

KELOMPOK AKUN
REALISASI BELANJA DAN
TRANSFER KE DAERAH



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KELOMPOK PENGELUARAN

5 BELANJA NEGARA
51 Belanja Pegawai
511 Belanja Gaji dan Tunjangan
5111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
51111 Belanja Gaji PNS
511111 Belanja Gaji Pokok PNS
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
51112 Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
511122 Belanja Tunj. Anak PNS
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS
511125 Belanja Tunj. PPh PNS
511126 Belanja Tunj. Beras PNS
511127 Belanja Tunj. Kemahalan PNS
511128 Belanja Tunj. Lauk pauk PNS
511129 Belanja Uang Makan PNS
51113 Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS
511131 Belanja Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS
511132 Belanja Tunj. Cacat PNS
511133 Belanja Tunj. Khusus Peralihan PNS
511134 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS
511135 Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS
511136 Swasta/Badan/Komisi
511137 Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS
511138 Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS
511139 Belanja Tunjangan SAR PNS
51114 Belanja Tunjangan-tunjangan III Pegawai Negeri/Staff di Luar Negeri
511141 Belanja Tunj. Sewa Rumah PN/Staff di LN
511142 Belanja Tunj. Restitusi Pengobatan PN/Staff di LN
511143 Belanja Tunj. Social Security PN/Staff di LN
511144 Belanja Tunj. Asuransi Kecelakaan PN/Staff di LN
511145 Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PN/Staff di LN
511146 Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PN/Staff di LN
511147 Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PN Dalam dan Luar Negeri
511149 Belanja Lokal Staff Lainnya
51115 Belanja Tunjangan Umum PNS
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS
51116 Belanja Gaji- PNS TNI/Polri
511161 Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri
511169 Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri
51117 Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS TNI/Polri
511171 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri
511172 Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri
511173 Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri
511174 Belanja Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri
511175 Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri
511176 Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

511177	Belanja Tunj. Kemahalan PNS TNI/Polri
511178	Belanja Tunj. Lauk pauk PNS TNI/Polri
511179	Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri
51118 Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS TNI/Polri	
511181	Belanja Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS TNI/Polri
511182	Belanja Tunj. Cacat PNS TNI/Polri
511183	Belanja Tunj. Khusus Peralihan PNS TNI/Polri
511184	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS TNI/Polri
511185	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS TNI/Polri
511186	Belanja Tunj. Kewanitaan PNS TNI/Polri
511187	Belanja Tunj. Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS TNI/Polri
511188	Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS TNI/Polri
511189	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS TNI/Polri
51119 Belanja Tunjangan-tunjangan III PNS TNI/POLRI	
511191	Belanja Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI
511192	Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS TNI/POLRI
511193	Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri
511194	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/Polri
5112 Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	
51121 Belanja Gaji TNI/POLRI	
511211	Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI
511219	Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI
51122 Belanja Tunjangan-tunjangan I TNI/POLRI	
511221	Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI
511222	Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI
511223	Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI
511224	Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI
511225	Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI
511226	Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI
511227	Belanja Tunj. Kemahalan TNI/POLRI
511228	Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI
511229	Belanja Uang Makan TNI/POLRI
51123 Belanja Tunjangan-tunjangan II TNI/POLRI	
511231	Belanja Tunj. Anggota Cadangan TNI DDA TNI/POLRI
511232	Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI
511233	Belanja Tunj. Babinkamtibmas TNI/POLRI
511234	Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI/POLRI
511235	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/POLRI
511236	Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI
511237	Belanja Tunj. Keahlian/Keterampilan TNI/POLRI
511238	Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNI/POLRI
51124 Belanja Tunjangan-tunjangan III TNI/POLRI	
511241	Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI
511242	Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka TNI/POLRI
511243	Belanja Tunjangan daerah terpencil/sangat terpencil TNI/Polri
511244	Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri
5113 Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	
51131 Belanja Gaji Pejabat Negara	
511311	Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

511319	Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara
51132	Belanja Tunjangan-tunjangan I Pejabat Negara
511321	Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara
511322	Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara
511323	Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara
511325	Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara
51133	Belanja Tunjangan-tunjangan II Pejabat Negara
511331	Belanja Tunj. Komunikasi Intensif Pejabat Negara
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara
511333	Belanja Uang Paket Harian Pejabat Negara
511334	Belanja Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan Pejabat Negara
511335	Belanja Pelayanan Sidang dan Penyelesaian Tugas Mendesak Pejabat Negara
511336	Belanja Tunjangan Pembinaan Kegiatan dan Khusus BPK Pejabat Negara
511337	Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka Pejabat Negara
5114	Belanja Gaji Dokter PTT
51141	Belanja Gaji Dokter PTT
511411	Belanja Gaji Dokter dan Bidan PTT
511412	Belanja Tunjangan Pajak PPh Dokter dan Bidan PTT
511413	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT
511414	Belanja Tunjangan Dokter dan Bidan PTT
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS
51151	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS
511511	Belanja Gaji Pokok Pegawai
511512	Belanja Tunjangan Pegawai
511519	Belanja Tunjangan Lainnya
512	Belanja Honorarium/Lembur/Vakasi/Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito
5121	Belanja Honorarium
51211	Belanja Honorarium
512111	Belanja Uang Honor Tetap
512112	Belanja Uang Honor Tidak Tetap
5122	Belanja Lembur
51221	Belanja Lembur
512211	Belanja uang lembur
5123	Belanja Vakasi
51231	Belanja Vakasi
512311	Belanja Vakasi
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito
51241	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito
512411	Belanja pegawai (Tunj. Khusus/kegiatan)
512412	Belanja Pegawai Transito
513	Belanja Kontribusi Sosial
5131	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu
51311	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS dan Pejabat Negara
513111	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS
513112	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara
513113	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS TNI/Dephan
513114	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Polri



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

51312 Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri
513121 Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri (Lama)
513122 Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Dephan
513123 Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Polri
51313 Belanja Tunjangan Hari Tua
513131 Belanja Tunjangan Hari Tua/Unfunded liability
5132 Belanja Asuransi Kesehatan
51321 Belanja Askes PNS/Pejabat Negara
513211 Belanja Askes PNS
513212 Belanja Askes Pejabat Negara
51322 Belanja Askes Penerima Pensiun
513221 Belanja Askes Penerima Pensiun
51323 Belanja Askes TNI/Dephan
513231 Belanja Askes TNI/Dephan
51324 Belanja Askes Polri
513241 Belanja Askes Polri
51325 Belanja Askes Veteran
513251 Belanja Askes Veteran
5133 Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran
51331 Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran
513311 Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran Non Tuvet
5134 Belanja Cadangan Perubahan Sharing
51341 Belanja Cadangan Perubahan Sharing
513411 Belanja Cadangan Perubahan Sharing
52 Belanja Barang
521 Belanja Barang
5211 Belanja Barang Operasional
52111 Belanja Barang Operasional
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
521112 Belanja pengadaan bahan makanan
521113 Belanja untuk menambah daya tahan tubuh
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
5212 Belanja Barang Non Operasional
52121 Belanja Barang Non Operasional
521211 Belanja Bahan
521212 Belanja Barang Transito
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
522 Belanja Jasa
5221 Belanja Jasa
52211 Belanja Jasa
522111 Belanja Langganan daya dan jasa
522112 Belanja Jasa pos dan giro
522113 Belanja Jasa Konsultan
522114 Belanja Sewa



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

522115	Belanja Jasa Profesi
522119	Belanja Jasa Lainnya
523	Belanja Pemeliharaan
5231	Belanja Pemeliharaan
52311	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
52312	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
523129	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
52313	Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
523131	Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
523132	Belanja Biaya Pemeliharaan Irigasi
523133	Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan
52319	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya
523199	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya
524	Belanja Perjalanan
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri
52411	Belanja Perjalanan Dalam Negeri
524111	Belanja perjalanan biasa
524112	Belanja perjalanan tetap
524119	Belanja perjalanan lainnya
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri
52421	Belanja Perjalanan Luar Negeri
524211	Belanja perjalanan biasa
524212	Belanja perjalanan tetap
524219	Belanja perjalanan lainnya
525	Belanja Badan Layanan Umum (BLU)
5251	Belanja Barang BLU
52511	Belanja Barang dan Jasa BLU
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan
525112	Belanja Barang
525113	Belanja Jasa
525114	Belanja Pemeliharaan
525115	Belanja Perjalanan
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
53	Belanja Modal
531	Belanja Modal Tanah
5311	Belanja Modal Tanah
53111	Belanja Modal Tanah
531111	Belanja Modal Tanah
531112	Belanja Modal Pembebasan Tanah
531113	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah
531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah
531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
531116	Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah
531117	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
532	Belanja Modal Peralatan dan Mesin



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

5321 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
53211 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
532112 Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin
532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
532114 Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin
532115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin
532116 Belanja Modal Perijinan Peralatan dan Mesin
532117 Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin
532118 Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin
533 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5331 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
53311 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
533112 Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan
533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan
533114 Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan
533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan
533116 Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan
533117 Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Gedung dan Bangunan
533118 Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan
534 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
5341 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
53411 Belanja Modal Jalan dan Jembatan
534111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan
534112 Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan
534113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan jembatan
534114 Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan
534115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan
534116 Belanja Modal Perijinan Jalan dan Jembatan
534117 Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Jalan dan Jembatan
534118 Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan
53412 Belanja Modal Irigasi
534122 Belanja Modal Irigasi
534122 Belanja Modal Bahan Baku Irigasi
534123 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi
534124 Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi
534125 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi
534126 Belanja Modal Perijinan Irigasi
534127 Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Irigasi
534128 Belanja Modal Perjalanan Irigasi
53413 Belanja Modal Jaringan
534131 Belanja Modal Jaringan
534132 Belanja Modal Bahan Baku Jaringan
534133 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan
534134 Belanja Modal Sewa Peralatan Jaringan
534135 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan
534136 Belanja Modal Perijinan Jaringan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

534137	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Jaringan
534138	Belanja Modal Perjalanan Jaringan
535	Belanja Pemeliharaan Yang Dikapitalisasi
5351	Belanja Pemeliharaan Yang Dikapitalisasi
53511	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Yang Dikapitalisasi
535111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Yang Dikapitalisasi
535119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya Yang Dikapitalisasi
53512	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Yang Dikapitalisasi
535121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Yang Dikapitalisasi
535129	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dikapitalisasi
53513	Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan Yang Dikapitalisasi
535131	Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Yang Dikapitalisasi
535132	Belanja Biaya Pemeliharaan Irigasi Yang Dikapitalisasi
535139	Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan Yang Dikapitalisasi
53519	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya Yang Dikapitalisasi
535199	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya Yang Dikapitalisasi
536	Belanja Modal Fisik Lainnya
5361	Belanja Modal Fisik Lainnya
53611	Belanja Modal Fisik Lainnya
536111	Belanja Modal Fisik Lainnya
5362	Belanja Dana Bergulir
53621	Belanja Dana Bergulir
536211	Belanja Dana Bergulir
537	Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)
5371	Belanja Modal BLU
53711	Belanja Modal BLU
537111	Belanja Modal Tanah
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya
54	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang
541	Belanja Pembayaran Bunga Utang
5411	Belanja Pembayaran Bunga Utang DN – Jangka Pendek
54111	Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara
541111	Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara – Rupiah
541119	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Surat Perbendaharaan Negara
5412	Belanja Pembayaran Bunga Utang DN – Jangka Panjang
54121	Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara
541211	Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Rupiah
541219	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Obligasi Negara
54122	Belanja Pembayaran Bunga Dalam Negeri Jangka Panjang Lainnya
541221	Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan
541229	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Obligasi Negara lainnya
5413	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri
54131	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang
541311	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang
541312	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Panjang
54132	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek
541321	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

541322	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Pendek
5414	Belanja Pembayaran Bunga Utang LN – Jangka Panjang
54141	Belanja Bunga Pinjaman program
541411	Belanja Bunga Pinjaman Program
541419	Belanja Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program
54142	Belanja Bunga Pinjaman proyek
541421	Belanja Bunga Pinjaman Proyek
541429	Belanja Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek
54143	Belanja Bunga Obligasi Negara
541431	Belanja Bunga Obligasi Negara – Valas
541439	Belanja Biaya/kewajiban lainnya – Bunga Obligasi Negara
54144	Belanja Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman
541441	Belanja Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Program
541442	Belanja Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Proyek
541449	Belanja Biaya/kewajiban lainnya – Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman
54145	Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara
541451	Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara – Valuta Asing
541459	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Surat Perbendaharaan Negara
5415	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri
54151	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang
541511	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang - Valas
541519	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Panjang - Valas
54152	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek
541521	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek - Valas
541529	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Pendek - Valas
542	Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri
5421	Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri
54211	Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri
542111	Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri
542119	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri
54212	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri
542121	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri
542129	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount Obligasi Negara Dalam Negeri
543	Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Luar Negeri
5431	Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Luar Negeri
54311	Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri
543111	Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri
543119	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

54312	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri
543121	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri
543129	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount Obligasi Negara Luar Negeri
544	Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption
5441	Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Dalam Negeri
54411	Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Dalam Negeri
544111	Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Dalam Negeri
545	Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri
5451	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri
54511	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Panjang
545111	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Panjang
545119	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount SBSN Jangka Panjang
54512	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Pendek
545121	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Pendek
545129	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount SBSN Jangka Pendek
546	Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri
5461	Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri
54611	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Panjang
546111	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Panjang - Valas
546119	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount SBSN Jangka Panjang - Valas
54612	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Pendek
546111	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Pendek - Valas
546119	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount SBSN Jangka Pendek - Valas
547	Belanja Denda
5471	Belanja Pembayaran Denda
54711	Belanja Pembayaran Imbalan Bunga
547111	Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Pajak (SPM-IB Pajak)
547112	Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan
547113	Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Bea dan Cukai (SPM-IB Bea dan Cukai)
547119	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Bunga Dalam Negeri Jangka Pendek Lainnya
55	Belanja Subsidi
551	Belanja Subsidi Perusahaan Negara
5511	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
55111	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
551111	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
5512	Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan – BBM
55121	Belanja Subsidi BBM
551211	Belanja Subsidi Avgas
551212	Belanja Subsidi Avtur
551213	Belanja Subsidi Premium
551214	Belanja Subsidi Minyak Bakar
551215	Belanja Subsidi Minyak Solar



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

551216	Belanja Subsidi Minyak Diesel
551217	Belanja Subsidi Minyak Tanah
551218	Belanja Subsidi Elpiji
5513 Belanja Subsidi Lembaga Non-Kuangan – Non BBM	
55131 Belanja Subsidi Non-BBM – Harga/Biaya	
551311	Belanja Subsidi pangan
551312	Belanja Subsidi listrik
551313	Belanja Subsidi benih
551314	Belanja Subsidi obat
551315	Belanja Subsidi gula
551316	Belanja Subsidi pupuk
551317	Belanja Subsidi perawatan beras
551318	Belanja Subsidi pengawasan pupuk
551319	Belanja Subsidi harga/biaya lainnya
55132 Belanja Subsidi Non-BBM – Pajak	
551321	Belanja Subsidi PPh
551322	Belanja Subsidi PPN
551323	Belanja Subsidi BM
55133 Belanja Subsidi Non-BBM – Lainnya	
551331	Belanja Subsidi haji
551332	Belanja Subsidi kendaraan bermotor
551339	Belanja Subsidi lainnya
5514 Belanja Subsidi Lembaga Non-Kuangan – PSO	
55141 Belanja Subsidi dalam rangka PSO	
551411	Belanja Subsidi PT KAI
551412	Belanja Subsidi PT PELNI
551413	Belanja Subsidi PT Pos Indonesia
551414	Belanja Subsidi TVRI
551415	Belanja Subsidi BULOG dihapuskan
551419	Belanja Subsidi dalam rangka PSO Lainnya
552 Belanja Subsidi Perusahaan Swasta	
5521 Belanja Subsidi Lembaga Keuangan	
55211 Belanja Subsidi Lembaga Keuangan	
552111	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
55212 Belanja Subsidi – Bunga Kredit	
552121	Belanja Subsidi Bunga KUT
552122	Belanja Subsidi Bunga KOP PIR
552123	Belanja Subsidi Bunga KOP
552124	Belanja Subsidi Bunga KOP PRIM
552125	Belanja Subsidi Bunga KPR
552126	Belanja Subsidi Bunga Ketahanan Pangan
552129	Belanja Subsidi Bunga kredit program lainnya
5522 Belanja Subsidi Lembaga Non-Kuangan	
55221 Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan	
552211	Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan
56 Belanja Hibah	
561 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	
5611 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	
56111 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	
561111	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

562 Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
5621 Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
56211 Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
562111 Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
563 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
5631 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
56311 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
563111 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
57 Belanja Bantuan sosial
571 Belanja Bantuan kompensasi sosial
5711 Belanja Bantuan kompensasi sosial
57111 Belanja Bantuan kompensasi sosial
571111 Belanja Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM
572 Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan dan Peribadatan
5721 Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan
57211 Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan
572111 Belanja Bantuan Langsung (Block Grant) Sekolah/Lembaga/Guru
572112 Belanja Bantuan Imbal Swadaya Sekolah/Lembaga
572113 Belanja Bantuan Beasiswa
5722 Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan
57221 Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan
572211 Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan
573 Belanja Lembaga Sosial Lainnya
5731 Belanja Lembaga Sosial Lainnya
57311 Belanja Lembaga Sosial Lainnya
573111 Belanja Lembaga Sosial Lainnya
58 Belanja Lain-lain
581 Belanja Lain-lain
5811 Belanja Lain-lain
58111 Belanja Rekonstruksi
581111 Belanja untuk Rekonstruksi Aceh
58112 Belanja Lain-lain I
581121 Belanja Kerjasama Teknis Internasional
581122 Belanja Pengeluaran Tak Tersangka
581123 Belanja Cadangan Umum
581124 Belanja Pemilu tahunan
581125 Belanja Cadangan tunjangan beras PNS/TNI/Polri
581126 Belanja Cadangan dana reboisasi
581127 Belanja Tunggakan dan klaim pihak ketiga
581128 Belanja Dana Cadangan Tanggap Darurat (Dana Kontijensi)
58113 Belanja Lain-lain II
581131 Belanja Biaya/Upah Pungut PBB untuk DJP
581132 Belanja KONI
581133 Belanja Dana Pehunjang (PHLN)
581134 Belanja Non Modal-Otorita Batam
581135 Belanja karena rugi selisih kurs
581136 Jasa Surveyor



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

581137	Jasa Perbendaharaan
581138	Jasa Pelayanan Bank Operasional
58114 Belanja Lain-lain III	
581141	Belanja TVRI
581142	Belanja RRI
581149	Belanja lain-lain
KELOMPOK TRANSFER KE DAERAH	
6 TRANSFER KE DAERAH	
61 Transfer Dana Perimbangan	
611 Transfer Dana Bagi Hasil	
6111 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak	
61111 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan	
611111	Transfer DBH PPh ps1 21 untuk Propinsi
611112	Transfer DBH PPh ps1 21 untuk Kabupaten/Kota
611113	Transfer DBH PPh ps1 25/29 OP untuk Propinsi
611114	Transfer DBH PPh ps1 25/29 OP untuk Kabupaten/Kota
61112 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	
611121	Transfer DBH PBB untuk Propinsi
611122	Transfer DBH PBB untuk Kabupaten/Kota
611123	Transfer DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi
611124	Transfer DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kab./Kota
611125	Transfer DBH bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Kabupaten/Kota
61113 Transfer Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	
611131	Transfer DBH BPHTB untuk Propinsi
611132	Transfer DBH BPHTB untuk Kabupaten/Kota
611133	Transfer DBH BPHTB bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Kabupaten/Kota
6112 Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	
61121 Transfer Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	
611211	Transfer DBH minyak bumi untuk Propinsi
611212	Transfer DBH minyak bumi untuk Kab./Kota Penghasil
611213	Transfer DBH minyak bumi untuk Kab./Kota lainnya
61122 Transfer Dana Bagi Hasil Gas Bumi	
611221	Transfer DBH Gas Bumi untuk Propinsi
611222	Transfer DBH Gas Bumi untuk Kab./Kota Penghasil
611223	Transfer DBH Gas Bumi untuk Kab./Kota lainnya
61123 Transfer Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum	
611231	Transfer DBH iuran tetap untuk Propinsi
611232	Transfer DBH iuran tetap untuk Kab./Kota
611233	Transfer DBH royalti untuk Propinsi
611234	Transfer DBH royalti untuk Kab./Kota Penghasil
611235	Transfer DBH royalti untuk Kab./Kota lainnya
61124 Transfer Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi	
611241	Transfer DBH Setoran bagian pemerintah untuk Propinsi
611242	Transfer DBH Setoran bagian pemerintah untuk Kab./Kota Penghasil
611243	Transfer DBH Setoran bagian pemerintah untuk Kab./Kota Lainnya



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

611244	Transfer DBH iuran tetap dan iuran produksi untuk Propinsi
611245	Transfer DBH iuran tetap dan iuran produksi untuk Kab./Kota Penghasil
611246	Transfer DBH iuran tetap dan iuran produksi untuk Kab./Kota Lainnya
61125 Transfer Dana bagi Hasil Kehutanan	
611251	Transfer DBH IIUPH/IHPH untuk Propinsi
611252	Transfer DBH IIUPH/IHPH untuk Kab./Kota
611253	Transfer DBH PSDH untuk Propinsi
611254	Transfer DBH PSDH untuk Kab./Kota Penghasil
611255	Transfer DBH PSDH untuk Kab./Kota lainnya
611256	Transfer DBH Dana Reboisasi untuk Kab./Kota Penghasil
61125 Transfer Dana Bagi Hasil Perikanan	
611251	Transfer DBH Perikanan untuk Kab./Kota
612 Transfer Dana Alokasi Umum	
6121 Transfer Dana Alokasi Umum	
61211 Transfer Dana Alokasi Umum	
612111	Transfer DAU untuk Propinsi
612112	Transfer DAU untuk Kabupaten/Kota
613 Transfer Dana Alokasi Khusus	
6131 Transfer Dana Alokasi Khusus	
61311 Transfer DAK Bidang Pendidikan	
613111	Transfer DAK Bidang Pendidikan
61312 Transfer DAK Bidang Kesehatan	
613121	Transfer DAK Bidang Kesehatan
61313 Transfer DAK Bidang Infrastruktur	
613131	Transfer DAK Bidang Infrastruktur
61314 Transfer DAK Bidang Prasarana Pemerintahan	
613141	Transfer DAK Bidang Prasarana Pemerintahan
61315 Transfer DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	
613151	Transfer DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
61316 Transfer DAK Bidang Pertanian	
613161	Transfer DAK Bidang Pertanian
61317 Transfer DAK Bidang Lingkungan Hidup	
613171	Transfer DAK Bidang Lingkungan Hidup
62 Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	
621 Transfer Dana Otonomi Khusus	
6211 Transfer Dana Otonomi Khusus	
62111 Transfer Dana Otonomi Khusus	
621111	Transfer Dana Otonomi Khusus untuk Papua
621112	Transfer Dana Otonomi Khusus untuk NAD
621113	Transfer Dana Otonomi Khusus tambahan infrastruktur untuk Papua
622 Transfer Dana Penyesuaian	
6221 Transfer Dana Penyesuaian	
62211 Transfer Dana Penyesuaian	
622111	Transfer Dana Penyesuaian untuk Propinsi
622112	Transfer Dana Penyesuaian untuk Kabupaten/Kota
622119	Transfer Dana Penyesuaian Lainnya



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN KEEMPAT

KELOMPOK AKUN

REALISASI PEMBIAYAAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KELOMPOK PEMBIAYAAN

7 PEMBIAYAAN
71 Penerimaan Pembiayaan
711 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri
7111 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri
71111 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan
711111 Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL)
711112 Penerimaan Pembiayaan dari Rekening Dana Investasi
711113 Penerimaan Pembiayaan dari Rekening BUN untuk Obligasi
71112 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan Dana Moratorium
711121 Penerimaan Pembiayaan dari Dana Eks Moratorium Pokok untuk Cadangan Aceh
7112 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Non-Perbankan
71121 Penerimaan Hasil Privatisasi
711211 Penerimaan Hasil Privatisasi
7113 Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
71131 Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
711311 Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
711312 Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN
7114 Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara/Obligasi
71141 Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri
711441 Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Perbendaharaan Negara
71142 Penerimaan dari Penjualan Obligasi Negara Dalam Negeri
711421 Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara Dalam Negeri
711422 Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri
71143 Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri - Jangka Pendek
711431 Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN - Jangka Pendek
71144 Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri - Jangka Panjang
711441 Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN - Jangka Panjang
711442 Penerimaan Imbalan dibayar di muka SBSN - Jangka Panjang
712 Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri
7121 Penarikan Pinjaman Program
71211 Penarikan Pinjaman Program Bilateral
712111 Penarikan Pinjaman Program dari OECF
712112 Penarikan Pinjaman Program Bilateral Lainnya
71212 Penarikan Pinjaman Program Multilateral
712121 Penarikan Pinjaman Program dari IBRD
712122 Penarikan Pinjaman Program dari ADB
712123 Penarikan Pinjaman Program Multilateral Lainnya
7122 Penarikan Pinjaman Proyek
71221 Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral
712211 Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral
71222 Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

712221	Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral
71223	Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor
712231	Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor
71224	Penarikan Pinjaman Proyek Leasing
712241	Penarikan Pinjaman Proyek Leasing
71225	Penarikan Pinjaman Proyek Komersial
712251	Penarikan Pinjaman Proyek Komersial
71229	Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya
712291	Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya
7123	Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara
71231	Penerimaan Obligasi Negara Luar Negeri
712311	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara - Valas
712312	Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara - Valas
71232	Penerimaan Surat Perbendaharaan Negara - Valas
712321	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Perbendaharaan Negara - Valas
71233	Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri - Jangka Pendek
712331	Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN Valas - Jangka Pendek
71234	Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri - Jangka Panjang
712341	Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN Valas - Jangka Panjang
712342	Penerimaan Imbalan dibayar di muka SBSN Valas - Jangka Panjang
713	Penerimaan dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
7131	Penerimaan dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
71311	Penerimaan Pinjaman Program dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
713111	Penerimaan Pinjaman Program dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
71312	Penerimaan Pinjaman Proyek dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
713121	Penerimaan Pinjaman Proyek dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
714	Penerimaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
7141	Penerimaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
71411	Penjadualan Kembali Bunga Utang Pinjaman Luar Negeri
714111	Penerimaan Pembiayaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
715	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman
7151	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri
71511	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri
715111	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman dalam Negeri kepada Pemda
715112	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman dalam Negeri kepada BUMD



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

715113	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman dalam Negeri Kepada BUMN
715114	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman dalam Negeri Kepada Non Pemerintah
7152 Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri	
71521 Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Tahun Anggaran Berjalan	
715211	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar negeri TAB kepada Daerah
715212	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri TAB kepada BUMD
715213	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri TAB kepada BUMN
71522 Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Tahun Anggaran Lalu	
715221	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri TAYL kepada Daerah
715222	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri TAYL kepada BUMD
715223	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri TAYL kepada BUMN
719 Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	
7191 Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	
71911 Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	
719111	Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs
719112	Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening KUN Rekening Valuta USD Karena Selisih Kurs
72 Pengeluaran Pembiayaan	
721 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	
7211 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan	
72111 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan	
721111	Pembayaran Pinjaman Kredit Jangka Pendek dan uang Muka dari Sektor Perbankan
721112	Pengeluaran Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek Perbankan
72112 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan untuk Moratorium	
721121	Pengeluaran Pembiayaan Eks Moratorium Pokok untuk Cadangan Aceh
7212 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Non-Perbankan	
72121 Pengeluaran untuk Program Restrukturisasi	
721211	Pengeluaran untuk Program Restrukturisasi
7213 Pengeluaran untuk Pembayaran/Pelunasan Surat Utang Negara/Obligasi	
72131 Pengeluaran untuk Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara	
721331	Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara
721332	Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara melalui Pembelian Kembali
72132 Pengeluaran untuk Pelunasan Obligasi Dalam Negeri	
721321	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Dalam Negeri
721322	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Dalam Negeri melalui Pembelian Kembali
721324	Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

72133	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri - Jangka Pendek
721331	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek
721332	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek melalui Pembelian Kembali
72134	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri - Jangka Panjang
721341	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang
721342	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali
721343	Pembayaran Imbalan dibayar di muka SBSN - Jangka Panjang
722	Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri
7221	Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri-Pinjaman Program
72211	Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Program
722111	Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok (Amortisasi) Utang Luar Negeri – Pinjaman Program
722112	Pengeluaran Cicilan Pokok Utang LN Pinjaman Program
7221	Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri-Pinjaman Proyek
72221	Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Proyek
722211	Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Proyek
722212	Pengeluaran Cicilan Pokok Utang LN Pinjaman Proyek
7223	Pengeluaran untuk Pelunasan Surat Berharga Negara
72231	Pengeluaran untuk Pelunasan Obligasi Negara Luar Negeri - Valas
722311	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara Luar Negeri
722312	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara Luar Negeri - melalui Pembelian Kembali
722313	Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Luar Negeri
72232	Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri - Valas
722321	Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara - Valas
722322	Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara - melalui Pembelian Kembali
72233	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri - Jangka Pendek
722331	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Pendek
722332	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Pendek melalui Pembelian Kembali
72234	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri - Jangka Panjang
722341	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Panjang
722342	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali
722343	Pembayaran Imbalan dibayar di muka Surat Berharga Syariah Negara Valas- Jangka Panjang
723	Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali
7231	Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali – Pinjaman Program
72311	Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Program
723111	Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Program



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

7232 Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali – Pinjaman Proyek
72321 Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Proyek
723211 Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Proyek
7233 Pelunasan Bunga Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali – Pinjaman Proyek
72331 Pengeluaran penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
723311 Pengeluaran penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
724 Penyertaan Modal Negara
7241 Penyertaan Modal Negara pada BUMN
72411 Penyertaan Modal Negara pada BUMN
724111 PMN untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
7242 Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional
72421 Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional
724211 PMN untuk Badan Internasional
7244 Penyertaan Modal Negara Lainnya
72441 Penyertaan Modal Lainnya
724311 Penyertaan Modal Lainnya
724312 Penyertaan Modal Pemerintah SMF
725 RDI/RPD
7251 Penerusan Pinjaman Dalam Negeri RDI/RPD
72511 Penerusan Pinjaman Dalam Negeri
725111 Penerusan Pinjaman dalam Negeri kepada Pemda
725112 Penerusan Pinjaman dalam Negeri kepada BUMD
725113 Penerusan Pinjaman dalam Negeri Kepada BUMN
725114 Penerusan Pinjaman dalam Negeri Kepada Non Pemerintah
7252 Penerusan Pinjaman Luar Negeri
72521 Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan
725211 Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan Kepada Daerah
725212 Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan Kepada BUMD
725213 Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan Kepada BUMN
72522 Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu
725221 Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu Kepada Daerah
725222 Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu Kepada BUMD
725223 Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu Kepada BUMN
726 Dukungan Infrastruktur
7261 Dukungan Infrastruktur
72611 Dukungan Infrastruktur
726111 Dukungan Infrastruktur
729 Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain
7291 Koreksi Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain
72911 Koreksi Penyesuaian Reksus Karena Selisih Kurs
729111 Koreksi Penyesuaian Penurunan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs
729112 Koreksi Penyesuaian Penurunan Saldo Rekening KUN dalam Valuta USD karena Selisih Kurs



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN KELIMA

KELOMPOK AKUN

NON ANGGARAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KELOMPOK NON ANGGARAN

8 NON ANGGARAN
81 Penerimaan Non Anggaran
811 Penerimaan Non Anggaran PFK
8111 Penerimaan PFK 10 % Gaji
81111 Penerimaan PFK 10 % Gaji
811111 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji PNS Pusat
811112 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji PNS Daerah
811113 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji Polri dan PNS Polri
811114 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji TNI dan PNS Dephan
8112 Penerimaan PFK 2 % Gaji Terusan
81121 Penerimaan PFK 2 % Gaji Terusan
811211 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji Terusan PNS Pusat
811212 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji terusan PNS Daerah
811213 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji Terusan POLRI dan PNS Polri
811214 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji Terusan TNI dan PNS DEPHAN
8113 Penerimaan PFK Beras BULOG
81131 Penerimaan PFK Beras BULOG
811311 Penerimaan Setoran / Potongan PFK Bulog PNS Pusat
811312 Penerimaan Setoran / Potongan PFK Bulog Polri & PNS POLRI
811313 Penerimaan Setoran / Potongan PFK Bulog TNI & PNS Dephan
8114 Penerimaan PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda
81141 Penerimaan PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda
811411 Penerimaan Setoran PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Propinsi
811412 Penerimaan Setoran PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Kabupaten/Kota
8115 Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT
81151 Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT
811511 Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT
8116 Penerimaan PFK 2 % Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/POLRI
81161 Penerimaan PFK 2 % Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/POLRI
811611 Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan PensiunTNI/PNS Dephan
811612 Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Pensiun POLRI/PNS POLRI
8117 Penerimaan PFK Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (PFK DTP Migas)
81171 Penerimaan PFK Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (PFK DTP Migas)
811711 Penerimaan Setoran PFK Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (PFK DTP Migas)
8118 Penerimaan PFK Penutupan Rekening
81181 Penerimaan PFK Penutupan Rekening
811811 Penerimaan Setoran Penutupan Rekening



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

8119 Penerimaan PFK Lain-lain
81191 Penerimaan PFK Lain-lain
811911 Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Pusat
811912 Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Daerah
812 Penerimaan Wesel Pemerintah
8121 Penerimaan Wesel Pemerintah
81211 Penerimaan Wesel Pemerintah
812111 Penerimaan potongan WP dari SPM KPPN
812112 Penerimaan Setoran untuk penerbitan WP
813 Penerimaan Reimbursement Dalam Rangka Prefinancing (PP) dan PFK BUN Lainnya
8131 Penerimaan Reimbursement Dalam Rangka Prefinancing (PP) dan PFK BUN Lainnya
81311 Penerimaan Reimbursement Dalam Rangka Prefinancing (PP) dan PFK BUN Lainnya
813111 Penerimaan setoran sisa UP-PP
813112 Penerimaan Reimbursement / Pengganti PFK PP dan PPHLN
813113 Penerimaan Penggantian UP PP Berasal dari SPM GU Nihil (Pengesahan)
813114 Penggantian Dana Rek. KPPN ke Rek BUN atas Pembayaran kepada PPHLN (Karena adanya pembayaran ineligible)
813115 Penggantian Dana dari REKSUS ke Rek BUN karena REKSUS kosong
813116 Penggantian Dana dari REKSUS ke Rekening BUN karena Prefinancing REKSUS
813117 Penggantian Dana dari Pihak ketiga ke Rekening BUN atas pembayaran kepada PPHLN (Karena adanya pembayaran ineligible)
813118 Penggantian Dana dari Rekening Dana Talangan REKSUS kosong
81312 Penerimaan Dana Talangan
813121 Penerimaan Dana Talangan dari Rekening SAL
813122 Penerimaan Dana Talangan dari dana moratorium
814 Penerimaan Kiriman Uang
8141 Penerimaan Kiriman Uang
81411 Penerimaan Kiriman Uang
814111 Penerimaan Kiriman Uang Antar KPPN
814112 Penerimaan Kiriman Uang dari Kantor Pusat Ditjen PBN Rekening 500.000000 ke KPPN
814113 Penerimaan Kiriman Uang dari KPPN ke Kantor Pusat Ditjen PBN Rekening 500.000000
814114 Penerimaan Kiriman Uang dari Kantor Pusat Ditjen PBN 500.000000 ke Rekening BUN 502.000000
814115 Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening BUN 502.000000 ke Kantor Pusat Ditjen PBN Rekening 500.000000
814116 Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Sub BUN Valas ke Rekening BUN 502.000000
814117 Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening 501 ke Bank Operasional I
814118 Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening 501 ke Bank Operasional II
81412 Penerimaan Kiriman Uang dalam rangka TSA
814121 Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening 501.000.000 KPPN Induk ke Bank Operasional I KPPN Non KCBI
814122 Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening 501.000.000 KPPN Induk ke Bank Operasional II KPPN Non KCBI
814123 Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening 501.000.000 KPPN Induk ke Sentral Giro/SGG KPPN Non KCBI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

814124	Penerimaan Kiriman Uang dari Bank Operasional I KPPN Non KCBI ke Rekening 501.000.000 KPPN Induk
814125	Penerimaan Kiriman Uang dari Bank Operasional II KPPN Non KCBI ke Rekening 501.000.000 KPPN Induk
814126	Penerimaan Kiriman Uang dari Sentral Giro/SGG KPPN Non KCBI ke Rekening 501.000.000 KPPN Induk
814127	Penerimaan Kiriman Uang dari Bank Operasional III KPPN Non KCBI ke Rekening 501.000.000 KPPN Induk
814128	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Gabungan KPPN Non KCBI ke Rekening 501.000.000 KPPN Induk
81413 Penerimaan Kiriman Uang dalam rangka TSA dengan RPK-BUN P	
814131	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening BUN ke RPK-BUN-P
814132	Penerimaan Kiriman Uang dari RPK-BUN-P ke BO I di KPPN
814133	Penerimaan Kiriman Uang dari RPK-BUN-P ke Rekening BUN
814134	Penerimaan Kiriman Uang dari BO I di KPPN ke RPK-BUN-P
8142 Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus	
81421 Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus	
814211	Penerimaan Kiriman Uang dari Reksus ke KPPN (berdasarkan SPM-LS /SPM-GU Isi/SPM Pengganti)
814212	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Khusus ke Rekening Kantor Pusat Ditjen PBN 500.000.000
814213	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Khusus ke Rekening BUN 502.000000
814214	Pembetulan Pembukuan Pengeluaran Penggantian dari Rekening Khusus
814215	Penerimaan dari KPPN ke Rekening Kantor Pusat Ditjen PBN 500.000.00 berdasarkan SPM Pengganti
814216	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Khusus
8143 Penerimaan Pemindahbukuan	
81431 Penerimaan Pemindahbukuan	
814311	Penerimaan Pemindahbukuan Intern KPPN
814312	Pemindahbukuan dari Bank Tunggal ke Bank Operasional
814313	Pemindahbukuan dari Bank Operasional ke Bank Tunggal
814314	Pemindahbukuan dari Bank Operasional (BO) I ke BO II
814315	Pemindahbukuan dari Bank Operasional (BO) II ke BO I
814316	Pemindahbukuan dari Rekening Gabungan ke Bank Tunggal (Bank Operasional)
814317	Pemindahbukuan dari Bank Tunggal/Operasional I ke Sentral Giro/Sentral Giro Gabungan
814318	Pemindahbukuan dari Sentral Giro/Sentral Giro Gabungan ke Bank Tunggal/Operasional I
81432 Penerimaan Pemindahbukuan Bank Operasional III	
814321	Pemindahbukuan dari Bank Operasional III ke Bank Tunggal/Bank Operasional I
814322	Penerimaan Pemindahbukuan dari Bank Persepsi PBB ke BO III
814323	Penerimaan Pemindahbukuan dari Bank Persepsi BPHTB ke BO III
81433 Penerimaan Pemindahbukuan dalam rangka TSA	
814331	Penerimaan Pemindahbukuan dari Bank Tunggal ke Bank Operasional I
814332	Penerimaan Pemindahbukuan dari Bank Operasional I ke Bank Tunggal
814333	Penerimaan Pemindahbukuan dari Bank Tunggal ke Bank Operasional II
814334	Penerimaan Pemindahbukuan dari Bank Operasional II ke Bank Tunggal
81434 Penerimaan Pemindahbukuan Rekening BUN dengan Rekening KUN dalam Valuta USD	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

814341	Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening 502.000000 ke Rekening 600.502411
814342	Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening 600.502411 ke Rekening 502.000000
81435 Penerimaan Pemindahbukuan Rekening BUN dengan Rekening RPKBUN	
814351	Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening 502.000000 ke Rekening RPKBUN P1
814352	Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening 502.000000 ke Rekening RPKBUN P2
814353	Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening 502.000000 ke Rekening RPKBUN P3
814354	Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening RPKBUN P1 ke Rekening 502.000000
814355	Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening RPKBUN P2 ke Rekening 502.000000
814356	Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening RPKBUN P3 ke Rekening 502.000000
81436 Penerimaan Pemindahbukuan Rek. Talangan Reksus Kosong dgn Rek. Sub BUN Talangan karena Reksus Kosong	
814361	Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening 500.000001 ke Rekening 561.000001
814362	Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening 500.000001 ke Rekening 561.000002
814363	Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening 500.000001 ke Rekening 561.000003
814364	Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening 500.000001 ke Rekening 561.000005
814365	Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening 561.000001 ke Rekening 500.000001
814366	Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening 561.000002 ke Rekening 500.000001
814367	Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening 561.000003 ke Rekening 500.000001
814368	Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening 561.000005 ke Rekening 500.000001
81437 Penerimaan Pemindahbukuan Rekening BUN dengan Rekening Talangan karena Reksus Kosong	
814371	Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening 502.000000 ke Rekening 500.000001
814372	Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening 500.000001 ke Rekening 502.000000
8144 Penerimaan Pemindahbukuan Penutupan Rekening	
81441 Penerimaan Pemindahbukuan Penutupan Rekening	
814411	Penerimaan Pemindahbukuan Penutupan rekening
815 Penerimaan Transito	
8151 Penerimaan Transito	
81511 Penerimaan Transito	
815111	Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Dana Rupiah
815112	Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri
815113	Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Pengguna PNB (Swadana)
815114	Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Tahun Anggaran yang Lalu
816 Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	
8161 Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

81611	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga
816111	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Rekening
82	Pengeluaran Non Anggaran
821	Pengeluaran Non Anggaran PFK
8211	Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 10% Gaji
82111	Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 10% Gaji
821111	Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun PNS (4,75%)
821112	Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua PNS (3,25%)
821113	Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS (2%)
821114	Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun Polri & PNS Polri (4,75%)
821115	Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua Polri & PNS Polri (3,25%)
821116	Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan Polri & PNS Polri (2%)
821117	Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun Personel TNI dan PNS Dephan (4,75%)
821118	Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua TNI dan PNS Dephan (3,25%)
821119	Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI & PNS Dephan (2%)
8212	Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan
82121	Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan
821211	Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS (2%)
821212	Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Daerah (2%)
821213	Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Polri & PNS Polri (2%)
821214	Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan TNI & PNS Dephan (2%)
8213	Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Beras Bulog
82131	Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Beras Bulog
821311	Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog PNS Pusat
821312	Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog Polri & PNS Polri
821313	Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog TNI & PNS Dephan
8214	Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda
82141	Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda
821411	Pengembalian Penerimaan Setoran PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Propinsi
821412	Pengembalian Penerimaan Setoran PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Kabupaten/Kota
8215	Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT
82151	Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT
821511	Pengembalian Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT
8216	Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/POLRI
82161	Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/POLRI
821611	Pengembalian Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan PensiunTNI/PNS Dephan
821612	Pengembalian Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Pensiun POLRI/PNS POLRI
8217	Pengembalian Penerimaan Dana Tabungan Peangon Tenaga kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (PFK DTP Migas)
82171	Pengembalian Penerimaan PFK Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (PFK DTP Migas)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

821711	Pengembalian Penerimaan Setoran/Potongan PFK Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (PFK DTP Migas)
8218	Pengembalian Penerimaan PFK Penutupan Rekening
82181	Pengembalian Penerimaan PFK Penutupan Rekening
821811	Pengembalian Penerimaan Setoran Penutupan Rekening Pihak Ketiga
8219	Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain
82191	Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain
821911	Pengembalian Penerimaan PFK Tabungan Perumahan PNS Pusat
821912	Pengembalian Penerimaan PFK Tabungan Perumahan PNS Daerah
822	Pelunasan Wesel Pemerintah
8221	Pelunasan Wesel Pemerintah
82211	Pelunasan Wesel Pemerintah
822111	Pelunasan Wesel Pemerintah
823	Pembayaran PFK Prefinancing dan PFK BUN Lainnya
8231	Pembayaran PFK Prefinancing dan PFK BUN Lainnya
82311	Pembayaran PFK Prefinancing dan PFK BUN Lainnya
823111	Pembayaran UP-PP (DU/TU)
823112	Pembayaran PFK PP (Prefinancing)
823113	Pembayaran SPM-GU Nihil (Pengesahan ke Rekening BUN)
823114	Pembayaran kepada PPHLN karena pengeluaran in-eligible
823115	Pembayaran dari Rekening BUN karena Reksus kosong
823116	Pembayaran dari Rekening BUN karena Prefinancing UP-Reksus
823117	Pengisian Rekening Dana SAL
823118	Pembayaran ke Rekening Dana Talangan Reksus kosong
82312	Pengembalian Dana Talangan
823121	Pengembalian Dana Talangan ke Rekening SAL
823122	Pengembalian Dana Talangan ke dana moratorium
824	Pengeluaran Kiriman Uang
8241	Pengeluaran Kiriman Uang
82411	Pengeluaran Kiriman Uang
824111	Pengeluaran Kiriman Uang antar KPPN
824112	Pengeluaran Kiriman Uang dari KPPN ke Kantor Pusat Ditjen PBN Rekening 500.000000
824113	Pengeluaran Kiriman Uang dari Kantor Pusat Ditjen PBN Rekening 500.000000 ke KPPN
824114	Pengeluaran Kiriman Uang dari Kantor Pusat Ditjen PBN Rekening 500.000000 ke Rekening BUN 502.000000
824115	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening BUN 502.000000 ke Kantor Pusat Ditjen PBN 500.000000
824116	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening BUN 502.000000 ke Rekening Sub BUN Valas
824117	Pengeluaran Kiriman Uang dari Bank Operasional I ke Rekening 501
824118	Pengeluaran Kiriman Uang dari Bank Operasional II ke Rekening 501
82412	Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka TSA
824121	Pengeluaran Kiriman Uang dari Bank Operasional I KPPN Non KCBI ke Rekening 501.000.000 KPPN Induk
824122	Pengeluaran Kiriman Uang dari Bank Operasional II KPPN Non KCBI ke Rekening 501.000.000 KPPN Induk
824123	Pengeluaran Kiriman Uang dari Sentral Giro/SGG KPPN Non KCBI ke Rekening 501.000.000 KPPN Induk



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

824124	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening 501.000.000 KPPN Induk ke Bank Operasional I KPPN Non KCBI
824125	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening 501.000.000 KPPN Induk ke Bank Operasional II KPPN Non KCBI
824126	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening 501.000.000 KPPN Induk ke Sentral Giro/SGG KPPN Non KCBI
824127	Pengeluaran Kiriman Uang dari Bank Operasional III KPPN Non KCBI ke Rekening 501.000.000 KPPN Induk
824128	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening Gabungan KPPN Non KCBI ke Rekening 501.000.000 KPPN Induk
82413 Pengeluaran Kiriman Uang dalam rangka TSA dengan RPK-BUN P	
824131	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening BUN ke RPK-BUN-P
824132	Pengeluaran Kiriman Uang dari RPK-BUN-P ke BO I KPPN
824133	Pengeluaran Kiriman Uang dari RPK-BUN-P ke Rekening BUN
824134	Pengeluaran Kiriman Uang dari BO I KPPN ke RPK-BUN-P
8242 Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus	
82421 Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus	
824211	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening Khusus ke KPPN (berdasarkan SPM-LS /SPM-GU Isi/SPM Pengganti)
824212	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening Khusus ke Rekening Kantor Pusat Ditjen PBN 500.000000
824213	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening Khusus ke Rekening BUN 502.000000
824214	Pembetulan Pembukuan Penerimaan Penggantian dari Rekening Khusus
824215	Pengeluaran dari KPPN ke Rekening Kantor Pusat Ditjen PBN 500.000.000 berdasarkan SPM Pengganti
824216	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Khusus
8243 Pengeluaran Pemindahbukuan	
82431 Pengeluaran Pemindahbukuan	
824311	Pengeluaran Pemindahbukuan Intern KPPN
824312	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Tunggal ke Bank Operasional
824313	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Operasional ke Bank Tunggal
824314	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Operasional (BO) I ke BO II
824315	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Operasional (BO) II ke BO I
824316	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening Gabungan ke Bank Tunggal (Bank Operasional)
824317	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Tunggal/Operasional I ke Sentral Giro/Sentral Giro Gabungan
824318	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Sentral Giro/Sentral Giro Gabungan ke Bank Tunggal/Operasional I
82432 Pengeluaran Pemindahbukuan Bank Operasional III	
824321	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Operasional III ke Bank Tunggal/Bank Operasional I
824322	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Persepsi PBB ke BO III
824323	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Persepsi BPHTB ke BO III
82433 Pengeluaran Pemindahbukuan dalam rangka TSA	
824331	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Tunggal ke Bank Operasional I
824332	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Operasional I ke Bank Tunggal
824333	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Tunggal ke Bank Operasional II
824334	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Operasional II ke Bank Tunggal



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

82434	Pengeluaran Pemindahbukuan Rekening BUN dengan Rekening KUN dalam Valuta USD
824341	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening 502.000000 ke Rekening 600.502411
824342	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening 600.502411 ke Rekening 502.000000
82435	Pengeluaran Pemindahbukuan Rekening BUN dengan Rekening RPKBUN
824351	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening 502.000000 ke Rekening RPKBUN P1
824352	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening 502.000000 ke Rekening RPKBUN P2
824353	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening 502.000000 ke Rekening RPKBUN P3
824354	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening RPKBUN P1 ke Rekening 502.000000
824355	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening RPKBUN P2 ke Rekening 502.000000
824356	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening RPKBUN P3 ke Rekening 502.000000
82436	Pengeluaran Pemindahbukuan Rek. Talangan Reksus Kosong dgn Rek. Sub BUN Talangan karena Reksus Kosong
824361	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening 500.000001 ke Rekening 561.000001
824362	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening 500.000001 ke Rekening 561.000002
824363	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening 500.000001 ke Rekening 561.000003
824364	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening 500.000001 ke Rekening 561.000005
824365	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening 561.000001 ke Rekening 500.000001
824366	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening 561.000002 ke Rekening 500.000001
824367	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening 561.000003 ke Rekening 500.000001
824368	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening 561.000005 ke Rekening 500.000001
82437	Pengeluaran Pemindahbukuan Rekening BUN dengan Rekening Talangan karena Reksus Kosong
824371	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening 502.000000 ke Rekening 500.000001
824372	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening 500.000001 ke Rekening 502.000000
8244	Pengeluaran Pemindahbukuan Penutupan Rekening
82441	Pengeluaran Pemindahbukuan Penutupan Rekening
824411	Pengeluaran Pemindahbukuan Penutupan Rekening
825	Pengeluaran Transito
8251	Pengeluaran Transito
82511	Pengeluaran Transito
825111	Pengeluaran Uang Persediaan Dana Rupiah
825112	Pengeluaran Uang Persediaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri
825113	Pengeluaran Uang Persediaan Pengguna PNPB (Swadana)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KELOMPOK NON ANGGARAN

8 NON ANGGARAN
81 Penerimaan Non Anggaran
811 Penerimaan Non Anggaran PFK
8111 Penerimaan PFK 10 % Gaji
81111 Penerimaan PFK 10 % Gaji
811111 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji PNS Pusat
811112 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji PNS Daerah
811113 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji Polri dan PNS Polri
811114 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji TNI dan PNS Dephan
8112 Penerimaan PFK 2 % Gaji Terusan
81121 Penerimaan PFK 2 % Gaji Terusan
811211 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji Terusan PNS Pusat
811212 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji terusan PNS Daerah
811213 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji Terusan POLRI dan PNS Polri
811214 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji Terusan TNI dan PNS DEPHAN
8113 Penerimaan PFK Beras BULOG
81131 Penerimaan PFK Beras BULOG
811311 Penerimaan Setoran / Potongan PFK Bulog PNS Pusat
811312 Penerimaan Setoran / Potongan PFK Bulog Polri & PNS POLRI
811313 Penerimaan Setoran/ Potongan PFK Bulog TNI & PNS Dephan
8114 Penerimaan PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda
81141 Penerimaan PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda
811411 Penerimaan Setoran PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Propinsi
811412 Penerimaan Setoran PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Kabupaten/Kota
8115 Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT
81151 Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT
811511 Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT
8116 Penerimaan PFK 2 % Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/POLRI
81161 Penerimaan PFK 2 % Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/POLRI
811611 Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan PensiunTNI/PNS Dephan
811612 Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Pensiun POLRI/PNS POLRI
8117 Penerimaan PFK Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (PFK DTP Migas)
81171 Penerimaan PFK Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (PFK DTP Migas)
811711 Penerimaan Setoran PFK Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (PFK DTP Migas)
8118 Penerimaan PFK Penutupan Rekening
81181 Penerimaan PFK Penutupan Rekening
811811 Penerimaan Setoran Penutupan Rekening
8119 Penerimaan PFK Lain-lain
81191 Penerimaan PFK Lain-lain



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN KEENAM

KELOMPOK AKUN APBN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

AKUN APBN

4 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
41 Estimasi Penerimaan Perpajakan
411 Estimasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri
4111 Estimasi Pendapatan Pajak Penghasilan
41111 Estimasi Pendapatan PPh Migas
411111 Estimasi Pendapatan PPh Minyak Bumi
411112 Estimasi Pendapatan PPh Gas Bumi
411119 Estimasi Pendapatan PPh Migas Lainnya
41112 Estimasi Pendapatan PPh Non-Migas
411121 Estimasi Pendapatan PPh Pasal 21
411122 Estimasi Pendapatan PPh Pasal 22
411123 Estimasi Pendapatan PPh Pasal 22 Impor
411124 Estimasi Pendapatan PPh Pasal 23
411125 Estimasi Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi
411126 Estimasi Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan
411127 Estimasi Pendapatan PPh Pasal 26
411128 Estimasi Pendapatan PPh Final
411129 Estimasi Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya
41113 Estimasi Pendapatan PPh Fiskal
411131 Estimasi Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri
4112 Estimasi Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai
41121 Estimasi Pendapatan PPN
411211 Estimasi Pendapatan PPN Dalam Negeri
411212 Estimasi Pendapatan PPN Impor
411219 Estimasi Pendapatan PPN Lainnya
41122 Estimasi Pendapatan PPnBM
411221 Estimasi Pendapatan PPnBM dalam Negeri
411222 Estimasi Pendapatan PPnBM Impor
411229 Estimasi Pendapatan PPnBM Lainnya
4113 Estimasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
41131 Estimasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
411311 Estimasi Pendapatan PBB Pedesaan
411312 Estimasi Pendapatan PBB Perkotaan
411313 Estimasi Pendapatan PBB Perkebunan
411314 Estimasi Pendapatan PBB Kehutanan
411315 Estimasi Pendapatan PBB Pertambangan
411319 Estimasi Pendapatan PBB Lainnya
4114 Estimasi Pendapatan BPHTB
41141 Estimasi Pendapatan BPHTB
411411 Estimasi Pendapatan BPHTB
4115 Estimasi Pendapatan Cukai
41151 Estimasi Pendapatan Cukai
411511 Estimasi Pendapatan Cukai Hasil Tembakau
411512 Estimasi Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol
411513 Estimasi Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol
411514 Estimasi Pendapatan Denda Administrasi Cukai
411519 Estimasi Pendapatan Cukai Lainnya



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

4116	Estimasi Pendapatan Pajak Lainnya
41161	Estimasi Pendapatan Pajak Lainnya
411611	Estimasi Pendapatan Bea Meterai
411612	Estimasi Pendapatan dari Penjualan Benda Meterai
411619	Estimasi Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya
41162	Estimasi Pendapatan Bunga Penagihan Pajak
411621	Estimasi Pendapatan Bunga Penagihan PPh
411622	Estimasi Pendapatan Bunga Penagihan PPN
411623	Estimasi Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM
411624	Estimasi Pendapatan Bunga Penagihan PTLL
4121	Estimasi Pendapatan Bea Masuk
41211	Estimasi Pendapatan Bea Masuk
412111	Estimasi Pendapatan Bea Masuk
412112	Estimasi Pendapatan Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)
412113	Estimasi Pendapatan Denda Administrasi Pabean
412114	(KITE)
412119	Estimasi Pendapatan Pabean Lainnya
4122	Estimasi Pendapatan Pajak/pungutan ekspor
41221	Estimasi Pendapatan Pajak/pungutan ekspor
412211	Estimasi Pendapatan Pajak/pungutan ekspor
42	Estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
421	Estimasi Penerimaan Sumber Daya Alam
4211	Estimasi Pendapatan Minyak bumi
42111	Estimasi Pendapatan Minyak Bumi
421111	Estimasi Pendapatan Minyak Bumi
4212	Estimasi Pendapatan Gas Alam
42121	Estimasi Pendapatan Gas Bumi
421211	Estimasi Pendapatan Gas Bumi
4213	Estimasi Pendapatan Pertambangan Umum
42131	Estimasi Pendapatan Pertambangan Umum
421311	Estimasi Pendapatan Iuran Tetap
421312	Estimasi Pendapatan Royalti
4214	Estimasi Pendapatan Kehutanan
42141	Estimasi Pendapatan Dana Reboisasi
421411	Estimasi Pendapatan Dana Reboisasi
42142	Estimasi Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan
421421	Estimasi Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan
42143	Estimasi Pendapatan IIUPH (IHPH)
421431	Estimasi Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Industri
421432	Estimasi Pendapatan IIUPH (IHPH) Bambu
421433	Estimasi Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Rotan
421434	Estimasi Pendapatan IIUPH (IHPH) Hutan Alam
4215	Estimasi Pendapatan Perikanan
42151	Estimasi Pendapatan Perikanan
421511	Estimasi Pendapatan Perikanan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

4216	Estimasi Pendapatan Pertambangan Panas Bumi
42161	Estimasi Pendapatan Panas Bumi
421611	Estimasi Pendapatan Panas Bumi
422	Estimasi Pendapatan Bagian Laba BUMN
4221	Estimasi Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN
42211	Estimasi Pendapatan Laba BUMN Perbankan
422111	Estimasi Pendapatan Laba BUMN Perbankan
42212	Estimasi Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan
422121	Estimasi Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan
423	Estimasi Pendapatan PNPB Lainnya
4231	Estimasi Pendapatan Penjualan
42311	Estimasi Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan
423111	Estimasi Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan
423112	Estimasi Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan
423113	Estimasi Pendapatan Penjualan Hasil Tambang
423114	Estimasi Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan
423115	Estimasi Pendapatan Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi Lainnya
423116	dan Hasil Cetakan Lainnya
423117	Estimasi Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan
	Estimasi Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka
423118	Operasi Pasar Mumi.
423119	Estimasi Pendapatan Penjualan Lainnya
42312	Estimasi Pendapatan Penjualan Aset
423121	Estimasi Pendapatan Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan dan Tanah
423122	Estimasi Pendapatan Penjualan Kendaraan Bermotor
423123	Estimasi Pendapatan Penjualan Sewa Beli
423124	Estimasi Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing
423129	Estimasi Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan
42313	Estimasi Pendapatan Penjualan dari kegiatan Hulu Migas(Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak)
423131	Estimasi Pendapatan Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak
423132	Estimasi Pendapatan Minyak Mentah (DMO)
423139	Estimasi Pendapatan Lainnya dari kegiatan Hulu Migas
42314	Estimasi Pendapatan Sewa
423141	Estimasi Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri
423142	Estimasi Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang
423143	Estimasi Pendapatan Sewa Benda-benda Bergerak
423149	Estimasi Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya
4232	Estimasi Pendapatan Jasa
42321	Estimasi Pendapatan Jasa I
423211	Estimasi Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya
	Estimasi Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/Museum dan Pungutan Usaha
423212	Pariwisata Alam (PUPA)
423213	Estimasi Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor, SIM, STNK, dan BPKB
423214	Estimasi Pendapatan Hak dan Perijinan
423215	Estimasi Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan
	Estimasi Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi,
423216	Pendapatan BPN, Pendapatan DJBC
423217	Estimasi Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

423218	Estimasi Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan, dan Kenavigasian
42322	Estimasi Pendapatan Jasa II
423221	Estimasi Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
423222	Estimasi Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi
423223	Estimasi Pendapatan Iuran Lelang untuk Fakir Miskin
423224	Estimasi Pendapatan Jasa Catatan Sipil
423225	Estimasi Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa
423226	Estimasi Pendapatan Uang Pewanegaraan
423227	Estimasi Pendapatan Bea Lelang
423228	Estimasi Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara
423229	Estimasi Pendapatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi
42333	Estimasi Pendapatan Jasa Luar Negeri
423331	Estimasi Pendapatan dari Pemberian Surat Perjalanan RI
423332	Estimasi Pendapatan dari Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler
423339	Estimasi Pendapatan Rutin Lainnya dari Luar Negeri
42339	Estimasi Pendapatan Jasa Lainnya
423391	Estimasi Pendapatan Jasa Lainnya
4233	Estimasi Pendapatan Bunga
42331	Estimasi Pendapatan Bunga
423311	Estimasi Pendapatan Bunga atas Investasi dalam Obligasi
423312	Estimasi Pendapatan BPPN atas Bunga Obligasi
423313	Estimasi Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman
423319	Estimasi Pendapatan Bunga Lainnya
42332	Estimasi Pendapatan Gain on Bond Redemption
	Estimasi Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi
423321	Dalam Negeri Jangka Panjang
42333	Estimasi Pendapatan Premium atas Obligasi Negara
423331	Estimasi Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah
423332	Estimasi Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing
4234	Estimasi Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan
42351	Estimasi Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan
423511	Estimasi Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan
423512	Estimasi Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan
	Estimasi Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan
423513	Pengadilan (Peradilan)
423514	Estimasi Pendapatan Hasil Denda/Tilang dan sebagainya
423515	Estimasi Pendapatan Ongkos Perkara
423519	Estimasi Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya
4235	Estimasi Pendapatan Pendidikan
42351	Estimasi Pendapatan Pendidikan
423511	Estimasi Pendapatan Uang Pendidikan
423512	Estimasi Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan
423513	Estimasi Pendapatan Uang Ujian untuk Menjalankan Praktek
423514	Estimasi Pendapatan Pendidikan Lainnya
4236	Estimasi Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi
42361	Estimasi Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi
423611	Estimasi Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Ditetapkan Pengadilan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

423612	Estimasi Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara
423613	Estimasi Pendapatan dan Pengembalian Penyalahgunaan Penyelenggaraan Keuangan
423614	Estimasi Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan di pengadilan
4237 Estimasi Pendapatan luran dan denda	
42371 Estimasi Pendapatan luran Badan Usaha	
423711	Estimasi Pendapatan luran Badan Usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM
423712	Estimasi Pendapatan luran Badan Usaha dari kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa
423713	Estimasi Pendapatan luran Badan Usaha di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
42372 Estimasi Pendapatan Dana Pengamanan Hutan	
423721	Estimasi Pendapatan Dana Pengamanan Hutan
42373 Estimasi Pendapatan dari Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	
423731	Estimasi Pendapatan luran Menangkap/Mengambil/Mengangkut Satwa Liar/Mengambil/Mengangkut Tumbuhan Alam Hidup atau Mati
423732	Estimasi Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA)
423733	Estimasi Pungutan Izin Pengusahaan Taman Buru (PIPTB)
423734	Estimasi Pungutan Izin Berburu di taman buru dan areal buru (PIB)
423735	Estimasi Pungutan Masuk Obyek Wisata Alam
423736	Estimasi luran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA)
423737	Estimasi luran Hasil Usaha Perburuan di Taman Buru (IHUPTB)
42374 Estimasi Pendapatan Penerimaan dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam	
423741	Estimasi Pendapatan Penerimaan Dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan
42375 Estimasi Pendapatan Denda yang dialokasikan	
423751	Estimasi Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan
423752	Estimasi Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
423753	Estimasi Pendapatan Denda Administrasi BPHTB
423754	Estimasi Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal
423755	Estimasi Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha
4239 Estimasi Pendapatan Lain-lain	
42391 Estimasi Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu	
423911	Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL
423912	Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL
423913	Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL
423914	Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinj. LN TAYL
423915	Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah TAYL
423916	Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Swadana TAYL
42392 Estimasi Pendapatan Pelunasan Piutang	
423921	Estimasi Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara
423922	Estimasi Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

42393	Estimasi Pendapatan dari Pelunutupan Rekening
423931	Estimasi Pendapatan dari Penutupan Rekening
42399	Estimasi Pendapatan Lain-lain
423991	Estimasi Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji
423992	Estimasi Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional
423993	(GNRHL)
423994	Estimasi Pendapatan dari Biaya Pengawasan HET Minyak Tanah
423995	Estimasi Pendapatan Bagian Pemerintah dari Sisa Surplus Bank Indonesia
423999	Estimasi Pendapatan Anggaran Lain-lain
424	Estimasi Pendapatan Badan Layanan Umum
4241	Estimasi Pendapatan Jasa Layanan Umum
42411	Estimasi Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat
424111	Estimasi Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit
424112	Estimasi Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
424113	Tehnologi
424114	Estimasi Pendapayan Jasa Pelayanan Telekomunikasi
424115	Estimasi Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian yang dialokasikan
424116	Estimasi Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi yang dialokasikan
424117	Estimasi Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran yang dialokasikan
424118	Estimasi Pendapatan Penyediaan Barang yang dialokasikan
424119	Estimasi Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya
42412	Estimasi Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu
424121	Estimasi Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita
424122	Estimasi Pendapatan Pengelolaan Kawasan Ekonomi Terpadu
424123	Estimasi Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah
424129	Estimasi Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya
42413	Estimasi Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat
424131	Estimasi Pendapatan Program Dana Penjaminan
424132	Estimasi Pendapatan Program Modal Ventura
424133	Estimasi Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral
424134	Estimasi Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah
424135	Estimasi Pendapatan Investasi
424136	Estimasi Pendapatan Pengelolaan dana khusus lainnya
424139	Estimasi Pendapatan Pengelolaan dana khusus lainnya yang dialokasikan
4242	Estimasi Pendapatan Hibah
42421	Estimasi Pendapatan Hibah Terikat
424211	Estimasi Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan
424212	Estimasi Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha
424213	Estimasi Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda
424214	Estimasi Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Perorangan
424215	Estimasi Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha
424216	Estimasi Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Negara
424219	Estimasi Pendapatan Hibah Terikat Lainnya yang dialokasikan
42422	Estimasi Pendapatan Hibah Tidak Terikat
424221	Estimasi Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan
424222	Estimasi Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha
424223	Estimasi Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda
424224	Estimasi Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Perorangan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

424225	Estimasi Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha
424226	Estimasi Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Negara
424229	Estimasi Pendapatan Hibah Tidak Terikat -Lainnya
4243 Estimasi Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	
42431 Estimasi Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	
424311	Estimasi Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan
424312	Estimasi Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha
424313	Estimasi Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah
43 Estimasi Penerimaan Hibah	
431 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri	
4311 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri	
43111 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri	
431111	Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Perorangan
431112	Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha
431119	Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri Lainnya
4312 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri	
43121 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri	
431211	Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri - Perorangan
431212	Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri - Bilateral
431213	Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri - Multilateral
431219	Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Lainnya



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

AKUN APBN

5 Appropriasi BELANJA NEGARA
51 Appropriasi Belanja Pegawai
511 Appropriasi Belanja Gaji dan Tunjangan
5111 Appropriasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
51111 Appropriasi Belanja Gaji PNS
511111 Appropriasi Belanja Gaji Pokok PNS
511119 Appropriasi Belanja Pembulatan Gaji PNS
51112 Appropriasi Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS
511121 Appropriasi Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
511122 Appropriasi Belanja Tunj. Anak PNS
511123 Appropriasi Belanja Tunj. Struktural PNS
511124 Appropriasi Belanja Tunj. Fungsional PNS
511125 Appropriasi Belanja Tunj. PPh PNS
511126 Appropriasi Belanja Tunj. Beras PNS
511127 Appropriasi Belanja Tunj. Kemahalan PNS
511128 Appropriasi Belanja Tunj. Lauk pauk PNS
511129 Appropriasi Belanja Uang Makan PNS
51113 Appropriasi Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS
511131 Appropriasi Belanja Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS
511132 Appropriasi Belanja Tunj. Cacat PNS
511133 Appropriasi Belanja Tunj. Khusus Peralihan PNS
511134 Appropriasi Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS
511135 Appropriasi Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS
511136 Appropriasi Belanja Tunj. Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS
511137 Appropriasi Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS
511138 Appropriasi Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS
511139 Appropriasi Belanja Tunjangan SAR PNS
51114 Appropriasi Belanja Tunjangan-tunjangan III PNS Pegawai Negeri (Staff di Luar Negeri)
511141 Appropriasi Belanja Tunj. Sewa Rumah PNS (Staff di LN)
511142 Appropriasi Belanja Tunj. Restitusi Pengobatan PNS (Staff di LN)
511143 Appropriasi Belanja Tunj. Social Security PNS (Staff di LN)
511144 Appropriasi Belanja Tunj. Asuransi Kecelakaan PNS (Staff di LN)
511145 Appropriasi Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (Staff di LN)
511146 Appropriasi Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (Staff di LN)
511147 Appropriasi Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri
511148 Appropriasi Belanja Lokal Staff Lainnya
51115 Appropriasi Belanja Tunjangan Umum PNS
511151 Appropriasi Belanja Tunjangan Umum PNS
51116 Appropriasi Belanja Gaji- PNS TNI/Polri
511161 Appropriasi Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri
511169 Appropriasi Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri
51117 Appropriasi Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS TNI/Polri



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

511171	Appropriasi Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri
511172	Appropriasi Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri
511173	Appropriasi Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri
511174	Appropriasi Belanja Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri
511175	Appropriasi Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri
511176	Appropriasi Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri
511177	Appropriasi Belanja Tunj. Kemahalan PNS TNI/Polri
511178	Appropriasi Belanja Tunj. Lauk pauk PNS TNI/Polri
511179	Appropriasi Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri
51118 Appropriasi Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS TNI/Polri	
511181	Appropriasi Belanja Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS TNI/Polri
511182	Appropriasi Belanja Tunj. Cacat PNS TNI/Polri
511183	Appropriasi Belanja Tunj. Khusus Peralihan PNS TNI/Polri
511184	Appropriasi Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS TNI/Polri
511185	Appropriasi Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS TNI/Polri
511186	Appropriasi Belanja Tunj. Kewanitaan PNS TNI/Polri
511187	Appropriasi Belanja Tunj. Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS TNI/Polri
511188	Appropriasi Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS TNI/Polri
511189	Appropriasi Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS TNI/Polri
51119 Appropriasi Belanja Tunjangan-tunjangan III PNS TNI/POLRI	
511191	Appropriasi Belanja Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI
511192	Appropriasi Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS TNI/POLRI
511193	Appropriasi Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri
511194	Appropriasi Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/Polri
5112 Appropriasi Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	
51121 Appropriasi Belanja Gaji TNI/POLRI	
511211	Appropriasi Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI
511219	Appropriasi Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI
51122 Appropriasi Belanja Tunjangan-tunjangan I TNI/POLRI	
511221	Appropriasi Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI
511222	Appropriasi Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI
511223	Appropriasi Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI
511224	Appropriasi Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI
511225	Appropriasi Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI
511226	Appropriasi Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI
511227	Appropriasi Belanja Tunj. Kemahalan TNI/POLRI
511228	Appropriasi Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI
511229	Appropriasi Belanja Uang Makan TNI/POLRI
51123 Appropriasi Belanja Tunjangan-tunjangan II TNI/POLRI	
511231	Appropriasi Belanja Tunj. Anggota Cadangan TNI DDA TNI/POLRI
511232	Appropriasi Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI
511233	Appropriasi Belanja Tunj. Babinsa TNI/POLRI
511234	Appropriasi Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI/POLRI
511235	Appropriasi Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/POLRI
511236	Appropriasi Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI
511237	Appropriasi Belanja Tunj. Keahlian/Keterampilan TNI/POLRI
511238	Appropriasi Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNI/POLRI
51124 Appropriasi Belanja Tunjangan-tunjangan III TNI/POLRI	
511241	Appropriasi Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

511242	Appropriasi Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka TNI/POLRI
511243	Appropriasi Belanja Tunjangan daerah terpencil/sangat terpencil TNI/Polri
511244	Appropriasi Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri
5113 Appropriasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	
51131 Appropriasi Belanja Gaji Pejabat Negara	
511311	Appropriasi Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara
511319	Appropriasi Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara
51132 Appropriasi Belanja Tunjangan-tunjangan I Pejabat Negara	
511321	Appropriasi Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara
511322	Appropriasi Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara
511323	Appropriasi Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara
511324	Appropriasi Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara
511325	Appropriasi Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara
51133 Appropriasi Belanja Tunjangan-tunjangan II Pejabat Negara	
511331	Appropriasi Belanja Tunj. Komunikasi Intensif Pejabat Negara
511332	Appropriasi Belanja Uang Kehematan Pejabat Negara
511333	Appropriasi Belanja Uang Paket Harian Pejabat Negara
511334	Appropriasi Belanja Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan Pejabat Negara
511335	Appropriasi Belanja Pelayanan Sidang dan Penyelesaian Tugas Mendesak Pejabat Negara
511336	Appropriasi Belanja Tunjangan Pembinaan Kegiatan dan Khusus BPK Pejabat Negara
511337	Appropriasi Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka Pejabat Negara
5114 Appropriasi Belanja Gaji Dokter PTT	
51141 Appropriasi Belanja Gaji Dokter PTT	
511411	Appropriasi Belanja Gaji Dokter dan Bidan PTT
511412	Appropriasi Belanja Tunjangan Pajak PPh Dokter dan Bidan PTT
511413	Appropriasi Belanja Tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT
511414	Appropriasi Belanja Tunjangan Dokter dan Bidan PTT
5115 Appropriasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	
51151 Appropriasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	
511511	Appropriasi Belanja Gaji Pokok Pegawai
511512	Appropriasi belanja Tunjangan Pegawai
511513	Appropriasi Belanja Tunjangan Lainnya
512 Appropriasi Belanja Honorarium/Lembur/Vakasi/Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	
5121 Appropriasi Belanja Honorarium	
51211 Appropriasi Belanja Honorarium	
512111	Appropriasi Belanja Uang Honor Tetap
512112	Appropriasi Belanja Uang Honor Tidak Tetap
5122 Appropriasi Belanja Lembur	
51221 Appropriasi Belanja Lembur	
512211	Appropriasi Belanja uang lembur
5123 Appropriasi Belanja Vakasi	
51231 Appropriasi Belanja Vakasi	
512311	Appropriasi Belanja Vakasi
5124 Appropriasi Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	
51241 Appropriasi Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	
512411	Appropriasi Belanja pegawai (Tunj. Khusus/kegiatan)
512412	Appropriasi Belanja Pegawai Transito



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

513 Appropriasi Belanja Kontribusi Sosial
5131 Appropriasi Belanja Pensiun dan Uang Tunggu
51311 Appropriasi Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS dan Pejabat Negara
513111 Appropriasi Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS
513112 Appropriasi Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara
513113 Appropriasi Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS TNI/Dephan
513114 Appropriasi Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Polri
51312 Appropriasi Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri
513121 Appropriasi Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri (Lama)
513122 Appropriasi Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Dephan
513123 Appropriasi Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Polri
51313 Appropriasi Belanja Tunjangan Hari Tua
513131 Appropriasi Belanja Tunjangan Hari Tua/Unfunded liability
5132 Appropriasi Belanja Asuransi Kesehatan
51321 Appropriasi Belanja Askes PNS/Pejabat Negara
513211 Appropriasi Belanja Askes PNS
513212 Appropriasi Belanja Askes Pejabat Negara
51322 Appropriasi Belanja Askes Penerima Pensiun
513221 Appropriasi Belanja Askes Penerima Pensiun
51323 Appropriasi Belanja Askes TNI/Dephan
513231 Appropriasi Belanja Askes TNI/Dephan
51324 Appropriasi Belanja Askes Polri
513241 Appropriasi Belanja Askes Polri
51325 Appropriasi Belanja Askes Veteran
513251 Appropriasi Belanja Askes Veteran
5133 Appropriasi Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran
51331 Appropriasi Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran
513311 Appropriasi Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran Non Tuvet
5134 Appropriasi Belanja Cadangan Perubahan Sharing
51341 Appropriasi Belanja Cadangan Perubahan Sharing
513411 Appropriasi Belanja Cadangan Perubahan Sharing
52 Appropriasi Belanja Barang
521 Appropriasi Belanja Barang
5211 Appropriasi Belanja Barang Operasional
52111 Appropriasi Belanja Barang Operasional
521111 Appropriasi Belanja Keperluan Perkantoran
521112 Appropriasi Belanja pengadaan bahan makanan
521113 Appropriasi Belanja untuk menambah daya tahan tubuh
521114 Appropriasi Belanja pengiriman surat dinas pos pusat
521119 Appropriasi Belanja Barang Operasional Lainnya
5212 Appropriasi Belanja Barang Non Operasional
52121 Appropriasi Belanja Barang Non Operasional
521211 Appropriasi Belanja Bahan
521212 Appropriasi Belanja Barang Transito
521219 Appropriasi Belanja Barang Non Operasional Lainnya



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

522 Appropriasi Belanja Jasa
5221 Appropriasi Belanja Jasa
52211 Appropriasi Belanja Jasa
522111 Appropriasi Belanja Langganan daya dan jasa
522112 Appropriasi Belanja Jasa pos dan giro
522113 Appropriasi Belanja Jasa Konsultan
522114 Appropriasi Belanja Sewa
522115 Appropriasi Belanja Jasa Profesi
522119 Appropriasi Belanja Jasa Lainnya
523 Appropriasi Belanja Pemeliharaan
5231 Appropriasi Belanja Pemeliharaan
52311 Appropriasi Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
523111 Appropriasi Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
523119 Appropriasi Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
52312 Appropriasi Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
523121 Appropriasi Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
523129 Appropriasi Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
52313 Appropriasi Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
523131 Appropriasi Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
523132 Appropriasi Belanja Biaya Pemeliharaan Irigasi
523133 Appropriasi Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan
52319 Appropriasi Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya
523199 Appropriasi Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya
524 Appropriasi Belanja Perjalanan
5241 Appropriasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri
52411 Appropriasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri
524111 Appropriasi Belanja perjalanan biasa
524112 Appropriasi Belanja perjalanan tetap
524119 Appropriasi Belanja perjalanan lainnya
5242 Appropriasi Belanja Perjalanan Luar Negeri
52421 Appropriasi Belanja Perjalanan Luar Negeri
524211 Appropriasi Belanja perjalanan biasa
524212 Appropriasi Belanja perjalanan tetap
524219 Appropriasi Belanja perjalanan lainnya
525 Appropriasi Belanja Badan Layanan Umum (BLU)
5251 Appropriasi Belanja Barang BLU
52511 Appropriasi Belanja Barang dan Jasa BLU
525111 Appropriasi Belanja Gaji dan Tunjangan
525112 Appropriasi Belanja Barang
525113 Appropriasi Belanja Jasa
525114 Appropriasi Belanja Pemeliharaan
525115 Appropriasi Belanja Perjalanan
525119 Appropriasi Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU
53 Appropriasi Belanja Modal
531 Appropriasi Belanja Modal Tanah
5311 Appropriasi Belanja Modal Tanah
53111 Appropriasi Belanja Modal Tanah
531111 Appropriasi Belanja Modal Tanah
531112 Appropriasi Belanja Modal Pembebasan Tanah
531113 Appropriasi Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

531114	Appropriasi Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah
531115	Appropriasi Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah
531116	Appropriasi Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah
531117	Appropriasi Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
532 Appropriasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
5321 Appropriasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
53211 Appropriasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
532111	Appropriasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
532112	Appropriasi Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin
532113	Appropriasi Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
532114	Appropriasi Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin
532115	Appropriasi Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin
532116	Appropriasi Belanja Modal Perijinan Peralatan dan Mesin
532117	Appropriasi Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin
532118	Appropriasi Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin
533 Appropriasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
5331 Appropriasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
53311 Appropriasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
533111	Appropriasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
533112	Appropriasi Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan
533113	Appropriasi Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan
533114	Appropriasi Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan
533115	Appropriasi Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan
533116	Appropriasi Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan
533117	Appropriasi Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Gedung dan Bangunan
533118	Appropriasi Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan
534 Appropriasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	
5341 Appropriasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	
53411 Appropriasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan	
534111	Appropriasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan
534112	Appropriasi Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan
534113	Appropriasi Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan jembatan
534114	Appropriasi Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan
534115	Appropriasi Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan
534116	Appropriasi Belanja Modal Perijinan Jalan dan Jembatan
534117	Appropriasi Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Jalan dan Jembatan
534118	Appropriasi Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan
53412 Appropriasi Belanja Modal Irigasi	
534121	Appropriasi Belanja Modal Irigasi
534122	Appropriasi Belanja Modal Bahan Baku Irigasi
534123	Appropriasi Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi
534124	Appropriasi Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi
534125	Appropriasi Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi
534126	Appropriasi Belanja Modal Perijinan Irigasi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

534127	Appropriasi Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Irigasi
534128	Appropriasi Belanja Modal Perjalanan Irigasi
53413	Appropriasi Belanja Modal Jaringan
534131	Appropriasi Belanja Modal Jaringan
534132	Appropriasi Belanja Modal Bahan Baku Jaringan
534133	Appropriasi Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan
534134	Appropriasi Belanja Modal Sewa Peralatan Jaringan
534135	Appropriasi Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan
534136	Appropriasi Belanja Modal Perijinan Jaringan
534137	Appropriasi Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Jaringan
534138	Appropriasi Belanja Modal Perjalanan Jaringan
535	Appropriasi Belanja Pemeliharaan Yang Dikapitalisasi
5351	Appropriasi Belanja Pemeliharaan Yang Dikapitalisasi
53511	Appropriasi Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Yang Dikapitalisasi
535111	Appropriasi Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Yang Dikapitalisasi
535119	Appropriasi Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya Yang Dikapitalisasi
53512	Appropriasi Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Yang Dikapitalisasi
535121	Appropriasi Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Yang Dikapitalisasi
535129	Appropriasi Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dikapitalisasi
53513	Appropriasi Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan Yang Dikapitalisasi
535131	Appropriasi Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Yang Dikapitalisasi
535132	Appropriasi Belanja Biaya Pemeliharaan Irigasi Yang Dikapitalisasi
535139	Appropriasi Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan Yang Dikapitalisasi
53519	Appropriasi Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya Yang Dikapitalisasi
535199	Appropriasi Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya Yang Dikapitalisasi
536	Appropriasi Belanja Modal Fisik Lainnya
5361	Appropriasi Belanja Modal Fisik Lainnya
53611	Appropriasi Belanja Modal Fisik Lainnya
536111	Appropriasi Belanja Modal Fisik Lainnya
5362	Appropriasi Belanja Dana Bergulir
53621	Appropriasi Belanja Dana Bergulir
536211	Appropriasi Belanja Dana Bergulir
537	Allotment Belanja Badan Layanan Umum (BLU)
5371	Allotment Belanja Modal BLU
53711	Allotment Belanja Modal BLU
537111	Allotment Belanja Modal Tanah
537112	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin
537113	Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan
537114	Allotment Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
537115	Allotment Belanja Modal Fisik Lainnya
54	Appropriasi Belanja Pembayaran Kewajiban Utang
541	Appropriasi Belanja Pembayaran Bunga Utang
5411	Appropriasi Belanja Pembayaran Bunga Utang DN – Jangka Pendek
54111	Appropriasi Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara
541111	Appropriasi Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara – Rupiah



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

541119	Appropriasi Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Surat Perbendaharaan Negara
5412	Appropriasi Belanja Pembayaran Bunga Utang DN – Jangka Panjang
54121	Appropriasi Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara
541211	Appropriasi Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Rupiah
541219	Appropriasi Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Obligasi Negara
54122	Appropriasi Belanja Pembayaran Bunga Dalam Negeri Jangka Panjang Lainnya
541221	Appropriasi Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan
541229	Appropriasi Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Obligasi Negara lainnya
5413	Appropriasi Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri
54131	Appropriasi Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang
541311	Appropriasi Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang
541312	Appropriasi Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Panjang
54132	Appropriasi Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek
541321	Appropriasi Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek
541322	Appropriasi Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Pendek
5414	Appropriasi Belanja Pembayaran Bunga Utang LN – Jangka Panjang
54141	Appropriasi Belanja Bunga Pinjaman program
541411	Appropriasi Belanja Bunga Pinjaman Program
541419	Appropriasi Belanja Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program
54142	Appropriasi Belanja Bunga Pinjaman proyek
541421	Appropriasi Belanja Bunga Pinjaman Proyek
541429	Appropriasi Belanja Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek
54143	Appropriasi Belanja Bunga Obligasi Negara
541431	Appropriasi Belanja Bunga Obligasi Negara – Valas
541439	Appropriasi Belanja Biaya/kewajiban lainnya – Bunga Obligasi Negara
54144	Appropriasi Belanja Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman
541441	Appropriasi Belanja Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Program
541442	Appropriasi Belanja Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Proyek
541449	Appropriasi Belanja Biaya/kewajiban lainnya – Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman
54145	Appropriasi Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara
541451	Appropriasi Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara – Valuta Asing
541459	Appropriasi Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Surat Perbendaharaan Negara
5415	Appropriasi Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri
54151	Appropriasi Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang
541511	Appropriasi Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang - Valas



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

541519	Appropriasi Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Panjang - Valas
54152	Appropriasi Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek
541521	Appropriasi Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek - Valas
541529	Appropriasi Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Pendek - Valas
5421	Appropriasi Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri
54211	Appropriasi Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri
542111	Appropriasi Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri
542119	Appropriasi Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri
54212	Appropriasi Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri
542121	Appropriasi Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri
542129	Appropriasi Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount Obligasi Negara Dalam Negeri
5431	Appropriasi Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Luar Negeri
54311	Appropriasi Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri
543111	Appropriasi Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri
543119	Appropriasi Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri
54312	Appropriasi Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri
543121	Appropriasi Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri
543129	Appropriasi Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount Obligasi Negara Luar Negeri
5441	Appropriasi Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Dalam Negeri
54411	Appropriasi Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Dalam Negeri
544111	Appropriasi Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Dalam Negeri
5451	Appropriasi Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri
54511	Appropriasi Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Panjang
545111	Appropriasi Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Panjang
545119	Appropriasi Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount SBSN Jangka Panjang
54512	Appropriasi Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Pendek
545121	Appropriasi Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Pendek
545129	Appropriasi Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount SBSN Jangka Pendek



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

5461	Appropriasi Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri
54611	Appropriasi Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Panjang
546111	Appropriasi Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Panjang - Valas
546119	Appropriasi Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount SBSN Jangka Panjang - Valas
54612	Appropriasi Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Pendek
546111	Appropriasi Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Pendek - Valas
546119	Appropriasi Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount SBSN Jangka Pendek - Valas
5471	Appropriasi Belanja Pembayaran Denda
54711	Appropriasi Belanja Pembayaran Imbalan Bunga
547111	Appropriasi Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Pajak (SPM-IB Pajak)
547112	Appropriasi Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan
547113	Appropriasi Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Bea dan Cukai (SPM-IB Bea dan Cukai)
547119	Appropriasi Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Bunga Dalam Negeri Jangka Pendek Lainnya
55	Appropriasi Belanja Subsidi
551	Appropriasi Belanja Subsidi Perusahaan Negara
5511	Appropriasi Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
55111	Appropriasi Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
551111	Appropriasi Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
5512	Appropriasi Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan – BBM
55121	Appropriasi Belanja Subsidi BBM
551211	Appropriasi Belanja Subsidi Avgas
551212	Appropriasi Belanja Subsidi Avtur
551213	Appropriasi Belanja Subsidi Premium
551214	Appropriasi Belanja Subsidi Minyak Bakar
551215	Appropriasi Belanja Subsidi Minyak Solar
551216	Appropriasi Belanja Subsidi Minyak Diesel
551217	Appropriasi Belanja Subsidi Minyak Tanah
551218	Appropriasi Belanja Subsidi Elpiji
5513	Appropriasi Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan – Non BBM
55131	Appropriasi Belanja Subsidi Non-BBM – Harga/Biaya
551311	Appropriasi Belanja Subsidi pangan
551312	Appropriasi Belanja Subsidi listrik
551313	Appropriasi Belanja Subsidi benih
551314	Appropriasi Belanja Subsidi obat
551315	Appropriasi Belanja Subsidi gula
551316	Appropriasi Belanja Subsidi pupuk
551317	Appropriasi Belanja Subsidi perawatan beras
551318	Appropriasi Belanja Subsidi pengawasan pupuk
551319	Appropriasi Belanja Subsidi harga/biaya lainnya
55132	Appropriasi Belanja Subsidi Non-BBM – Pajak
551321	Appropriasi Belanja Subsidi PPh
551322	Appropriasi Belanja Subsidi PPN
551323	Appropriasi Belanja Subsidi BM
55133	Appropriasi Belanja Subsidi Non-BBM – Lainnya
551331	Appropriasi Belanja Subsidi haji
551332	Appropriasi Belanja Subsidi kendaraan bermotor



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

551339	Appropriasi Belanja Subsidi lainnya
5514	Appropriasi Belanja Subsidi Lembaga Non-Kuangan – PSO
55141	Appropriasi Belanja Subsidi dalam rangka PSO
551411	Appropriasi Belanja Subsidi PT KAI
551412	Appropriasi Belanja Subsidi PT PELNI
551413	Appropriasi Belanja Subsidi PT Pos Indonesia
551414	Appropriasi Belanja Subsidi TVRI
551415	Appropriasi Belanja Subsidi BULOG
551419	Appropriasi Belanja Subsidi dalam rangka PSO Lainnya
552	Appropriasi Belanja Subsidi Perusahaan Swasta
5521	Appropriasi Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
55211	Appropriasi Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
552111	Appropriasi Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
55212	Appropriasi Belanja Subsidi – Bunga Kredit
552121	Appropriasi Belanja Subsidi Bunga KUT
552122	Appropriasi Belanja Subsidi Bunga KOP PIR
552123	Appropriasi Belanja Subsidi Bunga KOP
552124	Appropriasi Belanja Subsidi Bunga KOP PRIM
552125	Appropriasi Belanja Subsidi Bunga KPR
552126	Appropriasi Belanja Subsidi Bunga Ketahanan Pangan
552129	Appropriasi Belanja Subsidi Bunga kredit program lainnya
5522	Appropriasi Belanja Subsidi Lembaga Non-Kuangan
55221	Appropriasi Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan
552211	Appropriasi Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan
56	Appropriasi Belanja Hibah
561	Appropriasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
5611	Appropriasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
56111	Appropriasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
561111	Appropriasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
562	Appropriasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
5621	Appropriasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
56211	Appropriasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
562111	Appropriasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
563	Appropriasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
5631	Appropriasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
56311	Appropriasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
563111	Appropriasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
57	Appropriasi Belanja Bantuan sosial
571	Appropriasi Belanja Bantuan kompensasi sosial
5711	Appropriasi Belanja Bantuan kompensasi sosial
57111	Appropriasi Belanja Bantuan kompensasi sosial
571111	Appropriasi Belanja Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM
572	Appropriasi Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan dan Peribadatan
5721	Appropriasi Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan
57211	Appropriasi Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan
572111	Appropriasi Belanja Bantuan Langsung (Block Grant) Sekolah/Lembaga/Guru
572112	Appropriasi Belanja Bantuan Imbal Swadaya Sekolah/Lembaga
572113	Appropriasi Belanja Bantuan Beasiswa



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

5722	Appropriasi Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan
57221	Appropriasi Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan
572211	Appropriasi Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan
573	Appropriasi Belanja Lembaga Sosial Lainnya
5731	Appropriasi Belanja Lembaga Sosial Lainnya
57311	Appropriasi Belanja Lembaga Sosial Lainnya
573111	Appropriasi Belanja Lembaga Sosial Lainnya
58	Appropriasi Belanja Lain-lain
581	Appropriasi Belanja Lain-lain
5811	Appropriasi Belanja Lain-lain
58111	Appropriasi Belanja Rekonstruksi Aceh
581111	Appropriasi Belanja untuk Rekonstruksi Aceh
58112	Appropriasi Belanja Lain-lain I
581121	Appropriasi Belanja Kerjasama Teknis Internasional
581122	Appropriasi Belanja Pengeluaran Tak Terduga
581123	Appropriasi Belanja Cadangan Umum
581124	Appropriasi Belanja Pemilu tahunan
581125	Appropriasi Belanja Cadangan tunjangan beras PNS/TNI/Polri
581126	Appropriasi Belanja Cadangan dana reboisasi
581127	Appropriasi Belanja Tunggakan dan klaim pihak ketiga
581128	Appropriasi Belanja Dana Cadangan Tanggap Darurat (Dana Kontijensi)
58113	Appropriasi Belanja Lain-lain II
581131	Appropriasi Belanja DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk DJP
581132	Appropriasi Belanja KONI
581133	Appropriasi Belanja Dana Penunjang (PHLN) yang dialokasikan untuk Pemda
581134	Appropriasi Belanja Non Modal-Otorita Batam
581135	Appropriasi Belanja karena rugi selisih kurs
581136	Appropriasi Jasa Surveyor
581137	Appropriasi Jasa Perbendaharaan
581138	Appropriasi Jasa Pelayanan Bank Operasional
58114	Appropriasi Belanja Lain-lain III
581141	Appropriasi Belanja TVRI
581142	Appropriasi Belanja RRI
581149	Appropriasi Belanja lain-lain
KELOMPOK TRANSFER KE DAERAH	
6	TRANSFER KE DAERAH
61	Appropriasi Transfer Dana Perimbangan
611	Appropriasi Transfer Dana Bagi Hasil
6111	Appropriasi Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
61111	Appropriasi Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan
611111	Appropriasi Transfer DBH PPh ps1 21 untuk Propinsi
611112	Appropriasi Transfer DBH PPh ps1 21 untuk Kabupaten/Kota
611113	Appropriasi Transfer DBH PPh ps1 25/29 OP untuk Propinsi
611114	Appropriasi Transfer DBH PPh ps1 25/29 OP untuk Kabupaten/Kota
61112	Appropriasi Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
611121	Appropriasi Transfer DBH PBB untuk Propinsi
611122	Appropriasi Transfer DBH PBB untuk Kabupaten/Kota
611123	Appropriasi Transfer DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

611124	Appropriasi Transfer DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kab./Kota
611125	Appropriasi Transfer DBH bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Kabupaten/Kota
61113 Appropriasi Transfer Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	
611131	Appropriasi Transfer DBH BPHTB untuk Propinsi
611132	Appropriasi Transfer DBH BPHTB untuk Kabupaten/Kota
611133	Appropriasi Transfer DBH BPHTB bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Kabupaten/Kota
6112 Appropriasi Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	
61121 Appropriasi Transfer Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	
611211	Appropriasi Transfer DBH minyak bumi untuk Propinsi
611212	Appropriasi Transfer DBH minyak bumi untuk Kab./Kota Penghasil
611213	Appropriasi Transfer DBH minyak bumi untuk Kab./Kota lainnya
61122 Appropriasi Transfer Dana Bagi Hasil Gas Bumi	
611221	Appropriasi Transfer DBH Gas Bumi untuk Propinsi
611222	Appropriasi Transfer DBH Gas Bumi untuk Kab./Kota Penghasil
611223	Appropriasi Transfer DBH Gas Bumi untuk Kab./Kota lainnya
61123 Appropriasi Transfer Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum	
611231	Appropriasi Transfer DBH iuran tetap untuk Propinsi
611232	Appropriasi Transfer DBH iuran tetap untuk Kab./Kota
611233	Appropriasi Transfer DBH royalti untuk Propinsi
611234	Appropriasi Transfer DBH royalti untuk Kab./Kota Penghasil
611235	Appropriasi Transfer DBH royalti untuk Kab./Kota lainnya
61124 Appropriasi Transfer Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi	
611241	Appropriasi Transfer DBH Setoran bagian pemerintah untuk Propinsi
611242	Appropriasi Transfer DBH Setoran bagian pemerintah untuk Kab./Kota Penghasil
611243	Appropriasi Transfer DBH Setoran bagian pemerintah untuk Kab./Kota Lainnya
611244	Appropriasi Transfer DBH iuran tetap dan iuran produksi untuk Propinsi
611245	Appropriasi Transfer DBH iuran tetap dan iuran produksi untuk Kab./Kota Penghasil
611246	Appropriasi Transfer DBH iuran tetap dan iuran produksi untuk Kab./Kota Lainnya
61125 Appropriasi Transfer Dana bagi Hasil Kehutanan	
611251	Appropriasi Transfer DBH IIUPH/IHPH untuk Propinsi
611252	Appropriasi Transfer DBH IIUPH/IHPH untuk Kab./Kota
611253	Appropriasi Transfer DBH PSDH untuk Propinsi
611254	Appropriasi Transfer DBH PSDH untuk Kab./Kota Penghasil
611255	Appropriasi Transfer DBH PSDH untuk Kab./Kota lainnya
611256	Appropriasi Transfer DBH Dana Reboisasi untuk Propinsi
611257	Appropriasi Transfer DBH Dana Reboisasi untuk Kab./Kota Penghasil
61125 Appropriasi Transfer Dana Bagi Hasil Perikanan	
611251	Appropriasi Transfer DBH Perikanan untuk Kab./Kota
61211 Appropriasi Transfer Dana Alokasi Umum	
612111	Appropriasi Transfer DAU untuk Propinsi
612112	Appropriasi Transfer DAU untuk Kabupaten/Kota



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

6131	Appropriasi Transfer DAK
61311	Appropriasi Transfer DAK Pendidikan
613111	Appropriasi Transfer DAK untuk Pendidikan
61312	Appropriasi Transfer DAK Kesehatan
613121	Appropriasi Transfer DAK untuk Kesehatan
61313	Appropriasi Transfer DAK Infrastruktur
613131	Appropriasi Transfer DAK untuk Infrastruktur
61314	Appropriasi Transfer DAK Prasarana Pemerintahan
613141	Appropriasi Transfer DAK untuk Prasarana Pemerintahan
61315	Appropriasi Transfer DAK Kelautan dan Perikanan
613151	Appropriasi Transfer DAK untuk Kelautan dan Perikanan
61316	Appropriasi Transfer DAK Pertanian
613161	Appropriasi Transfer DAK untuk Pertanian
61317	Appropriasi Transfer DAK Lingkungan Hidup
613171	Appropriasi Transfer DAK untuk Lingkungan Hidup
62	Appropriasi Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
621	Appropriasi Transfer Dana Otonomi Khusus
6211	Appropriasi Transfer Dana Otonomi Khusus
62111	Appropriasi Transfer Dana Otonomi Khusus
621111	Appropriasi Transfer Dana Otonomi Khusus untuk Papua
621112	Appropriasi Transfer Dana Otonomi Khusus untuk NAD
621113	Appropriasi Transfer Dana Otonomi Khusus tambahan infrastruktur untuk Papua
622	Appropriasi Transfer Dana Penyesuaian
6221	Appropriasi Transfer Dana Penyesuaian
62211	Appropriasi Transfer Dana Penyesuaian
622111	Appropriasi Transfer Dana Penyesuaian untuk Propinsi
622112	Appropriasi Transfer Dana Penyesuaian untuk Kabupaten/Kota
622119	Appropriasi Transfer Dana Penyesuaian Lainnya



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

AKUN APBN

7 PEMBIAYAAN
71 Estimasi Penerimaan Pembiayaan
711 Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri
7111 Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan
71111 Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan
711111 Estimasi Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL)
711112 Estimasi Penerimaan Pembiayaan dari Rekening Dana Investasi
711113 Estimasi Penerimaan Pembiayaan dari Rekening BUN untuk Obligasi
71112 Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan Dana Moratorium
711121 Estimasi Penerimaan Pembiayaan dari Dana Eks Moratorium Pokok untuk Cadangan Aceh
7112 Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Non-Perbankan
71121 Estimasi Penerimaan Hasil Privatisasi
711211 Estimasi Penerimaan Hasil Privatisasi
7113 Estimasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
71131 Estimasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
711311 Estimasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
711312 Estimasi Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN
7114 Estimasi Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara/Obligasi
71141 Estimasi Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri
711441 Estimasi Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Perbendaharaan Negara
71142 Estimasi Penerimaan dari Penjualan Obligasi Negara Dalam Negeri
711421 Estimasi Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara Dalam Negeri
711422 Estimasi Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri
71143 Estimasi Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri - Jangka Pendek
711431 Estimasi Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN - Jangka Pendek
71144 Estimasi Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri - Jangka Panjang
711441 Estimasi Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN - Jangka Panjang
711442 Estimasi Penerimaan Imbalan dibayar di muka SBSN - Jangka Panjang
712 Estimasi Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri
7121 Estimasi Penarikan Pinjaman Program
71211 Estimasi Penarikan Pinjaman Program Bilateral
712111 Estimasi Penarikan Pinjaman Program dari OECF
712112 Estimasi Penarikan Pinjaman Program Bilateral Lainnya
71212 Estimasi Penarikan Pinjaman Program Multilateral
712121 Estimasi Penarikan Pinjaman Program dari IBRD
712122 Estimasi Penarikan Pinjaman Program dari ADB
712123 Estimasi Penarikan Pinjaman Program Multilateral Lainnya
7122 Estimasi Penarikan Pinjaman Proyek
71221 Estimasi Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

712211	Estimasi Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral
71222	Estimasi Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral
712221	Estimasi Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral
71223	Estimasi Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor
712231	Estimasi Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor
71224	Estimasi Penarikan Pinjaman Proyek Leasing
712241	Estimasi Penarikan Pinjaman Proyek Leasing
71225	Estimasi Penarikan Pinjaman Proyek Komersial
712251	Estimasi Penarikan Pinjaman Proyek Komersial
71229	Estimasi Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya
712291	Estimasi Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya
7123	Estimasi Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara
71231	Estimasi Penerimaan Obligasi Negara Luar Negeri
712311	Estimasi Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara - Valas
712312	Estimasi Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara - Valas
71232	Estimasi Penerimaan Surat Perbendaharaan Negara - Valas
712321	Estimasi Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Perbendaharaan Negara - Valas
71233	Estimasi Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri - Jangka Pendek
712331	Estimasi Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN Valas - Jangka Pendek
71234	Estimasi Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri - Jangka Panjang
712341	Estimasi Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN Valas - Jangka Panjang
712342	Estimasi Penerimaan Imbalan dibayar di muka SBSN Valas - Jangka Panjang
713	Estimasi Penerimaan dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
7131	Estimasi Penerimaan dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
71311	Estimasi Penerimaan Pinjaman Program dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Negeri
713111	Estimasi Penerimaan Pinjaman Program dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
71312	Estimasi Penerimaan Pinjaman Proyek dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
713121	Estimasi Penerimaan Pinjaman Proyek dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
714	Estimasi Penerimaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
7141	Estimasi Penerimaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
71411	Estimasi Penjadualan Kembali Bunga Utang Pinjaman Luar Negeri
714111	Estimasi Penerimaan Pembiayaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
715	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman
7151	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri
71511	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

715111	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman dalam Negeri kepada Pemda
715112	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman dalam Negeri kepada BUMD
715113	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman dalam Negeri Kepada BUMN
715114	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman dalam Negeri Kepada Non Pemerintah
7152 Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri	
71521 Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Tahun Anggaran Berjalan	
715211	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar negeri TAB kepada Daerah
715212	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri TAB kepada BUMD
715213	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri TAB kepada BUMN
71522 Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Tahun Anggaran Lalu	
715221	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri TAYL kepada Daerah
715222	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri TAYL kepada BUMD
715223	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri TAYL kepada BUMN
719 Estimasi Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	
7191 Estimasi Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	
71911 Estimasi Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	
719111	Estimasi Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs
719112	Estimasi Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening KUN Rekening Valuta USD Karena Selisih Kurs
72 Appropriasi Pengeluaran Pembiayaan	
721 Appropriasi Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	
7211 Appropriasi Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan	
72111 Appropriasi Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan	
721111	Appropriasi Pembayaran Pinjaman Kredit Jangka Pendek dan uang Muka dari Sektor Perbankan
721112	Appropriasi Pengeluaran Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek Perbankan
72112 Appropriasi Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan untuk Moratorium	
721121	Appropriasi Pengeluaran Pembiayaan Eks Moratorium Pokok untuk Cadangan Aceh
7212 Appropriasi Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Non-Perbankan	
72121 Appropriasi Pengeluaran untuk Program Restrukturisasi	
721211	Appropriasi Pengeluaran untuk Program Restrukturisasi
7213 Appropriasi Pengeluaran untuk Pembayaran/Pelunasan Surat Utang Negara/Obligasi	
72131 Appropriasi Pengeluaran untuk Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara	
721331	Appropriasi Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

721332	Appropriasi Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara melalui Pembelian Kembali
72132	Appropriasi Pengeluaran untuk Pelunasan Obligasi Dalam Negeri
721321	Appropriasi Pengeluaran Pelunasan Obligasi Dalam Negeri
721322	Appropriasi Pengeluaran Pelunasan Obligasi Dalam Negeri melalui Pembelian Kembali
721324	Appropriasi Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri
72133	Appropriasi Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri - Jangka Pendek
721331	Appropriasi Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek
721332	Appropriasi Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek melalui Pembelian Kembali
72134	Appropriasi Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri - Jangka Panjang
721341	Appropriasi Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang
721342	Appropriasi Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali
721343	Appropriasi Pembayaran Imbalan dibayar di muka SBSN - Jangka Panjang
722	Appropriasi Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri
7221	Appropriasi Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri
72211	Appropriasi Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Program
722111	Appropriasi Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok (Amortisasi) Utang Luar Negeri – Pinjaman Program
722112	Appropriasi Pengeluaran Cicilan Pokok Utang LN Pinjaman Program
7222	Appropriasi Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Proyek
72222	Appropriasi Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Proyek
72221	Appropriasi Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Proyek
72222	Appropriasi Pengeluaran Cicilan Pokok Utang LN Pinjaman Proyek
7223	Appropriasi Pengeluaran untuk Pelunasan Surat Berharga Negara
72231	Appropriasi Pengeluaran untuk Pelunasan Obligasi Negara Luar Negeri - Valas
722311	Appropriasi Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara Luar Negeri
722312	Appropriasi Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara Luar Negeri - melalui Pembelian Kembali
722313	Appropriasi Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Luar Negeri
72232	Appropriasi Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri - Valas
722321	Appropriasi Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara - Valas
722322	Appropriasi Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara - melalui Pembelian Kembali
72233	Appropriasi Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri - Jangka Pendek
722331	Appropriasi Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Pendek
722332	Appropriasi Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Pendek melalui Pembelian Kembali
72234	Appropriasi Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri - Jangka Panjang



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

722341	Appropriasi Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Panjang
722342	Appropriasi Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali
722343	Appropriasi Pembayaran Imbalan dibayar di muka Surat Berharga Syariah Negara Valas- Jangka Panjang
723	Appropriasi Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali
7231	Appropriasi Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali – Pinjaman Program
72311	Appropriasi Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Program
723111	Appropriasi Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Program
7232	Appropriasi Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali – Pinjaman
72321	Appropriasi Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Proyek
723211	Appropriasi Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Proyek
7233	Appropriasi Pelunasan Bunga Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali – Pinjaman
72331	Appropriasi Pengeluaran penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
723311	Appropriasi Pengeluaran penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
724	Appropriasi Penyertaan Modal Negara
7241	Appropriasi Penyertaan Modal Negara pada BUMN
72411	Appropriasi Penyertaan Modal Negara pada BUMN
724111	Appropriasi PMN untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
7242	Appropriasi Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional
72421	Appropriasi Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional
724211	Appropriasi PMN untuk Badan Internasional
7243	Appropriasi Penyertaan Modal Negara Lainnya
72431	Appropriasi Penyertaan Modal Lainnya
724311	Appropriasi Penyertaan Modal Lainnya
724312	Appropriasi Penyertaan Modal Pemerintah SMF
72432	Appropriasi Penyertaan Modal Negara untuk Dukungan Infrastruktur
724321	Appropriasi Penyertaan Modal Negara untuk Dukungan Infrastruktur
725	Appropriasi Penerusan Pinjaman
7251	Appropriasi Penerusan Pinjaman Dalam Negeri RDI/RPD
72511	Appropriasi Penerusan Pinjaman Dalam Negeri
725111	Appropriasi Penerusan Pinjaman dalam Negeri kepada Pemda
725112	Appropriasi Penerusan Pinjaman dalam Negeri kepada BUMD
725113	Appropriasi Penerusan Pinjaman dalam Negeri Kepada BUMN
725114	Appropriasi Penerusan Pinjaman dalam Negeri Kepada Non Pemerintah
7252	Appropriasi Penerusan Pinjaman Luar Negeri
72521	Appropriasi Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan
725211	Appropriasi Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah Tahun Anggaran Berjalan
725212	Appropriasi Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMD Tahun Anggaran Berjalan
725213	Appropriasi Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMN Tahun Anggaran Berjalan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

72522	Appropriasi Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu
725221	Appropriasi Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah Th. Anggaran Yang Lalu
725222	Appropriasi Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMD Tahun Anggaran Yang Lalu
725222	Appropriasi Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMN Tahun Anggaran Yang Lalu
726	Appropriasi Penyertaan Modal Negara untuk Dukungan Infrastruktur
7261	Appropriasi Penyertaan Modal Negara untuk Dukungan Infrastruktur
72611	Appropriasi Penyertaan Modal Negara untuk Dukungan Infrastruktur
726111	Appropriasi Penyertaan Modal Negara untuk Dukungan Infrastruktur
729	Appropriasi Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain
7291	Appropriasi Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain
72911	Appropriasi Penyesuaian Rekening Karena Selisih Kurs
729111	Appropriasi Penyesuaian Penurunan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs
729112	Appropriasi Penyesuaian Penurunan Saldo Rekening KUN dalam Valuta USD karena Selisih Kurs



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN KETUJUH

KELOMPOK AKUN DIPA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

AKUN DIPA

4 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
41 Estimasi Penerimaan Perpajakan yang dialokasikan
411 Estimasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri yang dialokasikan
4111 Estimasi Pendapatan Pajak Penghasilan yang dialokasikan
41111 Estimasi Pendapatan PPh Migas yang dialokasikan
411111 Estimasi Pendapatan PPh Minyak Bumi yang dialokasikan
411112 Estimasi Pendapatan PPh Gas Bumi yang dialokasikan
411119 Estimasi Pendapatan PPh Migas Lainnya yang dialokasikan
41112 Estimasi Pendapatan PPh Non-Migas yang dialokasikan
411121 Estimasi Pendapatan PPh Pasal 21 yang dialokasikan
411122 Estimasi Pendapatan PPh Pasal 22 yang dialokasikan
411123 Estimasi Pendapatan PPh Pasal 22 Impor yang dialokasikan
411124 Estimasi Pendapatan PPh Pasal 23 yang dialokasikan
411125 Estimasi Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi yang dialokasikan
411126 Estimasi Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan yang dialokasikan
411127 Estimasi Pendapatan PPh Pasal 26 yang dialokasikan
411128 Estimasi Pendapatan PPh Final yang dialokasikan
411129 Estimasi Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya yang dialokasikan
41113 Estimasi Pendapatan PPh Fiskal yang dialokasikan
411131 Estimasi Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri yang dialokasikan
4112 Estimasi Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai yang dialokasikan
41121 Estimasi Pendapatan PPN yang dialokasikan
411211 Estimasi Pendapatan PPN Dalam Negeri yang dialokasikan
411212 Estimasi Pendapatan PPN Impor yang dialokasikan
411219 Estimasi Pendapatan PPN Lainnya yang dialokasikan
41122 Estimasi Pendapatan PPnBM yang dialokasikan
411221 Estimasi Pendapatan PPnBM dalam Negeri yang dialokasikan
411222 Estimasi Pendapatan PPnBM Impor yang dialokasikan
411229 Estimasi Pendapatan PPnBM Lainnya yang dialokasikan
4113 Estimasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan yang dialokasikan
41131 Estimasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan yang dialokasikan
411311 Estimasi Pendapatan PBB Pedesaan yang dialokasikan
411312 Estimasi Pendapatan PBB Perkotaan yang dialokasikan
411313 Estimasi Pendapatan PBB Perkebunan yang dialokasikan
411314 Estimasi Pendapatan PBB Kehutanan yang dialokasikan
411315 Estimasi Pendapatan PBB Pertambangan yang dialokasikan
411319 Estimasi Pendapatan PBB Lainnya yang dialokasikan
4114 Estimasi Pendapatan BPHTB yang dialokasikan
41141 Estimasi Pendapatan BPHTB yang dialokasikan
411411 Estimasi Pendapatan BPHTB yang dialokasikan
4115 Estimasi Pendapatan Cukai yang dialokasikan
41151 Estimasi Pendapatan Cukai yang dialokasikan
411511 Estimasi Pendapatan Cukai Hasil Tembakau yang dialokasikan
411512 Estimasi Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol yang dialokasikan
411513 Estimasi Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol yang dialokasikan
411514 Estimasi Pendapatan Denda Administrasi Cukai yang dialokasikan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

411519	Estimasi Pendapatan Cukai Lainnya yang dialokasikan
4116	Estimasi Pendapatan Pajak Lainnya yang dialokasikan
41161	Estimasi Pendapatan Pajak Lainnya
411611	Estimasi Pendapatan Bea Meterai yang dialokasikan
411612	Estimasi Pendapatan dari Penjualan Benda Meterai yang dialokasikan
411619	Estimasi Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya yang dialokasikan
41162	Estimasi Pendapatan Bunga Penagihan Pajak yang dialokasikan
411621	Estimasi Pendapatan Bunga Penagihan PPh yang dialokasikan
411622	Estimasi Pendapatan Bunga Penagihan PPN yang dialokasikan
411623	Estimasi Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM yang dialokasikan
411624	Estimasi Pendapatan Bunga Penagihan PTLL yang dialokasikan
4121	Estimasi Pendapatan Bea Masuk yang dialokasikan
41211	Estimasi Pendapatan Bea Masuk yang dialokasikan
412111	Estimasi Pendapatan Bea Masuk yang dialokasikan
412112	Estimasi Pendapatan Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil) yang dialokasikan
412113	Estimasi Pendapatan Denda Administrasi Pabean yang dialokasikan
412114	Estimasi Pendapatan Bea Masuk dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang dialokasikan
412119	Estimasi Pendapatan Pabean Lainnya yang dialokasikan
4122	Estimasi Pendapatan Pajak/pungutan ekspor yang dialokasikan
41221	Estimasi Pendapatan Pajak/pungutan ekspor yang dialokasikan
412211	Estimasi Pendapatan Pajak/pungutan ekspor yang dialokasikan
42	Estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dialokasikan
421	Estimasi Penerimaan Sumber Daya Alam yang dialokasikan
4211	Estimasi Pendapatan Minyak bumi yang dialokasikan
42111	Estimasi Pendapatan Minyak Bumi yang dialokasikan
421111	Estimasi Pendapatan Minyak Bumi yang dialokasikan
4212	Estimasi Pendapatan Gas Bumi yang dialokasikan
42121	Estimasi Pendapatan Gas Bumi yang dialokasikan
421211	Estimasi Pendapatan Gas Bumi yang dialokasikan
4213	Estimasi Pendapatan Pertambangan Umum yang dialokasikan
42131	Estimasi Pendapatan Pertambangan Umum yang dialokasikan
421311	Estimasi Pendapatan Iuran Tetap yang dialokasikan
421312	Estimasi Pendapatan Royalti yang dialokasikan
4214	Estimasi Pendapatan Kehutanan yang dialokasikan
42141	Estimasi Pendapatan Dana Reboisasi yang dialokasikan
421411	Estimasi Pendapatan Dana Reboisasi yang dialokasikan
42142	Estimasi Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan yang dialokasikan
421421	Estimasi Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan yang dialokasikan
42143	Estimasi Pendapatan IIUPH (IHPH) yang dialokasikan
421431	Estimasi Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Industri yang dialokasikan
421432	Estimasi Pendapatan IIUPH (IHPH) Bambu yang dialokasikan
421433	Estimasi Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Rotan yang dialokasikan
421434	Estimasi Pendapatan IIUPH (IHPH) Hutan Alam yang dialokasikan
4215	Estimasi Pendapatan Perikanan yang dialokasikan
42151	Estimasi Pendapatan Perikanan yang dialokasikan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

421511	Estimasi Pendapatan Perikanan yang dialokasikan
4216	Estimasi Pendapatan Pertambangan Panas Bumi yang dialokasikan
42161	Estimasi Pendapatan Panas Bumi yang dialokasikan
421611	Estimasi Pendapatan Panas Bumi yang dialokasikan
422	Estimasi Pendapatan Bagian Laba BUMN yang dialokasikan
4221	Estimasi Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN yang dialokasikan
42211	Estimasi Pendapatan Laba BUMN Perbankan yang dialokasikan
422111	Estimasi Pendapatan Laba BUMN Perbankan yang dialokasikan
42212	Estimasi Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan yang dialokasikan
422121	Estimasi Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan yang dialokasikan
423	Estimasi Pendapatan PNBPN Lainnya yang dialokasikan
4231	Estimasi Pendapatan Penjualan dan Sewa yang dialokasikan
42311	Estimasi Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan yang dialokasikan
423111	Estimasi Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan yang dialokasikan
423112	Estimasi Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan yang dialokasikan
423113	Estimasi Pendapatan Penjualan Hasil Tambang yang dialokasikan
423114	Estimasi Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan yang dialokasikan
423115	Estimasi Pendapatan Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi Lainnya yang dialokasikan
423116	Estimasi Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya yang dialokasikan
423117	Estimasi Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan yang dialokasikan
423118	Estimasi Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni yang dialokasikan
423119	Estimasi Pendapatan Penjualan Lainnya yang dialokasikan
42312	Estimasi Pendapatan Penjualan Aset yang dialokasikan
423121	Estimasi Pendapatan Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan dan Tanah yang dialokasikan
423122	Estimasi Pendapatan Penjualan Kendaraan Bermotor yang dialokasikan
423123	Estimasi Pendapatan Penjualan Sewa Beli yang dialokasikan
423124	Estimasi Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing yang dialokasikan
423129	Estimasi Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan
42313	Estimasi Pendapatan Penjualan dari kegiatan Hulu Migas(Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak yang dialokasikan)
423131	Estimasi Pendapatan Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak yang dialokasikan
423132	Estimasi Pendapatan Minyak Mentah (DMO) yang dialokasikan
423139	Estimasi Pendapatan Lainnya dari kegiatan Hulu Migas yang dialokasikan
42314	Estimasi Pendapatan Sewa yang dialokasikan
423141	Estimasi Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri yang dialokasikan
423142	Estimasi Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang yang dialokasikan
423143	Estimasi Pendapatan Sewa Benda-benda Bergerak yang dialokasikan
423149	Estimasi Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya yang dialokasikan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

4232	Estimasi Pendapatan Jasa yang dialokasikan
42321	Estimasi Pendapatan Jasa I yang dialokasikan
423211	Estimasi Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya yang dialokasikan
423212	Estimasi Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA) yang dialokasikan
423213	Estimasi Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor, SIM, STNK, dan BPKB yang dialokasikan
423214	Estimasi Pendapatan Hak dan Perijinan yang dialokasikan
423215	Estimasi Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan yang dialokasikan
423216	Estimasi Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan DJBC yang dialokasikan
423217	Estimasi Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama yang dialokasikan
423218	Estimasi Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan, dan Kenavigasian yang dialokasikan
42322	Estimasi Pendapatan Jasa II yang dialokasikan
423221	Estimasi Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) yang dialokasikan
423222	Estimasi Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi yang dialokasikan
423223	Estimasi Pendapatan Iuran Lelang untuk Fakir Miskin yang dialokasikan
423224	Estimasi Pendapatan Jasa Catatan Sipil yang dialokasikan
423225	Estimasi Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa yang dialokasikan
423226	Estimasi Pendapatan Uang Pewarganegaraan yang dialokasikan
423227	Estimasi Pendapatan Bea Lelang yang dialokasikan
423228	Estimasi Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara yang dialokasikan
423229	Estimasi Pendapatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi yang dialokasikan
42323	Estimasi Pendapatan Jasa Luar Negeri
423331	Estimasi Pendapatan dari Pemberian Surat Perjalanan RI yang dialokasikan
423332	Estimasi Pendapatan dari Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler yang dialokasikan
423339	Estimasi Pendapatan Rutin Lainnya dari Luar Negeri yang dialokasikan
42329	Estimasi Pendapatan Jasa Lainnya
423391	Estimasi Pendapatan Jasa Lainnya yang dialokasikan
4233	Estimasi Pendapatan Bunga yang dialokasikan
42331	Estimasi Pendapatan Bunga yang dialokasikan
423311	Estimasi Pendapatan Bunga atas Investasi dalam Obligasi yang dialokasikan
423312	Estimasi Pendapatan BPPN atas Bunga Obligasi yang dialokasikan
423313	Estimasi Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman yang dialokasikan
423319	Estimasi Pendapatan Bunga Lainnya yang dialokasikan
42332	Estimasi Pendapatan Gain on Bond Redemption yang dialokasikan
423321	Estimasi Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang yang dialokasikan
42333	Estimasi Pendapatan Premium atas Obligasi Negara yang dialokasikan
423331	Estimasi Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah yang dialokasikan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

423332	Estimasi Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing yang dialokasikan
4234	Estimasi Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan yang dialokasikan
42341	Estimasi Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan yang dialokasikan
423411	Estimasi Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan yang dialokasikan
423412	Estimasi Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan yang dialokasikan
423413	Estimasi Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan) yang dialokasikan
423414	Estimasi Pendapatan Hasil Denda/Tilang dan sebagainya yang dialokasikan
423415	Estimasi Pendapatan Ongkos Perkara yang dialokasikan
423419	Estimasi Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya yang dialokasikan
4235	Estimasi Pendapatan Pendidikan
42351	Estimasi Pendapatan Pendidikan
423511	Estimasi Pendapatan Uang Pendidikan yang dialokasikan
423512	Estimasi Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan yang dialokasikan
423513	Estimasi Pendapatan Uang Ujian untuk Menjalankan Praktek yang dialokasikan
423514	Estimasi Pendapatan Pendidikan Lainnya yang dialokasikan
4236	Estimasi Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi
42361	Estimasi Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi
423611	Estimasi Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Ditetapkan Pengadilan yang dialokasikan
423612	Estimasi Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara yang dialokasikan
423613	Estimasi Pendapatan dari Pengembalian Penyalahgunaan Penyelenggaraan Keuangan yang dialokasikan
423614	Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan di pengadilan yang dialokasikan
4237	Estimasi Iuran dan Denda yang dialokasikan
42371	Estimasi Pendapatan Iuran Badan Usaha yang dialokasikan
423711	Estimasi Pendapatan Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM yang dialokasikan
423712	Estimasi Pendapatan Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa yang dialokasikan
423713	Estimasi Iuran Badan Usaha di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang dialokasikan
42372	Estimasi Pendapatan Dana Pengamanan Hutan yang dialokasikan
423721	Estimasi Pendapatan Dana Pengamanan Hutan yang dialokasikan
42373	Estimasi Pendapatan dari Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam yang dialokasikan
423731	Estimasi Pendapatan Iuran Menangkap/Mengambil/Mengangkut Satwa Liar/Mengambil/Mengangkut Tumbuhan Alam Hidup atau Mati yang dialokasikan
423732	Estimasi Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA) yang dialokasikan
423733	Estimasi Pungutan Izin Pengusahaan Taman Buru (PIPTB) yang dialokasikan
423734	Estimasi Pungutan Izin Berburu di taman buru dan areal buru (PIB) yang dialokasikan
423735	Estimasi Pungutan Masuk Obyek Wisata Alam yang dialokasikan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

423736	Estimasi Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA) yang dialokasikan
423737	Estimasi Iuran Hasil Usaha Perburuan di Taman Buru (IHUPTB) yang dialokasikan
42374	Estimasi Pendapatan Penerimaan dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan yang dialokasikan
423741	Estimasi Pendapatan Penerimaan Dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan yang dialokasikan
42375	Estimasi Pendapatan Denda yang dialokasikan
423751	Estimasi Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan yang dialokasikan
423752	Estimasi Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah yang dialokasikan
423753	Estimasi Pendapatan Denda Administrasi BPHTB yang dialokasikan
423754	Estimasi Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal yang dialokasikan
423755	Estimasi Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha yang dialokasikan
4239	Estimasi Pendapatan Lain-lain yang dialokasikan
42391	Estimasi Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu yang dialokasikan
423911	Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL yang dialokasikan
423912	Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL yang dialokasikan
423913	Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL yang dialokasikan
423914	Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinj. LN TAYL yang dialokasikan
423915	Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah TAYL yang dialokasikan
423916	Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Swadana TAYL yang dialokasikan
42392	Estimasi Pendapatan Pelunasan Piutang yang dialokasikan
423921	Estimasi Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara yang dialokasikan
423922	Estimasi Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara yang dialokasikan
42393	Estimasi Pendapatan Penutupan Rekening yang dialokasikan
423931	Estimasi Pendapatan Penutupan Rekening yang dialokasikan
42399	Estimasi Pendapatan Lain-lain yang dialokasikan
423991	Estimasi Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji yang dialokasikan
423992	Estimasi Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional yang dialokasikan
423993	Estimasi Pendapatan dari Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) yang dialokasikan
423994	Estimasi Pendapatan dari Biaya Pengawasan HET Minyak Tanah yang dialokasikan
423995	Estimasi Pendapatan Bagian Pemerintah dari Sisa Surplus Bank Indonesia yang dialokasikan
423999	Estimasi Pendapatan Anggaran Lain-lain yang dialokasikan
424	Estimasi Pendapatan Badan Layanan Umum yang dialokasikan
4241	Estimasi Pendapatan Jasa Layanan Umum yang dialokasikan
42411	Estimasi Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat yang dialokasikan
424111	Estimasi Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang dialokasikan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

424112	Estimasi Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan yang dialokasikan
424113	Estimasi Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Tehnologi yang dialokasikan
424114	Estimasi Pendapatan Jasa Pencetakan yang dialokasikan
424115	Estimasi Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian yang dialokasikan
424116	Estimasi Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi yang dialokasikan
424117	Estimasi Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran yang dialokasikan
424118	Estimasi Pendapatan Penyediaan Barang yang dialokasikan
424119	Estimasi Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya yang dialokasikan
42412 Estimasi Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu yang dialokasikan	
424121	Estimasi Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita yang dialokasikan
424122	Estimasi Pendapatan Pengelolaan Kawasan Ekonomi Terpadu yang dialokasikan
424123	Estimasi Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah yang dialokasikan
424129	Estimasi Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya yang dialokasikan
42413 Estimasi Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat yang dialokasikan	
424131	Estimasi Pendapatan Program Dana Penjaminan yang dialokasikan
424132	Estimasi Pendapatan Program Dana Penjaminan Syariah yang dialokasikan
424133	Estimasi Pendapatan Program Modal Ventura yang dialokasikan
424134	Estimasi Pendapatan Program Dana Bergulir Sektorial yang dialokasikan
424135	Estimasi Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah yang dialokasikan
424136	Estimasi Pendapatan Investasi yang dialokasikan
424139	Estimasi Pendapatan Pengelolaan dana khusus lainnya yang dialokasikan
4242 Estimasi Pendapatan Hibah yang dialokasikan	
42421 Estimasi Pendapatan Hibah Terikat yang dialokasikan	
424211	Estimasi Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan yang dialokasikan
424212	Estimasi Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha yang dialokasikan
424213	Estimasi Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda yang dialokasikan
424214	Estimasi Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Perorangan yang dialokasikan
424215	Estimasi Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha yang dialokasikan
424216	Estimasi Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Negara yang dialokasikan
424219	Estimasi Pendapatan Hibah Terikat Lainnya yang dialokasikan
42422 Estimasi Pendapatan Hibah Tidak Terikat yang dialokasikan	
424221	Estimasi Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan yang dialokasikan
424222	Estimasi Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha
424223	Estimasi Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda yang dialokasikan
424224	Estimasi Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Perorangan yang dialokasikan
424225	Estimasi Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha yang dialokasikan
424226	Estimasi Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Negara yang dialokasikan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

424229	Estimasi Pendapatan Hibah Tidak Terikat -Lainnya yang dialokasikan
4243	Estimasi Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU yang dialokasikan
42431	Estimasi Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU yang dialokasikan
424311	Estimasi Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan yang dialokasikan
424312	Estimasi Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha yang dialokasikan
424313	Estimasi Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah yang dialokasikan
43	Estimasi Penerimaan Hibah
431	Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri yang dialokasikan
4311	Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri yang dialokasikan
43111	Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri yang dialokasikan
431111	Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Perorangan yang dialokasikan
431112	Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Lembaga/Badan Usaha yang dialokasikan
431119	Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri Lainnya yang dialokasikan
4312	Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri yang dialokasikan
43121	Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri yang dialokasikan
431211	Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Perorangan yang dialokasikan
431212	Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Bilateral yang dialokasikan
431213	Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Multilateral yang dialokasikan
431219	Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Lainnya yang dialokasikan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

AKUN DIPA

5 Allotment BELANJA NEGARA
51 Allotment Belanja Pegawai
511 Allotment Belanja Gaji dan Tunjangan
5111 Allotment Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
51111 Allotment Belanja Gaji PNS
511111 Allotment Belanja Gaji Pokok PNS
511119 Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS
51112 Allotment Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS
511121 Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
511122 Allotment Belanja Tunj. Anak PNS
511123 Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS
511124 Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS
511125 Allotment Belanja Tunj. PPh PNS
511126 Allotment Belanja Tunj. Beras PNS
511127 Allotment Belanja Tunj. Kemahalan PNS
511128 Allotment Belanja Tunj. Lauk pauk PNS
511129 Allotment Belanja Uang Makan PNS
51113 Allotment Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS
511131 Allotment Belanja Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS
511132 Allotment Belanja Tunj. Cacat PNS
511133 Allotment Belanja Tunj. Khusus Peralihan PNS
511134 Allotment Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS
511135 Allotment Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS
511136 Allotment Belanja Tunj. Kewanitaan PNS
511136 Allotment Belanja Tunj. Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta/Badan/Komisi
511137 Allotment Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS
511138 Allotment Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS
511139 Allotment Belanja Tunjangan SAR PNS
51114 Allotment Belanja Tunjangan-tunjangan III PNS Pegawai Negeri/Staff di Luar Negeri
511141 Allotment Belanja Tunj. Sewa Rumah PNS (Staff di LN)
511142 Allotment Belanja Tunj. Restitusi Pengobatan PNS (Staff di LN)
511143 Allotment Belanja Tunj. Social Security PNS (Staff di LN)
511144 Allotment Belanja Tunj. Asuransi Kecelakaan PNS (Staff di LN)
511145 Allotment Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (Staff di LN)
511146 Allotment Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (Staff di LN)
511147 Allotment Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri
511148 Allotment Belanja Lokal Staff Lainnya
51115 Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS
511151 Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS
51116 Allotment Belanja Gaji- PNS TNI/Polri
511161 Allotment Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri
511169 Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri
51117 Allotment Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS TNI/Polri
511171 Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

511172	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri
511173	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri
511174	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri
511175	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri
511176	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri
511177	Allotment Belanja Tunj. Kemahalan PNS TNI/Polri
511178	Allotment Belanja Tunj. Lauk pauk PNS TNI/Polri
511179	Allotment Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri
51118 Allotment Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS TNI/Polri	
511181	Allotment Belanja Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS TNI/Polri
511182	Allotment Belanja Tunj. Cacat PNS TNI/Polri
511183	Allotment Belanja Tunj. Khusus Peralihan PNS TNI/Polri
511184	Allotment Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS TNI/Polri
511185	Allotment Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS TNI/Polri
511186	Allotment Belanja Tunj. Kewanitaan PNS TNI/Polri
511187	Allotment Belanja Tunj. Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS TNI/Polri
511188	Allotment Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS TNI/Polri
511189	Allotment Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS TNI/Polri
51119 Allotment Belanja Tunjangan-tunjangan III PNS TNI/POLRI	
511191	Allotment Belanja Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI
511192	Allotment Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS TNI/POLRI
511193	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri
511194	Allotment Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/Polri
5112 Allotment Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	
51121 Allotment Belanja Gaji TNI/POLRI	
511211	Allotment Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI
511219	Allotment Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI
51122 Allotment Belanja Tunjangan-tunjangan I TNI/POLRI	
511221	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI
511222	Allotment Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI
511223	Allotment Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI
511224	Allotment Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI
511225	Allotment Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI
511226	Allotment Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI
511227	Allotment Belanja Tunj. Kemahalan TNI/POLRI
511228	Allotment Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI
511229	Allotment Belanja Uang Makan TNI/POLRI
51123 Allotment Belanja Tunjangan-tunjangan II TNI/POLRI	
511231	Allotment Belanja Tunj. Anggota Cadangan TNI DDA TNI/POLRI
511232	Allotment Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI
511233	Allotment Belanja Tunj. Babinsa BabinkamtibmasTNI/POLRI
511234	Allotment Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI/POLRI
511235	Allotment Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/POLRI
511236	Allotment Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI
511237	Allotment Belanja Tunj. Keahlian/Keterampilan TNI/POLRI
511238	Allotment Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNI/POLRI
51124 Allotment Belanja Tunjangan-tunjangan III TNI/POLRI	
511241	Allotment Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI
511242	Allotment Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka TNI/POLRI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

511243	Allotment Belanja Tunjangan daerah terpencil/sangat terpencil TNI/Polri
511244	Allotment Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri
5113	Allotment Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara
51131	Allotment Belanja Gaji Pejabat Negara
511311	Allotment Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara
511319	Allotment Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara
51132	Allotment Belanja Tunjangan-tunjangan I Pejabat Negara
511321	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara
511322	Allotment Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara
511323	Allotment Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara
511324	Allotment Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara
511325	Allotment Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara
51133	Allotment Belanja Tunjangan-tunjangan II Pejabat Negara
511331	Allotment Belanja Tunj. Komunikasi Intensif Pejabat Negara
511332	Allotment Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara
511333	Allotment Belanja Uang Paket Harian Pejabat Negara
511334	Allotment Belanja Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan Pejabat Negara
511335	Allotment Belanja Pelayanan Sidang dan Penyelesaian Tugas Mendesak Pejabat Negara
511336	Allotment Belanja Tunjangan Pembinaan Kegiatan dan Khusus BPK Pejabat Negara
511337	Allotment Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka Pejabat Negara
5114	Allotment Belanja Gaji Dokter PTT
51141	Allotment Belanja Gaji Dokter PTT
511411	Allotment Belanja Gaji Dokter dan Bidan PTT
511412	Allotment Belanja Tunjangan Pajak PPh Dokter dan Bidan PTT
511413	Allotment Belanja Tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT
511414	Allotment Belanja Tunjangan Dokter dan Bidan PTT
5115	Allotment Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS
51151	Allotment Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS
511511	Allotment Belanja Gaji Pokok Pegawai
511512	Allotment Belanja Tunjangan Pegawai
511513	Allotment Belanja Tunjangan Lainnya
512	Allotment Belanja Honorarium/Lembur/Vakasi/Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito
5121	Allotment Belanja Honorarium
51211	Allotment Belanja Honorarium
512111	Allotment Belanja Uang Honor Tetap
512112	Allotment Belanja Uang Honor Tidak Tetap
5122	Allotment Belanja Lembur
51221	Allotment Belanja Lembur
512211	Allotment Belanja uang lembur
5123	Allotment Belanja Vakasi
51231	Allotment Belanja Vakasi
512311	Allotment Belanja Vakasi
5124	Allotment Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito
51241	Allotment Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito
512411	Allotment Belanja pegawai (Tunj. Khusus/kegiatan)
512412	Allotment Belanja Pegawai Transito



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

513 Allotment Belanja Kontribusi Sosial
5131 Allotment Belanja Pensiun dan Uang Tunggu
51311 Allotment Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS dan Pejabat Negara
513111 Allotment Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS
513112 Allotment Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara
513113 Allotment Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS TNI/Dephan
513114 Allotment Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Polri
51312 Allotment Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri
513121 Allotment Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri (Lama)
513122 Allotment Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Dephan
513123 Allotment Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Polri
51313 Allotment Belanja Tunjangan Hari Tua
513131 Allotment Belanja Tunjangan Hari Tua/Unfunded liability
5132 Allotment Belanja Asuransi Kesehatan
51321 Allotment Belanja Askes PNS/Pejabat Negara
513211 Allotment Belanja Askes PNS
513212 Allotment Belanja Askes Pejabat Negara
51322 Allotment Belanja Askes Penerima Pensiun
513221 Allotment Belanja Askes Penerima Pensiun
51323 Allotment Belanja Askes TNI/Dephan
513231 Allotment Belanja Askes TNI/Dephan
51324 Allotment Belanja Askes Polri
513241 Allotment Belanja Askes Polri
51325 Allotment Belanja Askes Veteran
513251 Allotment Belanja Askes Veteran
5133 Allotment Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran
51331 Allotment Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran
513311 Allotment Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran Non Tuvet
5134 Allotment Belanja Cadangan Perubahan Sharing
51341 Allotment Belanja Cadangan Perubahan Sharing
513411 Allotment Belanja Cadangan Perubahan Sharing
52 Allotment Belanja Barang
521 Allotment Belanja Barang
5211 Allotment Belanja Barang Operasional
52111 Allotment Belanja Barang Operasional
521111 Allotment Belanja Keperluan Perkantoran
521112 Allotment Belanja pengadaan bahan makanan
521113 Allotment Belanja untuk menambah daya tahan tubuh
521114 Allotment Belanja pengiriman surat dinas pos pusat
521119 Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya
5212 Allotment Belanja Barang Non Operasional
52121 Allotment Belanja Barang Non Operasional
521211 Allotment Belanja Bahan
521212 Allotment Belanja Barang Transit
521219 Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

522 Allotment Belanja Jasa
5221 Allotment Belanja Jasa
52211 Allotment Belanja Jasa
522111 Allotment Belanja Langganan daya dan jasa
522112 Allotment Belanja Jasa pos dan giro
522113 Allotment Belanja Jasa Konsultan
522114 Allotment Belanja Sewa
522115 Allotment Belanja Jasa Profesi
522119 Allotment Belanja Jasa Lainnya
523 Allotment Belanja Pemeliharaan
5231 Allotment Belanja Pemeliharaan
52311 Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
523111 Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
523119 Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
52312 Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
523121 Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
523129 Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
52313 Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
523131 Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
523132 Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Irigasi
523133 Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan
52319 Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya
523199 Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya
524 Allotment Belanja Perjalanan
5241 Allotment Belanja Perjalanan Dalam Negeri
52411 Allotment Belanja Perjalanan Dalam Negeri
524111 Allotment Belanja perjalanan biasa
524112 Allotment Belanja perjalanan tetap
524119 Allotment Belanja perjalanan lainnya
5242 Allotment Belanja Perjalanan Luar Negeri
52421 Allotment Belanja Perjalanan Luar Negeri
524211 Allotment Belanja perjalanan biasa
524212 Allotment Belanja perjalanan tetap
524219 Allotment Belanja perjalanan lainnya
525 Allotment Belanja Badan Layanan Umum (BLU)
5251 Allotment Belanja Barang BLU
52511 Allotment Belanja Barang dan Jasa BLU
525111 Allotment Belanja Gaji dan Tunjangan
525112 Allotment Belanja Barang
525113 Allotment Belanja Jasa
525114 Allotment Belanja Pemeliharaan
525115 Allotment Belanja Perjalanan
525119 Allotment Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU
53 Allotment Belanja Modal
531 Allotment Belanja Modal Tanah
5311 Allotment Belanja Modal Tanah
53111 Allotment Belanja Modal Tanah
531111 Allotment Belanja Modal Tanah
531112 Allotment Belanja Modal Pembebasan Tanah
531113 Allotment Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah
531114 Allotment Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

531115	Allotment Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah
531116	Allotment Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah
531117	Allotment Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
532	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5321	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin
53211	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin
532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin
532112	Allotment Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin
532113	Allotment Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
532114	Allotment Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin
532115	Allotment Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin
532116	Allotment Belanja Modal Perijinan Peralatan dan Mesin
532117	Allotment Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin
532118	Allotment Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin
533	Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5331	Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan
53311	Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan
533111	Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan
533112	Allotment Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan
533113	Allotment Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan
533114	Allotment Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan
533115	Allotment Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan
533116	Allotment Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan
533117	Allotment Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Gedung dan Bangunan
533118	Allotment Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan
534	Allotment Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
5341	Allotment Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
53411	Allotment Belanja Modal Jalan dan Jembatan
534111	Allotment Belanja Modal Jalan dan Jembatan
534112	Allotment Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan
534113	Allotment Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan jembatan
534114	Allotment Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan
534115	Allotment Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan
534116	Allotment Belanja Modal Perijinan Jalan dan Jembatan
534117	Allotment Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Jalan
534118	Allotment Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan
53412	Allotment Belanja Modal Irigasi
534122	Allotment Belanja Modal Irigasi
534122	Allotment Belanja Modal Bahan Baku Irigasi
534123	Allotment Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi
534124	Allotment Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi
534125	Allotment Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi
534126	Allotment Belanja Modal Perijinan Irigasi
534127	Allotment Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Irigasi
534128	Allotment Belanja Modal Perjalanan Irigasi
53413	Allotment Belanja Modal Jaringan
534131	Allotment Belanja Modal Jaringan
534132	Allotment Belanja Modal Bahan Baku Jaringan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

534133	Allotment Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan
534134	Allotment Belanja Modal Sewa Peralatan Jaringan
534135	Allotment Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan
534136	Allotment Belanja Modal Perijinan Jaringan
534137	Allotment Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Jaringan
534138	Allotment Belanja Modal Perjalanan Jaringan
535	Allotment Belanja Pemeliharaan Yang Dikapitalisasi
5351	Allotment Belanja Pemeliharaan Yang Dikapitalisasi
53511	Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Yang Dikapitalisasi
535111	Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Yang Dikapitalisasi
535119	Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya Yang
53512	Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Yang Dikapitalisasi
535121	Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Yang Dikapitalisasi
535129	Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dikapitalisasi
53513	Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan Yang Dikapitalisasi
535131	Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Yang Dikapitalisasi
535132	Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Irigasi Yang Dikapitalisasi
535139	Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan Yang Dikapitalisasi
53519	Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya Yang Dikapitalisasi
535199	Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya Yang Dikapitalisasi
536	Allotment Belanja Modal Fisik Lainnya
5361	Allotment Belanja Modal Fisik Lainnya
53611	Allotment Belanja Modal Fisik Lainnya
536111	Allotment Belanja Modal Fisik Lainnya
5362	Allotment Belanja Dana Bergulir
53621	Allotment Belanja Dana Bergulir
536211	Allotment Belanja Dana Bergulir
537	Allotment Belanja Badan Layanan Umum (BLU)
5371	Allotment Belanja Modal BLU
53711	Allotment Belanja Modal BLU
537111	Allotment Belanja Modal Tanah
537112	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin
537113	Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan
537114	Allotment Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
537115	Allotment Belanja Modal Fisik Lainnya
54	Allotment Belanja Pembayaran Kewajiban Utang
541	Allotment Belanja Pembayaran Bunga Utang
5411	Allotment Belanja Pembayaran Bunga Utang DN – Jangka Pendek
54111	Allotment Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara
541111	Allotment Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara – Rupiah
541119	Allotment Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Surat Perbendaharaan Negara
5412	Allotment Belanja Pembayaran Bunga Utang DN – Jangka Panjang
54121	Allotment Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara
541211	Allotment Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Rupiah
541219	Allotment Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Obligasi Negara
54122	Allotment Belanja Pembayaran Bunga Dalam Negeri Jangka Panjang Lainnya
541221	Allotment Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan
541229	Allotment Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Obligasi Negara lainnya
5413	Allotment Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri
54131	Allotment Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

541311	Allotment Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang
541312	Allotment Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Panjang
54132	Allotment Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek
541321	Allotment Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek
541322	Allotment Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Pendek
5414	Allotment Belanja Pembayaran Bunga Utang LN – Jangka Panjang
54141	Allotment Belanja Bunga Pinjaman program
541411	Allotment Belanja Bunga Pinjaman Program
541419	Allotment Belanja Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program
54142	Allotment Belanja Bunga Pinjaman proyek
541421	Allotment Belanja Bunga Pinjaman Proyek
541429	Allotment Belanja Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek
54143	Allotment Belanja Bunga Obligasi Negara
541431	Allotment Belanja Bunga Obligasi Negara – Valas
541439	Allotment Belanja Biaya/kewajiban lainnya – Bunga Obligasi Negara
54144	Allotment Belanja Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman
541441	Allotment Belanja Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Program
541442	Allotment Belanja Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Proyek
541449	Allotment Belanja Biaya/kewajiban lainnya – Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman
54145	Allotment Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara
541451	Allotment Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara – Valuta Asing
541459	Allotment Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Surat Perbendaharaan Negara
5415	Allotment Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri
54151	Allotment Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang
541511	Allotment Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang - Valas
541519	Allotment Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Panjang - Valas
54152	Allotment Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek
541521	Allotment Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek - Valas
541529	Allotment Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Pendek - Valas
5421	Allotment Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri
54211	Allotment Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri
542111	Allotment Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri
542119	Allotment Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri
54212	Allotment Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri
542121	Allotment Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri
542129	Allotment Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount Obligasi Negara Dalam Negeri



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

54311 Allotment Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri
543111 Allotment Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri
543119 Allotment Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri
54312 Allotment Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri
543121 Allotment Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri
543129 Allotment Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount Obligasi Negara Luar Negeri
5441 Allotment Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Dalam Negeri
54411 Allotment Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Dalam Negeri
544111 Allotment Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Dalam Negeri
5451 Allotment Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri
54511 Allotment Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Panjang
545111 Allotment Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Panjang
545119 Allotment Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount SBSN Jangka Panjang
54512 Allotment Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Pendek
545121 Allotment Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Pendek
545129 Allotment Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount SBSN Jangka Pendek
5461 Allotment Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri
54611 Allotment Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Panjang
546111 Allotment Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Panjang - Valas
546119 Allotment Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount SBSN Jangka Panjang - Valas
54612 Allotment Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Pendek
546111 Allotment Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Pendek - Valas
546119 Allotment Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount SBSN Jangka Pendek - Valas
5471 Allotment Belanja Pembayaran Denda
54711 Allotment Belanja Pembayaran Imbalan Bunga
547111 Allotment Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Pajak (SPM-IB Pajak)
547112 Allotment Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan
547113 Allotment Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Bea dan Cukai (SPM-IB Bea dan Cukai)
547119 Allotment Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Bunga Dalam Negeri Jangka Pendek Lainnya
55 Allotment Belanja Subsidi
551 Allotment Belanja Subsidi Perusahaan Negara
5511 Allotment Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
55111 Allotment Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
551111 Allotment Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
5512 Allotment Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan – BBM
55121 Allotment Belanja Subsidi BBM
551211 Allotment Belanja Subsidi Avgas
551212 Allotment Belanja Subsidi Avtur



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

551213	Allotment Belanja Subsidi Premium
551214	Allotment Belanja Subsidi Minyak Bakar
551215	Allotment Belanja Subsidi Minyak Solar
551216	Allotment Belanja Subsidi Minyak Diesel
551217	Allotment Belanja Subsidi Minyak Tanah
551218	Allotment Belanja Subsidi Elpiji
5513	Allotment Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan – Non BBM
55131	Allotment Belanja Subsidi Non-BBM – Harga/Biaya
551311	Allotment Belanja Subsidi pangan
551312	Allotment Belanja Subsidi listrik
551313	Allotment Belanja Subsidi benih
551314	Allotment Belanja Subsidi obat
551315	Allotment Belanja Subsidi gula
551316	Allotment Belanja Subsidi pupuk
551317	Allotment Belanja Subsidi perawatan beras
551318	Allotment Belanja Subsidi pengawasan pupuk
551319	Allotment Belanja Subsidi harga/biaya lainnya
55132	Allotment Belanja Subsidi Non-BBM – Pajak
551321	Allotment Belanja Subsidi PPh
551322	Allotment Belanja Subsidi PPN
551323	Allotment Belanja Subsidi BM
55133	Allotment Belanja Subsidi Non-BBM – Lainnya
551331	Allotment Belanja Subsidi haji
551332	Allotment Belanja Subsidi kendaraan bermotor
551339	Allotment Belanja Subsidi lainnya
5514	Allotment Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan – PSO
55141	Allotment Belanja Subsidi dalam rangka PSO
551411	Allotment Belanja Subsidi PT KAI
551412	Allotment Belanja Subsidi PT PELNI
551413	Allotment Belanja Subsidi PT Pos Indonesia
551414	Allotment Belanja Subsidi TVRI
551415	Allotment Belanja Subsidi BULOG
551419	Allotment Belanja Subsidi dalam rangka PSO Lainnya
552	Allotment Belanja Subsidi Perusahaan Swasta
5521	Allotment Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
55211	Allotment Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
552111	Allotment Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
55212	Allotment Belanja Subsidi – Bunga Kredit
552121	Allotment Belanja Subsidi Bunga KUT
552122	Allotment Belanja Subsidi Bunga KOP PIR
552123	Allotment Belanja Subsidi Bunga KOP
552124	Allotment Belanja Subsidi Bunga KOP PRIM
552125	Allotment Belanja Subsidi Bunga KPR
552126	Allotment Belanja Subsidi Bunga Ketahanan Pangan
552129	Allotment Belanja Subsidi Bunga kredit program lainnya
5522	Allotment Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan
55221	Allotment Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan
552211	Allotment Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan
56	Allotment Belanja Hibah
561	Allotment Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

5611 Allotment Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
56111 Allotment Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
561111 Allotment Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
562 Allotment Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
5621 Allotment Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
56211 Allotment Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
562111 Allotment Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
563 Allotment Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
5631 Allotment Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
56311 Allotment Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
563111 Allotment Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
57 Allotment Belanja Bantuan sosial
571 Allotment Belanja Bantuan kompensasi sosial
5711 Allotment Belanja Bantuan kompensasi sosial
57111 Allotment Belanja Bantuan kompensasi sosial
571111 Allotment Belanja Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM
572 Allotment Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan dan Peribadatan
5721 Allotment Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan
57211 Allotment Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan
572111 Allotment Belanja Bantuan Langsung (Block Grant) Sekolah/Lembaga/Guru
572112 Allotment Belanja Bantuan Imbal Swadaya Sekolah/Lembaga
572113 Allotment Belanja Bantuan Beasiswa
5722 Allotment Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan
57221 Allotment Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan
572211 Allotment Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan
573 Allotment Belanja Lembaga Sosial Lainnya
5731 Allotment Belanja Lembaga Sosial Lainnya
57311 Allotment Belanja Lembaga Sosial Lainnya
573111 Allotment Belanja Lembaga Sosial Lainnya
58 Allotment Belanja Lain-lain
581 Allotment Belanja Lain-lain
5811 Allotment Belanja Lain-lain
58111 Allotment Belanja Rekonstruksi Aceh
581111 Allotment Belanja untuk Rekonstruksi Aceh
58112 Allotment Belanja Lain-lain I
581121 Allotment Belanja Kerjasama Teknis Internasional
581122 Allotment Belanja Pengeluaran Tak Terduga
581123 Allotment Belanja Cadangan Umum
581124 Allotment Belanja Pemilu tahunan
581125 Allotment Belanja Cadangan tunjangan beras PNS/TNI/Polri
581126 Allotment Belanja Cadangan dana reboisasi
581127 Allotment Belanja Tunggakan dan klaim pihak ketiga
581128 Allotment Belanja Dana Cadangan Tanggap Darurat (Dana Kontijensi)
58113 Allotment Belanja Lain-lain II
581131 Allotment Belanja DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk DJP
581132 Allotment Belanja KONI
581133 Allotment Belanja Dana Penunjang (PHLN) yang dialokasikan untuk Pemda
581134 Allotment Belanja Non Modal-Otorita Batam



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

581135	Allotment Belanja karena rugi selisih kurs
581136	Allotment Jasa Surveyor
581137	Allotment Jasa Perbendaharaan
581138	Allotment Jasa Pelayanan Bank Operasional
58114	Allotment Belanja Lain-lain III
581141	Allotment Belanja TVRI
581142	Allotment Belanja RRI
581149	Allotment Belanja lain-lain
KELOMPOK TRANSFER KE DAERAH	
6 Transfer TRANSFER KE DAERAH	
61 Allotment Transfer Dana Perimbangan	
611 Allotment Transfer Dana Bagi Hasil	
6111 Allotment Transfer Dana Bagi Hasil Pajak	
61111 Allotment Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan	
611111	Allotment Transfer DBH PPh ps1 21 untuk Propinsi
611112	Allotment Transfer DBH PPh ps1 21 untuk Kabupaten/Kota
611113	Allotment Transfer DBH PPh ps1 25/29 OP untuk Propinsi
611114	Allotment Transfer DBH PPh ps1 25/29 OP untuk Kabupaten/Kota
61112 Allotment Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	
611121	Allotment Transfer DBH PBB untuk Propinsi
611122	Allotment Transfer DBH PBB untuk Kabupaten/Kota
611123	Allotment Transfer DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi
611124	Allotment Transfer DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kab./Kota
611125	Allotment Transfer DBH bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Kabupaten/Kota
61113 Allotment Transfer Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	
611131	Allotment Transfer DBH BPHTB untuk Propinsi
611132	Allotment Transfer DBH BPHTB untuk Kabupaten/Kota
611133	Allotment Transfer DBH BPHTB bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Kabupaten/Kota
6112 Allotment Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	
61121 Allotment Transfer Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	
611211	Allotment Transfer DBH minyak bumi untuk Propinsi
611212	Allotment Transfer DBH minyak bumi untuk Kab./Kota Penghasil
611213	Allotment Transfer DBH minyak bumi untuk Kab./Kota lainnya
61122 Allotment Transfer Dana Bagi Hasil Gas Bumi	
611221	Allotment Transfer DBH Gas Bumi untuk Propinsi
611222	Allotment Transfer DBH Gas Bumi untuk Kab./Kota Penghasil
611223	Allotment Transfer DBH Gas Bumi untuk Kab./Kota lainnya
61123 Allotment Transfer Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum	
611231	Allotment Transfer DBH iuran tetap untuk Propinsi
611232	Allotment Transfer DBH iuran tetap untuk Kab./Kota
611233	Allotment Transfer DBH royalti untuk Propinsi
611234	Allotment Transfer DBH royalti untuk Kab./Kota Penghasil
611235	Allotment Transfer DBH royalti untuk Kab/kota Lainnya
61124 Allotment Transfer Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi	
611241	Allotment Transfer DBH Setoran bagian pemerintah untuk Propinsi
611242	Allotment Transfer DBH Setoran bagian pemerintah untuk Kab./Kota Penghasil



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

611243	Allotment Transfer DBH Setoran bagian pemerintah untuk Kab./Kota Lainnya
611244	Allotment Transfer DBH iuran tetap dan iuran produksi untuk Propinsi
611245	Allotment Transfer DBH iuran tetap dan iuran produksi untuk Kab./Kota Penghasil
611246	Allotment Transfer DBH iuran tetap dan iuran produksi untuk Kab./Kota Lainnya
61125	Allotment Transfer Dana bagi Hasil Kehutanan
611251	Allotment Transfer DBH IIUPH/IHPH untuk Propinsi
611252	Allotment Transfer DBH IIUPH/IHPH untuk Kab./Kota
611253	Allotment Transfer DBH PSDH untuk Propinsi
611254	Allotment Transfer DBH PSDH untuk Kab./Kota Penghasil
611255	Allotment Transfer DBH PSDH untuk Kab./Kota lainnya
611256	Allotment Transfer DBH Dana Reboisasi untuk Propinsi
611257	Allotment Transfer DBH Dana Reboisasi untuk Kab./Kota Penghasil
61125	Allotment Transfer Dana Bagi Hasil Perikanan
611251	Allotment Transfer DBH Perikanan untuk Kab./Kota
612	Allotment Transfer Dana Alokasi Umum
6121	Allotment Transfer Dana Alokasi Umum
61211	Allotment Transfer Dana Alokasi Umum
612111	Allotment Transfer DAU untuk Propinsi
612112	Allotment Transfer DAU untuk Kabupaten/Kota
613	Allotment Transfer Dana Alokasi Khusus
6131	Allotment Transfer DAK
61311	Allotment Transfer DAK Pendidikan
613111	Allotment Transfer DAK untuk Pendidikan
61312	Allotment Transfer DAK Kesehatan
613121	Allotment Transfer DAK untuk Kesehatan
61313	Allotment Transfer DAK Infrastruktur
613131	Allotment Transfer DAK untuk Infrastruktur
61314	Allotment Transfer DAK Prasarana Pemerintahan
613141	Allotment Transfer DAK untuk Prasarana Pemerintahan
61315	Allotment Transfer DAK Kelautan dan Perikanan
613151	Allotment Transfer DAK untuk Kelautan dan Perikanan
61316	Allotment Transfer DAK Pertanian
613161	Allotment Transfer DAK untuk Pertanian
61317	Allotment Transfer DAK Lingkungan Hidup
613171	Allotment Transfer DAK untuk Lingkungan Hidup
62	Allotment Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
621	Allotment Transfer Dana Otonomi Khusus
6211	Allotment Transfer Dana Otonomi Khusus
62111	Allotment Transfer Dana Otonomi Khusus
621111	Allotment Transfer Dana Otonomi Khusus untuk Papua
621112	Allotment Transfer Dana Otonomi Khusus untuk NAD
621113	Allotment Transfer Dana Otonomi Khusus tambahan infrastruktur untuk Papua



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

622 Allotment Transfer Dana Penyesuaian	
6221 Allotment Transfer Dana Penyesuaian	
62211 Allotment Transfer Dana Penyesuaian	
622111	Allotment Transfer Dana Penyesuaian untuk Propinsi
622112	Allotment Transfer Dana Penyesuaian untuk Kabupaten/Kota
622119	Allotment Transfer Dana Penyesuaian untuk Kabupaten/Kota Lainnya



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

AKUN DIPA

7	Estimasi Penerimaan Pembiayaan yang dialokasikan
71	Estimasi Penerimaan Pembiayaan yang dialokasikan
711	Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri yang dialokasikan
7111	Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan yang dialokasikan
71111	Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan yang dialokasikan
711111	Estimasi Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang dialokasikan
711112	Estimasi Penerimaan Pembiayaan dari Rekening Dana Investasi yang dialokasikan
711113	Estimasi Penerimaan Pembiayaan dari Rekening BUN untuk Obligasi yang dialokasikan
71112	Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan Dana Moratorium yang dialokasikan
711121	Estimasi Penerimaan Pembiayaan dari Dana Eks Moratorium Pokok untuk Cadangan Aceh yang dialokasikan
7112	Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Non-Perbankan yang dialokasikan
71121	Estimasi Penerimaan Hasil Privatisasi yang dialokasikan
711211	Estimasi Penerimaan Hasil Privatisasi yang dialokasikan
7113	Estimasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi yang dialokasikan
71131	Estimasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi yang dialokasikan
711311	Estimasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi yang dialokasikan
711312	Estimasi Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN yang dialokasikan
7114	Estimasi Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara/Obligasi yang dialokasikan
71141	Estimasi Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri yang dialokasikan
711441	Estimasi Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Perbendaharaan Negara yang dialokasikan
71142	Estimasi Penerimaan dari Penjualan Obligasi Negara Dalam Negeri yang dialokasikan
711421	Estimasi Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara Dalam Negeri yang dialokasikan
711422	Estimasi Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri yang dialokasikan
71143	Estimasi Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri - Jangka Pendek yang dialokasikan
711431	Estimasi Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN - Jangka Pendek yang dialokasikan
71144	Estimasi Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri - Jangka Panjang yang dialokasikan
711441	Estimasi Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN - Jangka Panjang yang dialokasikan
711442	Estimasi Penerimaan Imbalan dibayar di muka SBSN - Jangka Panjang yang dialokasikan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

712 Estimasi Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri yang dialokasikan
7121 Estimasi Penarikan Pinjaman Program yang dialokasikan
71211 Estimasi Penarikan Pinjaman Program Bilateral yang dialokasikan
712111 Estimasi Penarikan Pinjaman Program dari OECF yang dialokasikan
712112 Estimasi Penarikan Pinjaman Program Bilateral Lainnya yang dialokasikan
71212 Estimasi Penarikan Pinjaman Program Multilateral yang dialokasikan
712121 Estimasi Penarikan Pinjaman Program dari IBRD yang dialokasikan
712122 Estimasi Penarikan Pinjaman Program dari ADB yang dialokasikan
712123 Estimasi Penarikan Pinjaman Program Multilateral Lainnya yang dialokasikan
7122 Estimasi Penarikan Pinjaman Proyek yang dialokasikan
71221 Estimasi Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral yang dialokasikan
712211 Estimasi Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral yang dialokasikan
71222 Estimasi Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral yang dialokasikan
712221 Estimasi Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral yang dialokasikan
71223 Estimasi Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor yang dialokasikan
712231 Estimasi Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor yang dialokasikan
71224 Estimasi Penarikan Pinjaman Proyek Leasing yang dialokasikan
712241 Estimasi Penarikan Pinjaman Proyek Leasing yang dialokasikan
71225 Estimasi Penarikan Pinjaman Proyek Komersial yang dialokasikan
712251 Estimasi Penarikan Pinjaman Proyek Komersial yang dialokasikan
71229 Estimasi Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya yang dialokasikan
712291 Estimasi Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya yang dialokasikan
7123 Estimasi Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara
71231 Estimasi Penerimaan Obligasi Negara Luar Negeri yang dialokasikan
712311 Estimasi Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara - Valas yang dialokasikan
712312 Estimasi Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara - Valas yang dialokasikan
71232 Estimasi Penerimaan Surat Perbendaharaan Negara - Valas yang dialokasikan
712321 Estimasi Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Perbendaharaan Negara - Valas yang dialokasikan
71233 Estimasi Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri - Jangka Pendek yang dialokasikan
712331 Estimasi Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN Valas - Jangka Pendek yang dialokasikan
71234 Estimasi Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri - Jangka Panjang yang dialokasikan
712341 Estimasi Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN Valas - Jangka Panjang yang dialokasikan
712342 Estimasi Penerimaan Imbalan dibayar di muka SBSN Valas - Jangka Panjang yang dialokasikan
713 Estimasi Penerimaan dari Penjadwalan Kembali Pokok Utang Luar Negeri yang dialokasikan
7131 Estimasi Penerimaan dari Penjadwalan Kembali Pokok Utang Luar Negeri yang dialokasikan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

71311	Estimasi Penerimaan Pinjaman Program dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri yang dialokasikan
713111	Estimasi Penerimaan Pinjaman Program dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri yang dialokasikan
71312	Estimasi Penerimaan Pinjaman Proyek dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri yang dialokasikan
713121	Estimasi Penerimaan Pinjaman Proyek dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri yang dialokasikan
714	Estimasi Penerimaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri yang dialokasikan
7141	Estimasi Penerimaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri yang dialokasikan
71411	Estimasi Penjadualan Kembali Bunga Utang Pinjaman Luar Negeri yang dialokasikan
714111	Estimasi Penerimaan Pembiayaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri yang dialokasikan
715	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman yang dialokasikan
7151	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri yang dialokasikan
71511	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri yang dialokasikan
715111	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman dalam Negeri kepada Pemda yang dialokasikan
715112	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman dalam Negeri kepada BUMD yang dialokasikan
715113	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman dalam Negeri Kepada BUMN yang dialokasikan
715114	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman dalam Negeri Kepada Non Pemerintah yang dialokasikan
7152	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri yang dialokasikan
71521	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Tahun Anggaran Berjalan yang dialokasikan
715211	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar negeri TAB kepada Daerah yang dialokasikan
715212	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri TAB kepada BUMD yang dialokasikan
715213	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri TAB kepada BUMN yang dialokasikan
71522	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Tahun Anggaran Lalu yang dialokasikan
715221	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri TAYL kepada Daerah yang dialokasikan
715222	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri TAYL kepada BUMD yang dialokasikan
715223	Estimasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri TAYL kepada BUMN yang dialokasikan
719	Estimasi Penerimaan Pembiayaan Lain-lain yang dialokasikan
7191	Estimasi Penerimaan Pembiayaan Lain-lain yang dialokasikan
71911	Estimasi Penerimaan Pembiayaan Lain-lain yang dialokasikan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

719111	Estimasi Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs yang dialokasikan
719112	Estimasi Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening KUN Rekening Valuta USD Karena Selisih Kurs yang dialokasikan
72	Allotment Pengeluaran Pembiayaan
721	Allotment Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri
7211	Allotment Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan
72111	Allotment Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan
721111	Allotment Pembayaran Pinjaman Kredit Jangka Pendek dan uang Muka dari Sektor Perbankan
721112	Allotment Pengeluaran Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek Perbankan
72112	Allotment Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan untuk Moratorium
721121	Allotment Pengeluaran Pembiayaan Eks Moratorium Pokok untuk Cadangan Aceh
7212	Allotment Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Non-Perbankan
72121	Allotment Pengeluaran untuk Program Restrukturisasi
721211	Allotment Pengeluaran untuk Program Restrukturisasi
7213	Allotment Pengeluaran untuk Pembayaran/Pelunasan Surat Utang Negara/Obligasi
72131	Allotment Pengeluaran untuk Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara
721331	Allotment Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara
	Allotment Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara melalui
721332	Pembelian Kembali
72132	Allotment Pengeluaran untuk Pelunasan Obligasi Dalam Negeri
721321	Allotment Pengeluaran Pelunasan Obligasi Dalam Negeri
	Allotment Pengeluaran Pelunasan Obligasi Dalam Negeri melalui Pembelian
721322	Kembali
721324	Allotment Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri
72133	Allotment Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri - Jangka Pendek
721331	Allotment Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek
721332	Allotment Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek melalui Pembelian Kembali
72134	Allotment Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri - Jangka Panjang
721341	Allotment Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang
721342	Allotment Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali
721343	Allotment Pembayaran Imbalan dibayar di muka SBSN - Jangka Panjang
722	Allotment Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri
7221	Allotment Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri
72211	Allotment Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Program
722111	Allotment Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok (Amortisasi) Utang Luar Negeri – Pinjaman Program
722112	Allotment Pengeluaran Cicilan Pokok Utang LN Pinjaman Program
7222	Allotment Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Proyek
72222	Allotment Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Proyek



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

722221	Allotment Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Proyek
722222	Allotment Pengeluaran Cicilan Pokok Utang LN Pinjaman Proyek
7223	Allotment Pengeluaran untuk Pelunasan Surat Berharga Negara
72231	Allotment Pengeluaran untuk Pelunasan Obligasi Negara Luar Negeri - Valas
722311	Allotment Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara Luar Negeri
	Allotment Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara Luar Negeri - melalui
722312	Pembelian Kembali
722313	Allotment Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Luar Negeri
72232	Allotment Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri - Valas
722321	Allotment Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara - Valas
	Allotment Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara - melalui
722322	Pembelian Kembali
	Allotment Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri -
72233	Jangka Pendek
722331	Allotment Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Pendek
722332	Allotment Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Pendek melalui Pembelian Kembali
	Allotment Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri -
72234	Jangka Panjang
722341	Allotment Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Panjang
722342	Allotment Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali
722343	Allotment Pembayaran Imbalan dibayar di muka Surat Berharga Syariah Negara Valas- Jangka Panjang
723	Allotment Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali
	Allotment Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali – Pinjaman
7231	Program
72311	Allotment Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Program
723111	Allotment Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Program
	Allotment Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali – Pinjaman
7232	Proyek
72321	Allotment Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Proyek
723211	Allotment Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Proyek
	Allotment Pelunasan Bunga Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali – Pinjaman
7233	Proyek
72331	Allotment Pengeluaran penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
723311	Allotment Pengeluaran penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
724	Allotment Penyertaan Modal Negara
7241	Allotment Penyertaan Modal Negara pada BUMN
72411	Allotment Penyertaan Modal Negara pada BUMN
724111	Allotment PMN untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
7242	Allotment Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional
72421	Allotment Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional
724211	Allotment PMN untuk Badan Internasional
7243	Allotment Penyertaan Modal Negara Lainnya



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

72431 Allotment Penyertaan Modal Lainnya
724311 Allotment Penyertaan Modal Lainnya
724312 Allotment Penyertaan Modal Pemerintah SMF
72432 Allotment Penyertaan Modal Negara untuk Dukungan Infrastruktur
724321 Allotment Penyertaan Modal Negara untuk Dukungan Infrastruktur
725 Allotment Penerusan Pinjaman
7251 Allotment Penerusan Pinjaman Dalam Negeri RDI/RPD
72511 Allotment Penerusan Pinjaman Dalam Negeri
725111 Allotment Penerusan Pinjaman dalam Negeri kepada Pemda
725112 Allotment Penerusan Pinjaman dalam Negeri kepada BUMD
725113 Allotment Penerusan Pinjaman dalam Negeri Kepada BUMN
725114 Allotment Penerusan Pinjaman dalam Negeri Kepada Non Pemerintah
7252 Allotment Penerusan Pinjaman Luar Negeri
72521 Allotment Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan
725211 Allotment Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah Tahun Anggaran Berjalan
725212 Allotment Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMD Tahun Anggaran Berjalan
725213 Allotment Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMN Tahun Anggaran Berjalan
72522 Allotment Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu
725221 Allotment Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah Th. Anggaran Yang Lalu
725222 Allotment Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMD Tahun Anggaran Yang Lalu
725222 Allotment Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMN Tahun Anggaran Yang Lalu
726 Allotment Penyertaan Modal Negara untuk Dukungan Infrastruktur
7261 Allotment Penyertaan Modal Negara untuk Dukungan Infrastruktur
72611 Allotment Penyertaan Modal Negara untuk Dukungan Infrastruktur
726111 Allotment Penyertaan Modal Negara untuk Dukungan Infrastruktur
729 Allotment Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain
7291 Allotment Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain
72911 Allotment Penyesuaian Rekening Karena Selisih Kurs
729111 Allotment Penyesuaian Penurunan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs
729112 Allotment Penyesuaian Penurunan Saldo Rekening KUN dalam Valuta USD karena Selisih Kurs



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN KEDELAPAN

DAFTAR

PENJELASAN AKUN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR PENJELASAN AKUN

4	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
41	Penerimaan Perpajakan
411	Pendapatan Pajak Dalam Negeri
4111	Pendapatan Pajak penghasilan
41111	Pendapatan PPh Migas
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi
	Penerimaan yang berasal dari PPh minyak bumi yang terdiri dari :
	· Setoran PPh Minyak Bumi,
	· Surat Tagihan Pajak (STP),
	· SKPKB PPh Minyak Bumi dan,
	· SKPKBT PPh Minyak Bumi.
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi
	Kode MAP ini digunakan untuk menampung penerimaan ke kas negara yang berasal PPh gas alam yang terdiri dari :
	· Setoran PPh Gas Bumi,
	· Surat Tagihan Pajak (STP),
	· SKPKB PPh Gas Bumi dan,
	· SKPKBT PPh Gas Bumi.
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya
	Penerimaan yang berasal dari PPh Lainnya yang dihasilkan dari kegiatan penambangan Gas Alam, yang terdiri dari :
	· Setoran PPh Lainnya dari Gas Bumi,
	· Surat Tagihan Pajak (STP) Lainnya dari Gas Bumi,
	· SKPKB PPh Lainnya dari Gas Bumi dan,
	· SKPKBT PPh Lainnya dari Gas Bumi.
41112	Pendapatan PPh Non-Migas
411121	Pendapatan PPh Pasal 21
	Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:
	Masa/Angsuran Tahunan
	· Surat Tagihan Pajak (STP)
	· PPh Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon.
	· Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
	· SKPKB PPh Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon
	· Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dan,
	· SKPKBT PPh Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang pesangon
411122	Pendapatan PPh Pasal 22
	Penerimaan dari transaksi dalam negeri yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:
	· Masa,
	· PPh Penebusan Migas,
	· PPh Penyerahan Rokok Produksi Dalam Negeri



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

	<ul style="list-style-type: none">· PPh yang dipungut Bendaharawan,
	<ul style="list-style-type: none">· PPh yang dipungut Badan Pemungut Lainnya,
	<ul style="list-style-type: none">· Surat Tagihan Pajak (STP),
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKB,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKB PPh Penebusan Migas,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKB PPh Penyerahan Rokok Produksi Dalam Negeri,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKBT,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKBT PPh Penebusan Migas dan,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKBT PPh Penyerahan Rokok Produksi Dalam Negeri,
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor
	Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah dirubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:
	<ul style="list-style-type: none">· Masa,
	<ul style="list-style-type: none">· Surat Tagihan Pajak (STP),
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKB,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKBT
411124	Pendapatan PPh Pasal 23
	Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah dirubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:
	<ul style="list-style-type: none">· Masa,
	<ul style="list-style-type: none">· Dividen,
	<ul style="list-style-type: none">· Bunga,
	<ul style="list-style-type: none">· Royalti,
	<ul style="list-style-type: none">· Jasa,
	<ul style="list-style-type: none">· PPh Bunga Simpanan Anggota Koperasi,
	<ul style="list-style-type: none">· Surat Tagihan Pajak (STP),
	<ul style="list-style-type: none">· STP Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKB,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKB Dividen, Bunga Royalti dan Jasa,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKB PPh Bunga Simpanan Anggota Koperasi,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKBT,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKBT Dividen, Bunga, Royalti dan Jasa, dan
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKBT PPh Bunga Simpanan Anggota Koperasi,
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi
	Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 29 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:
	<ul style="list-style-type: none">· Masa/Angsuran,
	<ul style="list-style-type: none">· Tahunan,
	<ul style="list-style-type: none">· Surat Tagihan Pajak (STP),
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKB dan,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKBT.
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan
	Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 29 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:
	<ul style="list-style-type: none">· Masa/Angsuran,
	<ul style="list-style-type: none">· Tahunan,



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

	<ul style="list-style-type: none">· Surat Tagihan Pajak (STP),
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKB dan,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKBT.
411127	Pendapatan PPh Pasal 26
	Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:
	<ul style="list-style-type: none">· Masa/Angsuran,
	<ul style="list-style-type: none">· Dividen,
	<ul style="list-style-type: none">· Bunga,
	<ul style="list-style-type: none">· Royalti,
	<ul style="list-style-type: none">· Jasa,
	<ul style="list-style-type: none">· Laba setelah pajak BUT
	<ul style="list-style-type: none">· Surat Tagihan Pajak (STP),
	<ul style="list-style-type: none">· STP Dividen, Bunga, Royalti, Jasa dan Laba setelah pajak BUT,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKB,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKB Dividen, Bunga Royalti, Jasa dan Laba setelah pajak BUT,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKBT dan,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKBT Dividen, Bunga, Royalti, Jasa dan Laba setelah pajak BUT.
411128	Pendapatan PPh Final
	Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 29 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:
	<ul style="list-style-type: none">· Fiskal Luar Negeri,
	<ul style="list-style-type: none">· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Diskonto/Bunga Obligasi Orang Pribadi
	<ul style="list-style-type: none">· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan OP
	<ul style="list-style-type: none">· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Persewaan Tanah dan/atau Bangunan Orang Pribadi
	<ul style="list-style-type: none">· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Bunga Deposito/Tabungan dan SBI Orang Pribadi
	<ul style="list-style-type: none">· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Hadiah Undian Orang Pribadi
	<ul style="list-style-type: none">· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Transaksi saham dan obligasi di Burse Efek Orang Pribadi
	<ul style="list-style-type: none">· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Penjualan Saham Pendiri Orang Pribadi
	<ul style="list-style-type: none">· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura OP
	<ul style="list-style-type: none">· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Jasa Konstruksi Orang Pribadi
	<ul style="list-style-type: none">· PPh Final Pasal 15 Jasa Pelayaran Dalam Negeri Orang Pribadi
	<ul style="list-style-type: none">· PPh Final Pasal 15 Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri Orang Pribadi
	<ul style="list-style-type: none">· PPh Final Pasal 15 Jasa Penerbangan Dalam Negeri Orang Pribadi
	<ul style="list-style-type: none">· PPh Final Pasal 15 Penghasilan Perwakilan Dagang LN Orang Pribadi
	<ul style="list-style-type: none">· PPh Final Pasal 15 Pola Bagi Hasil Orang Pribadi
	<ul style="list-style-type: none">· PPh Final Pasal 15 Kerjasama Bentuk BOT Orang Pribadi
	<ul style="list-style-type: none">· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Diskonto/Bunga Obligasi Badan
	<ul style="list-style-type: none">· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Badan
	<ul style="list-style-type: none">· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Persewaan Tanah dan/atau Bangunan Badan
	<ul style="list-style-type: none">· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Bunga Deposito/Tabungan dan SBI Badan
	<ul style="list-style-type: none">· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Hadiah Undian Badan
	<ul style="list-style-type: none">· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Transaksi saham dan obligasi di Burse Efek Badan
	<ul style="list-style-type: none">· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Penjualan Saham Pendiri Badan
	<ul style="list-style-type: none">· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura Badan
	<ul style="list-style-type: none">· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Jasa Konstruksi Badan
	<ul style="list-style-type: none">· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Jasa Konsultasi Badan
	<ul style="list-style-type: none">· PPh Final Pasal 15 Jasa Pelayaran Dalam Negeri Badan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

	<ul style="list-style-type: none">· PPh Final Pasal 15 Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri Badan
	<ul style="list-style-type: none">· PPh Final Pasal 15 Jasa Penerbangan Dalam Negeri Badan
	<ul style="list-style-type: none">· PPh Final Pasal 15 Penghasilan Perwakilan Dagang LN Badan
	<ul style="list-style-type: none">· PPh Final Pasal 15 Pola Bagi Hasil Badan
	<ul style="list-style-type: none">· PPh Final Pasal 15 Kerjasama Bentuk BOT Badan
	<ul style="list-style-type: none">· PPh Final Pasal 19 Revaluasi Aktiva Tetap Badan
	<ul style="list-style-type: none">· PPh Final Lainnya
	<ul style="list-style-type: none">· Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Final,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2) Orang Pribadi,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2) Badan,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKB PPh Final Pasal 15 Orang Pribadi,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKB PPh Final Pasal 15 Badan,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKB PPh Final Pasal 19 Badan
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat (2) Orang Pribadi,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat (2) Badan,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKBT PPh Final Pasal 15 Orang Pribadi,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKBT PPh Final Pasal 15 Badan,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKBT PPh Final Pasal 19 Badan
411129	Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya
	Penerimaan yang berasal dari PPh, selain yang dihasilkan dari kegiatan penambangan minyak bumi, yang terdiri dari :
	<ul style="list-style-type: none">· Setoran PPh Lainnya dari Minyak Bumi,
	<ul style="list-style-type: none">· Surat Tagihan Pajak (STP) Lainnya dari Minyak Bumi,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKB PPh Lainnya dari Minyak Bumi dan,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKBT PPh Lainnya dari Minyak Bumi.
	Penerimaan yang berasal dari PPh, selain yang dihasilkan dari kegiatan penambangan Gas Alam, yang terdiri dari :
	<ul style="list-style-type: none">· Setoran PPh Lainnya dari Gas Alam,
	<ul style="list-style-type: none">· Surat Tagihan Pajak (STP) Lainnya dari Gas Alam,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKB PPh Lainnya dari Gas Alam dan,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKBT PPh Lainnya dari Gas Alam.
41113	Pendapatan PPH Fiskal
411131	Pendapatan PPH Fikal Luar Negeri
	Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 29 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran Fiskal Luar Negeri,
4112	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai
41121	Pendapatan PPN
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri
	Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 18 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:
	<ul style="list-style-type: none">· Setoran Masa,
	<ul style="list-style-type: none">· Setoran Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar Daerah Pabean,
	<ul style="list-style-type: none">· Setoran Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean,
	<ul style="list-style-type: none">· Setoran Kegiatan Membangun Sendiri,
	<ul style="list-style-type: none">· Setoran Penyerahan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan,
	<ul style="list-style-type: none">· STP,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKB Masa,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKB Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean,



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

	<ul style="list-style-type: none">· SKPKB Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKB Kegiatan Membangun Sendiri,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKB Pemungut PPN,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKBT Masa,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKBT Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKBT Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKBT Kegiatan Membangun Sendiri,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKBT Pemungut PPN,
	<ul style="list-style-type: none">· PPN Final Membangun Sendiri,
	<ul style="list-style-type: none">· Pemungut.
411212	Pendapatan PPN Impor
	Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 18 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:
	<ul style="list-style-type: none">· Setoran Masa,
	<ul style="list-style-type: none">· STP,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKB PPN Impor,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKBT PPN Impor,
	<ul style="list-style-type: none">· Pemungut.
411219	Pendapatan PPN Lainnya
	Penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PPN, yang belum tertampung dalam pembagian jenis penerimaan PPN.
41122	Pendapatan PPnBM
411221	Pendapatan PPnBM dalam Negeri
	Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 18 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:
	<ul style="list-style-type: none">· Setoran Masa/Angsuran,
	<ul style="list-style-type: none">· STP,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKB Masa,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKB Pemungut PPn BM,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKBT Masa,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKBT Pemungut PPnBM,
	<ul style="list-style-type: none">· Pemungut.
411222	Pendapatan PPnBM Impor
	Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 18 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:
	<ul style="list-style-type: none">· Setoran Masa,
	<ul style="list-style-type: none">· STP,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKB PPn BM Impor,
	<ul style="list-style-type: none">· SKPKBT PPn BM Impor,
	<ul style="list-style-type: none">· Pemungut.
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya
	Penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PPnBM, yang belum tertampung dalam pembagian jenis penerimaan PPnBM.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

4113	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
41131	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
411311	Pendapatan PBB Pedesaan
	Penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PBB sektor pedesaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1983.
411312	Pendapatan PBB Perkotaan
	Penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PBB sektor perkotaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1983.
411313	Pendapatan PBB Perkebunan
	Penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PBB sektor perkebunan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1983.
411314	Pendapatan PBB Kehutanan
	Penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PBB sektor kehutanan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1983.
411315	Pendapatan PBB Pertambangan
	Penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PBB sektor pertambangan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1983.
411319	Pendapatan PBB Lainnya
	Penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PBB lainnya yang belum tertampung dalam pembagian jenis penerimaan PBB yang diatas.
4114	Pendapatan BPHTB
41141	Pendapatan BPHTB
411411	Pendapatan BPHTB
	Penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran BPHTB yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 21 Tahun 1997 UU No. 20 tahun 2000.
4115	Pendapatan Cukai
41151	Pendapatan Cukai
411511	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau
	Penerimaan yang berasal dari cukai hasil tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak menggunakan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya (pasal 4 ayat (1) c UU No. 11 tahun 1995)
411512	Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol
	Penerimaan yang berasal dari cukai Ethyl Alkohol atau etanol meliputi barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C ₂ H ₅ OH yang diperoleh baik secara peragian dan/ atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.
411513	Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol
	Penerimaan yang berasal dari cukai MMEA adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman mengandung ethyl alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya dengan tidak menggunakan bahan antara lain : bir, shandy, anggur, gin, whisky (pasal 4 a)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

411514	Pendapatan Denda Administrasi Cukai
	Penerimaan Denda Administrasi pada Direktorat Bea dan Cukai yang selama ini masih tergabung dalam MA Pabean Lainnya
411519	Pendapatan Cukai Lainnya
	Pendapatan cukai lainnya adalah penerimaan dari cukai yang tidak tertampung pada Cukai Hasil Tembakau, Ethyl alcohol, Minuman Ethyl Alkohol dan Denda Administrasi Cukai (pasal 7 ayat (7) UU No. 11 tahun 1995)
4116	Pendapatan Pajak Lainnya
41161	Pendapatan Pajak Lainnya
411611	Pendapatan Bea Meterai
	Penerimaan yang berasal dari penggunaan Bea Meterai yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 1985.
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Meterai
	Penerimaan dana hasil Penjualan Benda Meterai oleh PT. Pos Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Departemen Keuangan (BA.15).
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya
	Penerimaan yang berasal dari pembayaran pajak tidak langsung lainnya yang tidak termasuk dalam ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 18 Tahun 2000.
41162	Pendapatan Bunga Penagihan Pajak
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh
	Penerimaan yang berasal dari pembayaran bunga dan denda penagihan surat ketetapan pajak PPh yang diatur berdasarkan UU No. 19 Tahun 1997 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 19 Tahun 2000.
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN
	Penerimaan yang berasal dari pembayaran bunga dan denda penagihan surat ketetapan pajak PPN yang diatur berdasarkan UU No. 19 Thn 1997 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 19 Thn 2000.
411623	Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM
an	Penerimaan yang berasal dari pembayaran bunga dan denda penagihan surat ketetapan pajak PPnBM yang diatur berdasarkan UU No. 19 Thn 1997 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 19 Thn 2000.
411624	Pendapatan Bunga Penagihan PTL
	Penerimaan yang berasal dari pembayaran bunga dan denda penagihan surat ketetapan pajak PTL yang diatur berdasarkan UU No. 19 Thn 1997 yang telah dirubah terakhir dalam UU No. 19 Thn 2000.
412	Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional
4121	Pendapatan Bea Masuk
41211	Pendapatan Bea Masuk
412111	Pendapatan Bea Masuk
ng dialokasia	Pendapatan yang berasal dari pungutan bea atas barang-barang impor.
412112	Pendapatan Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)
	Dasar UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabean Pasal 25/26
412113	Pendapatan Denda Administrasi Pabean



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

	Penerimaan Denda Administrasi pada Direktorat Bea dan Cukai yang selama ini masih tergabung dalam MA Pabean Lainnya
412114	Pendapatan Bea Masuk dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pendapatan bea masuk yang harus dipungut atas penjualan lokal dari produk tujuan ekspor yang telah mendapat fasilitas KITE.
412119	Pendapatan Pabean Lainnya Pendapatan pabean lainnya adalah : Penerimaan yang berasal dari : <ul style="list-style-type: none">· Sanksi administrasi berupa denda (pasal 37 ayat (1) UU No. 10 tahun 1995)· Bunga (pasal 38 ayat (1) UU No. 10 tahun 1995)
4122	Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor
41221	Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor
412211	Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor Penerimaan yang berasal dari ekspor beberapa komoditi tertentu yang terkena Pajak/Pungutan ekspor dan penerimaan denda administrasi atas keterlambatan pembayaran Pajak/Pungutan Ekspor
42	Penerimaan Negara Bukan Pajak
421	Penerimaan Sumber Daya Alam
4211	Pendapatan Minyak bumi
42111	Pendapatan Minyak Bumi
421111	Pendapatan Minyak Bumi Penerimaan bagian Pemerintah dari penjualan minyak bumi, masuk ke Bagian Anggaran 15.06
4212	Pendapatan Gas Alam
42121	Pendapatan Gas Alam
421211	Pendapatan Gas Alam Penerimaan bagian Pemerintah dari penjualan gas alam, masuk ke Bagian Anggaran 15.06
4213	Pendapatan Pertambangan Umum
42131	Pendapatan Pertambangan Umum
421311	Pendapatan Iuran Tetap Dipungut dari Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan umum (Kontrak Karya, Kuasa Pertambangan dan Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara). Masuk Bagian Anggaran Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
421312	Pendapatan Royalti Dipungut dari Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan umum (Kontrak Karya, Kuasa Pertambangan dan Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan). Masuk Bagian Anggaran Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (BA. 20)
4214	Pendapatan Kehutanan
42141	Pendapatan Dana Reboisasi
421411	Pendapatan Dana Reboisasi Dipungut dari perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Ijin Penebangan Kayu (IPK) dan Pemenang Lelang Kayu Sitaan. Masuk Bagian Anggaran Departemen Kehutanan (BA 29).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

42142	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan
421421	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan
	Dipungut dari perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Ijin Penebangan Kayu (IPK) dan Pemenang Lelang Kayu Sitaan. Masuk Bagian Anggaran Departemen Kehutanan (BA 29).
42143	Pendapatan IIUPH (IHPH)
421431	Pendapatan IIUPH(IHPH) Tanaman Industri
	Dipungut dari perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan pemegang izin usaha pengelolaan hutan (IUPH/HPH). Masuk Bagian Anggaran Departemen Kehutanan (BA 29).
421432	Pendapatan IIUPH(IHPH) Bambu
	Dipungut dari perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan pemegang izin usaha pengelolaan hutan (IUPH/HPH) Masuk Bagian Anggaran Departemen Kehutanan (BA 29).
421433	Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Rotan
	Dipungut dari perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan pemegang izin usaha pengelolaan hutan (IUPH/HPH). Masuk Bagian Anggaran Departemen Kehutanan (BA 29).
421434	Pendapatan IIUPH (IHPH) Hutan Alam
	Dipungut dari perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan pemegang izin usaha pengelolaan hutan (IUPH/HPH). Masuk Bagian Anggaran Departemen Kehutanan (BA 29).
4215	Pendapatan Perikanan
42151	Pendapatan Perikanan
421511	Pendapatan Perikanan
	Penerimaan dari Pungutan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan dari Perusahaan Perikanan dalam rangka PMA/PMDN. Masuk Bagian Anggaran Departemen Kelautan dan Perikanan. (BA.32)
4216	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi
42161	Pendapatan Pertambangan panas Bumi
421611	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi
	Dipungut dari Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan panas bumi (Kontrak Karya, Kuasa Pertambangan dan Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara). Masuk Bagian Anggaran Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
422	Pendapatan Bagian Laba BUMN
4221	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN
	Penerimaan dari laba yang diperoleh pemerintah atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yakni kekayaan Negara yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada suatu BUMN.
42211	Pendapatan Laba BUMN Perbankan
422111	Pendapatan Laba BUMN Perbankan
	Penerimaan bagian pemerintah dari laba BUMN perbankan. Masuk Bagian Anggaran Departemen Keuangan (BA.15.06).
42212	Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan
422121	Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan
	Penerimaan bagian pemerintah dari laba BUMN non perbankan. Masuk Bagian Anggaran Departemen Keuangan (BA.15.06).
423	Pendapatan PNBP Lainnya
4231	Pendapatan Penjualan dan Sewa
42311	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

423111	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan
	Penerimaan dari penjualan sisa penelitian pertanian, benih dan hasil pertanian dari praktek perkebunan siswa. Masuk Bagian Anggaran Departemen Pertanian (BA.18)
423112	Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan
	Penerimaan dari penjualan sisa penelitian peternakan dan perikanan, semen beku untuk inseminasi buatan, bibit ternak, calon bibit, ternak susu, ternak afkir, hasil peternakan dan perikanan praktek siswa. Masuk Bagian Anggaran Departemen Pertanian (BA.18)
423113	Pendapatan Penjualan Hasil Tambang
	Penerimaan dari penjualan produksi batubara bagian pemerintah di luar royalti dan PPN. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA.20)
423114	Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan
	Penerimaan dari penjualan hasil sitaan baik berupa uang maupun hasil penjualan barang rampasan. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan Agung (BA.06).
423115	Pendapatan Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi Lainnya
	Penjualan vaksin dan antigen hewan ternak pada Kementerian Pertanian (BA 18) termasuk didalamnya Penjualan radioisotop pada BATAN (BA 42.03)
423116	Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya
	Penjualan Informasi, Penerbitan, Film dan Hasil Cetakan lain yang berada di berbagai Kementerian seperti Kementerian Pertanian (BA 18), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 20), Kementerian Perhubungan (BA 22), Kementerian Kesehatan (BA 24), Kementerian Pekerjaan Umum (BA.33), Mennegristik (BA.42), Menneq PAN (BA.48), dan BIN (BA.50), Meneg Kominfo (BA.59)
423117	Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan
	Penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian yang berasal dari penjualan dokumen lelang.
423118	Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni.
	Penerimaan yang berasal dari penjualan Cadangan Beras pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni oleh Perum BULOG
423119	Pendapatan Penjualan Lainnya
	Penjualan yang tidak termasuk penjualan-penjualan di atas.
42312	Pendapatan Penjualan Aset
423121	Pendapatan Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan dan Tanah
	Penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian tidak termasuk penjualan sewa beli rumah dinas.
423122	Pendapatan Penjualan Kendaraan Bermotor
	Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua Kementerian
423123	Pendapatan Penjualan Sewa Beli
	Penerimaan dari penjualan rumah dinas melalui kontrak sewa beli. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum
423124	Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing
	Penerimaan yang berasal dari Penjualan Aset Bekas Milik Asing



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

423129	Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian
42313	Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas
423131	Pendapatan Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak Penerimaan yang timbul akibat selisih harga beli BBM Pemerintah dari Badan Usaha (harga patokan) lebih rendah/kecil dari harga jual BBM Pemerintah kepada Masyarakat yang ditetapkan dalam Perpres. Masuk BA Departemen Keuangan
423132	Pendapatan Minyak Mentah (DMO) Penerimaan yang berasal dari selisih antara nilai minyak mentah DMO / Domestic Market Obligation dengan harga ICP / Indonesian Crude Price dengan DMO Fee. Nilai minyak mentah DMO adalah hasil penjualan minyak mentah bagian KKKS (Kontraktor Kontrak kerja Sama) diserahkan kepada Pemerintah atau dibeli Pemerintah. Sedangkan DMO Fee adalah pembayaran atau harga beli Pemerintah atas penyerahan minyak mentah DMO bagian KKKS. Penerimaan ini bersifat kontijensi. Masuk BA Departemen Keuangan
423139	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas Penerimaan yang diterima dari kegiatan usaha hulu migas seperti penerimaan bonus dari KKKS
42314	Pendapatan Sewa
423141	Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian
423142	Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian
423243	Pendapatan Sewa Benda-benda Bergerak Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian
423249	Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian
4232	Pendapatan Jasa
42321	Pendapatan Jasa I
423211	Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya Pendapatan dari hasil pelayanan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan, baik yang berada di Lingkungan Departemen Kesehatan maupun departemen lainnya.
423212	Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA) Pendapatan dari penjualan karcis masuk tempat hiburan/taman maupun museum yang berada di lingkungan Departemen Kehutanan (BA 29) maupun Departemen Pendidikan Nasional (BA 23) dan LIPI/Mennegristek (BA.42)
423213	Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor, SIM, STNK, dan BPKB Pendapatan dari pelayanan pembuatan surat Visa dan paspor oleh Departemen Luar Negeri, pembuatan SIM, STNK dan BPKB oleh POLRI, pendapatan dari surat keterangan keimigrasian antara lain KITAS, izin tinggal tetap di Indonesia dari Departemen Hukum dan HAM (BA.13)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

423214	Pendapatan Hak dan Perijinan
	Pendapatan dari permintaan hak paten, hak cipta maupun perpanjangan Merk di Departemen Hukum dan Perundang-undangan (BA 13), Pendapatan dari pendaftaran pestisida, royalti hasil penelitian dan pembuatan label obat-obatan pertanian/peternakan di Departemen Pertanian (BA 18), wajib daftar perusahaan, pengujian mutu barang dan sertifikasi mutu barang di Departemen Perindustrian dan/atau Perdagangan (BA 19), biaya hak penggunaan frekuensi radio, biaya ijin amatir radio di Dep Perhubungan, hak dan perijinan Departemen Tenaga Kerja (BA.26), hak dan perijinan di BPN (BA.56)
	Termasuk Hasil lelang 3G (postel)
423215	Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan
	Pendapatan Sensor/Karantina, pengawasan, pemeriksaan di berbagai departemen seperti Departemen Pertanian (BA 18), Departemen Perindustrian dan perdagangan (BA 19), Departemen Pendidikan Nasional (BA 23), Departemen Kesehatan (BA 24)
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan DJBC
	Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa informasi, jasa pelatihan dan jasa teknologi sesuai dengan tugas dan fungsi di seluruh departemen. Pendapatan BPN (pelayanan pendaftaran tanah yang meliputi : pengukuran dan pemetaan tanah untuk pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah, pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya, pelayanan redistribusi tanah, pelayanan pemeriksaan tanah, pelayanan informasi pertanahan), jasa pekerjaan yang berasal dari cukai dan kepabeanan.
423317	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama
	Pendapatan dari hasil pelayanan jasa urusan agama terutama pencatatan nikah dan rujuk di lingkungan Departemen Agama
423218	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan, dan Kenavigasian
	Penerimaan dari jasa penyeberangan untuk kapal lintas dalam negeri dan luar negeri, pendapatan pengguna sarana Bantu navigasi dan pendapatan jasa perkapalan, pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara, pelayanan jasa penerbangan, sewa dan tanda masuk Bandar Udara. Masuk Bagian Anggaran Departemen Perhubungan (BA 022) dan Departemen Kelautan dan Perikanan (BA 032)
42322	Pendapatan Jasa II
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
	Pendapatan yang berasal dari bunga rekening giro pemerintah
423222	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi
	Penerimaan dari pungutan operator telekomunikasi yang memperoleh ijin resmi telekomunikasi dan penerimaan jasa telekomunikasi pelabuhan. Masuk Bagian Anggaran Departemen Perhubungan (BA 22)
423223	Pendapatan Iuran Lelang untuk Fakir Miskin
	Pendapatan yang berasal dari sebagian hasil lelang penghapusan BMN yang dialokasikan untuk Fakir Miskin dan berasal dari seluruh Kementerian Negara/Lembaga serta disetorkan atas nama Kementerian Sosial (BA 27).
423224	Pendapatan Jasa Catatan Sipil
	Penerimaan dari hasil pelayanan jasa Kantor Catatan Sipil. Masuk Pendapatan Departemen Dalam Negeri
423225	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa
	Pendapatan yang berasal dari pengenaan biaya penagihan secara paksa atas piutang pajak tidak tertagih. Masuk Departemen Keuangan (BA 15)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

423226	Pendapatan Uang Pewarganegaraan
	Pendapatan yang berasal dari uang registrasi menjadi warga Negara Indonesia, masuk Departemen Hukum dan HAM (BA 13).
423227	Pendapatan Bea Lelang
	Pendapatan yang diperoleh dari bea lelang dan masuk ke Departemen Keuangan (BA 15).
423228	Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara
	Pendapatan yang berasal dari Jasa Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara. Masuk Departemen Keuangan (BA 15)
423229	Pendapatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi
	Merupakan penerimaan yang berasal dari Registrasi Dokter dan Dokter Gigi yang diselenggarakan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
42323	Pendapatan Jasa Dari Luar Negeri
423231	Pendapatan dari Pemberian Surat Perjalanan RI
	Pendapatan dari surat perjalanan RI dan masuk ke Bagian Anggaran Departemen Luar Negeri (BA 11)
423232	Pendapatan dari Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler
	Pendapatan dari pengurusan dokumen konsuler dan masuk Bagian anggaran Departemen Luar Negeri (BA 11)
423239	Pendapatan Rutin Lainnya dari Luar Negeri
	Pendapatan dari luar negeri selain surat perjalanan RI dan pengurusan dokumen konsuler.
42329	Pendapatan Jasa Lainnya
423291	Pendapatan Jasa Lainnya
	Pendapatan jasa yang tidak termasuk kelompok pendapatan jasa I dan II.
4233	Pendapatan Bunga
42331	Pendapatan Bunga
423311	Pendapatan Bunga atas Investasi dalam Obligasi
	Pendapatan bunga yang bersumber dari investasi atau pembelian surat-surat berharga berupa obligasi
423312	Pendapatan BPPN atas Bunga Obligasi
	Pendapatan bunga dari BPPN yang bersumber dari investasi / pembelian surat-surat berharga berupa obligasi
423313	Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman
	Pendapatan yang berasal dari bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya yang timbul dari pemberian piutang tersebut di atas
423319	Pendapatan Bunga Lainnya
	Pendapatan bunga selain yang bersumber dari investasi atau pembelian surat-surat berharga lainnya
42332	Pendapatan Gain on Bond Redemption
423321	Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi dalam Negeri Jangka Panjang
	Pendapatan yang diperoleh dari selisih lebih carrying value Obligasi yang dibeli kembali dengan clean price yang dibayar Pemerintah pada saat pembelian kembali Obligasi (buyback). Carrying value Obligasi ialah nominal Obligasi setelah dikurangi atau ditambah unamortized discount atau premium
42333	Pendapatan Premium atas Obligasi Negara
423331	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah
	Pendapatan yang diperoleh pada saat penerbitan SUN berdenominasi Rupiah yang dihitung dari selisih lebih



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

	penerimaan kas (clean price) dengan nominal SUN yang diterbitkan
423332	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing Pendapatan yang diperoleh pada saat penerbitan SUN berdenominasi Valuta Asing yang dihitung dari selisih lebih penerimaan kas (clean price) dengan nominal SUN yang diterbitkan
4234	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan
42341	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan
423411	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan Penerimaan legalisasi tanda tangan. Masuk Bagian Anggaran Departemen Hukum dan HAM (BA 13)
423412	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan Pengesahan surat di bawah tangan. Masuk Bagian Anggaran Departemen Hukum dan HAM (BA 13)
423413	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan) Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung (BA 05)
423414	Pendapatan Hasil Denda/Tilang dan sebagainya Hasil denda, denda tilang di lingkungan Kejaksaan Agung (BA 06)
423415	Pendapatan Ongkos Perkara Pendapatan dari ongkos perkara di lingkungan Kejaksaan Agung (BA 06)
423419	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya Menampung jenis penerimaan selain pendapatan kejaksaan dan peradilan tersebut diatas
4235	Pendapatan Pendidikan
42351	Pendapatan Pendidikan
423511	Pendapatan Uang Pendidikan Uang pendidikan berasal dari Sekolah maupun PTN yang menyelenggarakan pendidikan baik di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional maupun di departemen lain.
423512	Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat dan Akhir pendidikan yang berasal dari Sekolah maupun PTN yang menyelenggarakan pendidikan baik di lingkungan Dep. Pendidikan Nasional (BA 23) maupun di departemen lain.
423513	Pendapatan Uang Ujian untuk Menjalankan Praktek Uang Ujian untuk menjalankan Praktek yang berasal dari Sekolah Maupun PTN yang menyelenggarakan pendidikan baik di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (BA 23) maupun di departemen lain.
423519	Pendapatan Pendidikan Lainnya Uang pendapatan pendidikan lainnya seperti sumbangan pendidikan yg berasal dari Sekolah Maupun PTN yg menyelenggarakan pendidikan baik di lingkungan Dep. Pendidikan Nasional (BA 23) maupun di departemen lain.
4236	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi
42361	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi
423611	Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Ditetapkan Pengadilan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

	PNBP yang merupakan uang sitaan dari hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan
423612	Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK menjadi Milik Negara Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara
423613	Pendapatan dari Pengembalian Penyalahgunaan Penyelenggaraan Keuangan Pendapatan dari pengembalian penyalahgunaan penyelenggaraan keuangan
423614	Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan pengadilan Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan pengadilan
4237	Pendapatan Iuran dan Denda
42371	Pendapatan Iuran Badan Usaha
423711	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM PNBP yang berasal dari Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM
423712	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa PNBP yang berasal dari Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa
423713	Pendapatan Iuran Badan Usaha di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan PNBP yang berasal dari Iuran Badan Usaha dari kegiatan di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
42372	Pendapatan Dana Pengamanan Hutan
423721	Pendapatan Dana Pengamanan Hutan Pendapatan yang diterima dari Dana Pengamanan Hutan (DPH), Dana Illegal Logging, Dana Kompensasi Areal Pengganti
42373	Pendapatan dari Perlindungan Hutan dan Konsevasi Alam
423731	Pendapatan Iuran Menangkap/Mengambil/Mengangkut Satwa Liar/Mengambil/Mengangkut Tumbuhan Alam Hidup atau Mati (IASL/TA) Pendapatan yang diterima dari Iuran kepada pemegang izin menangkap, mengambil dan mengangkut satwa liar dan tumbuhan alam dalam keadaan hidup atau mati atau bagian-bagian daripadanya yang tidak dilindungi undang-undang dan yang dilindungi undang-undang.
423732	Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA) Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA) adalah pungutan yang dikenakan kepada calon pemegang izin pengusahaan pariwisata alam dan dikenakan sekali selama jangka waktu pengusahaan
423733	Pungutan Izin Pengusahaan Taman Buru (PIPTB) Pungutan izin pengusahaan taman buru (PIPTB) adalah pungutan yang dikenakan kepada calon pemegang izin pengusahaan taman buru dan dikenakan sekali dalam jangka waktu pengusahaan
423734	Pungutan Izin Berburu di taman buru dan areal buru (PIB) Pungutan Izin Berburu adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin berburu dan dikenakan satu kali pada saat izin berburu dikeluarkan
423735	Pungutan Masuk Obyek Wisata Alam Pungutan masuk adalah pungutan yang dikenakan terhadap setiap pengunjung yang masuk ke Taman wisata alam, Taman Nasional dan atau taman Buru
423736	Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA) Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA) adalah Iuran yang dikenakan kepada pemegang izin pengusahaan pariwisata alam yang dikenakan dari hasil usahanya sekali setiap tahun



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

423737	Iuran Hasil Usaha Perburuan di Taman Buru (IHUPTB)
	Iuran Hasil usaha Perburuan di Taman Buru (IHUPB) adalah iuran yang dikenakan kepada pemegang izin berburu berdasarkan jumlah satwa yang diburu sesuai dengan harga patokan yang berlaku untuk masing-masing jenis satwa yang diburu.
42374	Pendapatan Penerimaan Dana kompensasi Pelestarian SDA Kelautan
423741	Pendapatan Penerimaan Dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan
	Penerimaan dana kompensasi pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) Kelautan yang berasal dari Kapal Keruk Pasir Laut. Masuk Bagian Anggaran Departemen Kelautan dan Perikanan (BA.32).
42375	Pendapatan Denda
423751	Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan
	Pendapatan yang diterima dari Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH), Penerimaan dari Denda post audit dan tata usaha Provisi Sumber Daya Hutan
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
	PNBP yang berasal dari setoran rekanan pemerintah, berupa denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua departemen
423753	Pendapatan atas Denda Administrasi BPHTB
	Merupakan penerimaan dari Badan Pertanahan Nasional
423754	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal
	Pendapatan denda yang berasal dari pelaku pasar modal karena pelanggaran yang dilakukan. Merupakan PNBP Departemen Keuangan
423755	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha
	Pendapatan denda yang berasal dari pelaku usaha yang telah mendapatkan putusan tetap dari pengadilan. Merupakan PNBP Departemen Perdagangan.
4239	Pendapatan Lain-lain
42391	Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu
423911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL
	Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua departemen
423912	Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL
	Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua departemen
423913	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL
	Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua departemen
423914	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinj. LN TAYL
	Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua departemen
423915	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah TAYL
	Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua departemen
423916	Penerimaan Kembali Belanja Swadana TAYL
	Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua departemen



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

423919	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL
	Merupakan penerimaan kembali belanja Lainnya.
42392	Pendapatan Peiunasan Piutang
423921	Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara
	Pendapatan yang berasal dari pembayaran cicilan Piutang Non Bendahara. Piutang non bendahara terjadi karena kelalaian pegawai yang menyebabkan kerugian negara di luar pengurusan keuangan negara.
423922	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara
	Pendapatan yang berasal dari pembayaran cicilan TP/TGR bendahara. TP/TGR Bendahara terjadi karena ada kerugian negara yang disebabkan kesalahan atau kelalaian bendahara dalam rangka pengurusan keuangan Negara. Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua departemen.
42393	Pendapatan dari Penutupan Rekening
423931	Pendapatan dari Penutupan Rekening
	Pendapatan yang berasal dari penutupan rekening Kementerian Negara / Lembaga yang tidak dapat lagi dipertahankan keberadaannya karena tidak sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan dan penertiban rekening pemerintah.
42399	Pendapatan Lain-lain
423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji
	PNBP yang berasal dari pengembalian Uang Muka Gaji Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua departemen
423992	Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional
	Merupakan PNBPN yang berasal dari Pembayaran Premi dalam rangka Penjaminan Perbankan Nasional
423993	Pendapatan dari Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRH)
	Merupakan pendapatan yang berasal dari Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRH)
423994	Pendapatan dari Biaya Pengawasan HET Minyak Tanah
	Pendapatan yang berasal dari Biaya Pengawasan HET Minyak Tanah. Merupakan PNBPN Departemen Dalam Negeri.
423995	Pendapatan Bagian Pemerintah dari Sisa Surplus Bank Indonesia.
	Pendapatan Bagian Pemerintah dari Sisa Surplus Bank Indonesia
423996	Pendapatan Jasa Perbendaharaan
	Pendapatan yang diterima Pemerintah dari Bank Umum atau PT Pos sebagai pengelola kas negara (Bank Operasional)
423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain
	Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua departemen.
424	Pendapatan BLU
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum
42411	Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit
	Pendapatan BLU dari hasil pelayanan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan, baik yang berada di Lingkungan Departemen Kesehatan maupun departemen lainnya
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
	Pendapatan BLU yang berasal dari Sekolah maupun PTN yang menyelenggarakan pendidikan baik di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional maupun di departemen lain.
424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Tehnologi
	Pendapatan BLU dari kegiatan Jasa layanan bantuan tenaga trampil, informasi, pekerjaan, pelatihan dan teknologi.
424114	Pendapatan Jasa Pencetakan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

	Pendapatan BLU dari jasa pencetakan dokumen, buku dan sejenisnya.
424115	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan Kenavigasian
	Pendapatan BLU dari Jasa kegiatan Bandara, pelabuhan laut dan pengaturan navigasi untuk kepentingan transportasi.
424116	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi
	Pendapatan BLU atas kegiatan layanan penyelenggaraan kegiatan telekomunikasi melalui media atau sarana yang ada seperti alat telekomunikasi dan sejenisnya.
424117	Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran
	Pendapatan BLU atas jasa Layanan kegiatan pemasaran produk-produk tertentu yang ditujukan bagi konsumen atau pengguna produk atau jasa yang ditawarkan.
424118	Pendapatan Penyediaan Barang
	Pendapatan BLU yang diperoleh dari kegiatan penyediaan barang untuk kepentingan masyarakat atau instansi pengguna lainnya.
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya
	Pendapatan BLU yang diperoleh dari kegiatan di luar penyediaan barang dan jasa lainnya.
42412	Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu
424121	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita
	Pendapatan BLU dari hasil pengelolaan Kawasan Otorita yang ditetapkan oleh Pemerintah.
424122	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
	Pendapatan BLU dari hasil pengelolaan KAPET yang ditetapkan oleh Pemerintah.
424123	Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah
	Pendapatan BLU dari hasil pengelolaan FASUM milik Pemerintah
424129	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya
	Pendapatan BLU dari hasil diluar pengelolaan kawasan otorita, KAPET dan FASUM lainnya
42413	Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat
424131	Pendapatan Program Dana Penjaminan
	Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan program dana penjaminan
424132	Pendapatan Program Dana Penjaminan Syariah
	Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan program dana penjaminan Syariah
424133	Pendapatan Program Modal Ventura
	Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan program Modal Ventura
424134	Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral
	Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan program dana bergulir Sektoral
424135	Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah
	Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan program dana bergulir Syariah
424136	Pendapatan Investasi
	Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan investasi atas bidang-bidang tertentu
424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya
	Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana khusus lainnya
4242	Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum
42421	Pendapatan Hibah Terikat
424211	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan
	Pendapatan Hibah terikat Dalam Negeri yang berasal dari perorangan
424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha
	Pendapatan Hibah terikat Dalam Negeri yang berasal dari Lembaga / Badan Usaha
424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda
	Pendapatan Hibah terikat Dalam Negeri yang berasal dari Pemda
424214	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Perorangan
	Pendapatan Hibah terikat Luar Negeri yang berasal dari perorangan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha
	Pendapatan Hibah terikat Luar Negeri yang berasal dari perorangan
424216	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Negara
	Pendapatan Hibah terikat Luar Negeri yang berasal dari perorangan
424219	Pendapatan Hibah Terikat Lainnya
	Pendapatan Hibah terikat Dalam / Luar Negeri yang bukan berasal dari perorangan, lembaga/ Badan Usaha dan Pemda
42422	Pendapatan Hibah Tidak Terikat
424221	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan
	Pendapatan Hibah Tidak terikat Dalam Negeri yang berasal dari perorangan
424222	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha
	Pendapatan Hibah Tidak terikat Dalam Negeri yang berasal dari lembaga / Badan Usaha
424223	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda
	Pendapatan Hibah Tidak terikat Dalam Negeri yang berasal dari pemda
424224	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Perorangan
	Pendapatan Hibah Tidak terikat Luar Negeri yang berasal dari perorangan
424225	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha
	Pendapatan Hibah Tidak terikat Luar Negeri yang berasal dari Lembaga / Badan Usaha
424226	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Negara
	Pendapatan Hibah Tidak terikat Luar Negeri yang berasal dari Negara lain
424229	Pendapatan Hibah Tidak Terikat -Lainnya
	Pendapatan Hibah Tidak terikat Dalam / Luar Negeri yang bukan berasal dari perorangan, lembaga/ Badan Usaha dan Pemda
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU
42431	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan
	Pendapatan BLU yang diperoleh dari hasil kegiatan kerjasama dengan pihak lain : perorangan
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha
	Pendapatan BLU yang diperoleh dari hasil kegiatan kerjasama dengan pihak lain : Lembaga/Badan Usaha
424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah
	Pendapatan BLU yang diperoleh dari hasil kegiatan kerjasama dengan pihak lain : Pemda
43	Penerimaan Hibah
431	Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri
4311	Pendapatan Hibah Dalam Negeri
43111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri
431111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Perorangan
	Penerimaan hibah dalam negeri yang berasal dari perorangan. (BA.15 atau BA. Departemen terkait)
431112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Lembaga/Badan Usaha
	Penerimaan hibah dalam negeri yang berasal dari Lembaga/Badan Usaha berbentuk badan hukum. (BA.15 atau BA. Departemen terkait)
431119	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Lainnya
	Penerimaan hibah dalam negeri yang tidak dapat dikategorikan berasal dari perorangan maupun Lembaga/Badan Usaha berbentuk badan hukum. (BA.15 atau BA. Departemen terkait)
4312	Pendapatan Hibah Luar Negeri
43121	Pendapatan Hibah Luar Negeri
431211	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Perorangan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

	Penerimaan hibah luar negeri yang berasal dari perorangan. (BA.15 atau BA. Departemen terkait)
431212	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Bilateral
	Penerimaan hibah luar negeri yang berasal dari Lembaga Internasional dalam hubungan bilateral. (BA.15 atau BA. Departemen terkait)
431213	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Multilateral
	Penerimaan hibah luar negeri yang berasal dari Lembaga Internasional dalam hubungan multilateral. (BA.15 atau BA. Departemen terkait)
431219	Pendapatan Hibah Luar Negeri Lainnya
	Penerimaan hibah luar negeri yang tidak dapat dikategorikan berasal Lembaga Internasional baik dalam hubungan bilateral maupun multilateral. (BA.15 atau BA. Departemen terkait)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR PENJELASAN AKUN

5	BELANJA NEGARA
51	Belanja Pegawai
511	Belanja Gaji dan Tunjangan
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
51111	Belanja Gaji PNS
511111	Belanja Gaji Pokok PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran pembulatan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil
51112	Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/istri PNS
511122	Belanja Tunj. Anak PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anak PNS
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural PNS
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan fungsional PNS
511125	Belanja Tunj. PPh PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan PPh PNS
511126	Belanja Tunj. Beras PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan beras berbentuk uang maupun natura.
511127	Belanja Tunj. Kemahalan PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kemahalan PNS
511128	Belanja Tunj. Lauk pauk PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran dana lauk pauk yang diberikan kepada para pegawai negeri sehubungan dengan sifat tugas yang dilaksanakannya (organik dan non organik)
511129	Belanja Uang Makan PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan uang makan PNS
51113	Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS
511131	Belanja Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan PNS
511132	Belanja Tunj. Cacat PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan cacat PNS



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

511133	Belanja Tunj. Khusus Peralihan PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan khusus peralihan PNS
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kompensasi kerja PNS, termasuk tunjangan pengaman dan penyelamatan pelayaran, dan tunjangan kesyahbandaran yang pembayarannya selam ini berdasarkan SE DJA tanggal 28-05-1983 No. SE 74/A.23/1893, tgl 15-11-1993 NO SE 169/A.72/1983 dan tgl 02-12-1987 No. SE 83-/A.198/1987.
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan daerah terpencil/sangat terpencil PNS
511136	Belanja Tunj. Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan guru/dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS
511137	Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan tugas belajar tenaga pengajar biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan khusus PNS Papua
511139	Belanja Tunjangan SAR PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan pegawai yang bertugas menangani kegiatan pencarian dan penyelamatan pada kegiatan SAR dan sejenisnya PNS
51114	Belanja Tunjangan-tunjangan III Pegawai Negeri/Staff di Luar Negeri
511141	Belanja Tunj. Sewa Rumah PNS (Staff di LN)
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan sewa rumah PNS (staff di LN)
511142	Belanja Tunj. Restitusi Pengobatan PNS (Staff di LN)
	Pengeluaran untuk penggantian pembayaran tunjangan Pengobatan PNS (staff di LN)
511143	Belanja Tunj. Social Security PNS (Staff di LN)
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan jaminan sosial PNS (staff di LN)
511144	Belanja Tunj. Asuransi Kecelakaan PNS (Staff di LN)
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan asuransi kecelakaan PNS (staff di LN)
511145	Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (Staff di LN)
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (staff di LN)
511146	Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (Staff di LN)
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (staff di LN)
511147	Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri
511149	Belanja Lokal Staff Lainnya
	Pengeluaran untuk pembayaran gaji, tunjangan dan uang lembur lokal staff
51115	Belanja Tunjangan Umum PNS
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan umum/tambahan tunjangan umum PNS, termasuk PNS TNI/Polri sesuai peraturan presiden no 12 tahun 2006
51116	Belanja Gaji PNS TNI/Polri
511161	Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil TNI/Polri
511169	Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran pembulatan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil TNI/Polri
51117	Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS TNI/Polri
511171	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/istri PNS TNI/Polri
511172	Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural PNS TNI/Polri
511173	Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural PNS TNI/Polri
511174	Belanja Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan fungsional PNS TNI/Polri
511175	Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan PPh PNS TNI/Polri
511176	Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan beras berbentuk uang maupun natura untuk PNS TNI/Polri
511177	Belanja Tunj. Kemahalan PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kemahalan PNS TNI Polri
511178	Belanja Tunj. Lauk pauk PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran dana lauk pauk yang diberikan kepada para pegawai negeri sehubungan dengan sifat tugas yang dilaksanakannya (organik dan non organik) untuk PNS TNI/Polri
511179	Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan uang makan PNS TNI/Polri
51118	Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS TNI/Polri
511181	Belanja Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan PNS TNI/Polri
511182	Belanja Tunj. Cacat PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan cacat PNS TNI/Polri
511183	Belanja Tunj. Khusus Peralihan PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan khusus peralihan PNS TNI/Polri



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

511184	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kompensasi kerja PNS, termasuk tunjangan pengaman dan penyelamatan pelayaran, dan tunjangan kesyahbandaran yang pembayarannya selama ini berdasarkan SE DJA tanggal 28-05-1983 No. SE 74/A.23/1893, tgl 15-11-1993 NO SE 169/A.72/1983 dan tgl 02-12-1987 No. SE 83- /A.198/1987.
511185	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan daerah terpencil/sangat terpencil PNS
511186	Belanja Tunj. Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan guru/dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS
511187	Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan tugas belajar tenaga pengajar biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS
511188	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan khusus PNS Papua
51119	Belanja Tunjangan-tunjangan III PNS TNI/POLRI
511191	Belanja Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Medis PNS TNI/POLRI
511192	Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan lain-lain termasuk uang duka TNI/POLRI termasuk tunjangan cacat
511193	Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran Tunjangan Umum PNS TNI/Polri
511194	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kompensasi kerja bidang persandian PNS TNI/POLRI
5112	Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri
51121	Belanja Gaji TNI/POLRI
511211	Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran gaji pokok TNI/POLRI
511219	Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran pembulatan gaji pokok TNI/POLRI
51122	Belanja Tunjangan-tunjangan I TNI/POLRI
511221	Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/istri TNI/POLRI
511222	Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anak TNI/POLRI
511223	Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural TNI/POLRI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

511224	Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan fungsional TNI/POLRI
511225	Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan PPh TNI/POLRI
511226	Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan beras berbentuk uang maupun natura TNI/POLRI
511227	Belanja Tunj. Kemahalan TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kemahalan TNI/POLRI, termasuk tunjangan daerah terpencil POLRI yang pembayarannya selama ini berdasarkan SE bersama DJA dan Polri No. SE 141/A/2001 dan No. Pol/16/X/2001
511228	Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran dana lauk pauk yang diberikan kepada Anggota TNI/POLRI sehubungan dengan sifat tugas yang dilaksanakannya (organik dan non organik)
511229	Belanja Uang Makan TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan uang makan TNI/POLRI
51123	Belanja Tunjangan-tunjangan II TNI/POLRI
511231	Belanja Tunj. Anggota Cadangan TNI DDA TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anggota cadangan TNI DDA TNI/POLRI
511232	Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kowan/polwan TNI TNI/POLRI
511233	Belanja Tunj. Babinsa TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Babinsa TNI/POLRI
511234	Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI dan PNS TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan khusus Papua untuk TNI dan PNS TNI/POLRI
511235	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kompensasi kerja bidang persandian TNI TNI/POLRI
511236	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kompensasi kerja bidang persandian PNS TNI/POLRI
511237	Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan brevet TNI/POLRI
511238	Belanja Tunj. Keahlian/Keterampilan TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan keahlian/keterampilan TNI/POLRI
511239	Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan keterampilan khusus TNI/POLRI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

51124	Belanja Tunjangan-tunjangan III TNI/POLRI
511241	Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Medis TNI/POLRI
511242	Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka TNI/POLRI
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan lain-lain termasuk uang duka TNI/POLRI termasuk tunjangan cacat
511243	Belanja Tunjangan daerah terpencil/sangat terpencil TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan terpencil/sangat terpencil TNI/POLRI
511244	Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan umum/tambahan tunjangan umum TNI/POLRI sesuai peraturan presiden no 12 tahun 2006
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara
51131	Belanja Gaji Pejabat Negara
511311	Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran gaji pokok pejabat negara
511319	Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran pembulatan gaji pokok pejabat negara
51132	Belanja Tunjangan-tunjangan I Pejabat Negara
511321	Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/istri pejabat negara
511322	Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anak pejabat negara
511323	Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural pejabat negara
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan PPh pejabat negara
511325	Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan beras pejabat negara
51133	Belanja Tunjangan-tunjangan II Pejabat Negara
511331	Belanja Tunj. Komunikasi Intensif Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan komunikasi intensif pejabat negara
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan uang kehormatan pejabat negara
511333	Belanja Uang Paket Harian Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan paket harian pejabat negara
511334	Belanja Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan penunjang kegiatan dewan pejabat negara



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

511335	Belanja Pelayanan Sidang dan Penyelesaian Tugas Mendesak Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan pelayanan sidang dan penyelesaian tugas mendesak pejabat negara
511336	Belanja Tunjangan Pembinaan Kegiatan dan Khusus BPK Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan pembinaan kegiatan dan khusus BPK pejabat negara
511337	Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka Pejabat Negara
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan lain-lain termasuk uang duka pejabat negara
5114	Belanja Gaji Dokter PTT
51141	Belanja Gaji Dokter PTT
511411	Belanja Gaji Dokter dan Bidan PTT
	Pengeluaran untuk pembayaran gaji Dokter dan Bidan PTT
511412	Belanja Tunjangan Pajak PPh Dokter dan Bidan PTT
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan pajak PPh Dokter dan Bidan PTT
511413	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT
511414	Belanja Tunjangan Dokter dan Bidan PTT
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Dokter dan Bidan PTT termasuk tunjangan uang duka wafat (UDW)
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS
51151	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS
511511	Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS
	Pengeluaran untuk pembayaran gaji pokok Pegawai Non PNS pada Lembaga/Komisi
511512	Belanja Tunjangan Pegawai
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Pegawai Non PNS pada Lembaga/Komisi
511519	Belanja Tunjangan Lainnya
	Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan lainnya Pegawai Non PNS pada Lembaga/Komisi
512	Belanja Honorarium/Lembur/Vakasi/Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito
5121	Belanja Honorarium
51211	Belanja Honorarium
512111	Belanja Uang Honor Tetap
	Pengeluaran untuk pembayaran honorarium tetap antara lain untuk honorarium pegawai honor
512112	Belanja Uang Honor Tidak Tetap
	Pengeluaran untuk pembayaran honorarium tidak tetap. Diberikan kepada pegawai yang menjadi anggota Tim pelaksanaan kegiatan yang dibentuk sesuai dengan Standar Biaya.
5122	Belanja Lembur
51221	Belanja Lembur
512211	Belanja uang lembur
	Pengeluaran untuk pembayaran uang lembur termasuk uang makan yang dibayarkan dalam rangka lembur..



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

5123	Belanja Vakasi
51231	Belanja Vakasi
512311	Belanja Vakasi
	Pengeluaran untuk pembayaran imbalan untuk penguji atau pemeriksa kertas / jawaban ujian.
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito
51241	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito
512411	Belanja pegawai (Tunj. Khusus/kegiatan)
	Digunakan untuk pembayaran tunjangan khusus/tunjangan dan pembiayaan kepegawaian lainnya di dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
512412	Belanja Pegawai Transito
	Digunakan untuk pengeluaran sebagian belanja pegawai di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dialihkan ke daerah dan kantor-kantor di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi.
513	Belanja Kontribusi Sosial
5131	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu
51311	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS dan Pejabat Negara
513111	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun dan uang tunggu bagi PNS yang mengajukan pensiun dipercepat atau memilih menjadi anggota partai politik.
513112	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun dan uang tunggu bagi pejabat negara yang mengajukan pensiun dipercepat atau memilih menjadi anggota partai politik termasuk tunjangan CACAT PKRI/KNIP.
513113	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS TNI/Dephan
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun dan uang tunggu bagi PNS TNI/ Dephan yang mengajukan pensiun dipercepat atau memilih menjadi anggota partai politik.
513114	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Polri
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun dan uang tunggu bagi PNS Polri yang mengajukan pensiun dipercepat atau memilih menjadi anggota partai politik.
51312	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri
513121	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri (Lama)
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun dan uang tunggu bagi TNI/ Polri yang mengajukan pensiun dipercepat atau memilih menjadi anggota partai politik termasuk tunjangan untuk veteran RI.
513122	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Dephan
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun dan uang tunggu bagi TNI/ Polri yang mengajukan pensiun dipercepat atau memilih menjadi anggota partai politik.
513123	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Polri
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun dan uang tunggu bagi TNI/ Polri yang mengajukan pensiun dipercepat atau memilih menjadi anggota partai politik.
51313	Belanja Tunjangan Hari Tua
513131	Belanja Tunjangan Hari Tua/Unfunded liability



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

	Digunakan untuk pembayaran kewajiban pemerintah berupa Unfunded Liability (kekurangan Pendanaan) atas kenaikan Gaji Pokok Pegawai
5132	Belanja Asuransi Kesehatan
51321	Belanja Askes PNS/Pejabat Negara
513211	Belanja Askes PNS
	Digunakan untuk pembayaran belanja Askes PNS
513212	Belanja Askes Pejabat Negara
	Digunakan untuk pembayaran belanja Askes Pejabat Negara
51322	Belanja Askes Penerima Pensiun
513221	Belanja Askes Penerima Pensiun
	Digunakan untuk pembayaran belanja Askes Penerima Pensiun
51323	Belanja Askes TNI/Dephan
513231	Belanja Askes TNI/Dephan
	Digunakan untuk pembayaran belanja Askes TNI/Dephan
51324	Belanja Askes Polri
513241	Belanja Askes Polri
	Digunakan untuk pembayaran belanja Askes Polri
51325	Belanja Askes Veteran
513251	Belanja Askes Veteran
	Digunakan untuk pembayaran belanja Askes Veteran
5133	Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran
51331	Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran
513311	Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran Non Tuvet
	Digunakan untuk pembayaran belanja tunjangan kesehatan veteran non tuvet
5134	Belanja Cadangan Perubahan Sharing
51341	Belanja Cadangan Perubahan Sharing
513411	Belanja Cadangan Perubahan Sharing
	Digunakan untuk pembayaran cadangan perubahan sharing kepada pegawai.
52	Belanja Barang
521	Belanja Barang
5211	Belanja Barang Operasional
52111	Belanja Barang Operasional
521111	Belanja Keperluan Perkantoran
	Pengeluaran untuk membiayai keperluan sehari-hari perkantoran yang secara langsung menunjang kegiatan operasional Kementerian negara/ lembaga terdiri dari :
	- Satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yaitu pengadaan barang yang habis dipakai antara lain pembelian alat-alat tulis, barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, biaya minum/makanan kecil untuk rapat, biaya penerimaan tamu
	- Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah pegawai antara lain biaya Satpam/pengaman kantor, , telex, internet, komunikasi khusus diplomat, pengurusan sertifikat tanah, pembayaran PBB



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

	- Pengeluaran untuk membiayai pengadaan/penggantian inventaris yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kantor/satker di bawah nilai kapitalisasi.
521112	Belanja pengadaan bahan makanan
	Pengeluaran untuk pengadaan bahan makanan
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
	Pengeluaran untuk membiayai pengadaan bahan makanan / minuman / obat-obatan yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan operasional kepada pegawai
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas pos Pusat
	Pengeluaran untuk membiayai Pengiriman surat menyurat dalam rangka kedinasan yang dibayarkan oleh Kementerian Negara/lembaga
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya
	Pengeluaran untuk membiayai pengadaan barang yang tidak dapat ditampung dalam mata anggaran 52111, 521113, 521114 dalam rangka kegiatan operasional
5212	Belanja Barang Non Operasional
52121	Belanja Barang Non Operasional
521211	Belanja Bahan
	Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis dipakai) seperti : <ul style="list-style-type: none">• Alat Tulis Kantor (ATK)• Konsumsi/bahan makanan• Bahan cetakan• Dokumentasi• Spanduk• Biaya Fotokopi. yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional seperti dies natalis, pameran, seminar, pejabat, sosialisasi, rapat dan lain lain.
521212	Belanja Barang Transito
	Digunakan untuk pengeluaran pembiayaan belanja barang pada satuan kerja – satuan kerja yang baru dibentuk /UPT termasuk di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi atau satker yang tidak melekat pada Bagian Anggaran / Kementerian Negara / Lembaga serta bisa digunakan oleh satker lain yang telah diberikan persetujuan oleh Menkeu.
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya
	Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam mata anggaran 521211 dan 521211 termasuk belanja barang / modal yang akan diserahkan kepada masyarakat serta biaya-biaya Crash Program.
522	Belanja Jasa
5221	Belanja Jasa
52211	Belanja Jasa
522111	Belanja Langganan daya dan jasa
	Digunakan untuk pembayaran langganan daya dan jasa seperti listrik, telepon, air, dan gas termasuk untuk pembayaran denda keterlambatan pembayaran langganan daya dan jasa
522112	Belanja Jasa pos dan giro
	Digunakan untuk pembayaran jasa perbendaharaan yang telah dilaksanakan oleh kantor pos diseluruh Indonesia



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

522113	Belanja Jasa Konsultan
	Digunakan untuk pembayaran jasa konsultan secara kontraktual termasuk jasa pengacara
522114	Belanja Sewa
	Digunakan untuk pembayaran sewa (misalnya sewa kantor/gedung/ruangan, atau sewa lainnya)
522115	Belanja Jasa Profesi
	Belanja untuk pembayaran jasa atas keahlian yang dimiliki dan diberikan kepada Pegawai PNS dan non PNS sebagai nara sumber, pembicara, praktisi, pakar dalam kegiatan di luar Direktorat atau Eselon I pegawai yang bersangkutan untuk kepentingan dinas
522119	Belanja Jasa Lainnya
	Digunakan untuk pembayaran jasa yang tidak bisa ditampung dengan mata anggaran 522113 dan 522114
523	Belanja Pemeliharaan
5231	Belanja Pemeliharaan
52311	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
	<ul style="list-style-type: none">• Pengeluaran pemeliharaan/perbaikan yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Biaya Umum. Dalam rangka mempertahankan gedung dan bangunan kantor dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sampai dengan 2% (termasuk cleaning service) dan• pemeliharaan/perawatan halaman/taman gedung/kantor agar berada dalam kondisi semula, yang nilainya tidak memenuhi syarat kapitalisasi suatu aset
523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
	Pengeluaran untuk membiayai pemeliharaan rumah dinas dan rumah jabatan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas para pejabat seperti istana negara, Jabatan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota/Mahkamah Agung/Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Pimpinan/Ketua Lembaga Non departemen/Tni/Polri/asrama yang terdapat di semua Departemen/Lembaga Non Departemen, termasuk TNI, Polri/Aula yang pisah dengan Gedung Kantor/Gedung Kesenian, Art Center/Gedung Museum beserta isinya termasuk taman pagar agara dalam kondisi normal.
52312	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
	Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi nilai kapitalisasi.
523129	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pengeluaran lainnya untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi nilai kapitalisasi.
52313	Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
523131	Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan jalan dan jembatan agar berada dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi nilai kapitalisasi.
523132	Belanja Biaya Pemeliharaan Irigasi
	Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan irigasi agar berada dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi nilai kapitalisasi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

523133	Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan
	Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan jaringan agar berada dalam kondisi normal
52319	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya
523199	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya
	Pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap selain gedung dan bangunan, peralatan dan mesin serta jalan, irigasi dan jaringan agar berada dalam kondisi normal termasuk pemeliharaan tempat ibadah, bangunan bersejarah seperti candi, bangunan peninggalan Belanda, Jepang yang belum diubah posisinya, kondisi bangunan/Bangunan Keraton/Puri bekas kerajaan, bangunan cagar valam, cagar budaya, makam yang memiliki nilai sejarah
524	Belanja Perjalanan
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri
52411	Belanja Perjalanan Dalam Negeri
524111	Belanja perjalanan biasa
	Pengeluaran untuk perjalanan dinas seperti perjalanan dinas dalam rangka pembinaan/konsultasi, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan/pemeriksaan, mutasi pegawai, mutasi pension, pengiriman jenazah.
524112	Belanja perjalanan tetap
	Pengeluaran untuk perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh kementerian Negara/lembaga untuk kegiatan pelayanan masyarakat Contoh perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama dan lainnya.
524119	Belanja perjalanan lainnya
	Pengeluaran untuk perjalanan lainnya dalam rangka pendukung kegiatan kementerian negara/lembaga yang tidak tertampung di dalam pos belanja perjalanan biasa dan tetap antara lain biaya perjalanan teknis operasional kegiatan
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri
52421	Belanja Perjalanan Luar Negeri
524111	Belanja perjalanan biasa
	Pengeluaran untuk perjalanan dinas seperti perjalanan dinas dalam rangka pembinaan/konsultasi, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan/pemeriksaan, mutasi pegawai, mutasi pension, pengiriman jenazah untuk kepentingan dinas di / ke luar negeri
524112	Belanja perjalanan tetap
	Pengeluaran untuk perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh kementerian Negara/lembaga untuk kegiatan pelayanan warga di / ke luar negeri Contoh perjalanan dinas oleh tenaga ahli di kedutaan besar atau atase
524119	Belanja perjalanan lainnya
	Pengeluaran untuk perjalanan lainnya dalam rangka pendukung kegiatan kementerian negara/lembaga yang tidak tertampung di dalam pos belanja perjalanan biasa dan tetap antara lain biaya perjalanan teknis operasional kegiatan bagi kedutaan besar atau atase di luar negeri.
525	Belanja BLU
5251	Belanja Barang BLU
52511	Belanja Barang dan Jasa BLU
525111	Belanja Gaji dan tunjangan
	Pengeluaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BLU
525112	Belanja Barang
	Pengeluaran untuk pembelian barang untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU
525113	Belanja jasa



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

	Pengeluaran untuk memperoleh jasa untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU
525114	Belanja Pemeliharaan
	Pengeluaran untuk pemeliharaan BMN BLU
525115	Belanja Perjalanan
	Pengeluaran untuk pembayaran perjalanan dinas pegawai BLU
525119	Belanja Penyedia Barang dan jasa BLU Lainnya
	Pengeluaran untuk keperluan diluar akun 525111,525112,525113,525114 dan 525115 untuk menunjang kegiatan BLU yang bersangkutan
53	Belanja Modal
531	Belanja Modal Tanah
5311	Belanja Modal Tanah
53111	Belanja Modal Tanah
531111	Belanja Modal Tanah
	Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran - pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/ pakai (swakelola/kontraktual).
531112	Belanja Modal Pembebasan Tanah
	Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pembebasan, balik nama, pengosongan, serta pengeluaran - pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi secara swakelola sampai tanah tersebut siap digunakan/ pakai (swakelola).
531113	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah
	Pengeluaran untuk pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap digunakan/dipakai (swakelola).
531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah
	Pengeluaran yang dilakukan untuk pembuatan sertifikat tanah pada saat pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap digunakan/dipakai (swakelola).
531115	Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah
	Pengeluaran yang dilakukan untuk pengukuran/penimbunan, perataan dan pematangan tanah pada saat pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap digunakan/dipakai (swakelola).
531116	Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah
	Pengeluaran yang dilakukan untuk pengukuran tanah pada saat pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap digunakan/dipakai (swakelola).
531117	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
	Pengeluaran yang dilakukan untuk kepentingan perjalanan dinas dalam rangka pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap digunakan/dipakai (swakelola).
532	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
53211	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

	Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat dan efisiensi peralatan dan mesin (kontraktual)
532112	Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin Pengeluaran untuk pengadaan bahan baku peralatan dan mesin pada saat pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola
532113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin Pengeluaran untuk pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin siap digunakan.
532114	Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin Pengeluaran untuk pembayaran sewa ruangan, sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
532115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin Pengeluaran untuk pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
532116	Belanja Modal Perijinan Peralatan dan Mesin Pengeluaran untuk pembayaran biaya perijinan yang diperlukan pada saat pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
532117	Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin Pengeluaran untuk pembayaran biaya pemasangan dan instalasi pada saat pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
532118	Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin Pengeluaran untuk pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
533	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
53311	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak (kontraktual).
533112	Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan Pengeluaran untuk pengadaan bahan baku Gedung dan Bangunan pada saat pengadaan Gedung dan Bangunan secara swakelola
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan Pengeluaran untuk pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan gedung dan bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan
533114	Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan Pengeluaran untuk pembayaran sewa ruangan, sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat pengadaan gedung dan bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan tersebut siap digunakan
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Pengeluaran untuk pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan gedung dan bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan tersebut siap digunakan
533116	Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan Pengeluaran untuk pembayaran biaya perijinan yang diperlukan pada saat pengadaan gedung dan bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan tersebut siap digunakan.
533117	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Gedung dan Bangunan Pengeluaran untuk pembayaran biaya pengosongan, pembongkaran bangunan lama pada saat pembongkaran



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

	gedung dan bangunan secara swakelola.
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan gedung dan bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan tersebut siap digunakan
534	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
53411	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan
	Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat dan efisiensi jalan dan jembatan(kontraktual).
534112	Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan
	Pengeluaran untuk pengadaan bahan baku Jalan dan Jembatan pada saat pengadaan jalan dan jembatan secara swakelola
534113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan jembatan
	Pengeluaran untuk pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan jalan dan jembatan secara swakelola sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan
534114	Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan
	Pengeluaran untuk pembayaran sewa ruangan,sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat pengadaan jalana dan jembatan secara swakelola sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan
534115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan jalan dan jembatan secara swakelola sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan
534116	Belanja Modal Perijinan Jalan dan Jembatan
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya perijinan yang diperlukan pada saat pengadaan jalan dan jembatan secara swakelola sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan
534117	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Jalan dan Jembatan
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya pengosongan, pembongkaran bangunan lama pada saat pembangunan jalan dan jembatan secara swakelola.
534118	Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan jalan dan jembatan secara swakelola sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan
53412	Belanja Modal Irigasi
534121	Belanja Modal Irigasi
	Pengeluaran untuk memperoleh irigasi sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai irigasi tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat dan efisiensi irigasi (kontraktual).
534122	Belanja Modal Bahan Baku Irigasi
	Pengeluaran untuk pengadaan bahan baku irigasi pada saat pengadaan irigasi secara swakelola
534123	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi
	Pengeluaran untuk pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan irigasi secara swakelola sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan
534124	Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi
	Pengeluaran untuk pembayaran sewa ruangan,sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat pengadaan irigasi secara swakelola sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan
534125	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan irigasi secara swakelola sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

534126	Belanja Modal Perijinan Irigasi
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya perijinan yang diperlukan pada saat pengadaan irigasi secara swakelola sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan
534127	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Irigasi
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya pengosongan, pembongkaran bangunan lama pada saat pembangunan irigasi secara swakelola
534128	Belanja Modal Perjalanan Irigasi
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan irigasi secara swakelola sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan
53413	Belanja Modal Jaringan
534131	Belanja Modal Jaringan
	Pengeluaran untuk memperoleh jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat dan efisiensi jaringan (kontraktual).
534132	Belanja Modal Bahan Baku Jaringan
	Pengeluaran untuk pengadaan bahan baku jaringan pada saat pengadaan jaringan secara swakelola
534133	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan
	Pengeluaran untuk pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan jaringan secara swakelola sampai dengan jaringan tersebut siap digunakan
534134	Belanja Modal Sewa Peralatan Jaringan
	Pengeluaran untuk pembayaran sewa ruangan, sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat pengadaan jaringan secara swakelola sampai dengan jaringan tersebut siap digunakan
534135	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan jaringan secara swakelola sampai dengan jaringan tersebut siap digunakan
534136	Belanja Modal Perijinan Jaringan
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya perijinan yang diperlukan pada saat pengadaan jaringan secara swakelola sampai dengan jaringan tersebut siap digunakan
534137	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Jaringan
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya pengosongan, pembongkaran bangunan lama pada saat pembangunan jaringan secara swakelola
534138	Belanja Modal Perjalanan Jaringan
	Pengeluaran untuk pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan jaringan secara swakelola sampai dengan jaringan tersebut siap digunakan
535	Belanja Pemeliharaan yang dikapitalisasi
5351	Belanja Pemeliharaan yang dikapitalisasi
53511	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang dikapitalisasi
	<ul style="list-style-type: none">• Pengeluaran pemeliharaan/perbaikan yang nilai kerusakan bangunan sesuai standar biaya umum• pemeliharaan/perawatan gedung/kantor, yang nilainya memenuhi syarat kapitalisasi suatu aset sesuai dengan peraturan menteri keuangan tentang kapitalisasi.
53512	Belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin yang dikapitalisasi
535121	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yang dikapitalisasi
	Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang nilainya memenuhi nilai kapitalisasi sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini menteri keuangan.
523129	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikapitalisasi.
	Pengeluaran lainnya untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang nilainya nilai kapitalisasi sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini menteri keuangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

53513	Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dikapitalisasi
535131	Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang dikapitalisasi
	Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan jalan dan jembatan agar berada dalam kondisi normal yang nilainya memenuhi nilai kapitalisasi sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini menteri keuangan.
535132	Belanja Biaya Pemeliharaan Irigasi.
	Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan irigasi agar berada dalam kondisi normal yang nilainya memenuhi nilai kapitalisasi sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini menteri keuangan.
535133	Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan yang dikapitalisasi.
	Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan jaringan agar berada dalam kondisi normal yang nilainya memenuhi nilai kapitalisasi sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini menteri keuangan.
53519	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya yang dikapitalisasi
535191	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya yang dikapitalisasi
	Pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap selain gedung dan bangunan, peralatan dan mesin serta jalan, irigasi dan jaringan agar berada dalam kondisi normal termasuk pemeliharaan tempat ibadah, bangunan bersejarah seperti candi, bangunan peninggalan Belanda, Jepang yang belum diubah posisinya, kondisi bangunan/Bangunan Keraton/Puri bekas kerajaan, bangunan cagar alam, cagar budaya, makam yang memiliki nilai sejarah yang nilainya memenuhi nilai kapitalisasi sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini menteri keuangan
536	Belanja Modal Fisik Lainnya
5361	Belanja Modal Fisik Lainnya
53611	Belanja Modal Fisik Lainnya
536111	Belanja Modal Fisik Lainnya
	Pengeluaran untuk memperoleh modal fisik lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan belanja modal non fisik sampai siap pakai. Termasuk dalam belanja modal ini : kontrak sewa beli (leasehold), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian, barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum serta hewan ternak selain untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat, buku-buku dan jurnal ilmiah.
537	Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)
5371	Belanja Modal BLU
53711	Belanja Modal BLU
537111	Belanja Modal Tanah
	Belanja Modal Tanah BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Gedung
	Belanja Modal Peralatan dan Gedung BLU
537113	Belanja Modal gedung dan Bangunan
	Belanja Modal gedung dan Bangunan BLU
537114	Belanja Modal Fisik Jalan, Irigasi, dan Jaringan
	Belanja Modal Fisik Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya
	Belanja Modal Fisik Lainnya BLU
54	Belanja Pembayaran Bunga Utang
541	Belanja Pembayaran Bunga Utang
5411	Belanja Pembayaran Bunga Utang DN – Jangka Pendek
54111	Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara
541111	Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara – Rupiah
	Digunakan untuk pembayaran beban bunga terhadap penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dalam negeri dan surat Berharga lainnya
541119	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Surat Perbendaharaan Negara
	Digunakan untuk pengeluaran kewajiban pemerintah lainnya terhadap bunga Surat perbendaharaan Negara dalam negeri



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

5412	Belanja Pembayaran Bunga Utang DN – Jangka Panjang
54121	Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara
541211	Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Rupiah Digunakan untuk pembayaran beban bunga Obligasi Dalam Negeri yang harus dibayar oleh pemerintah
541219	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Obligasi Negara Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya Bunga Obligasi Negara
5413	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri
54131	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang
541311	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang Digunakan untuk pembayaran Imbalan Surat berharga Syariah Negara Jangka panjang
541312	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Panjang Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya Imbalan SBSN Jangka Panjang
54132	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek
541321	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek Digunakan untuk pembayaran Imbalan Surat berharga Syariah Negara Jangka pendek
541322	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Pendek Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya Imbalan SBSN Jangka Panjang
5414	Belanja Pembayaran Bunga Utang LN – Jangka Panjang
54141	Belanja Bunga Pinjaman program
541411	Belanja Bunga Pinjaman Program Digunakan untuk pembayaran beban bunga pinjaman program atau nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan serta pinjaman yang dapat dirupiahkan.
541419	Belanja Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program Digunakan untuk pengeluaran biaya/kewajiban pemerintah lainnya terhadap utang luar negeri jangka panjang dalam rangka pinjaman program.
54142	Belanja Bunga Pinjaman proyek
541421	Belanja Bunga Pinjaman Proyek Digunakan untuk pembayaran beban bunga pinjaman proyek atau nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri di luar pinjaman program
541429	Belanja Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek Digunakan untuk pengeluaran biaya/kewajiban pemerintah lainnya terhadap utang luar negeri jangka panjang dalam rangka pinjaman proyek
54143	Belanja Bunga Obligasi Negara Valas
541431	Belanja Bunga Obligasi Negara – Valas Digunakan untuk pembayaran beban bunga terhadap penerbitan Obligasi pemerintah dalam bentuk valas
541439	Belanja Biaya/kewajiban lainnya – Bunga Obligasi Negara Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya dan bunga Obligasi negara yang harus dibayar oleh pemerintah
54144	Belanja Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman
541441	Belanja Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Program Digunakan untuk pembayaran beban bunga terhadap utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Program
541442	Belanja Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Proyek Digunakan untuk pembayaran beban bunga terhadap utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Proyek



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

541449	Belanja Biaya/kewajiban lainnya – Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya - bunga utang LN melalui penjadualan kembali pinjaman
54145	Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara
541451	Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara – Valuta Asing Digunakan untuk pembayaran beban bunga Surat Perbendaharaan Negara dalam bentuk valas yang harus dibayar oleh pemerintah
541459	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Surat Perbendaharaan Negara Digunakan untuk pengeluaran rutin pembayaran biaya/kewajiban lainnya - Bunga Surat Perbendaharaan Negara dalam bentuk valuta asing
5415	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri
54151	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang
541511	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang - Valas Digunakan untuk pembayaran Imbalan Surat berharga Syariah Negara Jangka panjang
541519	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Panjang - Valas Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya Imbalan SBSN Jangka Panjang
54152	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek
541521	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek - Valas Digunakan untuk pembayaran Imbalan Surat berharga Syariah Negara Jangka Pendek
541529	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Pendek - Valas Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya Imbalan SBSN Jangka Pendek
542	Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri
5421	Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri
54211	Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri
542111	Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri Digunakan untuk pembayaran discount yang diberikan atas penerbitan surat perbendaharaan Negara Dalam Negeri
542119	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri Digunakan untuk pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri
54212	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri
542121	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri Digunakan untuk pembayaran discount yang diberikan atas penerbitan obligasi Negara Dalam Negeri
542129	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount Obligasi Negara Dalam Negeri Digunakan untuk pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount obligasi Dalam Negeri
543	Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Luar Negeri
5431	Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Luar Negeri
54311	Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri
543111	Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri Digunakan untuk pembayaran Discount Surat Utang Perbendaharaan Negara Luar Negeri
543119	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri Digunakan untuk pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

54312	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri
543121	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri Digunakan untuk pembayaran Discount Surat Utang Perbendaharaan Negara Luar Negeri
543129	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount Obligasi Negara Luar Negeri Digunakan untuk pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Obligasi Negara Luar Negeri
544	Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption
5441	Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Dalam Negeri
54411	Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Dalam Negeri
544111	Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Dalam Negeri Digunakan untuk mencatat beban yang timbul dari selisih lebih clean price yang dibayar Pemerintah pada saat pembelian kembali SUN (buyback) dengan carrying value SUN. carrying value SUN ialah nilai nominal SUN setelah dikurangi atau ditambah unamortized discount atau premium
545	Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri
5451	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri
54511	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Panjang
545111	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Panjang
545119	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount SBSN Jangka Panjang
54512	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Pendek
545121	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Pendek
545129	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount SBSN Jangka Pendek
546	Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri
5461	Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri
54611	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Panjang
546111	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Panjang - Valas
546119	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Discount SBSN Jangka Panjang - Valas
547	Belanja Denda
5471	Belanja Pembayaran Denda
54711	Belanja Pembayaran Imbalan Bunga
547111	Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Pajak (SPM-IB Pajak) Digunakan untuk pembayaran imbalan bunga atas kelalaian pemerintah membayar kembali pengembalian kelebihan pajak (restitusi)
547112	Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan Digunakan untuk pembayaran imbalan bunga atas pinjaman perbankan
547113	Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Bea dan Cukai (SPM-IB Bea dan Cukai) Digunakan untuk pembayaran imbalan bunga atas kelalaian pemerintah membayar kembali pengembalian kelebihan bea dan cukai
547119	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Bunga Dalam Negeri Jangka Pendek Lainnya Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya - Bunga dalam negeri jangka pendek lainnya



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

55	Belanja Subsidi
551	Belanja Subsidi Perusahaan Negara
5511	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
55111	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
551111	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan - Perusahaan Negara
	Digunakan untuk pembayaran subsidi melalui lembaga keuangan misalnya subsidi bunga KPR
5512	Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - BBM
55121	Belanja Subsidi BBM
551211	Belanja Subsidi Avgas
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi avgas yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan avgas.
551212	Belanja Subsidi Avtur
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi avtur yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan avtur.
551213	Belanja Subsidi Premium
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi premium yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan premium.
551214	Belanja Subsidi Minyak Bakar
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak bakar yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan minyak bakar.
551215	Belanja Subsidi Minyak Solar
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak solar yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan minyak solar.
551216	Belanja Subsidi Minyak Diesel
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak diesel yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan minyak diesel.
551217	Belanja Subsidi Minyak Tanah
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak tanah yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan minyak tanah.
551218	Belanja Subsidi Elpiji
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak tanah yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan elpiji.
5513	Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - Non BBM
55131	Belanja Subsidi Non-BBM - Harga/Biaya
551311	Belanja Subsidi pangan
	Digunakan untuk pengeluaran subsidi selisih harga yang diberikan kepada BULOG atas penyaluran beras OPK kepada Keluarga Miskin dengan perhitungan berdasarkan selisih antara harga jual beras OPK (Rp. 1.000,00) dengan Harga Pokok Beras BULOG.
551312	Belanja Subsidi listrik
	Digunakan untuk pengeluaran subsidi dalam rangka menutup defisit arus kas operasi PT. PLN (Persero). Subsidi ini diberikan akibat harga jual listrik yang ditentukan oleh Pemerintah lebih rendah dibandingkan biaya produksi listrik oleh PT. PLN (Persero)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

551313	Belanja Subsidi benih	Digunakan untuk pengeluaran subsidi selisih harga benih yang diberikan kepada petani melalui BUMN Benih terhadap penjualan benih padi dan kedele dibanding dengan biaya produksinya.
551314	Belanja Subsidi obat	Digunakan untuk pengeluaran subsidi selisih kurs atas pembelian impor bahan baku obat yang digunakan untuk pembuatan obat-obatan generik, alat kesehatan dan Keluarga Berencana.
551315	Belanja Subsidi gula	Digunakan untuk pengeluaran subsidi harga yang diberikan kepada petani melalui Pabrik Gula atas selisih harga jual gula petani dengan provenue yang ditetapkan oleh Pemerintah.
551316	Belanja Subsidi pupuk	Digunakan untuk pengeluaran subsidi harga yang diberikan kepada petani melalui Pabrik Pupuk atas selisih harga jual pupuk dengan provenue yang ditetapkan oleh Pemerintah.
551317	Belanja Subsidi perawatan beras	
551318	Belanja Subsidi pengawasan pupuk	
551319	Belanja Subsidi harga/biaya lainnya	Digunakan untuk pengeluaran subsidi selain subsidi pupuk, subsidi gula, subsidi obat, subsidi benih, subsidi pangan dan subsidi listrik.
55132	Belanja Subsidi Non-BBM - Pajak	
551321	Belanja Subsidi PPh	Digunakan untuk menampung pengeluaran negara atas pembayaran PPh yang ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.
551322	Belanja Subsidi PPN	Digunakan untuk menampung pengeluaran negara atas pembayaran PPN yang ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.
551323	Belanja Subsidi BM	Digunakan untuk menampung pengeluaran negara atas pembayaran BM yang ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.
55133	Belanja Subsidi Non-BBM - Lainnya	
551331	Belanja Subsidi haji	Digunakan untuk pengeluaran subsidi selisih kurs yang diberikan kepada jamaah haji terhadap perubahan kurs dibandingkan kurs dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah.
551332	Belanja Subsidi kendaraan bermotor	Digunakan untuk pengeluaran subsidi bunga kredit yang diberikan kepada anggota lembaga tinggi negara (DPR, DPA, MA, BPK) serta para pejabat eselon dalam Pemerintahan untuk pengadaan kendaraan perorangan.
551339	Belanja Subsidi lainnya	Digunakan untuk pengeluaran subsidi lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5514	Belanja Subsidi Lembaga Non-Kuangan - PSO	
55141	Belanja Subsidi dalam rangka PSO	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

551411	Belanja Subsidi PT KAI
	Digunakan untuk pengeluaran bantuan kepada PT. Kereta Api Indonesia.
551412	Belanja Subsidi PT PELNI
	Digunakan untuk pengeluaran bantuan kepada PT. PELNI
551413	Belanja Subsidi PT Pos Indonesia
	Digunakan untuk pengeluaran bantuan kepada PT. Pos Indonesia
551414	Belanja Subsidi TVRI
	Digunakan untuk pengeluaran bantuan kepada TVRI
551415	Belanja Subsidi BULOG
	Digunakan untuk pengeluaran bantuan kepada BULOG
551419	Belanja Subsidi dalam rangka PSO Lainnya
	Digunakan untuk pengeluaran bantuan dalam rangka PSO lainnya
552	Belanja Subsidi Perusahaan Swasta
5521	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
55211	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
552111	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan - Perusahaan Swasta
	Digunakan untuk pengeluaran bantuan kepada lembaga keuangan
55212	Belanja Subsidi Non-BBM - Bunga Kredit
552121	Belanja Subsidi Bunga KUT
	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Usaha Tani (KUT)
552122	Belanja Subsidi Bunga KOP PIR
	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Koperasi Anggota Perkebunan Inti Rakyat-Transmigrasi
552123	Belanja Subsidi Bunga KOP
	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Koperasi (KKop)
552124	Belanja Subsidi Bunga KOP PRIM
	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA)
552125	Belanja Subsidi Bunga KPR
	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana
552126	Belanja Subsidi Bunga Ketahanan Pangan
	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Ketahanan Pangan (KKP)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

552129	Belanja Subsidi Bunga kredit program lainnya
	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Program Lainnya.
5522	Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan
55221	Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan
552211	Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan
	Digunakan untuk pengeluaran bantuan kepada lembaga non keuangan
56	Belanja Hibah
561	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
5611	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
56111	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
561111	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
	Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain.
562	Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
5621	Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
56211	Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
562111	Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
	Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada organisasi internasional.
563	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
5631	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
56311	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
563111	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
	Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada pemerintah daerah.
57	Belanja Bantuan sosial
	Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian negara/lembaga, guna melindungi dari kemungkinan terjadinya berbagai risiko sosial.
571	Belanja Bantuan kompensasi sosial
5711	Belanja Bantuan kompensasi sosial
57111	Belanja Bantuan kompensasi sosial
571111	Belanja Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM
	Digunakan untuk pengeluaran Subsidi yang diberikan kepada masyarakat akibat kenaikan harga BBM
572	Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan dan Peribadatan
5721	Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan
57211	Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan
572111	Belanja Bantuan langsung (Block Grant) Sekolah/Lembaga/Guru
	Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk bantuan langsung (Block Grant) sekolah/lembaga/guru



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

572112	Belanja Bantuan imbal swadaya Sekolah/Lembaga
	Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk bantuan imbal swadaya sekolah/lembaga
572113	Belanja Bantuan Beasiswa
	Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk bantuan beasiswa
5722	Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan
57221	Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan
572211	Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan
	Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian negara/lembaga, guna meningkatkan sarana dan prasarana peribadatan
573	Belanja Lembaga Sosial Lainnya
5731	Belanja Lembaga Sosial Lainnya
57311	Belanja Lembaga Sosial Lainnya
573119	Belanja Lembaga Sosial Lainnya
	Digunakan untuk pengeluaran negara kepada lembaga sosial lainnya
58	Belanja Lain-lain
581	Belanja Lain-lain
5811	Belanja Lain-lain
	Digunakan untuk pengeluaran atau belanja pemerintah pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, belanja sosial dan dana cadangan umum.
58111	Belanja Rekonstruksi Aceh
581111	Belanja untuk Rekonstruksi Aceh
	Digunakan untuk pengeluaran dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias
58112	Belanja Lain-lain I
581121	Belanja Kerjasama Teknis Internasional
	Digunakan untuk pembayaran iuran-iuran keanggotaan RI dalam berbagai organisasi/ Badan Internasional.
581122	Belanja Pengeluaran Tak Tersangka
	Digunakan untuk pengeluaran yang tidak terduga dan tidak tertampung di dalam pos-pos pengeluaran yang lain.
581123	Belanja Cadangan Umum
	Digunakan untuk pengeluaran dalam rangka membentuk yang menggunakan dana cadangan umum
581124	Belanja Pemilu/sidang tahunan
	Digunakan untuk pengeluaran pembiayaan kegiatan dalam rangka pemilu/sidang tahunan
581125	Belanja Cadangan tunjangan beras PNS/TNI/Polri
	Digunakan untuk pembayaran selisih harga beras PNS/TNI/POLRI bila terjadi kenaikan pembelian harga beras Pemerintah kepada BULOG
581126	Belanja Cadangan dana reboisasi
	Digunakan untuk pengeluaran pembiayaan kegiatan dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana kehutanan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

581127	Belanja Tunggakan dan klaim pihak ketiga
	Digunakan untuk pembayaran terhadap klaim dari pihak ketiga
581128	Belanja Dana Cadangan Tanggap Darurat (Dana Kontijensi)
	Digunakan untuk pengeluaran yang sifatnya darurat BA 69
58113	Belanja Lain-lain II
581131	Belanja Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk DJP
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB sebesar 9 persen bagian biaya pemungutan dan disalurkan ke Rekening Kas Negara dan Kas daerah.
581132	Belanja KONI
	Bantuan Rutin kepada KONI Pusat dalam rangka tugas rutin KONI.
581133	Belanja Dana Penunjang (PHLN) yang dialokasikan untuk Pemda
	Digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Pemda bersumber dari PHLN, Sesuai dengan KMK No. 35 Tahun 2002 tentang Tatacara Pemberian dan Penatausahaan PHLN kepada Pemda .
581134	Belanja Non Modal-Otorita Batam
	Pengeluaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan otorita batam yang bersumber dari rupiah murni .
581135	Belanja karena rugi selisih kurs
	Pengeluaran yang digunakan untuk menutup kerugian karena selisih kurs pada saat konversi Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran (dari valas ke rupiah) khusus untuk Bendahara Pengeluaran Kantor Perwakilan Departemen Luar Negeri.
581136	Jasa Surveyor
	Pengeluaran Kementerian Negara / Lembaga tertentu yang dipakai untuk pelaksanaan survey untuk kepentingan tugas K/L khusus yang dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga (lembaga survey)
581137	Jasa Perbendaharaan
	Pengeluaran yang dipakai untuk pembayaran atas jasa perbendaharaan yang diberikan oleh kantor pos dalam pelaksanaan pengeluaran dan penerimaan Negara yang dilaksanakan oleh kantor pusat Ditjen Perbendaharaan
581138	Jasa Pelayanan Bank Operasional
	Pengeluaran yang dipakai untuk pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan oleh BO
58114	Belanja Lain-lain III
581141	Belanja TVRI
	Belanja yang dilakukan untuk kepentingan TVRI untuk menampung limpahan belanja subsidi kepada TVRI
581142	Belanja RRI
	Belanja eks perjan baik pegawai maupun barang yang dilakukan untuk kepentingan RRI untuk menampung limpahan belanja subsidi kepada RRI
581149	Belanja lain-lain III lainnya
	Digunakan untuk pengeluaran belanja lainnya
6	TRANSFER KE DAERAH
	Semua pengeluaran negara berupa transfer untuk membiayai dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian.
61	Transfer Dana Perimbangan
	semua pengeluaran negara berupa transfer yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

611	Transfer Dana Bagi Hasil
	Digunakan untuk pengeluaran negara yang dialokasikan kepada bagian daerah atas penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan sumber daya alam, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta bagian daerah atas Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.
6111	Transfer Dana Bagi Hasil Perpajakan
61111	Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan
611111	Transfer Dana Bagi hasil PPh ps1 21 untuk Propinsi
	Pengeluaran negara atas penyaluran penerimaan PPh Pasal 21 yang merupakan bagian pendapatan Propinsi.
611112	Transfer Dana Bagi hasil PPh ps1 21 untuk Kabupaten/Kota
	Pengeluaran negara atas penyaluran penerimaan PPh Pasal 21 yang merupakan bagian pendapatan Kabupaten/Kota.
611113	Transfer Dana Bagi hasil PPh ps1 25/29 OP untuk Propinsi
	Pengeluaran negara atas penyaluran penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi yang merupakan bagian pendapatan Propinsi.
611114	Transfer Dana Bagi hasil PPh ps1 25/29 OP untuk Kabupaten/Kota
	Pengeluaran negara atas penyaluran penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi yang merupakan bagian pendapatan Kabupaten/Kota.
61112	Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
611121	Transfer Dana Bagi hasil PBB untuk Propinsi
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian propinsi sebesar 16,2 persen dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Propinsi.
611122	Transfer Dana Bagi hasil PBB untuk Kabupaten/Kota
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian Kabupaten/Kota sebesar 64,8 persen dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota.
611123	Transfer Dana Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian daerah untuk Biaya Pemungutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Propinsi.
611124	Transfer Dana Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kab./Kota
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian daerah untuk Biaya Pemungutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota.
611125	Transfer Dana PBB bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Kabupaten/Kota
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian Pemerintah Pusat dan dibagikan kepada seluruh Kabupaten/Kota, yang pengalokasiannya didasarkan atas realisasi penerimaan PBB Tahun Anggaran Berjalan.
61113	Transfer Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
611131	Transfer Dana Bagi hasil BPHTB untuk Propinsi
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan BPHTB yang merupakan bagian propinsi sebesar 16 persen dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Propinsi.
611132	Transfer Dana Bagi hasil BPHTB untuk Kabupaten/Kota
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan BPHTB yang merupakan bagian daerah Kabupaten/Kota



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

	sebesar 64 persen dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota.
611133	Transfer BPHTB bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Kabupaten/Kota Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan BPHTB yang merupakan bagian Pemerintah Pusat dan dibagikan kepada seluruh Kabupaten/Kota secara merata.
611134	Transfer BPHTB Bagian Pemerintah Pusat dibagikan untuk Perbaikan Administrasi Pertanahan Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan BPHTB yang merupakan bagian Pemerintah Pusat yang digunakan untuk Biaya Perbaikan Administrasi Pertanahan.
611135	Transfer BPHTB Bagian Pemerintah Pusat utk biaya Adm.Pengkt.Pel. BPHTB Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan BPHTB yang merupakan bagian Pemerintah Pusat yang digunakan untuk Biaya Administrasi Peningkatan Pelayanan BPHTB.
611136	Transfer BPHTB Bagian Pemerintah Pusat utk Pemberian Imbalan Bunga Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan BPHTB yang merupakan bagian Pemerintah Pusat yang digunakan untuk Pemberian Imbalan Bunga.
6112	Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
61121	Transfer Dana Bagi Hasil Minyak Bumi
611211	Transfer Dana Bagi hasil minyak bumi untuk Propinsi Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA minyak bumi yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Propinsi.
611212	Transfer Dana Bagi hasil minyak bumi untuk Kab./Kota Penghasil Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA minyak bumi yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil.
611213	Transfer dana Bagi hasil minyak bumi untuk Kab./Kota lainnya Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA minyak bumi yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Propinsi penghasil.
61122	Transfer Dana Bagi Hasil Gas Alam
611221	Transfer Dana Bagi hasil gas alam untuk Propinsi Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA gas alam yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Propinsi penghasil.
611222	Transfer dana Bagi hasil gas alam untuk Kab./Kota Penghasil Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA gas alam yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil.
611223	Transfer Dana Bagi hasil gas alam untuk Kab./Kota lainnya Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA gas alam yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Propinsi penghasil.
61123	Transfer Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum
611231	Transfer Dana Bagi hasil iuran tetap untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil iuran Tetap sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil
611232	Transfer Dana Bagi hasil iuran tetap untuk Kab./Kota Menyalurkan bagi hasil iuran Tetap sebesar 64 % kepada Kabupaten/Kota Penghasil



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

611233	Transfer Dana Bagi hasil royalti untuk Propinsi
	Menyalurkan bagi hasil Royalti sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil
611234	Transfer Dana Bagi hasil royalti untuk Kab./Kota Penghasil
	Menyalurkan bagi hasil Royalti sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kota Penghasil
611235	Transfer Dana Bagi hasil royalti untuk Kab./Kota lainnya
	Menyalurkan bagi hasil Royalti sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil
61124	Transfer Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi
611241	Transfer Bagi hasil iuran tetap untuk Propinsi
	Menyalurkan bagi hasil Iuran Tetap sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil
611242	Transfer Dana Bagi hasil iuran tetap untuk Kab./Kota
	Menyalurkan bagi hasil Iuran Tetap sebesar 64 % kepada Kabupaten/Kota Penghasil
611243	Transfer Dana Bagi hasil royalti untuk Propinsi
	Menyalurkan bagi hasil Royalti sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil
611244	Transfer Dana Bagi hasil royalti untuk Kab./Kota Penghasil
	Menyalurkan bagi hasil Royalti sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kota Penghasil
611245	Transfer Dana Bagi hasil royalti untuk Kab./Kota lainnya
	Menyalurkan bagi hasil Royalti sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil
61125	Transfer Dana Bagi Hasil Kehutanan
611251	Transfer Dana Bagi hasil IHPH untuk Propinsi
	Menyalurkan bagi hasil IHPH sebesar 16% kepada Propinsi penghasil
611252	Transfer Dana Bagi hasil IHPH untuk Kab./Kota
	Menyalurkan bagi hasil IHPH sebesar 64% kepada Kabupaten/Kota Penghasil
611253	Transfer Dana Bagi hasil PSDH untuk Propinsi
	Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 16% kepada Propinsi penghasil
611254	Transfer Dana Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil
	Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Penghasil
611255	Transfer Dana Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya
	Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil
611256	Transfer DBH Dana Reboisasi untuk Kab./Kota Penghasil
	Pengeluaran DAK yang bersumber dari dana reboisasi dan digunakan untuk kab/kota
61126	Transfer Dana bagi Hasil Perikanan
611261	Transfer Dana Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota
	Menyalurkan bagi hasil perikanan sebesar 80% secara merata kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

612	Transfer Dana Alokasi Umum
6121	Transfer Dana Alokasi Umum
61211	Transfer Dana Alokasi Umum
612111	Transfer DAU untuk Propinsi
	Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Propinsi.
612112	Transfer DAU untuk Kabupaten/Kota
	Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Kabupaten/Kota.
613	Transfer Dana Alokasi Khusus
6131	Transfer DAK
61311	Transfer DAK Pendidikan
613111	Transfer DAK untuk Pendidikan
	Pengeluaran DAK yang digunakan untuk kegiatan di bidang pendidikan
61312	Transfer DAK Kesehatan
613121	Transfer DAK untuk Kesehatan
	Pengeluaran DAK yang digunakan untuk kegiatan di bidang kesehatan
61313	Transfer DAK Infrastruktur
613131	Transfer DAK untuk Infrastruktur
	Pengeluaran DAK yang digunakan untuk kegiatan di bidang infrastruktur.
61314	Transfer DAK Pemekaran Daerah (Pemerintahan)
613141	Transfer DAK untuk Pemekaran Pemerintah
	Pengeluaran DAK yang digunakan untuk kegiatan di bidang pemekaran pemerintah
61315	Transfer DAK Kelautan dan Perikanan
613151	Transfer DAK untuk Kelautan dan Perikanan
	Pengeluaran DAK yang digunakan untuk kegiatan di bidang kelautan dan perikanan
61326	Transfer DAK Pertanian
613261	Transfer DAK untuk Pertanian
	Pengeluaran DAK yang digunakan untuk kegiatan di bidang pertanian
61327	Transfer DAK Lingkungan Hidup
613271	Transfer DAK untuk Lingkungan Hidup
	Pengeluaran DAK yang digunakan untuk kegiatan di bidang Lingkungan Hidup
62	Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
621	Transfer Dana Otonomi Khusus
6211	Transfer Dana Otonomi Khusus
62111	Transfer Dana Otonomi Khusus
621111	Transfer Dana Otonomi Khusus untuk Papua
	Pengeluaran untuk pelaksanaan otonomi khusus untuk papua, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001
621112	Transfer Dana Otonomi Khusus untuk NAD



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

	Pengeluaran untuk pelaksanaan otonomi khusus untuk NAD
621113	Transfer Dana Otonomi Khusus tambahan infrastruktur untuk Papua
	Pengeluaran berupa transfer untuk dana otonomi khusus tambahan infrastruktur untuk Papua
622	Transfer Dana Penyesuaian/Penyeimbang
6221	Transfer Dana Penyesuaian
62211	Transfer Dana Penyesuaian
622111	Transfer Dana Penyesuaian untuk Propinsi
	Pengeluaran berupa transfer dana penyesuaian, pelaksanaan pencairannya menggunakan Bagian anggaran 71 (Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang)
622112	Transfer Dana Penyesuaian untuk Kabupaten/Kota
	Pengeluaran berupa transfer dana penyesuaian, pelaksanaan pencairannya menggunakan Bagian anggaran 71 (Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang) untuk Kabupaten/Kota
622119	Transfer Dana Penyesuaian Lainnya
	Transfer Dana penyesuaian lainnya



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR PENJELASAN AKUN

7	PEMBIAYAAN
71	Penerimaan Pembiayaan
711	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan
7111	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan
71111	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan
	Penerimaan yang berasal dari pinjaman pemerintah pusat dari Bank dalam negeri.
711111	Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL)
	Penerimaan dari Sisa Anggaran Lebih tahun-tahun sebelumnya dan besar penggunaan dalam pembiayaan dengan persetujuan DPR.
711112	Penerimaan Pembiayaan dari Rekening Dana Investasi
	Penerimaan RKUN 502.000.000 yang berasal dari rekening dana investasi
711113	Penerimaan Pembiayaan dari Rekening BUN untuk Obligasi
	Penerimaan RKUN 502.000.000 yang berasal dari rekening BUN untuk Obligasi
71112	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan dana moratorium
711121	Penerimaan Pembiayaan dari dana eks moratorium pokok untuk Cadangan Aceh
	Penerimaan dari cadangan moratorium Aceh
7112	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Non-Perbankan
71121	Penerimaan Hasil Privatisasi
711211	Penerimaan Hasil Privatisasi
	Penerimaan dari hasil penjualan saham.
7113	Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
71131	Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
711311	Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
	Penerimaan dari penjualan aset restrukturisasi perbankan/pengembalian dana talangan dari BPPN
711312	Penerimaan Hasil Penjualan / Penyelesaian Aset Eks. BPPN
	Penerimaan dari penjualan / penyelesaian aset yang selama ini dimiliki oleh BPPN
7114	Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara/Obligasi
71141	Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri
711411	Penerimaan Penerbitan / Penjualan Surat Perbendaharaan Negara
	Penerimaan dari penerbitan/penjualan Surat Perbendaharaan Negara dalam negeri yg jatuh tempo dlm periode tidak lebih dari satu tahun.
71142	Penerimaan dari Penjualan Obligasi Dalam Negeri
711421	Penerimaan Penerbitan / Penjualan Obligasi Negara Dalam Negeri
	Penerimaan dari penjadualan kembali obligasi dalam negeri jangka panjang. Karena tidak ada penerimaan sesungguhnya, akun ini digunakan hanya untuk memungkinkan pelaporan terhadap utang bunga obligasi yang dijadualkan kembali.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

711422	Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri
	Penerimaan bunga obligasi dalam negeri jangka panjang dari obligor yang diterima pada saat penjualan obligasi dan akan dibayarkan kembali kepada obligor pada saat jatuh tempo bunga obligasi).
71143	Penerimaan dari penjualan SBSN Dalam negeri Jangka Pendek
711431	Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN Jangka Pendek
	Penerimaan dari penerbitan atau penjualan Surat Berharga Syariah Negara yang jatuh tempo tidak lebih dari satu tahun di bursa dalam negeri.
71144	Penerimaan dari penjualan SBSN Dalam negeri Jangka Panjang
711441	Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN Jangka panjang
	Penerimaan dari penerbitan atau penjualan Surat Berharga Syariah Negara yang jatuh tempo lebih dari satu tahun di bursa dalam negeri.
711442	Penerimaan imbalan dibayar di muka SBSN Jangka panjang
	Penerimaan dari imbalan dibayar di muka Surat Berharga Syariah Negara yang jatuh tempo lebih dari satu tahun di bursa dalam negeri.
712	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri
7121	Penarikan Pinjaman Program
71211	Penarikan Pinjaman Program Bilateral
712111	Penarikan Pinjaman Program dari OECF
	Penerimaan pinjaman program dari negara pemberi pinjaman, yaitu Jepang.
712119	Penarikan Pinjaman Program Bilateral Lainnya
	Penerimaan pinjaman program dari negara pemberi pinjaman selain Jepang.
71212	Penarikan Pinjaman Program Multilateral
712121	Penarikan Pinjaman Program dari IBRD
	Penerimaan pinjaman program dari lembaga/badan internasional IBRD.
712122	Penarikan Pinjaman Program dari ADB
	Penerimaan pinjaman program dari lembaga/badan internasional ADB.
712129	Penarikan Pinjaman Program Multilateral Lainnya
	Penerimaan pinjaman program dari lembaga/badan internasional lainnya selain IBRD dan ADB.
7122	Penarikan Pinjaman Proyek
71221	Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral
712211	Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral
	Penerimaan pinjaman proyek dari Pemerintah suatu negara melalui lembaga/ badan keuangan yang dibentuk oleh negara bersangkutan untuk mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberian pinjaman/hibah kepada negara-negara penerima.
71222	Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral
712221	Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral
	Penerimaan pinjaman proyek dari lembaga/badan internasional seperti IBRD, ADB, IDA, IFAD dll.
71223	Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor
712231	Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

	Penerimaan dari pinjaman proyek yang disediakan dan dijamin oleh suatu negara melalui lembaga pengembang ekspornya kepada Pemerintah Indonesia untuk pembelian barang modal dan atau jasa dari negara pemberi pinjaman untuk keperluan proyek-proyek Pemerintah.
71224	Penarikan Pinjaman Proyek Leasing
712241	Penarikan Pinjaman Proyek Leasing
	Penerimaan dari pinjaman proyek yg diberikan kpd Pemerintah utk membiayai pembelian barang dan atau jasa dgn cara angsuran dari suatu perusahaan leasing di luar negeri berdasarkan KJB antara proyek dan pemasok.
71225	Penarikan Pinjaman Proyek Komersial
712251	Penarikan Pinjaman Proyek Komersial
	Penerimaan dari pinjaman dengan persyaratan komersial yang dananya diterima secara tunai dengan tujuan untuk keperluan Pemerintah lainnya.
71229	Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya
712291	Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya
	Penerimaan pinjaman luar negeri yang tidak termasuk dalam klasifikasi penerimaan pinjaman yang lain.
713	Penerimaan dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
7131	Penerimaan dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
71311	Penerimaan Pinjaman Program dari Penjadualan kembali pokok Utang Luar Negeri
713111	Penerimaan Pinjaman Program dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
	Penerimaan dari penjadualan kembali pokok utang luar negeri dari pinjaman program. Akun 713111 menjadi penyeimbang akun 723111.
71312	Penerimaan Pinjaman Proyek dari Penjadualan kembali pokok Utang Luar Negeri
713121	Penerimaan Pinjaman Proyek dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
	Penerimaan dari penjadualan kembali pokok utang luar negeri dari pinjaman proyek. Akun 1352/713121 menjadi penyeimbang akun 723211.
714	Penerimaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
7141	Penerimaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
71411	Penjadualan Kembali Bunga Utang Pinjaman Luar Negeri
714111	Penerimaan Pembiayaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
	Penerimaan dari penjadualan kembali bunga utang luar negeri. Karena tidak ada penerimaan sesungguhnya, akun ini digunakan hanya untuk memungkinkan pelaporan terhadap utang yang dijadualkan kembali. Akun 714111 menjadi penyeimbang akun /723311.
715	Penerimaan cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman
7151	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan pinjaman Dalam Negeri
71511	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri
715111	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Kepada Pemda
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman RDI/RPD dari Pemda
715112	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Kepada BUMD
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman RDI/RPD dari BUMD
715113	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMN
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman RDI/RPD dari BUMN
715114	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Kepada Non Pemerintah



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman RD/RPD dari Lembaga Non Pemerintah
7152	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan pinjaman Luar Negeri
71521	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri tahun Anggaran Berjalan
715211	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Pemda
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman SLA dari Pemda TAB
715212	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMD
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman SLA dari BUMD TAB
715213	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman SLA dari BUMN TAB
71522	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri tahun Anggaran Yang lalu
715221	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Pemda
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman SLA dari Pemda TAYL
715222	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMD
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman SLA dari BUMD TAYL
715223	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman SLA dari BUMN TAYL
719	Penerimaan Pembiayaan lain-lain
7191	Penerimaan Pembiayaan lain-lain
71911	Penerimaan Pembiayaan Lain-lain
719111	Penyesuaian Penambahan Saldo Reksus karena Selisih Kurs
	Penyesuaian Saldo dalam mata uang rupiah karena adanya selisih kurs tengah BI
719112	Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening KUN Valuta USD karena Selisih Kurs
	Penyesuaian Saldo dalam mata uang dollar karena adanya selisih kurs tengah BI
72	Pengeluaran Pembiayaan
721	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri
7211	Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan
72111	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan
721111	Pembayaran Pinjaman Kredit Jangka Pendek dan uang Muka dari Sektor Perbankan
	Pembayaran Pinjaman/Kredit Jangka Pendek dan Uang Muka dari bank-bank dalam negeri. (konfirmasi ke Dir PKN)
721112	Pengeluaran Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek Perbankan
	Pembayaran pinjaman kepada Bank dalam negeri. (confirm ke DPKN)
72112	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan untuk Moratorium
721121	Pengeluaran Pembiayaan Eks Moratorium Pokok untuk Cadangan Aceh
	Pengeluaran pembiayaan yang berasal dari Eks Moratorium untuk Cadangan Aceh
7212	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Non-Perbankan
72121	Pengeluaran untuk Program Restrukturisasi
721211	Pengeluaran untuk Program Restrukturisasi
	Pengeluaran untuk pembiayaan program restrukturisasi perbankan/dana talangan kepada BPPN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

7213	Pengeluaran Surat Utang Negara/Obligasi
72131	Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara
721311	Pengeluaran Pelunasan SPN
	Pelunasan/pembayaran kembali SPN.
721312	Pengeluaran Pelunasan SPN melalui Pembelian Kembali
	Pengeluaran berkaitan dengan penjadualan kembali SPN. Karena tidak ada pengeluaran sesungguhnya, akun ini digunakan hanya untuk memungkinkan pelaporan terhadap utang yang dijadualkan kembali.
72132	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Dalam Negeri
721321	Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN
	Pengeluaran karena pelunasan/pembayaran kembali obligasi dalam negeri jangka panjang.
721322	Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN melalui Pembelian Kembali
	Pelunasan obligasi dalam negeri jangka panjang yang lewat pembelian kembali.
721323	Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri
	Pembayaran bunga obligasi dalam negeri jangka panjang kepada obligor (pembeli obligasi pemerintah) pada saat jatuh tempo bunga obligasi.
72133	Pengeluaran Pelunasan SBSN Dalam Negeri - Jangka Pendek
721331	Belanja Pengeluaran Pelunasan SBSN DN – Jangka Pendek
	Pengeluaran untuk pelunasan Surat Berharga Syariah Negara DN jangka pendek.
721332	Pengeluaran Pelunasan SBSN DN – Jangka Pendek melalui Pembelian Kembali
	Pelunasan Surat Berharga Syariah negara DN jangka pendek melalui pembelian kembali (buyback)
72134	Pengeluaran SBSN Dalam Negeri - Jangka Panjang
721341	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara DN – Jangka Panjang
	Pengeluaran untuk pelunasan SBSN DN jangka panjang.
721342	Pengeluaran Pelunasan SBSN DN – Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali
	Pelunasan Surat Berharga Syariah negara DN jangka panjang melalui pembelian kembali (buyback)
721343	Pengeluaran Pembayaran Imbalan dibayar dimuka SBSN DN – Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali
	Pengeluaran berkaitan dengan pembelian kembali (buyback) imbalan dibayar Di muka Surat Berharga Syariah Negara DN - Jangka panjang.
722	Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri
7221	Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri- Pinjaman Program
72211	Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Program
722111	Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok (Amortisasi) Utang Luar Negeri – Pinjaman Program
	Pembayaran kembali utang luar negeri jangka panjang dari sumber pinjaman program yang jatuh tempo selama tahun anggaran.
722112	Pengeluaran Cicilan Pokok Utang LN Pinjaman Program
	Pengeluaran untuk pembayaran/cicilan pokok utang luar negeri dari Pinjaman Program
7222	Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri- Pinjaman Proyek
72221	Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Proyek



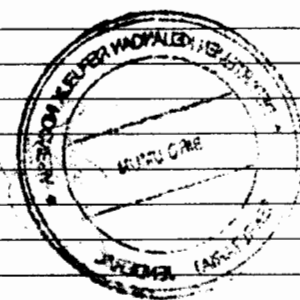
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

722211	Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Proyek
	Pembayaran kembali utang luar negeri jangka panjang dari sumber pinjaman proyek yang jatuh tempo selama tahun anggaran.
722212	Pengeluaran Cicilan Pokok Utang LN Pinjaman Proyek
	Pengeluaran untuk cicilan pokok utang luar negeri dari Pinjaman Proyek
7223	Pengeluaran untuk Pelunasan Surat Berharga Negara
72231	Pengeluaran untuk Pelunasan Obligasi Negara Luar Negeri - Valas
722311	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara Luar Negeri
	Pengeluaran karena pelunasan/pembayaran kembali obligasi luar negeri jangka panjang
722312	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara Luar Negeri – melalui Pembelian Kembali
	Pelunasan obligasi luar negeri jangka panjang yang lewat pembelian kembali.
722313	Pengeluaran Utang Bunga Obligasi Negara Luar Negeri
	Pembayaran bunga obligasi luar negeri jangka panjang kepada obligor (pembeli obligasi pemerintah) pada saat jatuh tempo bunga obligasi.
72232	Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri - Valas
722321	Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara - Valas
	Pengeluaran karena pelunasan/pembayaran kembali SPN luar negeri jangka panjang
722322	Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara– melalui Pembelian Kembali
	Pelunasan SPNi luar negeri jangka panjang yang lewat pembelian kembali
72233	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri – Jangka Pendek
722331	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas – Jangka Pendek
	Pengeluaran karena pelunasan/pembayaran kembali SBSN luar negeri jangka pendek
722332	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas – Jangka Pendek melalui Pembelian Kembali
	Pelunasan SBSN luar negeri jangka pendek yang dilakukan melalui pembelian kembali
72234	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri – Jangka Panjang
722341	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas – Jangka Panjang
	Pengeluaran karena pelunasan/pembayaran kembali SBSN luar negeri jangka panjang
722342	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas – Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali
	Pelunasan SBSN luar negeri jangka panjang yang dilakukan melalui pembelian kembali
722343	Pembayaran Imbalan dibayar di muka Surat Berharga Syariah Negara Valas – Jangka Panjang
	Pembayaran Imbalan di bayar di muka SBSN luar negeri jangka panjang i
723	Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali
	Pengeluaran yang berasal dari penjadualan kembali utang luar-negeri jangka-panjang yang jatuh tempo selama tahun anggaran tetapi tidak dibayar kembali dengan uang. MAK-MAK di bawah sub kelompok ini hanya disediakan untuk memungkinkan pelaporan terhadap ut
7231	Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali - Pinjaman Program
	Pengeluaran berkaitan dengan penjadualan kembali utang luar negeri dari pinjaman program.
72311	Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Program
723111	Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Program
	Pengeluaran dari penjadualan kembali utang LN – pinjaman program.
7232	Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali - Pinjaman Proyek
72321	Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Proyek
723211	Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Proyek



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

7233	Pelunasan Bunga Utang Luar Negeri melalui Penjadwalan Kembali - Pinjaman Proyek
72331	Pengeluaran penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
723311	Pengeluaran penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
724	Penyertaan Modal Negara
7241	Penyertaan Modal Negara pada BUMN
72411	Penyertaan Modal Negara pada BUMN
724111	PMN untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
	Penyertaan modal negara pada BUMN
7242	Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional
72421	Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional
724211	PMN untuk Badan Internasional
	Penyertaan modal pemerintah pada Badan Internasional
7249	Penyertaan Modal Negara Lainnya
72491	Penyertaan Modal Lainnya
724911	Penyertaan Modal Lainnya
	Penyertaan modal pemerintah selain pada BUMN dan Badan Internasional.
724912	Penyertaan Modal Negara SMF
	Penyertaan modal negara pada SMF
725	RDI/RPD
7251	RDI/RPD
72511	Penerusan Pinjaman Dalam Negeri
725111	Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Kepada Daerah
	Investasi pemerintah pusat pada pemerintah daerah.
725112	Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Kepada BUMD
	Investasi pemerintah pusat pada BUMD.
725113	Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Kepada BUMN
	Investasi pemerintah pusat pada BUMN.
725113	Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Kepada Non Pemerintah
	Investasi pemerintah pusat pada selain Pemda, BUMN, BUMD.
7252	Penerusan Pinjaman Luar Negeri
72521	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan
725211	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah Tahun Anggaran Berjalan
	Penerusan pinjaman LN kepada Daerah tahun anggaran berjalan.
725212	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMD Tahun Anggaran Berjalan
	Penerusan pinjaman LN kepada BUMD tahun anggaran berjalan.
725213	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMN Tahun Anggaran Berjalan
	Penerusan pinjaman LN kepada BUMN tahun anggaran berjalan.

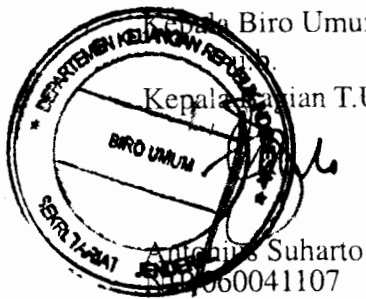




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

72522	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu
725221	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah Th. Anggaran Yang Lalu
	Penerusan pinjaman LN kepada daerah tahun anggaran yang lalu.
725222	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMD Tahun Anggaran Yang Lalu
	Penerusan pinjaman LN kepada BUMD tahun anggaran yang lalu.
725223	Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMN Tahun Anggaran Yang Lalu
	Penerusan pinjaman LN kepada BUMN tahun anggaran yang lalu.
726	Dukungan Infrastruktur
7261	Dukungan Infrastruktur
72611	Dukungan Infrastruktur
726111	Dukungan Infrastruktur
729	Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain
7291	Koreksi Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain
72911	Koreksi Penyesuaian Reksus Karena Selisih Kurs
729111	Koreksi Penyesuaian Penurunan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs
	Merupakan kontra pos dari Penyesuaian Penurunan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs (Mata Anggaran 726111)
729112	Koreksi Penyesuaian Penurunan Saldo Rekening KUN Dalam Valuta US Dolar Karena Selisih Kurs

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum



Kepala Biro Umum T.U. Departemen

Aldi Harto Suharto
060041107

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR PENJELASAN AKUN

8	NON ANGGARAN
81	Penerimaan Non Anggaran
811	Penerimaan Non Anggaran PFK
8111	Penerimaan PFK 10 % Gaji
81111	Penerimaan PFK 10 % Gaji
811111	Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji PNS Pusat
	Penerimaan yang bersumber dari setoran/potongan pihak ketiga atas Gaji PNS Pusat sebesar 10%
811112	Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji PNS Daerah
	Penerimaan yang bersumber dari setoran/potongan pihak ketiga atas Gaji PNS Daerah sebesar 10%
811113	Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji Polri dan PNS Polri
	Penerimaan yang bersumber dari setoran/potongan pihak ketiga atas Gaji Polri dan PNS Polri sebesar 10%
811114	Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji TNI dan PNS Dephan
	Penerimaan yang bersumber dari potongan pihak ketiga atas Gaji TNI dan PNS Dephan sebesar 10%
8112	Penerimaan PFK 2 % Gaji Terusan
81121	Penerimaan PFK 2 % Gaji Terusan
811211	Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji Terusan PNS Pusat
	Penerimaan yang bersumber dari setoran/potongan pihak ketiga atas Gaji Terusan PNS Pusat sebesar 2%
811212	Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji terusan PNS Daerah
	Penerimaan yang bersumber dari setoran/potongan pihak ketiga atas Gaji Terusan PNS Daerah sebesar 2%
811213	Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji Terusan POLRI dan PNS Polri
	Penerimaan yang bersumber dari setoran/potongan pihak ketiga atas Gaji Terusan Polri dan PNS Polri sebesar 2%
811214	Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji Terusan TNI dan PNS DEPHAN
	Penerimaan yang bersumber dari setoran/potongan pihak ketiga atas Gaji Terusan TNI dan PNS DEPHAN sebesar 2%
8113	Penerimaan PFK Beras BULOG
81131	Penerimaan PFK Beras BULOG
811311	Penerimaan Setoran / Potongan PFK Bulog PNS Pusat
	Penerimaan yang bersumber dari setoran/potongan atas Gaji PNS Pusat untuk PFK Bulog
811312	Penerimaan Setoran / Potongan PFK Bulog Polri & PNS POLRI
	Penerimaan yang bersumber dari setoran/potongan atas Gaji Polri dan PNS POLRI untuk PFK Bulog
811313	Penerimaan Setoran/ Potongan PFK Bulog TNI & PNS Dephan
	Penerimaan yang bersumber dari setoran/potongan atas Gaji TNI dan PNS Dephan untuk PFK Bulog
8114	Penerimaan PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda
81141	Penerimaan PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

811411	Penerimaan Setoran PFK 2 % luran Asuransi Kesehatan Propinsi Penerimaan setoran yang bersumber dari luran Asuransi Kesehatan Pemda Tk. I/Propinsi sebesar 2%
811412	Penerimaan Setoran PFK 2 % luran Asuransi Kesehatan Kabupaten/Kota Penerimaan setoran yang bersumber dari luran Asuransi Kesehatan Pemda Tk. II/Kabupaten/Kota sebesar 2%
8115	Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT
81151	Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT
811511	Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2 % luran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT Penerimaan setoran yang bersumber dari luran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT sebesar 2%
8116	Penerimaan PFK 2 % Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/POLRI
81161	Penerimaan PFK 2 % Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/POLRI
811611	Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2 % luran Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/PNS Dephan Penerimaan setoran yang bersumber dari luran Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/PNS Dephan sebesar 2%
811612	Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2 % luran Asuransi Kesehatan Pensiun POLRI/PNS POLRI Penerimaan setoran yang bersumber dari luran Asuransi Kesehatan Pensiun POLRI/PNS POLRI sebesar 2%
8117	Penerimaan PFK Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (DTP Migas)
81171	Penerimaan PFK Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (DTP Migas)
811711	Penerimaan PFK Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (DTP Migas) Penerimaan yang bersumber dari Pihak ketiga karena adanya rekening untuk Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (DTP Migas)
8119	Penerimaan PFK Lain-lain
81191	Penerimaan PFK Lain-lain
811911	Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Pusat Penerimaan yang bersumber dari setoran/potongan atas Gaji PNS Pusat untuk PFK Tabungan Wajib Perumahan.
811912	Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Daerah Penerimaan yang bersumber dari setoran/potongan atas Gaji PNS Daerah untuk PFK Tabungan Wajib Perumahan.
812	Penerimaan Wesel Pemerintah
8121	Penerimaan Wesel Pemerintah
81211	Penerimaan Wesel Pemerintah
812111	Penerimaan potongan WP dari SPM KPPN Penerimaan potongan yang berasal WP berkaitan dengan penerbitan SPM ke KPPN.
812112	Penerimaan Setoran untuk penerbitan WP Penerimaan setoran yang berkaitan dengan penerbitan WP
813	Penerimaan Reimbursement Dalam Rangka Prefinancing (PP) dan PFK BUN Lainnya
8131	Penerimaan Reimbursement Dalam Rangka Prefinancing (PP) dan PFK BUN Lainnya
81311	Penerimaan Reimbursement Dalam Rangka Prefinancing (PP) dan PFK BUN Lainnya
813111	Penerimaan setoran sisa UP-PP Penerimaan setoran sisa Uang Persediaan yang berasal Pembiayaan Pendahuluan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

813112	Penerimaan Reimbursement / Pengganti PFK PP dan PPHLN
	Penerimaan yang berasal dari penggantian PFK Pembiayaan Pendahuluan dan PPHLN
813113	Penerimaan Penggantian UP PP Berasal dari SPM GU Nihil (Pengesahan)
	Penerimaan dalam rangka pengembalian/penggantian Uang Persediaan yang dipakai sebagai Pembiayaan Pendahuluan.
813114	Penggantian Dana Rek. KPPN ke Rek BUN atas Pembayaran kepada PPHLN (Karena adanya pembayaran ineligible)
	Penerimaan yang berasal dari rekening KPPN untuk dipindahkan ke rekening BUN dalam rangka pembayaran PPHLN Karena adanya pembayaran ineligible.
813115	Penggantian Dana dari REKSUS ke Rek BUN karena REKSUS kosong
	Penggantian sejumlah dana yang berasal dari rekening khusus kepada rekening BUN yang disebabkan sebelumnya terjadi transfer dana dari rekening BUN ke reksus karena saldo rekening khusus nihil.
813116	Penggantian Dana dari REKSUS ke Rekening BUN karena prefinancing REKSUS
	Penggantian sejumlah dana yang berasal dari rekening khusus kepada rekening BUN yang disebabkan adanya pembiayaan pendahuluan untuk bantuan luar negeri.
813117	Penggantian Dana dari Pihak ketiga ke Rekening BUN atas pembayaran kepada PPHLN (Karena adanya pembayaran ineligible)
	Penggantian sejumlah dana yang berasal dari Pihak Ketiga kepada rekening BUN untuk pembayaran kepada PPHLN karena adanya pembayaran ineligible
813118	Penggantian Dana dari Rekening Dana Talangan REKSUS kosong
	Penggantian sejumlah dana yang berasal dari rekening dana talangan yang disebabkan saldo rekening khusus nihil.
81312	Penerimaan Dana Talangan
813121	Penerimaan dana talangan dari Rekening SAL
	Penerimaan Dana Talangan pada rekening BUN yang diperoleh dari rekening Sisa Anggaran Lebih untuk kegiatan yang mendesak seperti belanja pegawai (gaji).
813122	Penerimaan Dana Talangan dari Dana Moratorium
	Penerimaan Dana Talangan pada rekening BUN yang diperoleh dari rekening Dana Moratorium (Seperti untuk Bencana Aceh/Nias) untuk kepentingan Pemerintah.
814	Penerimaan Kiriman Uang
8141	Penerimaan Kiriman Uang
81411	Penerimaan Kiriman Uang
814111	Penerimaan Kiriman Uang Antar KPPN
	Penerimaan TUK dari Rekening 501.000.000 pada KPPN Induk untuk mengisi pagu BO I Gaji/Non Gaji untuk KPPN di wilayahnya
814112	Penerimaan Kiriman Uang dari Kantor Pusat Ditjen PBN 500.000000 ke KPPN
	Penerimaan Kiriman Uang dari rekening 500.000.000 pada Bank Indonesia Pusat ke Rekening Kas Negara pada KPPN Induk yang satu kota dengan KCBI.
814113	Penerimaan Kiriman Uang dari KPPN ke Kantor Pusat Ditjen PBN 500.000000
	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Kas negara pada KPPN satu kota dengan KBI ke Rekening 500.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

814114	Penerimaan Kiriman Uang dari Kantor Pusat Ditjen PBN 500.000000 ke Rekening BUN 502.000000
	Penerimaan Kiriman Uang dari rekening 500.000000 pada Bank Indonesia Pusat ke Rekening BUN 502.000000.
814115	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening BUN 502.000000 ke Kantor Pusat Ditjen PBN 500.000000
	Penerimaan Kiriman Uang dari rekening BUN 502.000000 pada Bank Indonesia Pusat ke Rekening 500.000000 pada Bank Indonesia Pusat
814116	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Sub BUN Valas ke Rekening BUN 502.000000
	Penerimaan Kiriman Uang dari rekening Sub BUN Valas pada Bank Indonesia Pusat ke Rekening 502.000000 pada Bank Indonesia Pusat
814117	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening 501 ke Bank Operasional I
	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Kas Negara 501.000000 pada KPPN Induk ke Rekening BO I gaji /non gaji
814118	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening 501 ke Bank Operasional II
	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Kas Negara 501.000000 pada KPPN Induk ke Rekening BO II gaji /non gaji
81412	Penerimaan Kiriman Uang dalam rangka TSA
814121	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening 501.000.000 KPPN Induk ke Bank Operasional I KPPN Non KCBI
	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Kas Negara 501.000000 pada KPPN Induk ke Rekening BO I KPPN Non KCBI
814122	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening 501.000.000 KPPN Induk ke Bank Operasional II KPPN Non KCBI dan sebaliknya
	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Kas Negara 501.000000 pada KPPN Induk ke Rekening BO II KPPN Non KCBI
814123	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening 501.000.000 KPPN Induk ke Sentral Giro/SGG KPPN Non KCBI
	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Kas Negara 501.000000 pada KPPN Induk ke Rekening SG/SGG KPPN Non KCBI
814124	Penerimaan Kiriman Uang dari Bank Operasional I KPPN Non KCBI ke Rekening 501.000.000 KPPN Induk
	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening BO I pada KPPN Non KCBI ke Rekening 501.000000 KPPN Induk
814125	Penerimaan Kiriman Uang dari Bank Operasional II KPPN Non KCBI ke Rekening 501.000.000 KPPN Induk
	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening BO II pada KPPN Non KCBI ke Rekening 501.000000 KPPN Induk
814126	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Sentral Giro/SGG KPPN Non KCBI ke 501.000.000 KPPN Induk
	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Sentral Giro/SGG KPPN Non KCBI ke Rekening Kas Negara 501.000000 pada KPPN Induk
814127	Penerimaan Kiriman Uang dari Bank Operasional III KPPN Non KBI ke Rekening 501.000.000 KPPN Induk
	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening BO III pada KPPN Non KCBI ke Rekening 501.000000 KPPN Induk
814128	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Gabungan KPPN Non KBI ke Rekening 501.000.000 KPPN Induk
	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Gabungan Bank Persepsi pada KPPN Non KCBI ke Rekening 501.000000 KPPN Induk



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

81413	Penerimaan Kiriman Uang dalam rangka TSA dengan RPK-BUN P
814131	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening BUN ke RPK-BUN-P
	Penerimaan Kiriman Uang dari rekening BUN 502.000000 pada Bank Indonesia Pusat ke Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat/ RPK-BUN-P (BRI : 0329-01-001819-30-7; Bank Mandiri : 119.00000.3333.0; BNI : 194600506)
814132	Penerimaan Kiriman Uang dari RPK-BUN-P ke BO I di KPPN
	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat/ RPK-BUN-P ke Rekening BO I gaji/non gaji pada KPPN
814133	Penerimaan Kiriman Uang dari RPK-BUN-P ke Rekening BUN
	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat/ RPK-BUN-P ke Rekening BUN 502.000000 pada Bank Indonesia Pusat
814134	Penerimaan Kiriman Uang dari BO I di KPPN ke RPK-BUN-P
	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening BO I gaji/non gaji pada KPPN ke Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat/ RPK-BUN-P
8142	Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus
81421	Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus
814211	Penerimaan Kiriman Uang dari Reksus ke KPPN (berdasarkan SPM-LS /SPM-GU Isi/SPM Pengganti)
	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Khusus (menampung pembiayaan) ke Rekening Kas Negara pada KPPN sesuai SPM-LS /SPM-GU Isi/SPM Pengganti)
814212	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Khusus ke RekeningKantor Pusat Ditjen PBN 500.000.000
	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Khusus ke Rekening antara /kantor Pusat Ditjen PBN 500.000000 pada Bank Indonesia Pusat.
814213	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Khusus ke Rekening BUN 502.000000
	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Khusus ke Rekening BUN 502.000000 pada Bank Indonesia Pusat.
814214	Pembetulan Pembukuan Pengeluaran Penggantian dari Rekening Khusus
	Pembetulan pembukuan yang dilakukan karena adanya kesalahan atas pengeluaran penggantian dari Rekening Khusus.
814215	Penerimaan dari KPPN ke Rekening Kantor Pusat Ditjen PBN 500.000.00 berdasarkan SPM Pengganti
	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Kas Negara KPPN ke Rekening antara /kantor Pusat Ditjen PBN 500.000000 pada Bank Indonesia Pusat sesuai SPM Pengganti.
814216	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Khusus
	Penerimaan Kiriman Uang dari rekening Khusus (menampung pembiayaan) satu ke Rekening Khusus yang lain sesuai pemberi bantuan/donor
8143	Penerimaan Pemindahbukuan
81431	Penerimaan Pemindahbukuan
814311	Penerimaan Pemindahbukuan Intern KPPN
	Penerimaan dari pemindahbukuan antara rekening No. 501.000.000 pada Bank Indonesia KPPN Induk ke rekening KPPN Wilayah.
814312	Pemindahbukuan dari Bank Tunggal ke Bank Operasional
	Penerimaan dari pemindahbukuan dari rekening No. 501.000.000 pada Bank Indonesia ke Rekening Gaji pada BO I sesuai pagu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

	Penerimaan dari pemindahbukuan dari rekening No. 501.000.000 pada Bank Indonesia ke Rekening Non Gaji pada BO I sesuai pagu
814313	Pemindahbukuan dari Bank Operasional ke Bank Tunggal
	Penerimaan pemindahbukuan dari BO I ke Rekening No. 501.000.000 pada Bank Indonesia
814314	Pemindahbukuan dari Bank Operasional (BO) I ke BO II
	Penerimaan Pemindahbukuan ini terdiri dari :
	Penerimaan kelebihan pagu pada BO II dimana pagu pada BO II ditetapkan paling banyak sebesar 5% dari pembayaran gaji
	Penerimaan yang berasal dari pemindahbukuan dari BO I gaji untuk pembayaran gaji bulan berkenaan, penerimaan tambahan pagu dari BO I Gaji untuk pembayaran belanja pegawai non gaji induk apabila pagu di BO I Gaji masih ada atau sebelum penihilan BO I Gaji, atau dari BO I Non Gaji apabila pagu di BO I gaji telah nihil
814315	Pemindahbukuan dari Bank Operasional (BO) II ke BO I
	Penerimaan kelebihan pagu pada BO I dimana terdapat kelebihan pagu pada BO II.
	Penerimaan pemindahbukuan pada BO I gaji untuk pembayaran gaji bulan berkenaan, penerimaan tambahan pagu dari BO II untuk pembayaran belanja pegawai non gaji induk apabila pagu di BO II masih ada.
814316	Pemindahbukuan dari Rekening Gabungan ke Bank Tunggal (Bank Operasional)
	Penerimaan pelimpahan dari Rekening Gabungan Bank/Kantor Pos Persepsi ke BO I Non Gaji .
814317	Pemindahbukuan dari Bank Tunggal/Operasional I ke Sentral Giro/Sentral Giro Gabungan
	Pemindahbukuan dari BO I Gaji/Non Gaji ke SG/SGG Pengeluaran untuk pembayaran belanja.gaji pegawai dan non gaji
814318	Pemindahbukuan dari Sentral Giro/Sentral Giro Gabungan ke Bank Tunggal/Operasional I
	Penerimaan pelimpahan dari rekening Pos Persepsi setiap hari Selasa, Rabu dan Jum'at ke Bank Tunggal
81432	Penerimaan Pemindahbukuan Bank Operasional III
814321	Pemindahbukuan dari Bank Operasional III ke Bank Tunggal/Bank Operasional I
	Penerimaan dari pelimpahan PBB dan BPHTB sebesar % (persentase) bagian pemerintah pusat dan biaya pemungutan PBB
814322	Penerimaan Pemindahbukuan dari Bank Persepsi PBB ke BO III
	Penerimaan pemindahbukuan PBB dari Bank Persepsi PBB setiap Selasa dan Jum'at dengan akun pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
814323	Penerimaan Pemindahbukuan dari Bank Persepsi BPHTB ke BO III
	Penerimaan pemindahbukuan BPHTB dari Bank Persepsi BPHTB setiap hari Selasa dan Jum'at dengan akun pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
81433	Penerimaan Pemindahbukuan dalam rangka TSA
814331	Penerimaan Pemindahbukuan dari Bank Tunggal ke Bank Operasional I
	Penerimaan pemindahbukuan dari rekening No. 501.000.000 pada Bank Indonesia ke Rekening Gaji pada BO I sesuai pagu dalam rangka TSA
	Penerimaan pemindahbukuan dari rekening No. 501.000.000 pada Bank Indonesia ke Rekening Non Gaji pada BO I sesuai pagu dalam rangka TSA
814332	Penerimaan Pemindahbukuan dari Bank Operasional I ke Bank Tunggal
	Penerimaan pemindahbukuan dari BO I ke Rekening No. 501.000.000 pada Bank Indonesia dalam rangka TSA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

814333	Penerimaan Pemindahbukuan dari Bank Tunggal ke Bank Operasional II
	Penerimaan pemindahbukuan dari rekening No. 501.000.000 pada Bank Indonesia ke Rekening BO II sesuai pagu dalam rangka TSA
814334	Penerimaan Pemindahbukuan dari Bank Operasional II ke Bank Tunggal
	Penerimaan pemindahbukuan dari BO II ke Rekening No. 501.000.000 pada Bank Indonesia dalam rangka TSA
81434	Penerimaan Pemindahbukuan Rekening BUN dengan Rekening KUN dalam Valuta USD
814341	Penerimaan Pemindahbukuan dari rekening 502.000000 ke Rekening 600.502411
	Penerimaan pemindahbukuan dari rekening BUN 502.000.000 pada Bank Indonesia Pusat ke Rekening KUN dalam Valuta USD 600.502411
814342	Penerimaan Pemindahbukuan dari rekening 600.502411 ke Rekening 502.000000
	Penerimaan pemindahbukuan dari rekening KUN dalam Valuta USD 600.502411 ke Rekening BUN 502.000.000 pada Bank Indonesia Pusat
81435	Penerimaan Pemindahbukuan Rekening BUN dengan Rekening RPK-BUN-P
814351	Penerimaan Pemindahbukuan dari rekening 502.000000 ke Rekening RPK-BUN-P1
	Penerimaan pemindahbukuan dari rekening BUN 502.000.000 pada Bank Indonesia Pusat ke Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat 1
814352	Penerimaan Pemindahbukuan dari rekening 502.000000 ke Rekening RPK-BUN-P2
	Penerimaan pemindahbukuan dari rekening BUN 502.000.000 pada Bank Indonesia Pusat ke Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat 2
814353	Penerimaan Pemindahbukuan dari rekening 502.000000 ke Rekening RPK-BUN-P3
	Penerimaan pemindahbukuan dari rekening BUN 502.000.000 pada Bank Indonesia Pusat ke Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat 3
814354	Penerimaan Pemindahbukuan dari rekening RPK-BUN-P1 ke Rekening 502.000000
	Penerimaan pemindahbukuan dari rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat 1 ke Rekening BUN 502.000.000 pada Bank Indonesia Pusat
814355	Penerimaan Pemindahbukuan dari rekening RPK-BUN-P2 ke Rekening 502.000000
	Penerimaan pemindahbukuan dari rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat 2 ke Rekening BUN 502.000.000 pada Bank Indonesia Pusat
814356	Penerimaan Pemindahbukuan dari rekening RPK-BUN-P3 ke Rekening 502.000000
	Penerimaan pemindahbukuan dari rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat 3 ke Rekening BUN 502.000.000 pada Bank Indonesia Pusat
81436	Penerimaan Pemindahbukuan Rek.Talangan Reksus Kosong dengan Rek. Sub BUN Talangan Karena Reksus Kosong
814361	Penerimaan Pemindahbukuan dari rekening 500.000001 ke Rekening 561.000001
	Penerimaan pemindahbukuan dari rekening Dana Talangan karena reksus Kosong ke Rekening Sub BUN Dana Talangan Reksus Kosong 561.000001 di Bank Indonesia Pusat
814362	Penerimaan Pemindahbukuan dari rekening 500.000001 ke Rekening 561.000002
	Penerimaan pemindahbukuan dari rekening Dana Talangan karena reksus Kosong ke Rekening Sub BUN Dana Talangan Reksus Kosong 561.000002 di Bank Indonesia Pusat
814363	Penerimaan Pemindahbukuan dari rekening 500.000001 ke Rekening 561.000003
	Penerimaan pemindahbukuan dari rekening Dana Talangan karena reksus Kosong ke Rekening Sub BUN Dana Talangan Reksus Kosong 561.000003 di Bank Indonesia Pusat
814364	Penerimaan Pemindahbukuan dari rekening 500.000001 ke Rekening 561.000005
	Penerimaan pemindahbukuan dari rekening Dana Talangan karena reksus Kosong ke Rekening Sub BUN Dana Talangan Reksus Kosong 561.000005 di Bank Indonesia Pusat
814365	Penerimaan Pemindahbukuan dari rekening 561.000001 ke Rekening 500.000001
	Penerimaan pemindahbukuan dari Rekening Sub BUN Dana Talangan Reksus Kosong 561.000001 di Bank Indonesia Pusat ke Rekening Dana Talangan karena reksus Kosong
814366	Penerimaan Pemindahbukuan dari rekening 561.000002 ke Rekening 500.000001
	Penerimaan pemindahbukuan dari Rekening Sub BUN Dana Talangan Reksus Kosong 561.000002 di Bank



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

	Indonesia Pusat ke Rekening Dana Talangan karena reksus Kosong
814367	Penerimaan Pemindahbukuan dari rekening 561.000003 ke Rekening 500.000001
	Penerimaan pemindahbukuan dari Rekening Sub BUN Dana Talangan Reksus Kosong 561.000003 di Bank Indonesia Pusat ke Rekening Dana Talangan karena reksus Kosong
814368	Penerimaan Pemindahbukuan dari rekening 561.000005 ke Rekening 500.000001
	Penerimaan pemindahbukuan dari Rekening Sub BUN Dana Talangan Reksus Kosong 561.000005 di Bank Indonesia Pusat ke Rekening Dana Talangan karena reksus Kosong
81437	Penerimaan Pemindahbukuan Rekening BUN dengan Rekening Talangan karena Reksus Kosong
814371	Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening 502.000000 ke Rekening 500.000001
	Penerimaan pemindahbukuan dari rekening BUN 502.000.000 pada Bank Indonesia Pusat ke Rekening Dana Talangan karena reksus Kosong
814372	Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening 500.000001 ke Rekening 502.000000
	Penerimaan pemindahbukuan dari Rekening Dana Talangan karena reksus Kosong ke Rekening BUN 502.000.000 pada Bank Indonesia Pusat
815	Penerimaan Transito
8151	Penerimaan Transito
81511	Penerimaan Transito
815111	Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Dana Rupiah
	Penerimaan Pengembalian Saldo Uang Persediaan /UP dari satuan kerja Kementerian Negara / Lembaga yang disetor ke kas negara karena adanya kelebihan UP yang diterima sebagai uang muka dari Kas Negara (KPPN) untuk pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan UP (DUP dan /atau TUP)
815112	Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri
	Penerimaan Pengembalian Saldo Uang Persediaan /UP yang berasal dari dari satuan kerja Kementerian Negara / Lembaga pengguna dana pinjaman/Hibah Luar Negeri yang disetor ke kas negara karena adanya kelebihan UP yang diterima sebagai uang muka dari Kas Negara (KPPN) untuk pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan UP (DUP dan /atau TUP)
815113	Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Pengguna PNB (Swadana)
	Penerimaan Pengembalian Saldo Uang Persediaan /UP dari satuan kerja Kementerian Negara / Lembaga Pengguna PNB (Swadana) yang disetor ke kas negara karena adanya kelebihan UP yang diterima sebagai uang muka dari Kas Negara (KPPN) untuk pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan UP (DUP dan /atau TUP)
815114	Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Tahun Anggaran yang Lalu
	Penerimaan Pengembalian Saldo Uang Persediaan /UP Tahun Anggaran Yang lalu dari satuan kerja Kementerian Negara / Lembaga yang disetor ke kas negara karena adanya kelebihan UP yang diterima sebagai uang muka dari Kas Negara (KPPN) untuk pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan UP (DUP dan /atau TUP)
816	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga
8161	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga
81611	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga
816111	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Rekening
	Penerimaan yang diperoleh melalui transfer dari rekening antara Bank Persepsi (non rekening kas Negara) sebagai penampungan karena adanya kesalahan No. Rekening dan/atau nama pemilik rekening Pihak Ketiga pada dokumen SPM/SP2D LS kepada Rekening Kas Negara di KPPN.
82	PENGELUARAN NON ANGGARAN
821	PENGELUARAN NON ANGGARAN PFK



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

8211	Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% Gaji
82111	Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% Gaji
821111	Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun PNS (4,75%)
	Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji PNS sebesar 4,75% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke Dana Pensiun PNS pada PT. TASPEN (Persero).
821112	Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua PNS (3,25%)
	Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji PNS sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat untuk Tunjangan Hari Tua PNS ke PT. TASPEN (Persero).
821113	Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS (2%)
	Penyaluran dana setoran/potongan luran Asuransi Kesehatan Gaji PNS sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT. ASKES (Persero).
821114	Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun Polri & PNS Polri (4,75%)
	Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji Polri dan PNS Polri sebesar 4,75% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke Dana Pensiun Polri dan PNS Polri pada PT. TASPEN (Persero).
821115	Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua Polri & PNS Polri (3,25%)
	Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji Polri dan PNS Polri sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat untuk Tunjangan Hari Tua Polri dan PNS Polri ke PT. TASPEN (Persero).
821116	Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan Polri & PNS Polri (2%)
	Penyaluran dana setoran/potongan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan Polri & PNS Polri sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT. ASKES (Persero).
821117	Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun Personel TNI dan PNS Dephan (4,75%)
	Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan sebesar 4,75% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke Dana Pensiun Polri dan PNS Polri pada PT. TASPEN (Persero).
821118	Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua TNI dan PNS Dephan (3,25%)
	Penyaluran dana setoran/potongan PFK Gaji TNI dan PNS Dephan sebesar 3,25% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat untuk Tunjangan Hari Tua Polri dan PNS Polri ke PT. TASPEN (Persero).
821119	Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI & PNS Dephan (2%)
	Penyaluran dana setoran/potongan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI dan PNS Dephan sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT. ASKES (Persero).
8212	Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan
82121	Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan
821211	Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS (2%) Gaji Terusan
	Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan PNS Pusat sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).
821212	Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Daerah (2%)
	Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan PNS Daerah sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).
821213	Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Polri & PNS Polri (2%)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

	Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan Polri & PNS Polri sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).
821214	Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan TNI & PNS Dephan (2%)
	Penyaluran setoran/potongan Asuransi Kesehatan atas Gaji Terusan TNI & PNS Dephan sebesar 2% yang sudah dihimpun oleh pemerintah pusat ke PT ASKES (Persero).
8213	Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Beras Bulog
82131	Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Beras Bulog
821311	Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog PNS Pusat
	Penyaluran penyeteroran setoran/potongan PFK Beras PNS Pusat ke PT. BULOG
821312	Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog Polri & PNS Polri
	Penyaluran penyeteroran setoran/potongan PFK Beras Polri & PNS Polri ke PT. BULOG
821313	Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog TNI & PNS Dephan
	Penyaluran penyeteroran setoran/potongan PFK Beras TNI & PNS Dephan ke PT. BULOG
8214	Pengembalian Penerimaan PFK 2 % luran Kesehatan Pemda
82141	Pengembalian Penerimaan PFK 2 % luran Kesehatan Pemda
821411	Pengembalian Penerimaan Setoran PFK 2 % luran Asuransi Kesehatan Propinsi
	Pengeluaran penyeteroran setoran/potongan PFK 2% luran Asuransi Kesehatan PNS Pemda Tk.II/Propinsi ke PT ASKES (Persero).
821412	Pengembalian Penerimaan Setoran PFK 2 % luran Asuransi Kesehatan Kabupaten/Kota
	Pengeluaran penyeteroran setoran/potongan PFK 2% luran Asuransi Kesehatan PNS Pemda Tk.II/Kabupaten/Kota ke PT ASKES (Persero).
8215	Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT
82151	Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT
821511	Pengembalian Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2 % luran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT
	Pengeluaran penyeteroran setoran/potongan PFK 2% luran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT ke PT ASKES (Persero).
8216	Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/POLRI
82161	Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/POLRI
821611	Pengembalian Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2 % luran Asuransi Kesehatan PensiunTNI/PNS Dephan
	Pengeluaran penyeteroran setoran/potongan PFK 2% luran Asuransi Kesehatan PensiunTNI/PNS Dephan ke PT ASKES (Persero).
821612	Pengembalian Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2 % luran Asuransi Kesehatan Pensiun POLRI/PNS POLRI
	Pengeluaran penyeteroran setoran/potongan PFK 2% luran Asuransi Kesehatan Pensiun POLRI/PNS POLRI ke PT ASKES (Persero).
8217	Pengembalian Penerimaan PFK Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (DTP Migas)
82171	Pengembalian Penerimaan PFK Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (DTP Migas)
821711	Pengembalian Penerimaan PFK Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (DTP Migas)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

	Pengembalian Penerimaan yang bersumber dari Pihak ketiga karena adanya rekening untuk Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (DTP Migas)
8219	Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain
82191	Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain
821911	Pengembalian Penerimaan PFK Tabungan Perumahan PNS Pusat
	Pengeluaran penyetoran setoran/potongang PFK Tabungan Perumahan PNS Pusat ke BAPERTARUM.
821912	Pengembalian Penerimaan PFK Tabungan Perumahan PNS Daerah
	Pengeluaran penyetoran setoran/potongang PFK Tabungan Perumahan PNS Daerah ke BAPERTARUM.
822	Pelunasan Wesel Pemerintah
8221	Pelunasan Wesel Pemerintah
82211	Pelunasan Wesel Pemerintah
822111	Pelunasan Wesel Pemerintah
	Pengeluaran untuk pembayaran wesel pemerintah
823	Pembayaran PFK Prefinancing dan PFK BUN Lainnya
8231	Pembayaran PFK Prefinancing dan PFK BUN Lainnya
82311	Pembayaran PFK Prefinancing dan PFK BUN Lainnya
823111	Pembayaran UP-PP (DU/TU)
	Pembayaran Uang Persediaan baik berupa Dana UP atau Tambahan UP yang berasal Pembiayaan Pendahuluan.
823112	Pembayaran PFK PP (Prefinancing)
	Pembayaran yang berasal dari penggantian PFK Pembiayaan Pendahuluan dan PPHLN
823113	Pembayaran SPM-GU Nihil (Pengesahan ke Rekening BUN)
	Pembayaran atas SPM-GU Nihil yang diajukan untuk UP yang dipakai sebagai Pembiayaan Pendahuluan berupa pengesahan pengeluaran yang berpengaruh pada rekening BUN.
823114	Pembayaran kepada PPHLN karena pengeluaran in-eligible
	Pembayaran yang berasal dari rekening BUN untuk dipindahkan ke rekening KPPN dalam rangka pembayaran kepada PPHLN Karena adanya pembayaran ineligibile.
823115	Pembayaran dari Rekening BUN karena Reksus kosong
	Pembayaran sejumlah dana yang berasal dari rekening BUN kepada rekening khusus yang disebabkan sebelumnya terjadi transfer dana dari reksus karena saldo rekening khusus nihil.
823116	Pembayaran dari Rekening BUN karena Prefinancing UP-Reksus
	Pembayaran sejumlah dana yang berasal dari rekening BUN kepada rekening khusus yang disebabkan sebelumnya terjadi transfer dana dari reksus untuk pembayaran Uang Persediaan untuk Pembiayaan pendahuluan.
823117	Pengisian Rekening Dana SAL
	Pengisian Dana pada rekening SAL yang diperoleh dari rekening BUN
823118	Pembayaran ke Rekening Dana Talangan Reksus kosong
	Pembayaran sejumlah dana yang kepada rekening dana talangan yang disebabkan saldo rekening khusus nihi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

82312	Pengembalian Dana Talangan
823121	Pengembalian Dana Talangan ke Rekening SAL
	Pengembalian Dana Talangan ke Rekening SAL setelah digunakan sesuai yang diterima rekening Dana Talangan sebelumnya.
823122	Pengembalian Dana Talangan ke dana moratorium
	Pengembalian Dana Talangan dari rekening BUN kepada rekening Dana Moratorium (Seperti untuk Bencana Aceh/Nias) yang ditujukan bagi kepentingan Pemerintah.
824	Pengeluaran Kiriman Uang
8241	Pengeluaran Kiriman Uang
82411	Pengeluaran Kiriman Uang
824111	Pengeluaran Kiriman Uang antar KPPN
	Pengeluaran Kiriman Uang antar KPPN terjadi karena penihilan pagu BO I Gaji dan pengiriman kelebihan pagu dari BO I Non Gaji ke Rekening 501.000.000 KPPN Induk
824112	Pengeluaran Kiriman Uang dari KPPN ke Kantor Pusat Ditjen PBN
	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening Kas negara pada KPPN satu kota dengan KCBI ke Rekening 500.000.000
824113	Pengeluaran Kiriman Uang dari Kantor Pusat Ditjen PBN ke KPPN
	Pengeluaran Kiriman Uang dari rekening 500.000.000 pada Bank Indonesia Pusat ke Rekening Kas Negara pada KPPN satu kota dengan KCBI
824114	Pengeluaran Kiriman Uang dari Kantor Pusat Ditjen PBN ke Rekening BUN
	Pengeluaran Kiriman Uang dari rekening 500.000.000 pada Bank Indonesia Pusat ke Rekening BUN 502.000000.
824115	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening BUN ke Kantor Pusat Ditjen PBN
	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening BUN 502.000.000 ke Rekening 500.000000 pada Bank Indonesia Pusat
824116	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening BUN ke Rekening Sub BUN Valas
	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening BUN 502.000.000 ke Rekening Sub BUN Valas pada Bank Indonesia Pusat
824117	Pengeluaran Kiriman Uang dari Bank Operasional I ke Rekening 501
	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening BO I gaji /non gaji ke Rekening Kas Negara 501.000000 pada KPPN Induk
824118	Pengeluaran Kiriman Uang dari Bank Operasional II ke Rekening 501
	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening BO II gaji /non gaji ke Rekening Kas Negara 501.000000 pada KPPN Induk
82412	Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka TSA
824121	Pengeluaran Kiriman Uang dari Bank Operasional I KPPN Non KCBI ke Rekening 501.000.000 KPPN Induk
	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening BO I KPPN Non KCBI ke Rekening Kas Negara 501.000000 pada KPPN Induk.
824122	Pengeluaran Kiriman Uang dari Bank Operasional II KPPN Non KCBI ke Rekening 501.000.000 KPPN Induk
	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening BO II KPPN Non KCBI ke Rekening Kas Negara 501.000000 pada KPPN Induk.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

824123	Pengeluaran Kiriman Uang dari Sentral Giro/SSG KPPN Non KCBI ke Rekening 501.000.000 KPPN Induk
	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening Sentral Giro/SSG KPPN Non KCBI ke Rekening Kas Negara 501.000000 pada KPPN Induk.
824124	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening 501.000.000 KPPN Induk ke Bank Operasional I KPPN Non KCBI
	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening Kas Negara 501.000000 pada KPPN Induk ke Rekening BO I pada KPPN Non KCBI
824125	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening 501.000.000 KPPN Induk ke Bank Operasional II KPPN Non KCBI
	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening Kas Negara 501.000000 pada KPPN Induk ke Rekening BO II pada KPPN Non KCBI
824126	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening 501.000.000 KPPN Induk ke Sentral Giro/SSG KPPN Non KCBI
	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening Kas Negara 501.000000 pada KPPN Induk ke Rekening Sentral Giro/SSG pada KPPN Non KCBI
824127	Pengeluaran Kiriman Uang dari Bank Operasional III KPPN Non KCBI ke Rekening 501.000.000 KPPN Induk
	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening BO I KPPN Non KCBI ke Rekening Kas Negara 501.000000 pada KPPN Induk.
824128	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening Gabungan KPPN Non KCBI ke Rekening 501.000.000 KPPN Induk
	Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening BO I KPPN Non KCBI ke Rekening Kas Negara 501.000000 pada KPPN Induk.
82413	Pengeluaran Kiriman Uang dalam rangka TSA dengan RPK-BUN P
824131	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening BUN ke RPK-BUN-P
	Pengeluaran Kiriman Uang dari rekening BUN 502.000000 pada Bank Indonesia Pusat ke Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat/ RPK-BUN-P (BRI : 0329-01-001819-30-7; Bank Mandiri : 119.00000.3333.0; BNI : 194600506)
824132	Pengeluaran Kiriman Uang dari RPK-BUN-P ke BO I KPPN
	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat/ RPK-BUN-P ke Rekening BO I gaji/non gaji pada KPPN
824133	Pengeluaran Kiriman Uang dari RPK-BUN-P ke Rekening BUN
	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat/ RPK-BUN-P ke Rekening BUN 502.000000 pada Bank Indonesia Pusat
824134	Pengeluaran Kiriman Uang dari BO I KPPN ke RPK-BUN-P
	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening BO I gaji/non gaji pada KPPN ke Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat/ RPK-BUN-P
8242	Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus
82421	Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus
824211	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening Khusus ke KPPN
	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening Khusus (menampung pembiayaan) ke Rekening Kas Negara pada KPPN sesuai SPM-LS /SPM-GU Isi/SPM Pengganti
824212	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening Khusus ke Rekening Kantor Pusat Ditjen PBN 500.000.000
	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening Khusus ke Rekening antara /kantor Pusat Ditjen PBN 500.000000 pada Bank Indonesia Pusat.
824213	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening Khusus ke Rekening BUN 502.000000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

	Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening Khusus ke Rekening BUN 502.000000 pada Bank Indonesia Pusat.
824214	Pembetulan Pembukuan Penerimaan Penggantian dari Rekening Khusus Pembetulan pembukuan yang dilakukan karena adanya kesalahan atas penerimaan penggantian dari Rekening Khusus.
824215	Pengeluaran dari KPPN ke Rekening Kantor Pusat Ditjen PBN 500.000.000 berdasarkan SPM Pengganti Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening Kas Negara KPPN ke Rekening antara /kantor Pusat Ditjen PBN 500.000000 pada Bank Indonesia Pusat sesuai SPM Pengganti.
824216	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Khusus Pengeluaran Kiriman Uang dari rekening Khusus (menampung pembiayaan) satu ke Rekening Khusus yang lain sesuai pemberi bantuan/donor
8243	Pengeluaran Pemindahbukuan
82431	Pengeluaran Pemindahbukuan
824311	Pengeluaran Pemindahbukuan Intern KPPN Pengeluaran pemindahbukuan antara rekening No. 501.000.000 pada Bank Indonesia KPPN Induk dengan rekening KPPN Wilayah.
824312	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Tunggal ke Bank Operasional Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening Kas Negara No. 501.000.000 pada Bank Indonesia ke BO untuk pembayaran belanja gaji dan non gaji
824313	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Operasional ke Bank Tunggal Pengeluaran Pemindahbukuan kelebihan saldo pada rekening non gaji atau sisa pagu pada rekening Gaji BO II ke Rekening Kas Negara No. 501.000.000 pada Bank Indonesia
824314	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Operasional (BO) I ke BO II Pengeluaran untuk pemindahbukuan dari BO I ke BO II terdiri dari : Pembagian pagu belanja pegawai dari BO I sebesar pembayaran gaji ditambah 5% dari pembayaran gaji ke masing-masing BO II, penambahan pagu BO II untuk kekurangan pembayaran belanja pegawai di luar gaji induk
824315	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Operasional (BO) II ke BO I Pengeluaran untuk pemindahbukuan dari BO II ke BO I meliputi pengeluaran pemindahbukuan kelebihan pagu BO II ke BO I Gaji sebelum penihilan BO I Gaji atau ke BO I Non Gaji setelah penihilan BO I Gaji
824316	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening Gabungan ke Bank Tunggal (Bank Operasional) Pengeluaran dalam rangka pelimpahan dari Rekening Gabungan Bank/Kantor Pos Persepsi ke BO I Non Gaji. Rekening Kas Negara Gabungan adalah satu rekening untuk menampung pelimpahan penerimaan dari Rekening Kas Negara Persepsi
824317	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Tunggal/Operasional I ke Sentral Giro/Sentral Giro Gabungan Pemindahbukuan dari BO I Gaji/Non Gaji ke SG/SGG Pengeluaran untuk pembayaran belanja.gaji pegawai dan non gaji
824318	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Sentral Giro/Sentral Giro Gabungan ke Bank Tunggal/Operasional I Pemindahbukuan dalam rangka pelimpahan penerimaan negara dari rekening Pos Persepsi ke BO I
82432	Pengeluaran Pemindahbukuan Bank Operasional III
824321	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Operasional III ke Bank Tunggal/Bank Operasional I Pelimpahan PBB dan BPHTB sebesar % (persentase) bagian pemerintah pusat dan biaya pemungutan PBB



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

824322	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Persepsi PBB ke BO III
	Pengeluaran pemindahbukuan PBB dari Bank Persepsi PBB setiap hari Selasa dan Jum'at untuk akun pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
824323	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Persepsi BPHTB ke BO III
	Pengeluaran pemindahbukuan BPHTB dari Bank Persepsi BPHTB setiap hari Selasa dan Jum'at untuk akun pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
82433	Pengeluaran Pemindahbukuan dalam rangka TSA
824331	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Tunggal ke Bank Operasional I
	Pengeluaran pemindahbukuan dari rekening No. 501.000.000 pada Bank Indonesia ke Rekening Gaji pada BO I sesuai pagu dalam rangka TSA
	Pengeluaran pemindahbukuan dari rekening No. 501.000.000 pada Bank Indonesia ke Rekening Non Gaji pada BO I sesuai pagu dalam rangka TSA
824332	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Operasional I ke Bank Tunggal
	Pengeluaran pemindahbukuan dari BO I ke Rekening No. 501.000.000 pada Bank Indonesia dalam rangka TSA
824333	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Tunggal ke Bank Operasional II
	Pengeluaran pemindahbukuan dari rekening No. 501.000.000 pada Bank Indonesia ke Rekening BO II sesuai pagu dalam rangka TSA
824334	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Operasional II ke Bank Tunggal
	Pengeluaran pemindahbukuan dari BO II ke Rekening No. 501.000.000 pada Bank Indonesia dalam rangka TSA
82434	Pengeluaran Pemindahbukuan Rekening BUN dengan Rekening KUN dalam Valuta USD
824341	Pengeluaran Pemindahbukuan dari rekening 502.000000 ke Rekening 600.502411
	Pengeluaran pemindahbukuan dari rekening BUN 502.000.000 pada Bank Indonesia Pusat ke Rekening KUN dalam Valuta USD 600.502411
824342	Pengeluaran Pemindahbukuan dari rekening 600.502411 ke Rekening 502.000000
	Pengeluaran pemindahbukuan dari rekening KUN dalam Valuta USD 600.502411 ke Rekening BUN 502.000.000 pada Bank Indonesia Pusat
82435	Pengeluaran Pemindahbukuan Rekening BUN dengan Rekening RPK-BUN-P
824351	Pengeluaran Pemindahbukuan dari rekening 502.000000 ke Rekening RPK-BUN-P1
	Pengeluaran pemindahbukuan dari rekening BUN 502.000.000 pada Bank Indonesia Pusat ke Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat 1
824352	Pengeluaran Pemindahbukuan dari rekening 502.000000 ke Rekening RPK-BUN-P2
	Pengeluaran pemindahbukuan dari rekening BUN 502.000.000 pada Bank Indonesia Pusat ke Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat 2
824353	Pengeluaran Pemindahbukuan dari rekening 502.000000 ke Rekening RPK-BUN-P3
	Pengeluaran pemindahbukuan dari rekening BUN 502.000.000 pada Bank Indonesia Pusat ke Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat 3
824354	Pengeluaran Pemindahbukuan dari rekening RPK-BUN-P1 ke Rekening 502.000000
	Pengeluaran pemindahbukuan dari rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat 1 ke Rekening BUN 502.000.000 pada Bank Indonesia Pusat
824355	Pengeluaran Pemindahbukuan dari rekening RPK-BUN-P2 ke Rekening 502.000000
	Pengeluaran pemindahbukuan dari rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat 2 ke Rekening BUN 502.000.000 pada Bank Indonesia Pusat
824356	Pengeluaran Pemindahbukuan dari rekening RPK-BUN-P3 ke Rekening 502.000000
	Pengeluaran pemindahbukuan dari rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat 3 ke Rekening BUN 502.000.000 pada Bank Indonesia Pusat



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

82436	Pengeluaran Pemindahbukuan Rek.Talangan Reksus Kosong dengan Rek. Sub BUN Talangan Karena Reksus Kosong
824361	Pengeluaran Pemindahbukuan dari rekening 500.000001 ke Rekening 561.000001
	Pengeluaran pemindahbukuan dari rekening Dana Talangan karena reksus Kosong ke Rekening Sub BUN Dana Talangan Reksus Kosong 561.000001 di Bank Indonesia Pusat
824362	Pengeluaran Pemindahbukuan dari rekening 500.000001 ke Rekening 561.000002
	Pengeluaran pemindahbukuan dari rekening Dana Talangan karena reksus Kosong ke Rekening Sub BUN Dana Talangan Reksus Kosong 561.000002 di Bank Indonesia Pusat
824363	Pengeluaran Pemindahbukuan dari rekening 500.000001 ke Rekening 561.000003
	Pengeluaran pemindahbukuan dari rekening Dana Talangan karena reksus Kosong ke Rekening Sub BUN Dana Talangan Reksus Kosong 561.000003 di Bank Indonesia Pusat
824364	Pengeluaran Pemindahbukuan dari rekening 500.000001 ke Rekening 561.000005
	Pengeluaran pemindahbukuan dari rekening Dana Talangan karena reksus Kosong ke Rekening Sub BUN Dana Talangan Reksus Kosong 561.000005 di Bank Indonesia Pusat
824365	Pengeluaran Pemindahbukuan dari rekening 561.000001 ke Rekening 500.000001
	Pengeluaran pemindahbukuan dari Rekening Sub BUN Dana Talangan Reksus Kosong 561.000001 di Bank Indonesia Pusat ke Rekening Dana Talangan karena reksus Kosong
824366	Pengeluaran Pemindahbukuan dari rekening 561.000002 ke Rekening 500.000001
	Pengeluaran pemindahbukuan dari Rekening Sub BUN Dana Talangan Reksus Kosong 561.000002 di Bank Indonesia Pusat ke Rekening Dana Talangan karena reksus Kosong
824367	Pengeluaran Pemindahbukuan dari rekening 561.000003 ke Rekening 500.000001
	Pengeluaran pemindahbukuan dari Rekening Sub BUN Dana Talangan Reksus Kosong 561.000003 di Bank Indonesia Pusat ke Rekening Dana Talangan karena reksus Kosong
824368	Pengeluaran Pemindahbukuan dari rekening 561.000005 ke Rekening 500.000001
	Pengeluaran pemindahbukuan dari Rekening Sub BUN Dana Talangan Reksus Kosong 561.000005 di Bank Indonesia Pusat ke Rekening Dana Talangan karena reksus Kosong
82437	Pengeluaran Pemindahbukuan Rekening BUN dengan Rekening Talangan karena Reksus Kosong
824371	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening 502.000000 ke Rekening 500.000001
	Pengeluaran pemindahbukuan dari rekening BUN 502.000.000 pada Bank Indonesia Pusat ke Rekening Dana Talangan karena reksus Kosong
824372	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening 500.000001 ke Rekening 502.000000
	Pengeluaran pemindahbukuan dari Rekening Dana Talangan karena reksus Kosong ke Rekening BUN 502.000.000 pada Bank Indonesia Pusat
825	Pengeluaran Transito
8251	Pengeluaran Transito
82511	Pengeluaran Transito
825111	Pengeluaran Uang Persediaan Dana Rupiah
	Pengeluaran Uang Persediaan /UP kepada satuan kerja Kementerian Negara / Lembaga yang diterima dari kas negara dengan perlakuan sebagai uang muka dari Kas Negara (KPPN) untuk pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan UP (DUP dan /atau TUP) dan belum membebani anggaran (DIPA atau dokumen yang dipersamakan) satker yang bersangkutan serta harus dikembalikan/disetor bila terdapat saldo pada akhir T.A. ybs. Atau akhir bulan yang berkenaan (TUP)
825112	Pengeluaran Uang Persediaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri
	Pengeluaran Uang Persediaan /UP kepada satuan kerja Kementerian Negara / Lembaga Pengguna Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri yang diterima dari kas negara dengan perlakuan sebagai uang muka dari Kas Negara (KPPN) untuk pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan UP (DUP dan /atau TUP) dan belum membebani anggaran (DIPA atau dokumen yang dipersamakan) satker yang bersangkutan serta harus dikembalikan/disetor bila terdapat saldo pada akhir T.A. ybs. Atau akhir bulan yang berkenaan (TUP)
825113	Pengeluaran Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

	Pengeluaran Uang Persediaan /UP kepada satuan kerja Kementerian Negara / Lembaga Pengguna PNB (Swadana) yang diterima dari kas negara dengan perlakuan sebagai uang muka dari Kas Negara (KPPN) untuk pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan UP (DUP dan /atau TUP) dan belum membebani anggaran (DIPA atau dokumen yang dipersamakan) satker yang bersangkutan serta harus dikembalikan/disetor bila terdapat saldo pada akhir T.A. ybs. Atau akhir bulan yang berkenaan (TUP)
826	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga
8261	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga
82611	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga
	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Rekening
	Pengeluaran dari Rekening Bank Operasional KPPN kepada rekening yang salah dari Pihak Ketiga sesuai dengan No. Rekening dan/atau nama pemilik rekening Pihak Ketiga yang tertera pada dokumen SPM/SP2D LS yang menimbulkan rekening antara / penampungan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB IV

DAFTAR KLASIFIKASI

Daftar klasifikasi yang mencakup klasifikasi menurut organisasi, fungsi, subfungsi, program, kegiatan, subkegiatan, dan mata anggaran merupakan landasan bagi setiap instansi yang terkait dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban anggaran dan pemeriksaan laporan keuangan. Daftar klasifikasi tersebut juga menjadi pendukung bagi setiap Kementerian Negara/Lembaga dalam menyusun RKA KL dan DIPA. Selanjutnya keseluruhan daftar tersebut secara terinci terdapat pada bagian yang tidak terpisahkan dari BAB IV.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR BAGIAN ANGGARAN

KODE	NAMA UNIT ORG.
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
001 01	SEKRETARIAT JENDERAL
001 02	MAJELIS
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
002 01	SEKRETARIAT JENDERAL
002 02	DEWAN
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
004 01	SEKRETARIAT JENDERAL
004 02	B. P. K. PUSAT
005	MAHKAMAH AGUNG
005 01	SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG
005 02	KEPANITERAAN
005 03	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
005 04	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
005 04	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TUN
005 06	BADAN URUSAN ADMINISTRASI
005 07	BADAN DIKLAT LITBANG
005 08	BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG
006	KEJAKSAAN AGUNG
006 01	KEJAKSAAN AGUNG
007	SEKRETARIAT NEGARA
007 01	SEKRETARIAT NEGARA
007 02	SEKRETARIAT KABINET
007 03	RUMAH TANGGA KEPRESIDENAN
007 04	SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
007 05	SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN
007 06	PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN
010	DALAM NEGERI
010 01	SEKRETARIAT JENDERAL
010 02	INSPEKTORAT JENDERAL
010 03	DITJEN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
010 04	DITJEN PEMERINTAHAN UMUM
010 05	DITJEN PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
010 06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
010 07	DITJEN OTONOMI DAERAH
010 08	DITJEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
010 09	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
010 11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
010 12	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
011	LUAR NEGERI
011 01	SEKRETARIAT JENDERAL
011 02	DITJEN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA
011 03	DITJEN AMERIKA DAN EROPA
011 04	DITJEN KERJASAMA ASEAN
011 05	DITJEN MULTILATERAL
011 06	DITJEN INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK
011 07	DITJEN HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
011 08	DITJEN PROTOKOL DAN KONSULER



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA UNIT ORGANISASI	
	011	09 INSPEKTORAT JENDERAL
	011	11 BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
012	PERTAHANAN	
	012	01 DEPARTEMEN PERTAHANAN
	012	21 MARKAS BESAR TNI
	012	22 MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
	012	23 MARKAS BESAR TNI ANGKATAN LAUT
	012	24 MARKAS BESAR TNI ANGKATAN UDARA
013	HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	
	013	01 SEKRETARIAT JENDERAL
	013	02 INSPEKTORAT JENDERAL
	013	03 DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
	013	05 DITJEN PEMASYARAKATAN
	013	06 DITJEN IMIGRASI
	013	07 DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
	013	08 DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
	013	09 DITJEN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
	013	10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
	013	11 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM
015	KEUANGAN	
	015	01 SEKRETARIAT JENDERAL
	015	02 INSPEKTORAT JENDERAL
	015	03 DITJEN ANGGARAN
	015	04 DITJEN PAJAK
	015	05 DITJEN BEA DAN CUKAI
	015	06 DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN
	015	07 DITJEN PENGELOLAAN UTANG
	015	08 DITJEN PERBENDAHARAAN
	015	09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
	015	10 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
	015	11 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
	015	12 BADAN KEBIJAKAN FISKAL
018	PERTANIAN	
	018	01 SEKRETARIAT JENDERAL
	018	02 INSPEKTORAT JENDERAL
	018	03 DITJEN TANAMAN PANGAN
	018	05 DITJEN PERKEBUNAN
	018	06 DITJEN PETERNAKAN
	018	07 DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
	018	08 DITJEN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR
	018	09 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
	018	10 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	018	11 BADAN KETAHANAN PANGAN
	018	12 BADAN KARANTINA PERTANIAN
019	PERINDUSTRIAN	
	019	01 SEKRETARIAT JENDERAL
	019	02 DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO DAN KIMIA
	019	03 DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, TEKSTIL DAN ANEKA
	019	04 DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA
	019	05 DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
	019	06 INSPEKTORAT JENDERAL



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA UNIT ORGANISASI	
	019 07	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
020	ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	
	020 01	SEKRETARIAT JENDERAL
	020 02	INSPEKTORAT JENDERAL
	020 04	DITJEN MINYAK DAN GAS BUMI
	020 05	DITJEN LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI
	020 06	DITJEN MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI
	020 11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	020 12	BADAN DIKLAT ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	020 13	BADAN GEOLOGI
022	PERHUBUNGAN	
	022 01	SEKRETARIAT JENDERAL
	022 02	INSPEKTORAT JENDERAL
	022 03	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT
	022 04	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT
	022 05	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
	022 08	DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
	022 11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
	022 12	BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERHUBUNGAN
	022 13	BADAN S A R
023	PENDIDIKAN NASIONAL	
	023 01	SEKRETARIAT JENDERAL
	023 02	INSPEKTORAT JENDERAL
	023 03	DITJEN MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
	023 04	DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
	023 05	DITJEN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
	023 08	DITJEN PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
	023 11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DIKBUD
024	KESEHATAN	
	024 01	SEKRETARIAT JENDERAL
	024 02	INSPEKTORAT JENDERAL
	024 03	DITJEN BINA KESEHATAN MASYARAKAT
	024 04	DITJEN BINA PELAYANAN MEDIK
	024 05	DITJEN PENGENDALIAAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
	024 07	DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
	024 11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
	024 12	BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
025	AGAMA	
	025 01	SEKRETARIAT JENDERAL
	025 02	INSPEKTORAT JENDERAL
	025 03	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
	025 04	DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
	025 05	DITJEN PEMBINAAN MASYARAKAT KRISTEN
	025 06	DITJEN PEMBINAAN MASYARAKAT KHATOLIK
	025 07	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
	025 08	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDHA
	025 09	DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMROH
	025 11	BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN AGAMA DAN DIKLAT
026	TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	026 01	SEKRETARIAT JENDERAL
	026 02	INSPEKTORAT JENDERAL



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA UNIT ORGANISASI	
026	03	DITJEN PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI
026	04	DITJEN PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI
026	05	DITJEN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL & JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
026	06	DITJEN PEMBINAAN PENYIAPAN PERMUKIMAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI
026	07	DITJEN PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI
026	08	DITJEN PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
026	11	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INFORMASI
026	13	DITJEN PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
027	DEPARTEMEN SOSIAL	
027	01	SEKRETARIAT JENDERAL
027	02	INSPEKTORAT JENDERAL
027	03	DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL
027	04	DITJEN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL
027	05	DITJEN BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL
027	11	BADAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
029	KEHUTANAN	
029	01	SEKRETARIAT JENDERAL
029	02	INSPEKTORAT JENDERAL
029	03	DITJEN BINA PRODUKSI KEHUTANAN
029	04	DITJEN REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL
029	05	DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
029	06	BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN
029	07	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN
032	KELAUTAN DAN PERIKANAN	
032	01	SEKRETARIAT JENDERAL
032	02	INSPEKTORAT JENDERAL
032	03	DITJEN PERIKANAN TANGKAP
032	04	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA DITJEN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
032	05	PERIKANAN
032	06	DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (P2HP)
032	07	DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)
032	11	BADAN RISET KELAUTAN DAN PERIKANAN (BRKP)
032	12	BADAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN
033	PEKERJAAN UMUM	
033	01	SEKRETARIAT JENDERAL
033	02	INSPEKTORAT JENDERAL
033	03	DITJEN PENATAAN RUANG
033	04	DITJEN BINA MARGA
033	05	DITJEN CIPTA KARYA
033	06	DITJEN SUMBER DAYA AIR
033	11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
033	13	BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA
033	14	BADAN PENGELOLA BADAN TOL
033	15	BADAN PENDUKUNG PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
034	MENKO BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	
034	01	MENKO BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
035	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	
035	01	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN
036	MENKO BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	
036	01	MENKO BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA UNIT ORGANISASI
040	KEMENTERIAN NEGARA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
040 01	SEKRETARIAT JENDERAL
040 02	INSPEKTORAT JENDERAL
040 03	DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA, SENI DAN PERFILMAN
040 04	DIREKTORAT JENDERAL SEJARAH DAN PURBAKALA
040 05	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
040 06	DIREKTORAT JENDERAL PEMASARAN
040 10	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
041 01	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
042 01	MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
043 01	MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
044 01	MENTERI NEGARA KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH
047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
047 01	MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
48 01	MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
050	BADAN INTELIJEN NEGARA
050 01	BADAN INTELIJEN NEGARA
051	LEMBAGA SANDI NEGARA
051 01	LEMBAGA SANDI NEGARA
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL
052 01	DEWAN KETAHANAN NASIONAL
054	BADAN PUSAT STATISTIK
054 01	BADAN PUSAT STATISTIK
055	KEMENTERIAN NEGARA PPN / BAPPENAS
055 01	MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN/BAPPENAS
056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL
056 01	BADAN PERTANAHAN NASIONAL
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL
057 01	PERPUSTAKAAN NASIONAL
059	MENTERI NEGARA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
059 01	SEKRETARIAT JENDERAL
059 02	INSPEKTORAT JENDERAL
059 03	DITJEN POS DAN TELEKOMUNIKASI
059 04	DITJEN APLIKASI TELEMATIKA
059 05	DITJEN SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI
059 06	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
059 07	BADAN INFORMASI PUBLIK
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
060 01	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
061	CICILAN BUNGA HUTANG
061 03	CICILAN BUNGA HUTANG
062	SUBSIDI DAN TRANSFER
062 03	SUBSIDI DAN TRANSFER
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
063 01	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA UNIT ORGANISASI
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
064 01	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
065 01	SEKRETARIAT UTAMA
065 02	DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
065 03	DEPUTI BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL
065 04	DEPUTI BIDANG KERJA SAMA PENANAMAN MODAL
065 05	DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL
065 06	DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
065 07	INSPEKTORAT
065 08	PUSAT PENELITIAN DAN PELATIHAN
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL
066 01	BADAN NARKOTIKA NASIONAL
067	MENEG PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR INDONESIA
067 01	MENEG PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR INDONESIA
068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
068 01	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
069	BELANJA LAIN-LAIN
069 03	BELANJA LAIN-LAIN
070	DANA PERIMBANGAN
070 03	DANA PERIMBANGAN
071	DANA OTONOMI KHUSUS PENYEIMBANG
071 03	DANA OTONOMI KHUSUS PENYEIMBANG
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
074 01	KOMNAS HAM
075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
075 01	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM
076 01	KOMISI PEMILIHAN UMUM
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI
077 01	MAHKAMAH KONSTITUSI RI
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
078 01	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
079 01	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
080 01	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
081 01	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
082 01	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL
083 01	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL
084	BADAN STANDARISASI NASIONAL
084 01	BADAN STANDARISASI NASIONAL
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
085 01	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
086 01	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA UNIT ORGANISASI
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
087 01	ARSIP NASIONAL
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
088 01	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
089 01	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
090	DEPARTEMEN PERDAGANGAN
090 01	SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN PERDAGANGAN
090 02	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
090 03	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
090 04	DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL
090 05	INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN PERDAGANGAN
090 06	BADAN PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL
090 07	BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
090 08	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN
091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
091 01	SEKRETARIAT KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
091 02	DEPUTI PEMBIAYAAN
091 03	DEPUTI PENGEMBANGAN KAWASAN
091 04	DEPUTI PERUMAHAN FORMAL
091 05	DEPUTI PERUMAHAN SWADAYA
092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA
092 01	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA
093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
093 01	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD - NIAS
094 01	BIDANG PENGAWASAN
094 02	BIDANG KEUANGAN DAN PERENCANAAN
094 03	BIDANG AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA
094 04	BIDANG EKONOMI DAN USAHA
094 05	BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PERAN PEREMPUAN
094 06	BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
094 07	BIDANG INFRASTRUKTUR, LINGKUNGAN DAN PEMELIHARAAN
094 08	BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
094 09	SEKRETARIAT, KOMUNIKASI DAN INFORMASI
094 10	BIDANG OPERASI
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
095 01	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
095 02	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
096	PEMBAYARAN CICILAN POKOK HUTANG LUAR NEGERI
096 03	PEMBAYARAN CICILAN POKOK HUTANG LUAR NEGERI
097	PEMBAYARAN CICILAN POKOK HUTANG DALAM NEGERI
097 03	PEMBAYARAN CICILAN POKOK HUTANG DALAM NEGERI
098	PENERUSAN PINJAMAN
098 03	PENERUSAN PINJAMAN
099	PENYERTAAN MODAL NEGARA
099 03	PENYERTAAN MODAL NEGARA
100	KOMISI YUDISIAL RI
100 01	KOMISI YUDISIAL RI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA UNIT ORGANISASI
101	PENERUSAN PINJAMAN SEBAGAI HIBAH
	101 03 PENERUSAN PINJAMAN SEBAGAI HIBAH
102	PENERUSAN HIBAH
	102 03 PENERUSAN HIBAH
103	BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN BENCANA
	103 01 BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN BENCANA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KLASIFIKASI MENURUT FUNGSI DAN SUBFUNGSI

Kode	Fungsi dan Sub Fungsi
01	Pelayanan Umum
01 01	Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri
01 02	Bantuan Luar Negeri
01 03	Pelayanan Umum
01 04	Penelitian Dasar dan Pengembangan Iptek
01 05	Pinjaman Pemerintah
01 06	Pembangunan Daerah
01 07	Litbang Pelayanan Umum Pemerintahan
01 90	Pelayanan Umum Pemerintahan Lainnya
02	Pertahanan
02 01	Pertahanan Negara
02 02	Dukungan Pertahanan
02 03	Bantuan Militer Luar Negeri
02 04	Litbang Pertahanan
02 90	Pertahanan lainnya
03	Ketertiban dan Keamanan
03 01	Kepolisian
03 02	Penanggulangan Bencana
03 03	Pembinaan Hukum
03 04	Peradilan
03 05	Lembaga Pemasarakatan
03 06	Litbang Ketertiban, Keamanan dan Hukum
03 90	Ketertiban, Keamanan dan Hukum Lainnya
04	Ekonomi
04 01	Perdagangan, Pengembangan Usaha, Koperasi, dan UKM
04 02	Tenaga Kerja
04 03	Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan
04 04	Pengairan
04 05	Bahan Bakar dan Energi
04 06	Pertambangan
04 07	Industri dan Konstruksi
04 08	Transportasi
04 09	Telekomunikasi dan Informatika
04 10	Litbang Ekonomi
04 90	Ekonomi lainnya
05	Lingkungan Hidup
05 01	Manajemen Limbah
05 02	Manajemen Air Limbah
05 03	Penanggulangan Polusi
05 04	Konservasi Sumberdaya Alam
05 05	Tata Ruang dan Pertanahan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kode	Fungsi dan Sub Fungsi
05 06	Litbang Perlindungan Lingkungan Hidup
05 90	Perlindungan Lingkungan Hidup Lainnya
06	Perumahan dan Fasilitas Umum
06 01	Pengembangan Perumahan
06 02	Pemberdayaan Komunitas Pemukiman
06 03	Penyediaan Air Minum
06 04	Penerangan jalan
06 05	Litbang Perumahan dan pemukiman
06 90	Perumahan dan Pemukiman Lainnya
07	Kesehatan
07 01	Obat dan Perbekalan Kesehatan
07 02	Pelayanan Kesehatan Perorangan
07 03	Pelayanan Kesehatan Masyarakat
07 04	Keluarga Berencana
07 05	Litbang Kesehatan
07 90	Kesehatan lainnya
08	Pariwisata dan Budaya
08 01	Pengembangan Pariwisata dan Budaya
08 02	Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga
08 03	Pembinaan Penerbitan dan Penyiaran
08 04	Litbang Pariwisata, Budaya, Kepemudaan dan Olahraga
08 90	Pariwisata dan Budaya Lainnya
09	Agama
09 01	Peningkatan Kehidupan Beragama
09 02	Kerukunan Hidup Beragama
09 03	Litbang Agama
09 90	Pelayanan Keagamaan Lainnya
10	Pendidikan
10 01	Pendidikan Anak Usia Dini
10 02	Pendidikan Dasar
10 03	Pendidikan Menengah
10 04	Pendidikan Non Formal & In Formal
10 05	Pendidikan Kedinasan
10 06	Pendidikan Tinggi
10 07	Pelayanan Bantuan terhadap Pendidikan
10 08	Pendidikan Keagamaan
10 09	Litbang Pendidikan
10 90	Pendidikan Lainnya
11	Perlindungan Sosial
11 01	Perlindungan dan Pelayanan Orang Sakit dan Cacat
11 02	Perlindungan dan Pelayanan Lansia
11 03	Perlindungan dan Pelayanan Sosial Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Pejuang
11 04	Perlindungan dan Pelayanan Sosial Anak-anak dan Keluarga
11 05	Pemberdayaan Perempuan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kode	Fungsi dan Sub Fungsi
11 06	Penyuluhan dan Bimbingan Sosial
11 07	Bantuan Perumahan
11 08	Bantuan dan Jaminan Sosial
11 09	Litbang Perlindungan Sosial
11 90	Perlindungan Sosial lainnya



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DAFTAR PROGRAM

KODE			NAMA PROGRAM
FUNGSI/SUBFUNGSI/PROGRAM			
01	01	01	Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi
01	01	02	Program Pemantapan Politik Luar Negeri dan Optimalisasi Diplomasi Indonesia
01	01	03	Program Perbaikan Proses Politik
01	01	04	Program Penegasan Komitmen Perdamaian Dunia
01	01	05	Program Peningkatan Kerjasama Internasional
01	01	06	Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional
01	01	07	Program Penataan Hubungan Negara dan Masyarakat
01	01	08	Program Penataan Peran Negara dan Masyarakat
01	01	09	Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik
01	01	10	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
01	01	11	Program Pengawasan Aparatur Negara
01	01	12	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
01	01	13	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Program Pengelolaan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pendidikan Kedinasan
01	01	14	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
01	01	15	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
01	01	16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
01	01	17	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
01	01	18	Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan
01	01	19	Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara
01	01	20	Program Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara
01	01	21	Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara
01	01	22	Program Pengembangan Kelembagaan Keuangan
01	01	23	Program Pengembangan Kelembagaan Keuangan
01	01	24	Program Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan
01	01	25	Program Pengelolaan dan Pembiayaan Hutang
01	01	26	Program Pemantapan Pelaksanaan Sistem Penganggaran
01	01	27	Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik
01	01	28	Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Hubungan Antar Lembaga
01	03	01	Program Keserasian Kebijakan Kependudukan
01	03	02	Program Penataan Administrasi Kependudukan
01	03	03	Program Pemberdayaan Masyarakat
01	04	01	Program Penelitian dan Pengembangan Iptek
01	04	02	Program Difusi dan Pemanfaatan Iptek
01	04	03	Program Penguatan Kelembagaan Iptek
01	05	01	Program Pembayaran Bunga Utang
01	06	01	Program Penataan Daerah Otonomi Baru Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah
01	06	02	Program Pengembangan Kota-Kota Kecil dan Menengah
01	06	03	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
01	06	04	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
01	06	05	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
01	06	06	Program Pengembangan Ekonomi Lokal
01	06	07	Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah
01	06	08	Program Pemulihan Kawasan Konflik
01	06	09	Program Pemulihan Wilayah Pasca Konflik
01	06	10	Program Pemulihan Wilayah Pasca Konflik
01	06	11	Program Pemulihan Daerah Yang Terkena Bencana Nasional



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE FUNGSI/SUBFUNGSI/PROGRAM			NAMA PROGRAM
01	06	12	Program Pengembangan Otonomi Daerah
01	06	13	Program Pembinaan Daerah
01	06	14	Program Pengembangan Daerah Khusus
01	90	01	Program Subsidi dan Transfer Lainnya
01	90	02	Program Pembiayaan Lain-Lain
01	90	03	Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias
02	01	01	Program Pengembangan Pertahanan Integratif
02	01	02	Program Pengembangan Pertahanan Matra Darat
02	01	03	Program Pengembangan Pertahanan Matra Laut
02	01	04	Program Pengembangan Pertahanan Matra Udara
02	01	05	Program Penegakan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan Wilayah NKRI
02	01	06	Program Pengembangan Bela Negara
02	02	01	Program Pengembangan Sistem dan Strategi Pertahanan
02	02	02	Program Pengembangan Industri Pertahanan
02	02	03	Program Pengembangan Potensi Dukungan Pertahanan
02	03	01	Program Kerjasama Militer Internasional
02	04	01	Program Penelitian dan Pengembangan Pertahanan
02	04	02	Program Pengembangan Ketahanan Nasional
02	90	01	Program Operasi Bhakti TNI
03	01	01	Program Pengembangan SDM Kepolisian
03	01	02	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian
03	01	03	Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban
03	01	04	Program Pemberdayaan Potensi Keamanan
03	01	05	Program Pemeliharaan Kamtibmas
03	01	06	Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara
03	01	07	Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara
03	01	08	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
03	01	09	Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri
03	01	10	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
03	01	12	Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban
03	02	01	Program Pencarian dan Penyelamatan
03	03	01	Program Perencanaan Hukum
03	03	02	Program Pembentukan Hukum
03	03	03	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM
03	03	04	Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum
03	03	05	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya
03	03	06	Program Penegakan Hukum dan HAM
03	03	07	Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum
03	03	08	Program Pembinaan dan Pengembangan Hukum dan HAM
03	03	09	Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum
03	03	10	Program Pembinaan Peradilan
04	01	01	Program Persaingan Usaha
04	01	02	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
04	01	03	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
04	01	04	Program Penciptaan Iklim Usaha KUKM
04	01	05	Program Penciptaan Iklim Usaha UMKM
04	01	06	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE FUNGSI/SUBFUNGSI/PROGRAM			NAMA PROGRAM
04	01	07	Program Pengembangan Ekspor
04	01	08	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
04	01	09	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
04	01	10	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
04	01	11	Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro
04	01	12	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
04	02	01	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
04	02	02	Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
04	02	03	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
04	02	04	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
04	02	05	Program Perluasan Kesempatan Kerja Yang Dilakukan Pemerintah
04	02	06	Program Pendukung Pasar Kerja
04	03	01	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
04	03	02	Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
04	03	03	Program Pengembangan Agribisnis
04	03	04	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
04	03	05	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
04	03	06	Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan
04	03	07	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pertanian
04	03	08	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
04	03	09	Program Pembinaan Produksi Kehutanan
04	03	10	Program Pembangunan dan Pembinaan Kehutanan
04	03	11	Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana
04	04	01	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya
04	04	02	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, dan Sumber Air Lainnya
04	04	03	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
04	05	01	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan
04	05	02	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi
04	05	03	Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi serta Teknologi Energi
04	05	04	Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Energi
04	05	05	Program Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi dan Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi
04	05	06	Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan
04	05	07	Program Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi dan Masyarakat terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan
04	05	08	Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi serta Bisnis Ketenagalistrikan
04	05	09	Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ketenagalistrikan, Usaha Energi Terbarukan dan Konservasi
04	05	10	Program Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Migas
04	05	11	Program Pembinaan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan SDA dan Batubara
04	05	12	Program Pengelolaan Usaha Pertambangan Migas
04	06	01	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
04	06	02	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE FUNGSI/SUBFUNGSI/PROGRAM			NAMA PROGRAM
04	07	01	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
04	07	02	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
04	07	03	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
04	07	04	Program Penataan Struktur Industri
04	08	01	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
04	08	02	Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan
04	08	03	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
04	08	04	Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ
04	08	05	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
04	08	06	Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan Perkeretaapian
04	08	07	Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api
04	08	08	Program Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Kereta Api
04	08	09	Program Restrukturisasi dan Reformasi Kelembagaan Perkeretaapian
04	08	10	Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Prasarana LLAJ
04	08	11	Program Pembangunan Transportasi Laut
04	08	12	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Laut
04	08	13	Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Peraturan Transportasi Laut
04	08	14	Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP
04	08	15	Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan
04	08	16	Program Restrukturisasi dan Reformasi Kelembagaan ASDP
04	08	17	Program Pembangunan Transportasi Udara
04	08	18	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Udara
04	08	19	Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Peraturan Transportasi Udara
04	08	20	Program Pengembangan Transportasi Antarmoda
04	08	21	Program Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
04	08	22	Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi dan Geofisika
04	09	01	Program Penyelesaian Restrukturisasi Pos dan Telematika
04	09	02	Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika
04	09	03	Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
04	90	01	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
04	90	02	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
04	90	03	Program Pengembangan Standardisasi Nasional
04	90	04	Program Pembinaan dan Pengembangan BUMN
05	01	01	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase
05	01	02	Program Pengembangan Kelembagaan
05	03	01	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
05	03	02	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
05	04	01	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
05	04	02	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
05	04	03	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
05	04	04	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
05	05	01	Program Penataan Ruang
05	05	02	Program Penataan Ruang Nasional
05	05	03	Program Pengelolaan Pertahanan
05	90	01	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
06	01	01	Program Pengembangan Perumahan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE FUNGSI/SUBFUNGSI/PROGRAM			NAMA PROGRAM
06	01	02	Program Pengembangan Permukiman
06	02	01	Program Lingkungan Sehat
06	02	02	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
06	03	01	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
06	03	02	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
06	90	01	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
06	90	02	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
06	90	03	Program Pengembangan Wilayah Tertinggal
06	90	04	Program Pengembangan Kawasan Tertinggal
06	90	05	Program Pengembangan Perkotaan
06	90	06	Program Pengendalian Pembangunan Kota-Kota Besar dan Metropolitan
06	90	07	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan
06	90	08	Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Antar Kota
06	90	09	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
07	01	01	Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan
07	01	02	Program Pengawasan Obat dan Makanan
07	01	03	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
07	02	01	Program Upaya Kesehatan Perorangan
07	03	02	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
07	03	03	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
07	03	04	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
07	03	05	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
07	04	01	Program Keluarga Berencana
07	04	02	Program Kesehatan Reproduksi Remaja
07	04	03	Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas
07	05	01	Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
07	90	01	Program Sumber Daya Kesehatan
07	90	02	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
08	01	01	Program Pengembangan Nilai Budaya
08	01	02	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
08	01	03	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
08	01	04	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
08	01	05	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
08	01	06	Program Pengembangan Kemitraan
08	02	01	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
08	02	02	Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda
08	02	03	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
08	02	04	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga
08	02	05	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
08	03	01	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
08	03	02	Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi
09	01	01	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
09	01	02	Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan
09	02	01	Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama
09	03	01	Program Penelitian dan Pengembangan Agama
09	90	01	Program Pengembangan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE			NAMA PROGRAM
FUNGSI/SUBFUNGSI/PROGRAM			
10	01	01	Program Pendidikan Anak Usia Dini
10	02	01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
10	03	01	Program Pendidikan Menengah
10	04	01	Program Pendidikan Non Formal
10	05	01	Program Pendidikan Kedinasan
10	06	01	Program Pendidikan Tinggi
10	07	01	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
10	07	02	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
10	07	03	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
10	08	01	Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
10	09	01	Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan
11	04	01	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
11	04	02	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
11	04	03	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan
11	04	04	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
11	04	05	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
11	05	01	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
11	05	02	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
11	06	01	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
11	06	02	Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial
11	08	01	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
11	09	01	Program Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
11	09	02	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
11	90	01	Program Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial
11	90	02	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
01	90	19	Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan
02	90	19	Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan
03	90	19	Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan
04	90	19	Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan
05	90	19	Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan
06	90	19	Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan
07	90	19	Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan
08	90	19	Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan
09	90	19	Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan
10	90	19	Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan
11	90	19	Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR KODE KEGIATAN

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
0016	Penyusunan, Pengkajian dan Pengembangan Data dan Informasi	000
0017	Peningkatan/Pengkajian Kapasitas Kelembagaan	000
0018	Kajian Manajemen Kebijaksanaan dan Pelayanan	000
0019	Kajian Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	000
0020	Penyusunan, Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan dan Strategi	000
0021	Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	000
0022	Operasi dan Pemeliharaan	000
0023	Operasional Menteri/Ketua Lembaga	000
0024	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana	000
0027	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	000
0028	Pembinaan Administrasi Kepegawaian dan Pensiun	000
0029	Pembinaan dan Pelaksanaan Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Perlengkapan Departemen	000
0030	Pembinaan dan Pengembangan Pemanfaatan Data dan Informasi	000
0031	Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Pendidikan dan Pelatihan	000
0032	Pembinaan Hukum dan Organisasi	000
0033	Penyelenggaraan/Pembinaan Informasi Publik	000
0034	Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi	000
0035	Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran	000
0036	Penatausahaan Anggaran, Penyelenggaraan Perbendaharaan	000
0037	Pendayagunaan/Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan	000
0038	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Pemerintahan	000
0039	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan	000
0040	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	000
0041	Penelitian dan Pengkajian Kebijaksanaan Pengawasan	000
0042	Pengawasan Pendayagunaan Aparatur Negara	000
0043	Pengelolaan dan Pengendalian Anggaran	000
0044	Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	000
0045	Pengembangan Kapasitas Litbang	000
0046	Pengembangan Kapasitas/Administrasi/Manajemen Sumber Daya Manusia	000
0047	Pengembangan Pendidikan Kesetaraan	000
0048	Pengembangan Pendidikan Profesional dan Keahlian	000
0049	Penyelenggaraan/Pengembangan Pendidikan Sumber Daya Manusia	000
0050	Pengembangan Perencanaan dan Administrasi Keuangan	000
0051	Pengembangan SDM dan Administrasi Kepegawaian	000
0052	Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja	000
0053	Pengendalian Program Diklat Pendidik dan Tenaga Kependidikan	000
0054	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	000
0055	Peningkatan Fasilitas Pelayanan Umum dan Operasional	000
0056	Peningkatan Kapasitas Manajemen Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	000
0057	Peningkatan Layanan Manajemen	000
0058	Peningkatan/Pemanfaatan/Penerapan Produk Litbang	000
0059	Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan	000
0060	Peningkatan Sistem Perencanaan dan Manajemen	000
0061	Peningkatan Tatalaksana dan SDM	000
0062	Penyelenggaraan dan Pengkoordinasian Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri	000
0063	Penyelenggaraan Efisiensi Perencanaan Pendidikan	000
0064	Penyelenggaraan/Penataan/Peningkatan Sistem dan Prosedur Informasi Pengawasan	000
0065	Penyelenggaraan Pembinaan Teknis Administrasi	000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
0066	Penyelenggaraan Pembinaan Teknologi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan	000
0067	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara	000
0069	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	000
0070	Penyusunan Program dan Rencana Kerja Pembangunan	000
0071	Penyusunan Rencana dan Program Strategis	000
0072	Penyusunan Statistik dan Dokumentasi Masalah Kepegawaian	000
0073	Perencanaan/Penyusunan/Pengembangan Program dan Sistem Prosedur	000
0074	Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan Aparatur Negara	000
0076	Sistem Pengelolaan Administrasi Keuangan	000
0001	Pembayaran Gaji PNS dan Honorarium	000
0002	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran	000
0003	Perawatan Gedung Kantor/Khusus	000
0004	Perawatan Sarana dan Prasarana Kantor	000
0005	Penyelenggaraan Tata Usaha Perkantoran, Kearsipan, Perpustakaan dan Dokumentasi	000
0078	Pelaksanaan Penyelesaian Daerah Konflik/Pasca Konflik (Inpres 6/2003)	000
0077	Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur	000
0083	Pengangkatan CPNS/Pegawai Tidak Tetap	000
0085	Percepatan Pemulihan Pembangunan Prov. NAD (Inpres No. 36/2003)	000
0086	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kab. Alor Dan Kab. Nabire	000
0087	Penyelenggaraan Koordinasi Penanganan Masalah Papua dan Daerah Rawan Konflik Lainnya	000
0082	Pemberdayaan Lembaga	000
0088	Pembinaan/Penyelenggaraan Kerjasama Internasional	000
0089	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung	000
0091	Kajian Kepemerintahan Yang Baik	000
0092	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Kementerian/Lembaga	000
0093	Penyusunan/ Penyempurnaan/ Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan	000
0094	Pembinaan/Pembuatan/Pengembangan Sistem, Data, Statistik dan Informasi	000
0090	Penyelenggaraan Sosialisasi/Diseminasi/Seminar/Workshop/Publikasi	000
0095	Penyelenggaraan/Peningkatan Akuntansi Pemerintah dan Kekayaan Milik Negara	000
0096	Penyelenggaraan/Peningkatan Perwakilan Luar Negeri	000
0025	Penyusunan Standar Biaya	000
0097	Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 (Percepatan Pemberantasan Korupsi)	000
0098	Perencanaan/Pengembangan/Penerapan SIN	000
0099	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Bidang Pelayanan Publik	000
0100	Rehabilitasi/Peningkatan/Renovasi Gedung/Laboratorium/Perpustakaan	000
0101	Pengembangan/Penyelegaraan/Fasilitasi Standarisasi Kompetensi dan Sertifikasi	000
0102	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	000
0104	Kerjasama Antar Instansi Pemerintah/Swasta/Lembaga	000
0105	Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender	000
0106	Penyusunan/Pengembangan Kurikulum/Bahan Ajar dan Model Pembelajaran	000
0107	Pengadaan/Pengiriman Buku-Buku dan Bahan Cetak	000
0109	Survey / Studi Kelayakan / Penyusunan Master Plan / D E D / S I D	000
0108	Pengadaan Peralatan Laboratorium	000
0110	Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan	000
0079	Pembangunan Gedung	000
0080	Pengadaan Tanah	000
0081	Pengadaan Kendaraan	000
0111	Perawatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	000
		022
0301	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan MPR	001
0316	Pelaksanaan Tugas-Tugas Legislatif	002



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
0601	Fasilitasi Peningkatan Peran Parpol Terhadap Publik	010
0602	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Ketersediaan Mekanisme/Saluran Komunikasi dengan Pemerintah Daerah, DPR	010
0603	Pemberdayaan Orsos/LSM dan Organisasi Profesi	010
0604	Pembinaan Politik Dalam Negeri	010
4701	Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat (Penyiapan Modul dan Memulai Voter Education and Information)	034
4702	Perbaikan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	034
4703	Peningkatan Kapasitas dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan	034
6701	Pengembangan Informasi Publik dan Kerjasama dengan Lembaga Informasi, Masyarakat dan Media	076
6702	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Ketersediaan Mekanisme/Saluran Partisipasi Politik	076
6703	Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat	076
6704	Perbaikan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	076
6705	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan/Organisasi/Sekretariat	076
6706	Penguatan Kelembagaan Demokrasi Non Pemerintah di Bidang Pemilu	076
6707	Penguatan Organisasi Penyelenggara Pemilu dan Pilkada	076
6708	Pendokumentasian Pemilu dan Pilkada	076
6709	PAW Anggota DPR, DPD dan DPRD serta KPU	076
7851	Pelaksanaan Tugas-Tugas Legislatif	095
1051	Penyelenggaraan Keprotokolan dan Kekonsuleran	011
1052	Penyelenggaraan Hubungan Diplomatik di Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional	011
1053	Penyelenggaraan Komunikasi antar Badan - Badan Pemerintah dengan Perwakilan RI di Luar Negeri	011
1054	Pemberian Respon Yang Lebih Tegas, Visioner dan Berkualitas dalam Isu - Isu Internasional Strategis	011
1055	Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri pada Perwakilan RI di Luar Negeri	011
0605	Peningkatan Kualitas Isi dan Keterbukaan Komunikasi Publik dan Politik Pejabat Pemerintah Pusat dan Daerah	010
0606	Fasilitasi Terhadap Parpol, Eksekutif, Kepala Daerah dan Pemda, dan Masyarakat Sipil	010
6710	Peningkatan Kualitas Isi dan Keterbukaan Komunikasi Publik dan Politik Pejabat Pemerintah Pusat & Daerah	076
6711	Perbaikan Proses Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Publik	076
6712	Fasilitasi Terhadap Parpol, Eksekutif, Kepala Daerah, Pemda, & Masyarakat Sipil bagi Sosialisasi Per-Undang Undang	076
6713	Pemutakhiran dan Daftar Pemilih Pemilu dan Pilkada	076
6714	Verifikasi Calon Peserta Pemilu	076
6715	Pengembangan Peraturan Juklak/Juknis tentang Pemilu/Pilkada	076
6716	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pilkada	076
1056	Peningkatan Peran Kontribusi Indonesia dalam Penciptaan Perdamaian Dunia dan Pemajuan HAM	011
1057	Pelaksanaan Diplomasi Kemanusiaan bagi Kelangsungan Pembangunan Daerah Rawan Bencana dan Konflik	011 007
1058	Penyelenggaraan Hubungan Diplomasi Bidang Ekonomi dan Kerjasama Teknik Luar Negeri	011
1059	Penyelenggaraan Hubungan Diplomasi Bidang Sosial, Budaya dan Penerangan Luar Negeri	011
1060	Penyelenggaraan Kerjasama ASEAN	011
1061	Kerjasama Bilateral / Multilateral dalam Pencegahan Kejahatan	011 083
0607	Peningkatan Kapasitas Komunikasi Publik dan Politik	010
0608	Fasilitasi Pelaksanaan Budaya Politik Demokratis, Anti KKN, dan HAM	010
0609	Identifikasi Penguatan Eks Swapraja	010
0610	Fasilitasi Peningkatan Reintegrasi GAM ke dalam Masyarakat	010
0611	Penyusunan dan Harmonisasi Peraturan Per UU di Daerah Khusus	010
1251	Penyiapan, Penyelenggaraan dan Pembinaan Standar Pelayanan Bidang HAM	013



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
1252	Penyelenggaraan, Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Pembangunan di Bidang Aparatur, Hak-Hak Sipil, Eks Tapol	013
4704	Penguatan Desk Aceh, Desk Papua, Desk Poso dan Crisis Centre	034
4705	Penyusunan Grand Strategy Penanganan Konflik	034
4706	Penyusunan Sistem Kewaspadaan Dini Sosial	034
4707	Koordinasi Persoalan-Persoalan Konflik	034
4708	Pelaksanaan Kajian Tentang Ancaman dan Potensi Konflik	034
5401	Operasi Intelijen Penanggulangan Separatisme	050
0612	Fasilitasi Penyusunan Perda Yang Mendorong Berkembangnya Masyarakat Sipil Lokal	010
0613	Fasilitasi Proses Perencanaan /Pengambilan Keputusan/ Pengawasan terhadap Kebijakan Lembaga Negara/Pemda	010
0614	Penelitian dan Pengkajian Negara dan Kemasyarakatan dalam Penyelesaian dan Pencegahan Konflik	010 011
5351	Forum Komunikasi PAN Tingkat Daerah (Forkompanda)	048
5352	Penerapan Modul Budaya Kerja Aparatur	048
7251	Pembangunan Demokratisasi Sistem Administrasi Negara	086
7252	Pengaturan dan Penegakan Hukum Sistem Administrasi Negara	086 087
7351	Penyelenggaraan Pertimbangan Kepegawaian	088
7352	Audit Kepegawaian	088
0084	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Aparatur Negara (Internal)	000
4201	Pengawasan/Supervisi Konstruksi	033
4852	Penataan Sistem dan Prosedur Pengawasan	040
4854	Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata	040
4855	Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pusat	040
5601	Peningkatan Intensitas dan Kualitas Pelaksanaan Pengawasan dan Audit Internal, Eksternal, dan Pengawasan	055
7401	Penelitian Pengkajian Bidang Pengawasan	089
7402	Pengembangan Tenaga Pemeriksa Profesional	089
7403	Pendayagunaan Pelaksanaan Pengawasan	089
7406	Penyelenggaraan Fasilitasi Pendayagunaan Pelaksanaan Pengawasan	089 004 007 010 011
4202	Pembinaan, Perencanaan, Harmonisasi, Kerjasama dan Publikasi Peraturan Per-UU-an	033
4203	Perbaikan Sistem Manajemen dan Penganggaran Lembaga	033
4204	Pengelolaan Kearsipan dan Kepustakaan	033
4205	Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Kelembagaan	033
4206	Peningkatan Kualitas Penceranaan Umum Secara Terpadu dan Komprehensif	033
4207	Penyusunan Program dan Rencana Kerja Pembangunan	033
4208	Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Kelembagaan Bidang PU dan Lintas Sektor	033
4856	Pengembangan Perencanaan dan Hukum Pusat	040
4860	Pendukungn Kegiatan Kebudayaan dan Pariwisata Pusat	040 044
5353	Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	048
5354	Evaluasi Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Departemen/LPND	048
5355	Korporatisasi Unit Pelaksana Pelayanan Publik	048
5356	Pengelolaan Tata Naskah	048
5602	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas Perencanaan Pembangunan	055



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
5603	Penciptaan Sistem Administrasi Pendukung dan Database Perencanaan Yang Efektif Dan Efisien	055
5751	Penyelamatan / Pelestarian Dokumen/Arsip Negara	059
5752	Peningkatan Kualitas Manajemen Institusi dan Tatalaksana	059
6251	Peningkatan Kerjasama antar Lembaga Dalam dan Luar Negeri	067
6252	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	067
6253	Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Kelembagaan	067
6254	Penyusunan Program dan Rencana Kerja Pembangunan	067
6255	Perencanaan Program, Rencana Kerja dan Anggaran	067
6304	Peningkatan Kerjasama antar Lembaga Dalam dan Luar Negeri	067
6305	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	067
		083
7255	Reformasi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah	086
7301	Penyusunan Pedoman Teknis Standar Penyelamatan, Penataan, Pengelolaan dan Pelestarian Arsip Negara	087
7302	Pengelolaan Kearsipan dan Kepustakaan	087
7303	Pengkajian Tentang Pengelolaan Kearsipan di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah	087
7353	Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Nasional	088
7354	Penyelenggaraan Sidang/Konferensi Internasional di Dalam/Luar Negeri	088
		090
		091
		004
		005
		007
1062	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kediplomatan dan Diklat Khusus Deplu	011
		013
		015
2003	Penyelenggaraan Pendidikan & Pelatihan SDM Dunia Usaha	019
2004	Penyelenggaraan Diklat Perindustrian	019
		020
		022
2801	Penempatan Dokter Spesialis dan Regulasi Kepegawaian	024
2802	Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	024
		026
7201		027
		032
4209	Penataan SDM Aparatur Sesuai Kebutuhan dan Kompetensi dan Perbaikan Distribusi PNS	033
4210	Pengadaan Fasilitas Diklat	033
4211	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan	033
4212	Penyelenggaraan Administrasi dan Pembinaan Teknis Penelitian PU	033
4213	Penyelenggaraan Pengkajian Strategi Pembangunan	033
4214	Penyelenggaraan Pengembangan dan Pengendalian Konstruksi	033
4215	Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan Bidang Peralatan dan Perbengkelan	033
		042
		044
5357	Bimbingan Teknis Penilaian Prestasi Kerja PNS	048
5358	Penyusunan Naskah Akademik Sistem Penilaian Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan	048
5604	Penyempurnaan Sistem Manajemen Pengelolaan SDM Aparatur sesuai Sistem Karir dan Renumerasi	055



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
		056
5701	Koordinasi, Bimbingan Teknis dan Evaluasi Jabatan Fungsional Pustakawan	057
		059
6101	Penyelenggaraan Pendidikan Kader Pimpinan Nasional	064
6351	Pelaksanaan Survei : SDKI dan SKRR	068
6352	Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Program KB Nasional	068
		075
		076
6901	Pengembangan SDM dan Administrasi Kepegawaian	080
6902	Penyelenggaraan dan Pengkoordinasian Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri	080
		081
		082
		083
		085
7256	Penyelenggaraan dan Pengkoordinasian Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri	086
7257	Pengembangan Sistem Pendayagunaan SDM Aparatur Negara	086
7258	Pembinaan Diklat Aparatur Berbasis Kompetensi	086
	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM Aparatur Pemerintah Pusat dan Daerah di Bidang Kearsipan	087
7304		087
7355	Pengembangan Sistem Diklat Manajemen PNS	088
7356	Penelitian dan Pengkajian Bidang Kepegawaian	088
7357	Jurnal Penelitian Manajemen PNS	088
7358	Pengembangan Karier dan Assessment Center PNS	088
7359	Pemetaan Jabatan PNS	088
7360	Penyusunan Formasi NS	088
7361	Pembinaan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian	088
7362	Pembinaan Jabatan	088
7363	Pembinaan dan Pengembangan Tata Naskah Kepegawaian	088
7404	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pengawasan	089
		090
7497	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sektor Perdagangan	090
		091
		010
1063	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kekonsuleran dan Informasi Politik Luar Negeri	011
1064	Pengembangan Sistem Informasi dan Kerjasama Internasional	011
		020
2104	Pembinaan/Penyusunan/Penyelenggaraan Kearsipan, Dokumentasi, dan Perpustakaan Bidang Geologi	020
2135	Penyusunan Sistem Informasi Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi	020
3301	Implementasi Kebijakan di Bidang Keagamaan	025
3302	Penyelenggaraan Keprotokolan dan Kekonsuleran Keagamaan	025
3303	Pemberdayaan Wakaf Produktif Masyarakat	025
3304	Pengelolaan Zakat Masyarakat	025
4216	Penilaian Kompetisi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	033
4217	Penyediaan Informasi dan Luasnya Capaian Informasi Publik	033
4218	Penyusunan Laporan Kinerja Pusat	033
4219	Perumusan Kebijakan Strategis, Pengaturan dan Model Investasi, Diseminasi dan Sosialisasi Kebijakan	033
4220	Perumusan Percepatan Pembangunan PS PU pada Daerah Otonomi Baru dan Kawasan Khusus Pusat	033
4221	Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi Literasi dan Spasial PU	033
4222	Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan Bidang Jasa Konstruksi	033
4951	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan BUMN kepada Masyarakat	041
4952	Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur dan BUMN	041



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
5151	Analisa Kinerja KUKM	044
5359	Implementasi Pedoman Deregulasi dan Debirokratisasi di Bidang Pelayanan Publik	048
5360	Penilaian Kompetisi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	048
5361	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan	048
5362	Penyusunan Pedoman Penerapan Metode ISO 9000-DI	048
6151	Revitalisasi Kinerja Kelembagaan Promosi Investasi di Luar Negeri	065
6152	Pengembangan Sistem Data dan Informasi Pelayanan Investasi secara On-Line	065
6153	Pengembangan Aplikasi Otomasi Persetujuan (APIT, RPTKA, TAO1, TAO2)	065
6154	Penyederhanaan Prosedur dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal baik di Tingkat Pusat dan Daerah	065
6155	Bimbingan dan Pembinaan Kepada Aparatur IPMP/IPMK di Bidang Pelayanan Penanaman Modal	065
6156	Fasilitasi Peningkatan Kinerja Kelembagaan Pengelolaan Perijinan bagi Kegiatan Usaha dan Investasi	065
7101	Pelayanan Jasa dan Informasi Survey dan Pemetaan	083
7259	Sistem dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	086
7305	Diseminasi Pengelolaan Kearsipan di Berbagai Instansi Pemerintah baik di Pusat dan Daerah	087
7306	Penerapan Sistem Kearsipan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	087
7364	Penetapan Kartu Kepegawaian	088
7365	Penetapan Nota Persetujuan Kepegawaian	088
7366	Penetapan Nota Pertimbangan Teknis Kepegawaian	088
7367	Penetapan SK Kepegawaian	088
7368	Pengelolaan Tata Naskah Pensiun PNS	088
		091
		020
4223	Penyelenggaraan Produksi Audio Visual	033
5753	Pembangunan dan Penguatan Media Center di Daerah Konflik dan Pasca Konflik	059
5754	Peningkatan Pelancaran Akses Informasi	059
5755	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyiaran Publik	059
5756	Fasilitasi Pengembangan Media Komunitas	059
5757	Peningkatan Kualitas Muatan Layanan Informasi	059
5758	Penyediaan Fasilitas/Wadah Penyampaian Aspirasi Masyarakat	059
5759	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Informasi Publik	059
5760	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Informasi Publik	059
5761	Penguatan dan Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	059
5762	Fasilitasi Sarana Penyampaian Aspirasi dan Peran Serta Masyarakat	059
		090
		004
		007
		008
		010
		011
1352	Survey dan Pemetaan	015
2005	Uji Coba Peralatan	019
2006	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lainnya	019
		022
		026
		027
		032
4224	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan	033



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
4225	Prasarana Fisik Departemen PU	033
		034
4953	Pengadaan/Pembelian Gedung Kantor	041
		042
		043
		044
		048
		054
5605	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan	055
		056
5702	Penyediaan Fasilitas, Koleksi dan Layanan Perpustakaan	057
5703	Bantuan Fasilitas Perpustakaan Keliling kepada Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota	057
5763	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan	059
6256	Peningkatan Dukungan Sarana dan Prasarana Fisik berupa Gedung Kantor, Sarana Transportasi untuk Menunjang	067
		068
		076
		077
		079
6905	Perawatan Prasarana dan Jaringan	080
		081
		083
		086
		087
		088
7405	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengawasan	089
		090
		093
0502	Pelaksanaan Pengamanan Fisik Jarak Dekat kepada Presiden, Wakil Presiden	007
0503	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produk Data Intelejen	007
0504	Peningkatan Kualitas Koordinasi Pengamanan Presiden, Wakil Presiden	007
0615	Pengolahan Data dan Pemetaan	010
0616	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Negara yang berasal dari APBN dan APBD	010
1353	Pengadaan Makanan Pegawai Kepabeanan	015
2007	Pengadaan Makanan bagi Pegawai	019
2301	Peningkatan Kesehatan Jasmani dan Rekreasi	023
2449	Peningkatan Kualitas Jasmani	023
4001	Pengendalian Pembangunan Kehutanan	029
4002	Pembinaan Standarisasi dan Lingkungan	029
4226	Pengolahan Data dan Pemetaan	033
4227	Penyelenggaraan Swadana Pusat Pengelolaan Data	033
4228	Penyelenggaraan Kegiatan dan Usaha Pendidikan Tinggi	033
4229	Penyelenggaraan Kedinasan Bidang Jasa Konstruksi	033
4230	Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan Bidang Peralatan dan Perbengkelan	033
4231	Penyelenggaraan Administrasi dan Pembinaan Teknis Penelitian	033
4232	Penyelenggaraan Pengkajian Strategi Pembangunan	033
4233	Penyelenggaraan Pengembangan dan Pengendalian Konstruksi	033
4234	Penyelenggaraan Pengembangan dan Pembinaan Jasa Konstruksi	033
4709	Pembiayaan Panitia Gerakan Disiplin Nasional	034
5606	Penyelenggaraan Konsultasi Rencana dan Program Kerja Kementerian dan Lembaga	055



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
5651	Pembinaan Administrasi Pertanahan	056
5652	Pembinaan Tata Pertanahan	056
5653	Pembinaan Administrasi Pertanahan	056
5764	Pengembangan Sistem, Prosedur dan Standarisasi dan Fungsi Manajemen	059
5765	Peningkatan Budaya Organisasi Aparatur	059
6257	Keperluan Sehari-Hari Perkantoran	067
6258	Operasional Menteri/Ketua Lembaga	067
6259	Pembinaan Tertib Administrasi, Tertib Hukum, dan Tertib Anggaran	067
6260	Pendidikan dan Pelatihan Struktural	067
6261	Pengadaan Makanan bagi Pegawai	067
6262	Pengadaan Obat-Obatan, Perlengkapan Kedokteran dan Administrasi Balai Kesehatan	067
6263	Penyelenggaraan Administrasi Umum	067
6264	Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan	067
6265	Dukungan Kerjasama Kelembagaan	067
6266	Penyediaan Gaji Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal	067
6267	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Rencana dan Program Kerja Kementerian	067
6268	Pembinaan Administrasi Kepegawaian dan Pensiun	067
6269	Pembinaan Kepegawaian	067
6270	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	067
6271	Pemeliharaan Kendaraan Operasional	067
6272	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	067
6273	Pengembangan Sistem Aplikasi Keuangan	067
6274	Penyelenggaraan Kegiatan Penunjang Lainnya	067
6275	Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan	067
6276	Rapat Koordinasi	067
6306	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Rencana dan Program Kerja Kementerian	067
6651	Penyelenggaraan Pendidikan BMG	075
1355	Melanjutkan Modernisasi Perpajakan melalui Penerapan Fitur-Fitur LTO	015
1356	Extensifikasi dan Intensifikasi Wajib Pajak	015
1357	Reformasi Administrasi Sengketa Pajak (Tax Court Reform)	015
1358	Reformasi Kebijakan Administrasi PNB	015
1359	Peningkatan Pelaksanaan Verifikasi dan Audit	015
1360	Peningkatan Sistem Pengawasan Kepabeanan dan Cukai	015
1361	Penyelenggaraan Informasi Pungutan Pajak	015
1362	Pencetakan Kertas Berharga	015
1363	Peningkatan Pelayanan Piutang dan Lelang Negara	015
1364	Pengkajian Tarif, Obyek dan Subyek Atas Bea Masuk, Cukai, Pajak Dan PNB	015
1365	Pembiayaan Lain-Lain	015
1366	Penyelenggaraan Pemeriksaan, Penyuluhan, Penetapan, Penagihan Pajak dan Pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan	015
1367	Peningkatan Kinerja Kepabeanan dan Cukai	015
1368	Survey, Pemetaan, Master Plan, Studi Kelayakan dan Penatagunaan Tanah (PBB)	015
1369	Peningkatan Pengelolaan Kas Negara	015
1370	Peningkatan Perencanaan Kebijakan APBN	015
1371	Penyelenggaraan dan Peningkatan Sistem Informasi Keuangan Daerah	015
1372	Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Belanja Negara	015
1373	Peningkatan Pengelolaan Hubungan Keuangan Pusat Daerah	015
1374	Pengkajian Pajak dan Retribusi Daerah Peningkatan PAD	015
1375	Penyelenggaraan Evaluasi Perda dan Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah	015



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
1376	Peningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara	015 090
1377	Penyusunan Strategi Pengembangan Modal Ventura	015
1378	Peningkatan dan Pengembangan E-Registration Pasar Modal	015
1379	Peningkatkan Kerjasama Bilateral / Multilateral antar Otoritas Pasar Modal	015
1380	Peningkatkan Kerjasama Penegakan Hukum dengan Regulator Pasar Modal Negara Lain	015
1381	Peningkatan Kerjasama Pengkajian Pengembangan Produk Pasar Modal Berbasis Syariah	015
1382	Penyelenggaraan Riset Sektor Jasa Keuangan	015
1383	Pembentukan Database Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan Instansi Lain	015
1384	Peningkatan Sistem dan Infrastruktur Teknologi Informasi antara Bapepam dan Self Regulatory	015
1385	Penyusunan Ketentuan di Bidang Lembaga Pembiayaan	015
1386	Monitoring Profil Risiko Kerugian	015
1387	Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Direksi dan Komisaris	015
1388	Penelitian Standar Pelayanan	015
1389	Penyelenggaraan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) Akuntan Publik	015
1390	Penyusunan dan Evaluasi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro	015
1391	Koordinasi Kegiatan Liberalisasi di Bidang Jasa	015
1392	Pengkajian di Bidang Pembiayaan Dalam dan Luar Negeri	015
1393	Pengkajian/Analisis tentang Posisi Indonesia pada Lembaga-Lembaga Internasional	015
1394	Pengkajian/Analisis tentang Isu-isu Ekonomi dan Keuangan dalam Kerangka Kerjasama Internasional	015
1395	Penyusunan dan Pengembangan Model Pemantauan Sektor Keuangan	015
1396	Persiapan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan	015
1397	Peningkatan Peran Pasar Modal	015
1398	Pemantapan Koordinasi Penegakan Hukum di Bidang Pasar Modal	015
1399	Pelaksanaan Know Your Customer (KYC) di Pasar Modal	015
1400	Penyusunan Rencana Aksi Individu Sektor Jasa Indonesia dalam Kerangka APEC	015
4751	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Kerjasama Ekonomi Internasional	035
4752	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Ekonomi	035
4753	Penyelenggaraan Pengkajian Strategi Pembangunan	035
4754	Penyelenggaraan Penunjang Koordinasi Kebijakan di Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional	035
6801	Pengembangan Sistem Analisis dan Kajian Terhadap Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang	078
6802	Sosialisasi dan Penyamaan Pemahaman kepada Aparat Penegak Hukum, PJK dan Masyarakat tentang Tindak Pidana	078
6803	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PPATK	078
6804	Pelaksanaan Kerjasama Nasional dan Internasional di Bidang Pencucian Uang	078
6805	Pengawasan Pelaksanaan Kepatuhan PJK dalam Pelaporan TPPU	078
6806	Pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komputerisasi Pengolahan Data	078
6807	Penyempurnaan Peraturan Perundangan, Penelaahan dan Pemberian Nasehat Hukum di Bidang Tindak Pidana Pencucian Uang	078
1401	Penyempurnaan Model	015
1402	Penyempurnaan Petunjuk Teknis RKA-KL dan RKA Bagian Anggaran Lain-Lain	015
5551	Pembinaan Statistik dan Sensus	054



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
5552	Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Statistik	054
0617	Penyempurnaan Berbagai Kebijakan Kependudukan Bidang Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan	010
0618	Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Bidang Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan	010
0619	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan melalui Penyerasian Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	010
0620	Peningkatan Kapasitas Daerah dan Penyusunan Proyeksi Penduduk	010
0621	Penyusunan Konsep Pedoman Perencanaan Kependudukan	010
0622	Penyusunan Rancangan Pedoman Analisis Kependudukan	010
0623	Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi NIK dengan Sistem Informasi	010
0624	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Sistem Informasi Administrasi	010
0625	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	010
0626	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	010
0627	Pelayanan Admuduk bagi Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana	010
0628	Pembinaan Admuduk TKI ke Luar Negeri	010
4235	Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Air Minum dan Air Limbah	033
4236	Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Persampahan dan Drainase	033
0629	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan/Orsos/Masyarakat	010
1065	Penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian Kebijaksanaan Hubungan Luar Negeri	011
1253	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Pembinaan Aparatur, Sarana dan Prasarana Hukum	013
2117	Pelaksanaan Riset Tematis	020
4101	Penyelenggaraan Riset, Eksplorasi & Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan	032
4237	Kebijakan Pembangunan Iptek	033
4238	Penelitian Penguasaan Teknologi	033
4239	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Iptek	033
4240	Penyelenggaraan Kegiatan Yang Dibiayai PNBPN Bidang SDA, Jalan Jembatan, Perumahan Permukiman dan Sebrannya	033
5001	Kebijakan Pembangunan Iptek	042
5002	Pelaksanaan Penelitian Dasar	042
5003	Pelaksanaan Sistem Insentif	042
6102	Penyelenggaraan Kajian Kebijakan Ketahanan Nasional	064
6851	Pelaksanaan Penelitian Dasar	079
6852	Pelaksanaan Riset Tematis	079
6853	Pelaksanaan Riset Unggulan dan Kompetitif	079
6909	Pengembangan Teknologi Bahan Nuklir	080
6910	Pengembangan Teknologi Perekayasa Perangkat Nuklir	080
6911	Pengembangan Teknologi Proses Radioisotop dan Radiofarmaka	080
6912	Pengembangan Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi	080
6913	Pengembangan Teknologi Reaktor dan Energi Nuklir	080
6914	Pengembangan Teknologi Pengelolaan Limbah Radioaktif	080
6951	Penelitian Penguasaan Teknologi	081
6952	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Farmasi dan Medika	081
6953	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bioindustri	081
6954	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Budidaya Pertanian	081
6955	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Agroindustri	081



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
6956	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Lahan dan Kawasan	081
6957	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Konversi dan Konservasi Energi	081
6958	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Material	081
6959	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pengembangan Sumberdaya Energi	081
6960	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dan Elektronika	081
6961	Pengembangan Teknologi Survei Laut	081
6962	Pengkajian Bioteknologi	081
6963	Rekayasa Desain dan Sistem Teknologi	081
6964	Pengembangan Seni dan Teknologi Keramik dan Porselin Bali	081
6965	Pengkajian Teknologi Polimer	081
6966	Pengembangan Teknologi Pati	081
6967	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Lingkungan	081
6968	Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	081
6969	Pengembangan Teknologi Energi	081
6970	Modifikasi Cuaca (Hujan Buatan)	081
6971	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Inventarisasi Sumberdaya Alam	081
6972	Pengembangan Obat Herbal Untuk Pengobatan Kanker	081
6973	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pengembangan Sumberdaya Mineral	081
6974	Pengkajian Kebijakan Inovasi Teknologi	081
6975	Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi	081
6976	Pengkajian Kebijakan Daya Saing	081
6977	Audit Teknologi	081
6978	Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi utk Transportasi	081
7051	Pelaksanaan Riset Tematis	082
7052	Penelitian Penguasaan Teknologi	082
7053	Penelitian Peralatan Iptek	082
7054	Penelitian dan Pengembangan Iptek Roket	082
7065	Penelitian, Pengembangan dan Rancang Bangun Sistem Satelit Mikro dan Stasiun Bumi	082
7066	Penelitian dan Pengembangan Sains Antariksa, Atmosfer, Iklim, Ionosfer dan Geomagnet	082
7067	Penelitian dan Pengembangan Sistem Teknologi Penginderaan Jauh dan Stasiun Bumi	082
7068	Peningkatan Kemampuan Kapasitas Litbang Sistem Konversi Energi Angin	082
		083
		085
		087
		090
7498	Penyelenggaraan Manajemen Litbang Perdagangan	090
7499	Penyelenggaraan Litbang Perdagangan Dalam Negeri	090
7500	Penyelenggaraan Litbang Perdagangan Luar Negeri	090
7460	Penyelenggaraan Litbang Iklim Usaha Perdagangan	090
5004	Difusi Informasi dan Promosi Iptek	042
5005	Koordinasi, Sosialisasi dan Kemitraan Iptek	042
5006	Layanan Pemanfaatan Iptek Bagi Masyarakat	042
5007	Penerapan Teknologi di Masyarakat	042
5008	Peningkatan Pemanfaatan Iptek	042
6854	Difusi Informasi dan Promosi Iptek	079
6855	Pengembangan Teknologi Tepat Guna	079
6856	Peningkatan Apresiasi Masyarakat terhadap Standarisasi	079
6857	Peningkatan Pemanfaatan Iptek	079
6915	Difusi Informasi dan Promosi Iptek	080
6916	Layanan Pemanfaatan Iptek bagi Masyarakat	080



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
6917	Diseminasi Hasil Litbang Iptek Nuklir	080
6979	Layanan Pemanfaatan Iptek bagi Masyarakat	081
6980	Pengembangan Diversifikasi Produk dan Sumber Pangan Berbasis Jagung	081
6981	Diseminasi Hasil Litbang	081
6982	Pengembangan Biopestisida	081
6983	Pengembangan Biopark	081
7055	Layanan Pemanfaatan Iptek bagi Masyarakat	082
7056	Pengembangan Sumberdaya Informasi dan Promosi Iptek Kedirgantaraan	082
7057	Pelayanan Data dan Informasi Penginderaan Jauh	082
7058	Pembinaan Teknologi, Pemanfaatan dan Penelitian Kedirgantaraan	082
7070	Penguatan Pemanfaatan Sistem Konversi Energi Angin	082
7102	Penyediaan Atlas Sumberdaya Atlas Publik dan Pengembangan Basis Data Atlas	083
		084
7156	Pengujian Penilaian Kesesuaian	084
7201	Difusi Informasi dan Promosi Iptek	085
3501	Penyediaan Informasi Pengembangan Kewilayahan Transmigrasi	026
5009	Pemantapan Indikator dan Statistik Iptek	042
5010	Penguatan Organisasi Profesi Ilmiah	042
5011	Peningkatan Jaringan Kelembagaan Iptek	042
		079
6918	Penguatan Pengawasan Standarisasi	080
6919	Peningkatan Jaringan Kelembagaan Iptek	080
6920	Pendayagunaan dan Pemanfaatan Reaktor Nuklir	080
6921	Operasional dan Revitalisasi Instalasi dan Fasilitas Nuklir	080
6922	Penguasaan Teknologi Keselamatan Nuklir dan Radiasi	080
6923	Penguasaan Energi Alternatif di Bidang Nuklir	080
		081
7059	Penguatan Riset Unggulan dan Tatalaksana Kedirgantaraan	082
7069	Penyusunan, Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kedirgantaraan Nasional	082
		083
7202	Pengembangan Regulasi Pemanfaatan Nuklir	085
7203	Penguatan Pengawasan Pemanfaatan Nuklir	085
0630	Fasilitasi Penyelesaian Batas Administrasi Antar Daerah/Negara	010
0631	Fasilitasi Sotk Pemerintah Daerah Otonom Baru	010
0632	Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Baru	010
0633	Fasilitasi Penyelesaian Status Aset Daerah Baru dan Daerah Induk	010
0634	Fasilitasi Penataan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan pada Daerah Otonom Baru	010
0635	Fasilitasi Urusan Tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat & Daerah	010
0636	Supervisi / Pengawasan / Evaluasi dan Pembatalan Perda yang Bermasalah	010
0637	Penyusunan Kebijakan/Implementasi Grand Strategy Penataan Otonomi Daerah	010
0638	Fasilitasi Pemantapan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah	010
0639	Fasilitasi Perkuatan Kerjasama Perbatasan Antar Daerah / Antar Negara	010
0640	Fasilitasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah di Wilayah Jabodetabekjur	010
0641	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintahan Daerah dan dengan DPRD / Mitra Kerja	010
	Fasilitasi Peningkatan Peran Gubernur Selaku Wakil Pemerintah dalam Rangka Kerja Sama	
0642	Pembinaan Wilayah	010
0643	Pembinaan Penyusunan Kelembagaan Pemerintah Daerah	010
0644	Penyusunan Kinerja Kelembagaan Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Organisasi Modern	010
0645	Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi (SCBD)	010



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
0646	Pengembangan Manajemen Bidang Pertanahan (LMPDP)	010
0647	Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (LGR)	010
0648	Fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Tatalaksana Pemerintahan Daerah	010
0649	Fasilitasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal	010
0650	Fasilitasi Pemanjapan Aparatur Pejabat Negara dan DPRD	010
0651	Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah	010
0652	Penataan Kelembagaan Di Daerah Otsus dan Istimewa	010
0653	Peningkatan Kinerja Perangkat Organisasi Daerah	010
0654	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	010
0655	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	010
0656	Fasilitasi Penataan Regulasi Keuangan Daerah	010
0657	Fasilitasi Pengembangan Diversifikasi Ekonomi Perdesaan	010
0658	Koordinasi Pengembangan Usaha Ekonomi Lokal	010
0659	Pembinaan Lembaga Keuangan Perdesaan	010
0660	Pembinaan Pengembangan Prasarana dan Sarana Berbasis Masyarakat (Community Based Development)	010
0661	Penyelenggaraan Diseminasi Teknologi Tepat Guna Bagi Kawasan Perdesaan	010
0662	Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Daerah	010
4241	Pengembangan Prasarana dan Sarana Kawasan Agropolitan	033
6277	Fasilitasi Pengembangan Diversifikasi Ekonomi Perdesaan	067
6278	Koordinasi Pengembangan Usaha Ekonomi Lokal	067
6279	Pengembangan Prasarana dan Sarana Kawasan Agropolitan	067
6280	Pembinaan Pengembangan Prasarana dan Sarana Berbasis Masyarakat (Community Based Development)	067
6307	Fasilitasi Pengembangan Diversifikasi Ekonomi Perdesaan	067
6308	Koordinasi Pengembangan Usaha Ekonomi Lokal	067
6309	Pengembangan Prasarana dan Sarana Kawasan Agropolitan	067
6310	Pembinaan Pengembangan Prasarana dan Sarana	067
0663	Penyusunan Rencana Pengelolaan /Rekrutimen/Mutasi /Manajemen Aparatur Pemda	010
0664	Peningkatan Kapasitas Pemda dalam Penguatan Regulasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemda	010
0665	Peningkatan Bantuan Teknik Kepada Ormas untuk Penyelesaian Konflik	010
0666	Penguatan Dialog/Forum Kemasyarakatan Generasi Muda Daerah Konflik	010
6281	Dukungan Bagi Penguatan Dialog/Forum Kemasyarakatan Yang Sudah Ada dengan Melibatkan Generasi Muda Untuk R	067
6311	Dukungan Bagi Penguatan Dialog/Forum Kemasyarakatan Yang Sudah Ada Dengan Melibatkan Generasi Muda Untuk R	067
0552	Pengembangan Sistem Manajemen Penanggulangan Bencana Nasional	008
0553	Penanggulangan Pasca Bencana Alam dan Kerusakan Sosial	008
0554	Monitoring Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	008
5363	Koordinasi dan Sinkronisasi Program PAN	048
7701	Penataan Ruang, Penyusunan Rencana Strategis, Program dan Anggaran NAD - Nias	094
7702	Pemulihan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat NAD - Nias	094
7703	Pemulihan Prasarana dan Sarana Hukum dan HAM NAD - Nias	094
7704	Pemulihan Keamanan dan Pengembangan Pertahanan NAD - Nias	094
7705	Rehab & Pemb.Perumahan/Prasarana Lingk.Permukiman, Air Bersih,Sanitasi, Drainase & Persampahan NAD-Nias	094
7706	Rehab & Pemb.Srn dan Prsrn Energi, SDA, Irigasi, Rawa dan Pengendalian Banjir NAD- Nias	094
7707	Rehab & Pemb.Srn dan Prsrn Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi NAD -Nias	094
7708	Rehab & Pemb.Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan NAD - Nias	094
7709	Pemilihan Sistem Administrasi dan Pengelolaan Pertanahan NAD - Nias	094



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
7710	Pemulihan dan Pengembangan Pertanian, Perikanan dan Kelautan NAD - Nias	094
7711	Pemulihan dan Pengembangan Perdagangan, Industri, Pariwisata, Investasi, UKM dan Koperasi NAD - Nias	094
7712	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja NAD - Nias	094
7713	Rehabilitasi Lingkungan Hidup dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam NAD - Nias	094
7714	Peningkatan Pemahaman dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebudayaan NAD - Nias	094
7715	Pemulihan Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan NAD-Nias	094
7716	Pengarusutamad Gender dan Anak dan Peningkatan Kesejahteraan KB NAD - Nias	094
7717	Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik dan Sensus Kependudukan NAD-Nias	094
7718	Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga NAD - Nias	094
7719	Pemulihan Kapasitas SDM dan Pelayanan Pendidikan NAD - Nias	094
7720	Pemulihan Prasarana & Sarana, Peningkatan Pelayanan Kesehatan NAD - Nias	094
7721	Koordinasi dan Konsultasi Rencana Kerja dan Program Kementerian/Lembaga	094
1151	Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Integratif	012
1152	Pengembangan Personil Integratif	012
1153	Pengembangan Materiil Integratif	012
1154	Pengembangan Fasilitas Integratif	012
1155	Penggiat Fungsi Integratif	012
1156	Latihan Integratif	012
1157	Operasi Integratif	012
		052
1158	Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Matra Darat	012
1159	Pengembangan Personil Matra Darat	012
1160	Pengembangan Materiil Matra Darat	012
1161	Pengembangan Fasilitas Matra Darat	012
1162	Penggiat Fungsi Matra Darat	012
1163	Latihan Matra Darat	012
1164	Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Matra Laut	012
1165	Pengembangan Personil Matra Laut	012
1166	Pengembangan Materiil Matra Laut	012
1167	Pengembangan Fasilitas Matra Laut	012
1168	Penggiat Fungsi Matra Laut	012
1169	Latihan Matra Laut	012
1170	Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Matra Udara	012
1171	Pengembangan Personil Matra Udara	012
1172	Pengembangan Materiil Matra Udara	012
1173	Pengembangan Fasilitas Matra Udara	012
1174	Penggiat Fungsi Matra Udara	012
1175	Latihan Matra Udara	012
1176	Pengembangan Personil Penegakan NKRI	012
1177	Pengembangan Materiil Penegakan NKRI	012
1178	Operasi Penegakan NKRI	012
1179	Pengembangan Fasilitas Penegakan NKRI	012
1180	Penggiat Fungsi Penegakan NKRI	012
1181	Pengembangan Sistem Bela Negara	012
1182	Pengembangan Personil Bela Negara	012
1183	Pengembangan Materiil Bela Negara	012
1184	Pengembangan Fasilitas Bela Negara	012
1185	Penggiat Fungsi Bela Negara	012
1186	Pengembangan Sistem Strategi Pertahanan	012
1187	Pengembangan Materiil Strategi Pertahanan	012
1188	Pengembangan Fasilitas Strategi Pertahanan	012



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
1189	Penggiat Fungsi Strategi Pertahanan	012
5501	Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Pertahanan Keamanan Nasional	052
1190	Pengembangan Sistem Industri Pertahanan	012
1191	Pengembangan Materiil Industri Pertahanan	012
1192	Pengembangan Fasilitas Industri Pertahanan	012
1193	Penggiat Fungsi Industri Pertahanan	012
1194	Penggiat Fungsi	012
1195	Pengembangan Sistem Kerjasam Militer Internasional	012
1196	Penggiat Fungsi Kerjasama Militer Internasional	012
1197	Latihan Kerjasama Militer Internasional	012
1198	Operasi Kerjasama Militer Internasional	012
1199	Pengembangan Sistem Litbang Pertahanan	012
1200	Pengembangan Materiil Litbang Pertahanan	012
1201	Penggiat Fungsi Litbang Pertahanan	012
6103	Penelitian dan Pengkajian Strategis	064
1202	Pengembangan Materiil	012
1203	Pengembangan Sistem Operasi Bhakti TNI	012
1204	Pengembangan Materiil Operasi Bhakti TNI	012
1205	Penggiat Fungsi Operasi Bhakti TNI	012
1206	Operasi Bhakti TNI	012
5851	Pemeliharaan Personil Polri	060
5852	Pengembangan Kekuatan Personil Polri	060
5853	Pengembangan Kemampuan Personil Polri	060
5854	Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Polri	060
5855	Penataan Kelembagaan Polri	060
5856	Pembangunan Materiil dan Fasilitas Polri	060
5857	Deteksi Kegiatan Masyarakat Mendukung Tugas Kegiatan Pemerintah	060
5858	Cipta Kondisi Keamanan	060
5859	Pengkajian Potensi Konflik	060
5860	Pengkajian Sistem Keamanan	060
5861	Pengawasan Orang Asing, Pengawasan Senjata Api dan Bahan Peledak, Perijinan dan Criminal Record	060
5402	Operasional Intelijen Penanggulangan Keamanan dan Ketertiban	050
5862	Pemberdayaan Komunitas Policing	060
5863	Pemberdayaan Pengamanan Swakarsa	060
0667	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan Penyiapan Pedoman bagi Aparat Pol PP, PPNS dan Satuan Linmas	010
0668	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Korban Bencana / Pasca Konflik	010
0669	Fasilitasi Pembinaan dan Pembimbingan, Satuan Perlindungan Masyarakat	010
0670	Fasilitasi dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Pasca Bencana	010
5864	Pengaturan dan Penertiban Kegiatan Masyarakat/Instansi	060
5865	Dukungan Umum	060
5866	Pelayanan Keamanan	060
5867	Pembimbingan, Pengayoman dan Perlindungan Masyarakat	060
5868	Penyelamatan Masyarakat dan Pemulihan Keamanan	060
5403	Pengadaan Peralatan Intelijen	050
5404	Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Intelijen	050
5406	Operasi Intelijen Penanggulangan Transnasional Crime dan Uang Palsu/ Kertas Berharga	050
5407	Operasi Intelijen	050
5408	Operasi Kontra Intelijen	050
5409	Operasi Intelijen Strategis	050



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
5405	Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Komunikasi Intelijen	050
5451	Pembinaan dan Fasilitasi Sistem Persandian	051
5452	Penelitian dan Pengembangan Persandian	051
6201	Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	066
6202	Penegakan Hukum Bidang Narkoba	066
6203	Terapi dan Rehabilitasi Korban Narkoba	066
6204	Penelitian dan Pengembangan Informatika	066
6205	Penguatan Kelembagaan Anti Narkoba	066
4003	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	029
4004	Penertiban Perdagangan Hasil Hutan Ilegal	029
4710	Operasi Keamanan / Penegakan Hukum / Penindakan Awal Separatisme	034
4711	Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum di dalam Wilayah Laut Indonesia	034
4712	Pelaksanaan Pengamanan VVIP serta Obyek Vital Nasional	034
4713	Penguatan Desk Tindak Kejahatan dan Terorisme	034
4714	Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Nasional	034
4715	Koordinasi Pencegahan Kegiatan Illegal Logging	034
4716	Pengawasan Lalu Lintas Uang dan Pemblokiran Aset Kelompok Teroris	034
5869	Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	060
5870	Koordinasi dan Pengawasan Teknis Penyidikan PPNS	060
5871	Kerjasama Bilateral/Multilateral dalam Pencegahan Kejahatan	060
5872	Kerjasama Bantuan Unsur-Unsur Keamanan dan Instansi	060
5873	Pemeliharaan Perdamaian Dunia / Peace Keeping Operation	060
2201	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Penyelamatan	022
0361	Kajian Hukum	005
0362	Pembinaan Sistem Administrasi Peradilan	005
0363	Perencanaan dan Pengendalian Organisasi, Administrasi dan Financial Peradilan	005
0401	Kajian Hukum	006
		013
6601	Pengkajian/penelitian Peraturan Perundangan dari Perspektif HAM, Permasalahan Ham dan Instrumen HAM	074
6751	Penelitian tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar' 45	077
6752	Kajian Hukum	077
0364	Pencetakan Himpunan Putusan Pengadilan	005
0365	Penyusunan Himpunan Perma	005
0366	Kodifikasi Putusan Pengadilan	005
0671	Pengolahan Pendapat dan Pertimbangan Perangkat Peraturan Perundang-Undangan	010
1254	Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Hukum	013
		019
2105	Inventarisasi Haki Bidang Geologi	020
		090
7501	Penyusunan Rancangan Amandemen UU No.15/1999	090
0367	Pemantapan Kualitas Partisipasi Publik Pelaksanaan Perlindungan Hukum dan HAM	005
0368	Penyelenggaraan dan Pembinaan Standar Pelayanan Perlindungan HAM	005
0402	Penyuluhan Hukum	006
0672	Penyelenggaraan Permasalahan	010
1255	Pembinaan / Penyelenggaraan Permasalahan	013
1256	Penyuluhan Hukum dan Koordinasi Ranham	013
1257	Pemantapan Kualitas Partisipasi Publik dalam Penegakan dan Pemajuan HAM	013
1258	Pembudayaan dan Permasalahan HAM	013
6602	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan HAM	074



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
6603	Penyelenggaraan Penyuluhan HAM	074
6604	Penerbitan Majalah/Jurnal/Buletin/Buku/Leaflet/Brosur/Poster	074
7651	Penyuluhan Hukum Pemberantasan Korupsi	093
7652	Penyelenggaraan Pendidikan Pemberantasan Korupsi	093
0369	Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum Bagi Golongan Miskin Atau Tidak Mampu	005
0370	Bimbingan Teknis Pengendalian dan Penanganan Perkara	005
0371	Pelayanan dan Bantuan Hukum	005
0403	Pelayanan dan Bantuan Hukum	006
1259	Pembinaan / Penyelenggaraan Keimigrasian	013
1260	Penyelenggaraan Pelayanan Hukum	013
1261	Pelayanan dan Bantuan Hukum	013
6717	Pelayanan dan Bantuan Hukum	076
6753	Penyelenggaraan Pelayanan Hukum	077
7451	Pelaksanaan Bantuan Hukum / Asistensi Hukum / Saksi Ahli / Penerjemah	090
0372	Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadilan	005
0373	Penyempurnaan Sistem Manajemen Perkara	005
0374	Pelaksanaan Hukum dan Peradilan Tertinggi	005
0375	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum dan Peradilan	005
0376	Penyelenggaraan Peradilan Tingkat Banding	005
0377	Penyelenggaraan Peradilan Tingkat Pertama	005
		006
		013
6605	Peningkatan Jejaring Pemajuan HAM	074
6606	Peningkatan Kerjasama untuk Perlindungan, Pemajuan dan Penegakan HAM	074
6607	Pembentukan Kantor Perwakilan	074
6608	Penyelenggaraan Pemilihan Anggota Komnas HAM Periode 2007-2012	074
6754	Penyempurnaan Sistem Manajemen Perkara	077
8101	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum dan Peradilan	100
0378	Penegakan Hukum dan HAM	005
0404	Penegakan Hukum dan HAM	006
0405	Penyidikan, Penuntutan, Pemberantasan Ttd Pelanggaran Kejahatan dan Penanganan Perkara	006
1262	Penegakan Hukum dan HAM	013
1263	Koordinasi Dan Kerjasama Penerapan HAM dan Pemenuhan HAM	013
4717	Penegakan Hukum dan HAM	034
4718	Penegakan Hukum, Operasional Timtas Korupsi, Pemberantasan Korupsi	034
4719	Penelitian dan Pengkajian Bidang Hukum	034
6609	Penyelenggaraan Pengawasan/Pemantauan Pelaksanaan, Perlindungan, Pemajuan dan Penegakan HAM	074
6610	Percepatan Penyelesaian Kasus Korupsi Dan Pelanggaran HAM	074
6611	Penyelenggaraan Mediasi HAM	074
6612	Penyelenggaraan Kegiatan Penyelidikan Pelanggaran HAM	074
7653	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pemberantasan Korupsi	093
7654	Penindakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi	093
0379	Pembuatan Sistem Penilaian Kualitas Hakim	005
0380	Peningkatan Profesionalitas Aparat Peradilan	005
0381	Resionalisasi Penempatan Hakim dan Pejabat Kepaniteraan	005
		006
		013
1264	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum Nasional	013
1265	Pembinaan, Perancangan, Harmonisasi, Kerjasama, Publikasi, Litigasi dan Fasilitas Perancangan Peraturan	013



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
1266	Pembinaan / Penyelenggaraan Haki	013
1267	Pembinaan / Penyelenggaraan AHU	013
6755	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum Nasional	077
7452	Penegakan Hukum Persaingan Usaha	090
7453	Pelaksanaan Dengar Pendapat Terkait dengan Masalah Persaingan Usaha	090
7454	Pengembangan dan Harmonisasi Kebijakan Persaingan Usaha	090
7455	Kajian Penanganan Perkara	090
7502	Penyelenggaraan Monitoring Persaingan Usaha Terkait Dugaan Praktek Monopoli	090
7456	Pemberdayaan Perlindungan Konsumen	090
7457	Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	090
7458	Peningkatan Pengawasan Kemetrolagian	090
7459	Peningkatan Operasionalisasi Kegiatan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)	090
7496	Peningkatan Partisipasi Daam Organisasi Metrologi Legal Internasional	090
7504	Penyelenggaraan Identifikasi Pemeriksaan dan Penyidikan PBK	090
7503	Peningkatan Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum	090
7461	Peningkatan Partisipasi Aktif dalam Perundingan di Berbagai Fora Internasional	090
7462	Penyelenggaraan Tim Nasional Perundingan Perdagangan Internasional	090
7463	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Dagang	090
7464	Peningkatan Koordinasi Penanganan Isu-Isu Perdagangan Internasional	090
7465	Penanggulangan Pelanggaran Haki	090
7466	Perkuatan SDM dengan Penyediaan Tenaga Magang pada Atdag	090
7467	Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga Pengawas Perdagangan Berjangka di LN	090
7468	Pelaksanaan Tindak Lanjut Perundingan Kerjasama Perdagangan Bilateral	090
4755	Pengkajian Kebijakan/Peraturan Sektoral dan Daerah	035
4756	Perencanaan, Koordinasi, dan Penyusunan Kebijakan dan Program UMKM	035
4757	Pembangunan Jaringan dan Penyebarluasan Informasi UMKM	035
5152	Penyederhanaan Proses Perijinan Usaha	044
5153	Pelayanan dan Bantuan Hukum KUKM	044
5154	Diseminasi Isu-Isu Strategis Pemberdayaan KUKM	044
5155	Penyederhanaan dan Efektivitas Proses Perijinan Usaha	044
5156	Pengembangan KUKM melalui Kerjasama Luar Negeri	044
5157	Pengembangan Sistem dan Jaringan Usaha	044
4758	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Industri Manufaktur	035
4759	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Industri Strategis	035
4760	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Yang Mendorong Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	035
4761	Pelaksanaan Timnas Pepi dan National Single Window (Ditanyakan Padanan Indonesianya)	035 084
7469	Pengembangan Ekspor Daerah	090
7470	Penyelenggaraan Indonesian Trade Promotion Centre	090
7471	Pengembangan Kebijakan Perdagangan Luar Negeri	090
7472	Pembentukan dan Pengembangan Nasional Single Window dan ASEAN Single Window	090
7473	Penyelenggaraan Timnas Peningkatan Ekspor dan Investasi di Bidang Perdagangan	090
7474	Pembinaan Ekspor, Peningkatan Daya Saing dan Pengendalian Impor	090
7475	Peningkatan Fasilitas Pemberdayaan UKM Mikro dan Kemitraan	090
7476	Peningkatan Optimalisasi Koordinasi Lintas Sektoral dan Lintas Wilayah	090
7477	Penyelenggaraan Temu Usaha	090
7478	Pengembangan Promosi Dagang	090
7479	Penyelenggaraan Forum Ekspor	090
7480	Pengamatan Pasar dan Pengembangan Produk	090



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
7481	Pengembangan Ekspor	090
7506	Penyelenggaraan Diklat Ekspor	090
7489	Penyelenggaraan/Peningkatan Forum Koordinasi Teknis dan Sosialisasi	090
5158	Fasilitasi Pengembangan UKM Berbasis Teknologi	044
5159	Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha UMKM dan Pihak Terkait	044
5160	Peningkatan Kerjasama Bidang Haki	044
5161	Peningkatan Sarana dan Prasarana Jaringan Lembaga Kewirausahaan	044
5162	Penumbuhan Wirausaha Baru	044
5163	Penyediaan Sarana Produksi Bersama bagi Anggota Koperasi	044
5164	Pelatihan Kewirausahaan dan Ketrampilan Teknis Berbasis Sumber Daya Lokal	044
5165	Revitalisasi Koperasi/KUD di Bidang Pangan	044
5166	Pelatihan Kewirausahaan dan Ketrampilan Teknis Berbasis Sumber Daya Lokal	044
5167	Pembinaan Sarjana Pencipta Kerja (Prospek) Mandiri	044
5168	Pengembangan Pusat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan SDM KUKM	044
5169	Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk UKM dan Koperasi	044
5170	Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah bagi UMKM	044
5171	Pemantauan/Pengkajian Kredit bagi UMKM Perkuatan Dana bagi UKM	044
5172	Pengawasan Pelaksanaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi UMKM	044
5173	Pengembangan Klaster Bisnis	044
5174	Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga	044
5175	Pelayanan dan Bantuan Hukum KUKM	044
5176	Penyediaan SKIM Penjaminan Kredit UKM	044
5177	Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah	044
5178	Penyelenggaraan Promosi Produk UKM	044
5179	Perkuatan Dana Bagi Koperasi dan UMKM	044
5180	Perkuatan Jaringan Kerjasama Lembaga Pengembangan Bisnis (BDS-P)	044
5181	Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah	044
5182	Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal	044
5183	Sinkronisasi Program Pemberdayaan Koperasi/UKM Pusat dan Daerah	044
5184	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelola KSP/USP	044
5185	Pengembangan Bisnis Ritel Modern (Smesco Mart)	044
5186	Publikasi Pemasaran Bisnis KUKM	044
5187	Fasilitasi Temu Karya Industri Kerajinan (Inkra)	044
5188	Fasilitasi Outlet Pemasaran Kepontren	044
5189	Fasilitasi dan Pengembangan Pusat Data dan Informasi Bisnis (PDIB) di Daerah	044
5190	Fasilitasi Impor Bahan Baku dan Produk bagi KUKM (Kulit)	044
5191	Pemberdayaan KUKM melalui Trading House dan Pendampingan KUKM Ekspor-Impor	044
5192	Fasilitasi Sarana Pengemasan Produk KUKM	044
5193	Pengembangan Trading Board dan Data Center KUKM	044
5194	Pengembangan Peta Pasar Produk KUKM	044
5195	Pembentukan Klinik Konsultasi Pemasaran (KKP) UKM	044
5196	Fasilitasi Outlet Pemasaran di Lokasi Strategis	044
5197	Dukungan Pemasaran Produk Sehat KUKM	044
5198	Pengembangan Jaringan Pemasaran KUKM	044
5199	Fasilitasi Perdagangan KUKM antar Pulau	044
5200	Pengembangan Badan Layanan Umum Promosi dan Dana Bergulir KUKM	044
5201	Promosi KUKM	044
5202	Dukungan Penyediaan Informasi Kredit bagi Lembaga Keuangan Non-Bank	044
5203	Perkuatan Dana Bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	044
5204	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	044



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
5205	Pembinaan, Pengawasan, dan Penilaian Perkoperasian	044
5206	Peningkatan Kualitas Pelayanan Koperasi kepada Anggota	044
5207	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	044
5208	Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan bagi Kader, Pengelola dan Anggota Koperasi	044
5209	Penyelenggaraan Pembinaan Administrasi dan Pengawasan Badan Hukum Koperasi	044
5210	Rintisan Penerapan Teknologi/Manajemen Modern pada Koperasi	044
5211	Pemasyarakatan Prinsip-Prinsip dan Model-Model Pengembangan Koperasi	044
5212	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelola KSP/USP	044
5213	Optimalisasi Pemanfaatan Dana Pembinaan UKK dari Bagian Laba BUMN	044
5214	Pelatihan Budaya Usaha dan Teknis Manajemen Usaha Mikro	044
5215	Pembiayaan Produktif dengan Pola Bagi Hasil dan Konvensional	044
5216	Penyediaan Kemudahan dan Pembinaan Usaha Mikro	044
5217	Penyusunan SKIM Kredit/Model Pembiayaan bagi Usaha Mikro	044
5218	Perluasan Sumber Permodalan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	044
5219	Fasilitasi Sarana Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL)	044
5220	Fasilitasi Mobil Warung bagi KUKM	044
5221	Fasilitasi Pelaksanaan Pasar Rakyat	044
5222	Fasilitasi Pasar Tradisional	044
5223	Fasilitasi dan Perkuatan Kemitraan dan Jaringan Usaha Mikro di Pedesaan	044
5224	Pengembangan Anjungan Bisnis Produk KUKM Berbasis Sentra	044
5225	Fasilitasi Perkuatan Pusat Distribusi Koperasi dan UKM	044
4762	Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Kawasan Perbatasan, Daerah Pasca Bencana & Daerah Tertnggl	035
4763	Pembinaan Pasar dan Distribusi	035
7482	Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi	090
7483	Persiapan Integrasi Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi ke dalam Otoritas Jasa Keuangan	090
7484	Pembinaan dan Pengembangan Usaha, Lembaga Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan	090
7485	Pembinaan Pasar dan Distribusi	090
7486	Pengembangan Pasar Lelang Daerah	090
7487	Pengembangan Sistem Resi Gudang	090
7488	Pengembangan PDN Daerah	090
7507	Pembentukan Lembaga Distribusi Nasional	090
7508	Pemrosesan Perizinan Usaha Berjangka	090
7509	Pelaksanaan Uji Profesi Calon Wakil Pialang	090
7510	Peningkatan Keterampilan Dunia Usaha Bidang PBK, SRG dan PL	090
7511	Pembinaan Pasar Fisik dan Kontrak Berjangka, SRG	090
7512	Pelaksanaan Kajian Kontrak Berjangka	090
3502	Penyusunan Kerangka Kualifikasi Nasional dan Sistem Sertifikasi Bidang Pendidikan dan Pelatihan	026
3503	Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Sektor Industri dan Jasa	026
3504	Penyelenggaraan Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi	026
3505	Penyelenggaraan Program Pelatihan Kerja Berbasis Masyarakat	026
3506	Penyelenggaraan Pelatihan Non Institusional/Pelatihan Keliling (MTU)	026
3507	Penyelenggaraan Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri	026
3508	Penguatan Kelembagaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	026
3509	Pengembangan Kelembagaan Kepelatihan dan Produktivitas Kewirausahaan	026
3510	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pelatihan dan Instruktur	026
3511	Pemberian Fasilitasi dan Dorongan Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Masyarakat	026
3512	Pembinaan dan Pengembangan Pelatihan dan Produktivitas	026



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
3513	Pengembangan Produktifitas dan Pembinaan Kewirausahaan	026
3514	Pembinaan Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan	026
3515	Pembinaan Instruktur dan Tenaga Keahlian Tenaga Kerja	026
3516	Pembinaan Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja	026
3517	Pembinaan Pemagangan Tenaga Kerja	026
3518	Pengembangan Manajemen dan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas	026
3520	Pembinaan Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi	026
3521	Penyempurnaan Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hub. Industrial & Pemberian Perlindungan dan Jamsostek	026
3522	Pemberian Dorongan dan Penyemp. Pelaksanaan Negosiasi Bipartit antara Pekerja dan Pemberi Kerja	026
3523	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja	026
3524	Peningkatan Fungsi Kelembagaan Ketenagakerjaan	026
3525	Pengembangan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	026
3526	Pelaksanaan dan Penghapusan Bentuk - Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak	026
3527	Pembinaan Kelembagaan dan Pemasarakatan Hubungan Industrial	026
3528	Pembinaan Pengupahan dan Jaminan Sosial	026
3529	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	026
3530	Pengawasan Norma Ketenagakerjaan	026
3531	Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak	026
3532	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Pengawas Hubungan Industrial	026
3533	Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	026
3534	Penyempurnaan dan Pengkonsolidasian Program Perluasan Kesempatan Kerja	026
3535	Fasilitasi Pendukung Pasar Kerja, melalui Penguatan Kelemb., Peningk. Info., Penyel. Bursa Kerja	026
3536	Penempatan Tenaga Kerja melalui Mekanisme AKL, Akad dan Aksus	026
3537	Pengembangan Pasar Kerja Dalam Negeri	026
3538	Pengembangan Pasar Kerja Luar Negeri	026
3539	Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	026
3540	Pembinaan Penggunaan Tenaga Kerja Asing	026
3541	Promosi Perluasan Kesempatan Kerja Dalam Negeri	026
3542	Pengembangan Sistem dan Perluasan Kesempatan Kerja Dalam Negeri	026
3543	Promosi dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia	026
3544	Pembinaan Kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia	026
3545	Perlindungan dan Advokasi Tenaga Kerja Indonesia	026
3546	Pemberdayaan Tenaga Kerja Luar Negeri	026
3547	Penyelenggaraan Padat Karya Produktif	026
3548	Koordinasi Penempatan TKI LN dan Konsolidasi Kebutuhan Pelatihan TKI	026
3549	Pengembangan dan Uji Coba Model - Model Perluasan Kesempatan Kerja	026
3550	Pembentukan dan Pengembangan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah	026
3551	Pembinaan Lembaga dan Sarana Perluasan Kesempatan Kerja	026
4005	Penyiapan Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan Produksi	029
4006	Pengembangan Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Alam	029
4007	Pengembangan Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Tanaman	029
4008	Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan	029
4009	Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	029
4010	Perencanaan dan Pembinaan Pengelolaan Hutan Produk Lestari	029
4011	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	029
4012	Pembentukan Wilayah Pengelolaan dan Perubahan Kawasan Hutan	029
4013	Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan dan Pengelolaan DAS Prioritas	029
4030	Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan dalam Pengelolaan DAS Prioritas	029
4031	Penunjukan Kawasan Hutan	029



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
4032	Penetapan Batas Kawasan Hutan	029
4033	Penetapan Kawasan Hutan	029
4034	Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	029
1501	Pembinaan/ Penanganan Komoditas Strategi Nasional	018
1502	Pengembangan dan Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian dan Perdesaan	018
1503	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	018
1504	Pengembangan Sistem Perkarantina Pertanian dan Standar Mutu Komoditas Pertanian	018
1505	Pengembangan Usaha Tani Komoditas Bernilai Tinggi/Pengutuhan Sentra Komoditas Unggulan Bernilai Tinggi	018
1506	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya, Pasca Panen dan Mekanisasi Pertanian	018
1507	Pengembangan Agribisnis Peternakan	018
1508	Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan Perkebunan	018
1509	Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Semusim Perkebunan	018
1510	Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Tahunan Perkebunan	018
1511	Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar Perkebunan	018
1512	Pembinaan Perlindungan Tanaman	018
1513	Pembinaan dan Pengembangan Perbenihan Pertanian	018
1514	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Mutu Produk Perkebunan	018
1515	Pengembangan Sumberdaya Informasi Iptek, Diseminasi, dan Penjaringan Umpan Balik	018
1516	Pengembangan Kelembagaan dan Komunikasi Hasil Litbang Pertanian	018
1517	Pengembangan Perbibitan Peternakan	018
4764	Koordinasi Cadangan Pangan	035
4765	Koordinasi Revitalisasi, Perikanan dan Kehutanan (RPPK)	035
1518	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	018
1519	Pengembangan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian	018
1520	Pengembangan Perbenihan/Perbibitan	018
1521	Pengembangan Perlindungan Tanaman	018
1522	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian	018
1523	Pengendalian Wabah/Flu Burung pada Hewan	018
1524	Perlindungan Keamanan Produk Peternakan	018
1525	Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik	018
1526	Penelitian dan Pengembangan Komoditas	018
1527	Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	018
1528	Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Tanah, Air dan Agroklimat	018
1529	Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan Pertanian	018
1530	Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi dan Keamanan Pangan	018
1531	Pembinaan dan Pengembangan Distribusi dan Akses Pangan	018
1532	Pembinaan dan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	018
1533	Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan Ketahanan Pangan	018
1534	Stabilisasi Harga Pangan Strategis	018
1535	Pemantapan Kelembagaan Ketahanan Pangan	018
1536	Peningkatan Pendapatan Petani melalui Inovasi	018
1537	Perlindungan Varietas Tanaman	018
0673	Perumusan dan Pengembangan Kebijakan Kelautan dan Peraturan Perundangan Pengelolaan Wilayah Pesisir	010
0674	Fasilitasi Penataan Pembangunan Wilayah Pulau-Pulau Terluar	010
0675	Peningkatan Kapasitas Kerlembagaan Daerah dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	010
4102	Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Lingkungan Laut dan Pesisir	032
4103	Pengembangan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	032
4104	Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Riset Kelautan dan Perikanan	032



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
4105	Perencanaan Penataan Ruang, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil serta Pengelolaan Batas Wilayah Laut	032
4106	Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Non Konvensional	032
4107	Pengemb & Pengelolaan Terpadu Wil Laut, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Terdepan Berbasis Kemitraan & Masy	032
7103	Pemetaan Tematik SDA dan LH Matra Laut	083
7104	Pemetaan Dasar Kelautan dan Kedirgantaraan	083
4108	Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir	032
4109	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha Perikanan	032
4110	Pengembangan dan Penyelenggaraan Karantina Ikan, dan Sistem Pengelolaan Kesehatan Ikan	032
4111	Pengembangan Data dan Statistik Perikanan	032
4112	Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan dan Peningkatan Sistem Penyuluhan	032
4113	Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Hasil Perikanan	032
4114	Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya	032
4115	Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan	032
4116	Penyelenggaraan Revitalisasi Perikanan	032
4117	Pengembangan Rekayasa Teknologi Terapan Perikanan	032
4118	Pengelolaan Sumberdaya Ikan Secara Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	032
1538	Pembinaan dan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	018
1539	Pembinaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	018
1540	Sinkronisasi Kebijakan dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	018
1541	Koordinasi Penanganan Daerah Bencana Alam, Konflik, Tertinggal dan Perbatasan	018
1542	Penyelenggaraan Pendidikan Pertanian	018
1543	Pengembangan Ketahanan Pangan di Lahan Kering	018
1544	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	018
1545	Pelayanan Pembiayaan Pertanian	018
1546	Pengembangan Perizinan dan Investasi	018
1547	Pemberdayaan Petani, Pelaku Agribisnis dan Penyuluhan Pertanian	018
4242	Penerapan Teknologi Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya	033
4243	Advis Teknis Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya	033
4417	Pembangunan Waduk, Embung, Situ dan Bangunan Penampung Air Lainnya	033
4418	Rehabilitasi Waduk, Embung, Situ dan Bangunan Penampung Air Lainnya	033
4419	Operasi dan Pemeliharaan Waduk, Embung, Situ dan Bangunan Penampung Air Lainnya	033
4420	Konservasi Danau dan Situ	033
4421	Perbaikan Sabuk Hijau di Kawasan Sumber Air	033
4422	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi	033
4423	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Rawa	033
4424	Pembangunan/Peningkatan Prasarana Irigasi Air Tanah	033
4425	Penyiapan Lahan Beririgasi	033
4426	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	033
4427	Rehabilitasi Jaringan Rawa	033
4428	Rehabilitasi Prasarana Irigasi Air Tanah	033
4429	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	033
4430	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa	033
4431	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	033
2136	Induk Pembangkit dan Jaringan	020
2137	Listrik Perdesaan	020
2160	Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	020
2161	Pengaturan dan Pengawasan Usaha Non Bahan Bakar	020
2162	Pelayanan Usaha Pengangkutan dan Penyimpanan Bidang Migas	020
2163	Pelayanan Usaha Niaga Bidang Migas	020



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
2118	Data Base Berbasis TI Sumber Daya Geologi	020
2133	Pengkoordinasian/Penyelenggaraan Konservasi Energi	020
2142	Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Pemanfaatan Energi	020
2143	Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Usaha Energi Baru Terbarukan	020
2144	Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Konservasi Energi	020
2145	Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Energi Perdesaan	020
2146	Penyiapan Bimbingan Teknis Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	020
2103	Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	020
2129	Pengembangan dan Pemanfaatan Briket Batubara	020
2147	Pemanfaatan Biofuel Untuk Masyarakat Perdesaan	020
2134	Perumusan SNI Bidang Ketenagalistrikan	020
2138	Penyiapan Program Ketenagalistrikan	020
2139	Penyusunan Kebijakan Investasi dan Pendanaan Tenaga Listrik	020
2140	Penyusunan Kebijakan Ketenagalistrikan Sosial	020
2141	Penyiapan Informasi dan Bimbingan Teknis Ketenagalistrikan	020
2148	Pengembangan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan	020
2149	Fasilitasi Implementasi PSK dan PSM Energi Terbarukan	020
2150	Pengaturan dan Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan	020
2151	Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan	020
2152	Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Harga dan Subsidi Listrik	020
2153	Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Hubungan Komersial Ketenagalistrikan	020
2154	Penyusunan Regulasi Perlindungan Konsumen Listrik	020
2155	Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Standardisasi Ketenagalistrikan	020
2156	Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan	020
2157	Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	020
2158	Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan	020
2101	Pembinaan Usaha Pertambangan	020
2102	Promosi Bidang Pertambangan	020
2169	Pemetaan Geologi Kelautan Kontinen dan Regional Pertambangan SDA & Batubara	020
2114	Penelitian, Penyelidikan, Inventarisasi dan Eksplorasi Mineral, Batubara, dan Bahan Galian Industri	020
2115	Peningkatan Pemanfaatan Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi	020
2126	Penerapan Good Mining Practice	020
2127	Peningkatan dan Pemanfaatan Mineral, Batubara dan Panas Bumi	020
2128	Pembinaan dan Pengusahaan Kegiatan Pertambangan	020
2130	Peningkatan Pemanfaatan Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi	020
2131	Penyiapan Kebijakan Penetapan Harga Dasar Uap Panas Bumi	020
2116	Penelitian, Penyelidikan, Inventarisasi dan Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas	020
2164	Pelayanan Pemerintahan dalam Menunjang Kegiatan Migas	020
2165	Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi	020
2166	Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	020
2167	Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	020
2168	Pembinaan Teknik dan Lindungan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	020
2170	Pemetaan Geologi Kelautan Kontinen dan Regional Pertambangan Migas	035
5012	Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri	042
5013	Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi	042
6858	Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi	079
6924	Pendayagunaan Hasil Litbang Iptek Nuklir	080
6984	Rancang Bangun Pesawat Udara Nir Awak	081
6985	Rancang Bangun Kapalmbersayap Wise-8	081
6986	Pengembangan Teknologi Kereta Api Perkotaan	081



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
6987	Pengembangan Bio Ethanol	081
6988	Pengembangan Bio Diesel	081
6989	Pengembangan Bio Oil	081
6990	Pengembangan Sistem Kendali Traversing, Sarana Industrialwind Tunnel	081
6991	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan	081
6992	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri dan Sistem Transportasi	081
6993	Pengkajian Termodinamika Motor dan Propulsi	081
6994	Teknologi Kekuatan Struktur	081
6995	Pengkajian Dinamika Pantai	081
6996	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri Proses	081
6997	Intelligent Industrial Machine	081
6998	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri Alat dan Mesin	081
7060	Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi Kedirgantaraan	082
7061	Peningkatan Kapasitas Litbang Iptek Energi Baru dan Terbarukan	082
7064	Pengembangan Kapasitas Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas Produk Iptek Kedirgantaraan	082
7151	Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standardisasi, Pengujian dan Kualitas	084
2008	Penguatan dan Pengembangan Klaster Industri Kecil dan Menengah	019
2009	Pengembangan Sentra-Sentra Industri Kecil dan Menengah Pendukung Klaster Industri	019
2010	Pengembangan IKM Unggulan Daerah	019
2011	Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor IKM	019
2012	Pengembangan IKM di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Pasca Konflik	019
2013	Pemberdayaan IKM di Provinsi (Dekonsentrasi)	019
2014	Pembantuan Pembinaan IKM di Kabupaten/Kota	019
2015	Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	019
2016	Penyelenggaraan dan Pengembangan Teknologi, Standard, Norma dan Bimbingan Teknis Industri	019
2017	Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Industri	019
2018	Penyelenggaraan dan Pengembangan Standar, Norma, dan Bimbingan Teknis	019
2019	Penyelenggaraan dan Pengembangan Kebijakan Teknologi	019
2020	Pengembangan Sistem Informasi Keindustrian	019
2021	Peningkatan Standardisasi Industri	019
2022	Pengembangan Sistem Informasi Keindustrian	019
2023	Pembinaan dan Pemanfaatan Teknologi Industri	019
2024	Pelaksanaan Litbang dan Aplikasi Teknologi Hasil Litbang	019
7152	Perluasan Penerapan SNI	084
2025	Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Perencanaan Pembangunan Sektor Industri	019
2026	Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Industri	019
2027	Penyusunan Standard Kompetensi	019
2028	Pengembangan Perkuatan Klaster Industri	019
2029	Penanganan Permasalahan Aktual Industri	019
2030	Peningkatan Kerjasama Intenal dan Eksternal Industri	019
2031	Penyusunan Kebijakan, Program dan Rencana Kerja Industri	019
2032	Peningkatan Iklim Usaha Industri	019
2033	Penguatan dan Pengembangan Klaster Industri	019
2034	Peningkatan Kerjasama Industri	019
2035	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Industri	019
2036	Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri	019
2037	Perencanaan dan Penyusunan Program	019
2038	Penanganan Masalah Aktual Industri	019
2039	Penguatan Kelembagaan Klaster IATT	019
2040	Pengembangan SDM Industrial	019



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
2041	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri IATT	019
2042	Pemantauan Kegiatan IATT	019
2043	Pengembangan Iklim Usaha	019
2044	Pengembangan Kawasan Industri	019
4244	Bantuan Penanggulangan Darurat Jalan dan Jembatan	033
4326	Rehabilitasi Jalan Nasional	033
4327	Pemeliharaan Jalan Nasional	033
4328	Rehabilitasi Jembatan Ruas Jalan Nasional	033
4329	Pemeliharaan Jembatan Ruas Jalan Nasional	033
4245	Peningkatan Jalan Nasional	033
4246	Pengadaan Peralatan / Bahan Jalan dan Jembatan	033
4247	Pembinaan Manajemen Kebinamargaan	033
4248	Pembinaan Jalan dan Jembatan Tol	033
4249	Cadangan Mendesak Bidang Jalan dan Jembatan	033
4250	Penerapan Teknologi Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan	033
4251	Advis Teknis Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan	033
4252	Pengaturan Jalan Tol	033
4253	Pengusahaan Jalan Tol	033
4254	Pengawasan Jalan Tol	033
4330	Pembangunan Jalan Nasional	033
4331	Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Nasional	033
4332	Peningkatan Jembatan Ruas Jalan Nasional	033
4333	Pembinaan Pelaksanaan Teknis Jalan dan Jembatan	033
4334	Pembebasan Lahan	033
4335	Penyiapan Program dan Administrasi PLN	033
4336	Penyiapan Standar dan Pedoman Teknik Jalan dan Jembatan	033
4337	Fasilitasi Penyelenggaraan Jalan Daerah	033
4338	Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja	033
4339	Pembinaan Teknik Jalan	033
4340	Pembinaan Teknik Jembatan	033
4341	Pembinaan Manajemen Lingkungan Jalan dan Jembatan	033
4342	Pengembangan Sistem Data dan Informasi	033
4343	Pembinaan dan Pengendalian Pekerjaan Strategis	033
4344	Pembangunan Jalan Strategis Nasional	033
4345	Pembangunan Jembatan Strategis Nasional	033
4346	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan	033
4347	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jembatan	033
4348	Penggantian Jembatan Ruas Jalan Nasional	033
2202	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ	022
2203	Pembangunan/Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	022
2204	Pembangunan Terminal	022
2205	Perbaikan Daerah Rawan Kecelakaan	022
2206	Pembangunan Alat Kalibrasi	022
2207	Penataan dan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Jalan Nasional Perkotaan	022
2208	Pembangunan Jembatan Timbang	022
2209	Operasional Jembatan Timbang	022
2210	Pelaksanaan ABIU (Accident Blackspot Investigation Unit)	022
2211	Penataan dan Manajemen Rekayasa LLAJ	022
2212	Pelaksanaan Road Safety Audit	022
2213	Pengadaan Alat Uji Tipe Khusus Sepeda Motor	022
2214	Penataan Jalur Angkutan	022



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
2215	Perencanaan dan Penataan Sistem Jaringan Transportasi	022
2216	Penyelenggaraan Crisis Center	022
2217	Pembangunan Prototipe Sarana Angkutan Jalan Ramah Lingkungan	022
2218	Pengadaan Bus Perintis	022
2219	Subsidi Operasi Perintis Angkutan Jalan	022
2220	Pembangunan Transportasi Umum Perkotaan Terpadu	022
2221	Kerjasama Pengadaan dan Pengoperasian Bus	022
2222	Rehabilitasi Terminal	022
2223	Rehabilitasi Jembatan Timbang	022
2224	Pengadaan Sarana KA Kelas Ekonomi, KRL, dan KR/ KRDE/ KD3	022
2225	Peningkatan Jalan dan Prasarana Kereta Api	022
2226	Peningkatan Jembatan KA	022
2227	Pembangunan Jalan Kereta Api	022
2228	Peningkatan dan Rehabilitasi Sistem Sinyal dan Telekomunikasi	022
2229	Penataan dan Penertiban Pemanfaatan Daerah Milik Jalan Jalur KA	022
2230	Pembangunan Double Track dan Double-Double Track	022
2231	Pembangunan Depo	022
2232	Pengembangan Perkeretaapian	022
2233	Rehabilitasi Jembatan KA	022
2234	Rehabilitasi Kereta Api Kelas Ekonomi dan KR/ KRDE/ KD3/ KR	022
2235	Standarisasi Kinerja Prasarana dan Sarana KA	022
2236	Rehabilitasi Peralatan Sintelis KA	022
2237	Rehabilitasi Jalan KA	022
2238	Rehabilitasi Jembatan KA	022
2239	Perencanaan Sistem Audit Kinerja Prasarana dan Sarana Serta SDM Perkeretaapian	022
2240	Penyempurnaan Skema Pendanaan PSO-IMO-TAC	022
2241	Spin-Off Divisi Kereta Api	022
2242	Pendukung Transportasi Perkotaan	022
2243	Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	022
2244	Pembangunan Kapal	022
2245	Pembangunan Dermaga Laut	022
2246	Pelayanan Pelayaran Perintis	022
2247	Pengadaan Peralatan Sarana Telekomunikasi Pelayaran	022
2248	Pengadaan Peralatan Penunjang Keselamatan Transportasi Laut	022
2249	Pengembangan Database dan Identitas Pelaut	022
2250	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelabuhan	022
2251	Rehabilitasi Kapal	022
2252	Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan	022
2253	Pembersihan Kolam/Pengerukan Alur Laut Pelayaran	022
2254	Rehabilitasi Sarana Bantu Navigasi	022
2255	Rehabilitasi Fasilitas Sarana dan Prasarana Pelabuhan	022
2256	Pembangunan Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan	022
2257	Subsidi Operasi Lintas Penyeberangan Perintis	022
2258	Pengadaan Kapal Perintis dan Bus Air	022
2259	Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Prasarana Keselamatan	022
2260	Pengadaan Speed Boat	022
2261	Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan	022
2262	Pengerukan dan Pembersihan Alur Penyeberangan	022
2263	Pengerukan dan Pembersihan Alur Penyeberangan	022
2264	Rehabilitasi Kapal Penyeberangan	022
2265	Pengadaan Peralatan Survei Pemetaan	022



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
2266	Pelayanan Penerbangan Perintis	022
2267	Pembangunan Landasan dan Fasilitasnya	022
2268	Pengadaan Fasilitas Keselamatan Penerbangan	022
2269	Pengadaan Fasilitas Penunjang Operasi Bandara	022
2270	Pembangunan Bandara Baru	022
2271	Pengembangan/Peningkatan Bandara	022
2272	Rehabilitasi Landasan dan Fasilitasnya	022
2273	Rehabilitasi Terminal dan Fasilitasnya	022
2274	Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan Penerbangan	022
2275	Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Transportasi	022
2276	Pengembangan Sistem Transportasi Nasional	022
2277	Studi Kebijakan Bidang Transportasi	022
6652	Pengembangan Sistem Observasi	075
6653	Pengembangan Sistem Data & Informasi Klimatologi, Meteorologi dan Geofisika	075
6654	Pengembangan Penelitian Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	075
6655	Pengembangan Unit Pelaksana Teknis	075
5766	Penyusunan/Pembaharuan Kebijakan, Regulasi, Kelembagaan Industri Pos dan Telematika	059
5767	Peningkatan Transparansi / Kejelasan Proses Perizinan Sektor Pos dan Telematika	059
5768	Penyusunan Regulasi, dan Kelembagaan Infrastruktur Pos Dan Telematika	059
5769	Penyusunan Regulasi Penelitian dan Pengembangan Industri Pos dan Telematika	059
5770	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Kualitas Layanan Pos dan Telematika	059
5771	Penyediaan Infrastruktur Pos dan Telematika di Daerah Non Ekonomis	059
5772	Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pos dan Telematika	059
5773	Penegakan Hukum dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pos dan Telematika	059
5774	Peningkatan Standarisasi dan Sertifikasi Pelayanan, Keahlian SDM, Perangkat dan Sistem Pos dan Telematika	059 032
5775	Penyusunan Regulasi dan Kelembagaan Teknologi Informasi	059
5776	Penyusunan Standar Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	059
5777	Peningkatan Literasi Masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-Literacy)	059
5778	Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	059
5779	Pembinaan dan Pengembangan Telematika	059
6718	Peningkatan Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	076
6719	Pemeliharaan Jaringan Teknologi Informasi	076
6157	Pengembangan Potensi Daerah dan Kawasan Khusus	065
6158	Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal di Pusat dan di Daerah	065
6159	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	065
6160	Evaluasi dan Validasi Persetujuan Penanaman Modal	065
6161	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal Pusat dan Daerah	065
6162	Penelitian terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Bidang Investasi	065
6163	Persiapan Pembentukan Daerah Khusus Pengembangan Investasi (DKPI)	065
6164	Penyusunan Kerangka Investasi (PMA/PMDN)	065
6165	Kajian Kebijakan Penanaman Modal Daerah Menuju Layanan Satu Atap	065
6166	Kajian Peraturan Yang Terkait dengan Pengembangan Kegiatan Penanaman Modal	065
6167	Pemberian Penghargaan Kepada Propinsi dan Kabupaten/ Kota Pelaksana Perijinan Investasi Satu Atap	065
6168	Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar UMKM	065
6169	Publikasi Kebijakan Pelayanan Publik di Bidang Investasi melalui Media Cetak/Elektronik	065
6170	Peningkatan Kerjasama Investasi dengan Institusi Dunia Usaha	065
6171	Penyelenggaraan Sekretariat Nasional Kerjasama Ekonomi Sub Regional	065
6172	Kajian Posisi Indonesia dalam Berbagai Kesepakatan Kerjasama Internasional di Bidang Investasi	065
6173	Peningkatan Sistem dan Prosedur Kerjasama Investasi di Daerah Perbatasan Negara (Sambas, Kalbar)	065



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
6174	Peningkatan Kerjasama dalam Rangka Bilateral dan Multilateral di Bidang Investasi	065
6175	Peningkatan Promosi Investasi di Dalam Negeri	065
6176	Penyelenggaraan Kantor Investasi di Luar Negeri	065
6177	Peningkatan Promosi Investasi Terintegrasi di Luar Negeri	065
6282	Pengembangan Potensi Daerah dan Kawasan Khusus	067
6283	Fasilitasi dan Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT)	067
6284	Koordinasi Antar Lembaga Baik Ditingkat Pusat dan Daerah Dalam Pengendalian Pelaksanaan terhadap Masalah	067
6285	Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	067
6286	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	067
6312	Pengembangan Potensi Daerah dan Kawasan Khusus	067
6313	Fasilitasi dan Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT)	067
6314	Koordinasi Antar Lembaga baik di Tingkat Pusat dan Daerah dalam Pengendalian Pelaksanaan terhadap Masalah	067
6315	Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	067
6316	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	067
7153	Peningkatan Partisipasi Masyarakat terhadap Standardisasi	084
7154	Peningkatan Jasa Pelayanan Akreditasi, Pendidikan dan Pelatihan Bidang Standardisasi	084
7155	Perbaikan Proses Pengembangan SNI	084
7157	Peningkatan Persepsi Masyarakat Terhadap Standar dan SNI	084
7158	Penguatan Posisi dalam Forum Regional dan Internasional Bidang Standardisasi	084
7159	Partisipasi dalam Forum Codex Alimentarius Commission	084
7490	Peningkatan Kerjasama Standardisasi	090
7491	Pembinaan Standardisasi, Akreditasi dan Pengendalian Produk	090
7492	Penguatan Infrastruktur SNI dan Penyetaraan Standardisasi Internasional	090
7493	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Bidang Standardisasi	090
7494	Pelaksanaan Unjuk Kerja Kompetensi LPK	090
7495	Pemberlakuan SNI untuk AEI	090
4954	Restrukturisasi, Profitisasi Dan Privatisasi BUMN	041
4955	Kajian Regulasi Public Service Obligation (PSO)	041
4956	Pembinaan Perusahaan - Perusahaan Negara	041
4255	Pembinaan Teknik Persampahan dan Drainase	033
4256	Penanggulangan Darurat Prasarana dan Sarana PLP	033
4257	Pengembangan Sistem Drainase dan Pengelolaan Persampahan	033
4258	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Air Minum dan Air Limbah	033
4259	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Persampahan dan Drainase	033
2159	Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan	020
2125	Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin	020
5053	Pengendalian Dampak Lingkungan	043
5054	Pemantauan Kualitas Lingkungan	043
5055	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	043
5056	Pengkajian Dampak Lingkungan	043
5057	Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan	043
6859	Pengkajian Dampak Lingkungan	079
0676	Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi	010
0677	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	010
0678	Penyusunan Pedoman dan Kebijakan Penataan dan Pengembangan Kawasan Khusus	010
0679	Penyusunan Model Pengelolaan Kawasan Bekas Tempat Pembuangan Akhir Sampah	010
0680	Peningkatan Kapasitas Pemda dalam Pengelolaan Irigasi	010



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
0681	Evaluasi Implementasi Program Pengelolaan Irigasi	010
0682	Fasilitasi dan Pemberian Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup	010
2122	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	020
2123	Perencanaan Ruang dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam	020
2124	Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi	020
2132	Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi	020
4014	Perlindungan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	029
4015	Pengelolaan Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Lainnya	029
4016	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya	029
4017	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	029
4018	Perencanaan dan Pembinaan Kawasan Konservasi	029
4119	Pengembangan Pengelolaan Konservasi Laut	032
5058	Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam	043
5059	Peningkatan Sarana Teknis Lingkungan Hidup	043
6860	Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi	079
7105	Pengembangan Geodesi dan Geodinamika	083
7106	Penetapan Zonasi Daerah Rawan Bencana Alam Darat dan Laut	083
4019	Rehabilitasi Lahan Kritis DAS Prioritas	029
4020	Perencanaan dan Pembinaan Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial	029
4028	Rehabilitasi Lahan Kritis DAS Prioritas	029
4029	Perencanaan dan Pembinaan Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial	029
4120	Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun, Estuaria dan Teluk	032
2119	Pemetaan Zona Kerentanan Bencana Geologi	020
2120	Penataan Ruang Berbasis Geologi	020
2121	Penyediaan Sarana Air Bersih Bersumber dari Air Tanah dan Sanitasi Dasar	020
4021	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Hutan Ekosistemnya	029
4022	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan dan Ekosistemnya	029
4023	Pembinaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	029
4024	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDAH dan Ekosistemnya	029
5060	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	043
5061	Pengembangan Perangkat Ekonomi dan Pendanaan Lingkungan	043
5062	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup	043
6287	Penanganan Isu Aktual Lingkungan Hidup	067
6288	Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	067
6289	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	067
6290	Peningkatan Kinerja dan Akuntabilitas	067
6291	Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	067
6317	Penanganan Isu Aktual Lingkungan Hidup	067
6318	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	067
6319	Peningkatan Kinerja dan Akuntabilitas	067
6320	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	067
4432	Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendali Banjir	033
4433	Pembangunan Sarana/Prasarana Pengaman Pantai	033
4434	Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat	033
4435	Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Lahar Gunung Berapi	033
4436	Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pengendali Banjir	033
4437	Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pengaman Pantai	033
4438	Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pengendalian Lahar Gunung Berapi	033
4439	Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengendalian Banjir	033
4440	Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengaman Pantai	033
4441	Operasi dan Pemeliharaan Sarana/Prasarana Pengendalian Lahar Gunung Berapi	033
0683	Penyusunan NSPM Penataan Ruang	010



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
0684	Operasionalisasi dan Sinkronisasi RTRWN dan RTR Pulau dengan RRTW di Bawahnya	010
0685	Koordinasi Penataan Ruang Pusat dan Daerah	010
0686	Penguatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Penataan Ruang di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	010
0687	Fasilitasi Penataan Wilayah Pengembangan Khusus	010
4121	Peningkatan Koordinasi Penataan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	032
4260	Penguatan Kelembagaan Penataan Ruang di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Tanggap terhadap Bencana	033
4261	Penguatan Koordinasi dalam Rangka Mendukung Upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Pusat dan Daerah	033
4262	Penyusunan NSPM Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yang Tanggap terhadap Bencana melalui Pendekatan Mitigasi	033
4263	Revisi UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang	033
4264	Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Revisi Uu No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang	033
4265	Operasionalisasi RTR Pulau, RTRWN, RTRWP, RTR Kab/Kota	033
4266	Penguatan Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah melalui Bantuan Teknis ke Daerah	033
4267	Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang pada Masyarakat	033
4268	Pembinaan Manajemen Penyelenggaraan Penataan Ruang	033
7062	Peningkatan Koordinasi Penataan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	082
7063	Pemanfaatan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi	082
7107	Pemetaan Dasar Rupabumi dan Tata Ruang	083
5654	Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	056
5655	Penelitian Bidang Pertanahan	056
5656	Pembinaan Pengelolaan Tata Laksana Pertanahan	056
5657	Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah	056
5658	Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	056
5659	Pelayanan Konsolidasi Tanah Swadaya	056
5660	Pelayanan Redistribusi Tanah Swadaya	056
5661	Pelayanan Pemeriksaan Tanah	056
5662	Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah	056
5663	Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali	056
5664	Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah	056
5665	Pelayanan Informasi Pertanahan	056
2106	Edukasi dan Komunikasi Lingkungan	020
2107	Penyelidikan Geologi Teknik dan Geodinamik	020
2108	Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi	020
2109	Penelitian, Penyelidikan dan Pemetaan Geologi Lingkungan dan Air Tanah	020
2110	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	020
2111	Penyusunan dan Penyebaran Neraca Sumber Daya Mineral dan Energi	020
2112	Mitigasi, Peringatan Dini dan Tanggap Darurat Bencana Gunungapi dan Bencana Geologi	020
2113	Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah	020
4025	Pengembangan Rencana dan Statistik Kehutanan	029
4026	Inventarisasi Hutan dan Pengembangan Informasi SDA Dan LH	029
4027	Perencanaan dan Pembinaan Prakondisi Pengelolaan Hutan	029
5063	Pengembangan Komunikasi Lingkungan	043
5064	Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Standardisasi Lingkungan	043
7108	Penyediaan Kerangka Geodesi Kebencanaan	083
7109	Penyelenggaraan Sistem Jaringan dan Standardisasi Data Spatial	083
7110	Pemetaan Tematik SDA dan LH Matra Darat	083
4269	Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Perumahan Nelayan, Kawasan Kumuh dan Kawasan Perbatasan	033
4270	Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa	033
4271	Penataan dan Revitalisasi Kawasan	033
4272	Pengembangan Perumahan dan Permukiman	033



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
4273	Cadangan Mendesak Bidang Perumahan dan Permukiman	033
4274	Penerapan Teknologi Pengembangan Perumahan dan Permukiman	033
4275	Advis Teknis Pengembangan Perumahan dan Permukiman	033
4276	Pelaksanaan Inpres 02/2003	033
7551	Pengembangan Subsidi Kepemilikan/Pembangunan/Perbaikan Rumah bagi MBR	091
7552	Fasilitasi dan Stimulasi Penyediaan Prasarana dan Utilitas Pada Kawasan Skala Besar	091
7553	Fasilitasi dan Stimulasi Penyediaan Prasarana dan Utilitas pada Kawasan Perbatasan dan Pesisir	091
7554	Fasilitasi dan Stimulasi Penyediaan Prasarana dan Utilitas pada Kawasan Industri	091
7555	Pembangunan Rusunawa	091
7556	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan PSU	091
7557	Pengembangan Lembaga Pembangunan Perumahan	091
7558	Penyusunan NSPM Pembiayaan Perumahan	091
7559	Fasilitasi Pengembangan Kebijakan, Strategi, dan Program Pengembangan Kawasan	091
7560	Penyusunan NSPM Pengembangan Kawasan	091
7561	Perumusan Kebijakan, Strategi, dan Program Pengembangan Perumahan Formal	091
7562	Penyusunan NSPM Perumahan Formal	091
7563	Fasilitasi dan Bantuan Teknis Penyelenggaraan Perumahan Formal	091
2803	Pengembangan Kesehatan Wilayah	024
2804	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Masyarakat Miskin	024
2805	Pemeliharaan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan	024
2806	Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan	024
4277	Penataan Lingkungan Permukiman	033
4278	Penataan Bangunan dan Lingkungan	033
4279	Pembinaan Teknis Bangunan Gedung	033
4280	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)	033
4281	Peningkatan Lingkungan Perumahan Perkotaan (NUSSP)	033
7564	Fasilitasi dan Bantuan Teknis Penyusunan RP4D	091
7565	Pengembangan Sistem Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Alam	091
7566	Pembangunan dan Perbaikan Perumahan Nelayan & Perumahan Rakyat di Wilayah Perbatasan & Pulau2 Kecil	091
7567	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan	091
7568	Pengembangan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan Swadaya	091
7569	Penyusunan NSPM Perumahan Swadaya	091
7570	Pembangunan dan Perbaikan Perumahan Nelayan dan Perumahan Rakyat di Perbatasan dan Pulau Terpencil	091
7571	Bantuan Teknis Kredit Mikro Perumahan	091
7572	Peningkatan Akses kepada Kredit Mikro	091
7573	Pendataan Perumahan Swadaya	091
7574	Perkuatan Kelembagaan dan Jejaring Komunitas Perumahan Swadaya	091
7575	Pengembangan Lembaga Kredit Mikro untuk Perumahan Swadaya	091
4442	Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku	033
4443	Pembangunan Tampunguan untuk Air Baku	033
4444	Rehabilitasi Tampunguan untuk Air Baku	033
4445	Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku	033
4446	Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku	033
4447	Operasi dan Pemeliharaan Tampunguan untuk Air Baku	033
4282	Pembinaan Teknik Air Minum	033
4283	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Pengelolaan Sanitasi	033
4284	Umum dan Informasi	033
4285	Kajian Kebijakan dan Program	033
4286	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan	033



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
4287	Analisa Keuangan, Promosi dan Peluang Investasi	033
4288	Penanggulangan Darurat Air Minum dan Air Limbah	033
0688	Penyusunan Kebijakan Insentif Pendanaan Pembangunan di Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar	010
0689	Penegasan Status Hukum Segmen-Segmen Batas Darat dan Laut	010
0690	Penataan Tanda-Tanda Fisik dan Patok Perbatasan di Wilayah Perbatasan dengan Prioritas Wilayah Perbatasan	010
0691	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perbatasan	010
0692	Peningkatan Kerjasama Bilateral Bidang Poleksosbudhankam	010
0693	Penetapan Garis Batas Antarnegara di Darat dan Laut	010
3552	Penguatan SDM Pemda dan Masyarakat Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi di Perbatasan	026
3553	Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Pelaku, Sektor dim Rangka Pengemb. Kawasan Trans. di Wil. Perbatasan	026
3554	Penyediaan dan Pengel. Prasarana dan Sarana Sosial, Ekonomi di Kaw. Trans. di Wil. Perbatasan	026
3555	Penyediaan Lembaga Keuangan Daerah di Kaw. Trans. di Wil. Perbatasan	026
3556	Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Transmigrasi di Wil. Perbatasan	026
3557	Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigran di Wil Perbatasan	026
3558	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kaw. Transmigrasi di Wil. Perbatasan.	026
3559	Perencanaan Teknis Permukiman dan Perpindahan	026
3560	Penyediaan Tanah Transmigrasi di Wilayah Perbatasan	026
3561	Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Wil. Perbatasan	026
3562	Penyelenggaraan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi di Wil. Perbatasan	026
3563	Pembinaan Promosi, Investasi dan Kemitraan.	026
3564	Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan di Wil. Perbatasan	026
3565	Peningkatan Kapasitas SDM dan Masyarakat di Wil. Perbatasan	026
3566	Pengembangan Usaha di Wilayah Perbatasan	026
3567	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan di Wil. Perbatasan	026
3568	Penyerasian Lingkungan di Wil. Perbatasan	026
4289	Penyusunan Jakstra Pengembangan Kawasan Perbatasan	033
4290	Penyusunan NSPM Pengembangan Kawasan Perbatasan	033
4291	Penyusunan dan Penetapan RTRW Perbatasan	033
4292	Penyusunan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Perbatasan	033
4293	Pengembangan Kelembagaan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan	033
4294	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pengembangan Kawasan Berbatasan	033
6292	Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Perbatasan	067
6293	Koordinasi Upaya-Upaya Pengembangan Wilayah Perbatasan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Sumber	067
6294	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi di Wilayah Per	067
6295	Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP)	067
6321	Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Perbatasan	067
6322	Koordinasi Upaya-Upaya Pengembangan Wilayah Perbatasan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Sumber	067
6323	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi di Wilayah Per	067
6324	Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP)	067
7111	Pemetaan Batas Wilayah	083
0694	Pemberdayaan Pemda dalam Mendorong Penciptaan Kebijakan Iklim Investasi & Pengembangan Wilayah	010
0695	Pengembangan Kebijakan, Strategi, NSPM, dan Permodelan dalam Pelaksanaan Pembangunan	010
0696	Peningkatan Kualitas SDM Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Kawasan dan Klaster Unggulan.	010



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
0697	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Usaha.	010
0698	Fasilitasi Forum Sosialisasi, Promosi, Partisipasi Pelaku Usaha dan Masyarakat.	010
0699	Fasilitasi Pembangunan Wilayah Tertinggal	010
3569	Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi di Wil Strategis & Cepat Tumbuh	026
3570	Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor di Wil Strategis & Cepat Tumbuh	026
3571	Peningkatan Kualitas SDM Pemda dan Masyarakat Transmigrasi di Wil. Cepat Tumbuh	026
3572	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi di Wil Strategis & Cepat Tumbuh	026
3573	Penyediaan dan Pengel. Prasarana dan Sarana Wil. untuk Pengemb. Usaha Ekonomi Kaw. Transmigrasi	026
3574	Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah	026
3575	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Andalan dan Cepat Tumbuh	026
3576	Pemberian Insentif kepada Pelaku Usaha di Wil. Strategis dan Cepat Tumbuh	026
3577	Peningkatan Pembentukan Desa Swadaya di Permukiman Transmigrasi di Wil. Strategis dan Cepat Tumbuh	026
3578	Peningkatan Produk Unggulan Kawasan di Wil. Strategis dan Cepat Tumbuh	026
3579	Penyusunan Rencana Teknis Pemberdayaan dan Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh	026
3580	Perencanaan Teknis Permukiman dan Perpindahan di Wil. Strategis dan Cepat Tumbuh	026
3581	Penyediaan Tanah Transmigrasi di Wil. Strategis dan Cepat Tumbuh	026
3582	Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	026
3583	Penyelenggaraan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi di Wil. Strategis dan Cepat Tumbuh	026
3584	Perencanaan Teknis Pengemb. Masyarakat dan Kawasan di Wil. Strategis dan Cepat Tumbuh	026
3585	Peningkatan Kapasitas SDM dan Masyarakat di Kaw. Strategis dan Cepat Tumbuh	026
3586	Pengembangan Usaha di Kaw. Strategis dan Cepat Tumbuh	026
3587	Penyerasian Lingkungan di Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh	026
4295	Penyelenggaraan Manajemen Pengelolaan Kapet	033
4296	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan KESR	033
4297	Penyusunan Jakarta Pengembangan Kawasan Andalan	033
4298	Penyusunan NSPM Pengembangan Kawasan Andalan	033
4299	Penyusunan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Andalan	033
4300	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pengembangan Kawasan Andalan	033
4766	Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah	035
3588	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dan Masyarakat Transmigrasi di Wil. Tertinggal	026
3589	Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor di Wilayah Tertinggal	026
3590	Penyediaan Lembaga Keuangan Daerah di Kaw. Transmigrasi Wilayah Tertinggal	026
3591	Penyediaan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Permukiman Wil. dim Rangka Pengemb. Usaha Perekonomian	026
3592	Peningkatan Pembentukan Desa Swakarya di Permukiman Transmigrasi	026
3593	Penyusunan Rencana Kawasan Terpadu Mandiri (KTM)	026
3594	Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	026
3595	Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Transmigrasi di Wil. Tertinggal	026
3596	Penyusunan Rencana Teknis Pemberdayaan dan Pengembangan Kawasan Tertinggal	026
3597	Fasilitasi Dukungan Manajemen Ketransmigrasian Di Wilayah Tertinggal	026
3598	Penelitian dan Pengkajian Sosial Budaya dan Ekonomi Wilayah	026
3599	Perencanaan Teknis Permukiman dan Perpindahan di Wilayah Tertinggal	026
3600	Penyediaan Tanah Transmigrasi di Wilayah Tertinggal	026
3601	Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Wilayah Tertinggal	026
3602	Penyelenggaraan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi di Wilayah Tertinggal	026
3603	Pembinaan Promosi, Investasi dan Kemitraan di Wilayah Tertinggal	026



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
3604	Petrencaanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan di Wilayah Tertinggal	026
3605	Peningkatan Kapasitas SDM dan Masyarakat di Wilayah Tertinggal	026
3606	Pengembangan Usaha di Wilayah Tertinggal	026
3607	Pengembangan Prasarana dan Sarana Kawasan di Wilayah Tertinggal	026
3608	Penyerasian Lingkungan di Wilayah Tertinggal	026
4301	Penyiapan Jakstra Penataan Ruang pada Kawasan Tertinggal	033
4302	Penyiapan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Tertinggal	033
4303	Pengembangan Kelembagaan Penataan Ruang Kawasan Tertinggal	033
4304	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pengembangan Kawasan Tertinggal	033
6296	Penyusunan Kebijakan Insentif Pendanaan Melalui DAK bagi Pembangunan Wilayah Terisolir	067
6297	Peningkatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sosial Dasar Terutama Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan di Wil	067
6298	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Antar Stakeholder Pembangunan Daerah Terisolir	067
6299	Penyusunan Bahan Masukan Aspek Investasi, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, UMKM, Kemitraan Usaha dan Peng	067
6325	Penyusunan Kebijakan Insentif Pendanaan melalui DAK bagi Pembangunan Wilayah Terisolir	067
6326	Peningkatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sosial Dasar Terutama Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan di Wil	067
6327	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Antar Stakeholder Pembangunan Daerah Terisolir	067
6328	Penyusunan Bahan Masukan Aspek Investasi, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, UMKM, Kemitraan Usaha dan Peng	067
0700	Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan	010
0701	Penataan dan Revitalisasi Kawasan Kumuh di Perkotaan	010
0702	Fasilitas Penguatan Kelembagaan Komunitas dlm Penyediaan Perumahan secara Mandiri	010
0703	Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Kota Kembar (Sister City/ Province)	010
0704	Peningkatan Kapasitas Aparat Daerah & Pengelolaan Kota Besar & Metropolitan	010
0705	Fasilitasi Pengelolaan Persampahan di Perkotaan	010
4305	Penyiapan Jakstra Penataan Ruang pada Kota-Kota Besar dan Metropolitan	033
4306	Penyiapan Rencana Tindak Pengembangan Kota-Kota Besar dan Metropolitan	033
4307	Pengembangan Kelembagaan Penataan Ruang Kota-Kota Besar dan Metropolitan	033
4308	Konsep Pengembalian Fungsi Kawasan Perkotaan	033
4309	Penataan dan Pengembalian Fungsi Kawasan Perkotaan	033
4310	Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman di Kota Besar	033
4311	Pembangunan Prasarana Perdesaan di Desa Pusat Pertumbuhan	033
4312	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM	033
4313	Pembangunan Prasarana dan Sarana Kawasan Terpilih Pusat Pertumbuhan Desa (KTP2D)	033
6300	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM	067
6301	Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pembangunan Prasarana Perdesaan Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM	067
6329	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM	067
6330	Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pembangunan Prasarana Perdesaan Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM	067
0706	Penyusunan Standar Pelayanan Perkotaan	010
0707	Fasilitasi Penataan Perkotaan	010
0708	Fasilitasi Percepatan Penyediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Kecil & Menengah	010
0709	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah Kota	010
4314	Review Strategi Pembangunan Kota-Kota	033
4315	Pembinaan Penataan Kota	033
0710	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	010
0711	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	010
0712	Peningkatan Kapasitas Fasilitator Pembangunan Perdesaan	010



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
0713	Peningkatan Kapasitas Aparat Pemda & Masyarakat dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan	010
0714	Pemantapan Kelembagaan Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Pembangunan	010
0715	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan melalui Program Pengembangan Kecamatan	010
0716	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit Pengaduan Masyarakat	010
4316	Bantuan Teknis dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Pembangunan Perdesaan	033
6302	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	067
0717	Penyusunan Model Partisipasi Kelembagaan Masyarakat Perkotaan dalam Penataan Kawasan Kumuh	010
0718	Fasilitasi Pengembangan Sistem Infrastruktur Ibukota Pemekaran.	010
0719	Penataan Kawasan Perkotaan Ibu Kota Kabupaten Pemekaran/Kota.	010
0720	Pengembangan Partisipasi dan Kemitraan Stakeholders Dalam Pengelolaan Kawasan Perkotaan	010
0721	Fasilitasi, Penilaian dan Pemberian Penghargaan Kepada Daerah dalam Inovasi Manajemen Perkotaan	010
0722	Fasilitasi Perijinan Satu Atap di Perkotaan	010
0723	Fasilitasi Pengembangan Potensi dan Pertumbuhan Perkotaan	010
4317	Penyempurnaan NSPM Pengelolaan Kota Kecil Menengah	033
4318	Penataan Kelembagaan dalam Pengelolaan Perkotaan Kecil dan Menengah	033
2807	Peningkatan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	024
2808	Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan	024
2809	Peningkatan Keterjangkauan Harga Obat dan Perbekalan Kesehatan	024
2810	Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit	024
2811	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	024
2841	Penanggulangan Flu Burung (Program OPK)	024
4767	Peningkatan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	035
6051	Pengujian Laboratorium Sampel Obat, Kosmetika, Produk Komplemen, Makanan dan PKRT	063
6052	Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat, Kosmetika, Produk Komplemen, Makanan dan PKRT	063
6053	Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Zat Adiktif/Rokok, dan Bahan Berbahaya	063
6054	Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan	063
6055	Penyusunan Standar dan Pedoman Pengawasan Obat dan Makanan	063
6056	Penilaian Permohonan Pendaftaran Produk Obat, Kosmetika, Produk Komplemen dan Makanan	063
6057	Peningkatan Penyidikan dan Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan	063
6058	Peningkatan Pemberdayaan Konsumen	063
6059	Stimulasi Eksplorasi dan Fasilitasi Litbang Teknologi Produksi Tanaman Obat Bahan Alam Indonesia	063
6060	Pengembangan Standar Tanaman Obat Bahan Alam Indonesia	063
6061	Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga Penelitian dan Industri Terkait	063
6062	Peningkatan Promosi Obat Bahan Alam Indonesia	063
6063	Pengembangan Sistem dan Layanan Informasi Obat Asli Indonesia (OAI) Terpadu	063
2812	Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Miskin di Kelas III Rumah Sakit	024
2813	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	024
2814	Operasional & Pemeliharaan Penyelenggaraan Pelayanan Medik	024
2815	Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan	024
2838	Penanggulangan Flu Burung (Program UKP)	024
2852	Percepatan Peningkatan Pelayanan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi	024
2816	Pengembangan Promosi Kesehatan dan Teknologi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	024
2817	Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat	024
2818	Peningkatan Pendidikan Kesehatan kepada Masyarakat	024
2840	Penanggulangan Flu Burung (Program Promkes)	024
2819	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya	024
2820	Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya	024
2821	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	024
2822	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar	024



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
2839	Penanggulangan Flu Burung (Program UKM)	024
2846	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu	024
2847	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak	024
2850	Peningkatan Kesehatan Komunitas	024
2851	Peningkatan Kesehatan Kerja	024
2823	Pencegahan dan Penanggulangan Faktor Resiko	024
2824	Peningkatan Imunisasi	024
2825	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	024
2826	Penemuan dan Tatalaksana Penderita	024
2827	Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	024
2837	Penanggulangan Flu Burung (Program P2P)	024
2828	Peningkatan Pendidikan Gizi Masyarakat	024
2829	Penanggulangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat	024
2842	Penanggulangan Flu Burung (Program Gizi Masy.)	024
6354	Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB	068
6355	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	068
6356	Pelayanan KIE Program Keluarga Berencana	068
6357	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	068
6358	Peningkatan Kualitas Pelayanan KB	068
6359	Advokasi dan Kie Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	068
6360	Peningkatan Partisipasi Masyarakat KRR	068
6361	Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Mekanisme OPRS Lini Lapangan	068
6362	Pengembangan Jaringan dan Peningkatan Kie-Advokasi Program KB Nasional	068
6363	Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Penyediaan Data Informasi Program KB Nasional	068
6364	Pembinaan Keterpaduan Program KB di Daerah	068
		024
2843	Penanggulangan Flu Burung (Program Litbangkes)	024
2830	Penyelenggaraan/Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan	024
2831	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan	024
2832	Perencanaan dan Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan	024
2833	Penyusunan Standar Kompetensi dan Regulasi Profesi Kesehatan	024
2834	Peningkatan Pembiayaan Jaminan Kesehatan	024
2835	Penyelenggaraan Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan	024
2836	Penanggulangan Krisis	024
2844	Pengelolaan Administrasi dan Rumah Tangga Departemen	024
2845	Kajian Pembangunan Kesehatan	024
4861	Peningkatan Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa	040
4862	Peningkatan dan Pengaktualisasian Nilai-Nilai Tradisi	040
4863	Pengembangan Masyarakat Adat	040
4864	Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Nilai Budaya	040
4865	Pendukung Pengembangan Nilai Budaya Daerah	040
5704	Pemanfaatan Naskah Kuno Nusantara	057
5705	Penyediaan Bahan Pustaka	057
5706	Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan dan Informasi	057
5707	Pemasyarakatan Perpustakaan	057
5708	Penyusunan Literatur	057
		007
0505	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	007
4866	Pengembangan Nilai Sejarah	040
4867	Pengembangan Geografi Sejarah	040
4868	Pengelolaan Peninggalan Bawah Air	040



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
4869	Pengelolaan Peninggalan Kepurbakalaan	040
4870	Pengelolaan Permuseuman	040
4871	Pengembangan Pemahaman Kekayaan Budaya Daerah	040
4872	Pendukung Pengelolaan Museum Daerah	040
4873	Pendukung Pengembangan Kekayaan Budaya Daerah	040
4874	Optimalisasi Koordinasi Pengembangan Sejarah dan Purbakala	040
5709	Pelestarian Fisik Kandungan Bahan Pustaka dan Naskah Kuno	057
5710	Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pustaka	057
5711	Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam	057
5712	Peningkatan Layanan dan Kerjasama Perpustakaan	057
4875	Pengembangan dan Pelestarian Kesenian	040
4876	Pengembangan Perfilman Nasional	040
4877	Pengembangan Galeri Nasional	040
4878	Peningkatan Sensor Film	040
4879	Pendukung Pengelolaan Taman Budaya Daerah	040
4880	Pendukung Pengembangan Keragaman Budaya Daerah	040
4881	Optimalisasi Koordinasi Pengembangan Nilai Budaya, Seni dan Film	040
4882	Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan dan Kebangsaan Pusat	040
4883	Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri	040
4884	Peningkatan Promosi Pariwisata Ke Luar Negeri	040
4885	Pengembangan Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata	040
4886	Pengembangan Informasi Pasar Wisata	040
4887	Pendukung Pengembangan Kebijakan Pemasaran dan Promosi Pariwisata Daerah	040
4888	Optimalisasi Koordinasi Pelaksanaan Pemasaran Pariwisata	040
4889	Fasilitasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan	040
4890	Pengembangan Standardisasi Pariwisata	040
4891	Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata	040
4892	Pengembangan Usaha dan Investasi Pariwisata	040
4893	Pendukung Pengembangan Daya Tarik Pariwisata Daerah	040
4894	Perintisan Pengembangan Destinasi Pariwisata	040
4895	Optimalisasi Koordinasi Pembangunan Pariwisata	040
4896	Pengembangan Kebijakan SDM Kebudayaan dan Pariwisata Nasional	040
4897	Peningkatan Profesionalisme dan Daya Saing SDM Kebudayaan dan Pariwisata	040
4898	Peningkatan Litbang Kebudayaan	040
4899	Peningkatan Litbang Pariwisata	040
4900	Pengembangan Arkeologi Nasional	040
4901	Pendukung Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Kebudayaan dan Kepariwisata Daerah	040
4902	Optimalisasi Koordinasi Kemitraan Kebudayaan dan Pariwisata	040
7601	Peningkatan Keserasian Kebijakan Pemuda	092
3305	Peningkatan Dialog Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota, Regional, dan Nasional	025
3306	Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	025
3307	Perluasan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Bentuk-Bentuk Bahaya Destruktif serta Perilaku Negatif	025
3308	Peningkatan Partisipasi Pemuda (Jalur Agama)	025
6206	Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	066
7602	Peningkatan Dialog Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota, Regional, dan Nasional	092
7603	Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	092
7604	Perluasan Pengerahan Tenaga Terdidik untuk Pembangunan Perdesaan	092
7605	Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Bahaya Destruktif Lainnya	092
7606	Peningkatan Kepeloporan dan Kepemimpinan Pemuda	092
7607	Penyelenggaraan Kemitraan untuk Meningkatkan Kualitas dan Kemandirian Pemuda	092



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
7608	Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan	092
7609	Pengembangan Perencanaan Olah Raga Terpadu	092
7610	Pengkajian Implementasi Kebijakan Pembangunan Keolahragaan	092
7611	Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga	092
7612	Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah	092
7613	Pemasyarakatan dan Pembinaan Olahraga	092
7614	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Berdasarkan Cabang Olahraga Prioritas Daerah	092
7615	Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Prioritas di Tingkat Daerah, Nasional dan Internasional	092
7616	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	092
7617	Peningkatan Olahraga Masyarakat	092
7618	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Secara Teratur, Berjenjang dan Berkesinambungan	092
7619	Pengembangan Olah Raga Kelompok Khusus	092
7620	Pemberian Penghargaan dan Peningkatan Kesejahteraan Olahragawan dan Pelaku Olah Raga	092
7621	Peningkatan Kualitas Olah Raga dan Pelaku Olah Raga	092
7622	Pembinaan dan Pengembangan Industri Olah Raga	092
7623	Pembinaan Olahraga Yang Bersifat Nasional	092
7624	Pembinaan Olahraga Yang Bersifat Internasional	092
7625	Operasional KONI	092
7626	Peningkatan Kerjasama Pola Kemitraan Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana	092
0506	Mendokumentasikan Kegiatan Presiden Baik di Dalam maupun Luar Negeri	007
0724	Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga Informasi, Masyarakat dan Media	010
4319	Pembinaan Pendapat Umum dan Koordinasi Humas Antar Departemen/Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara	033
5780	Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga Informasi, Masyarakat dan Media	059
5781	Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	059
5782	Peningkatan Komunikasi Politik Penyelenggara Negara	059
5783	Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	059
7112	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Survei dan Pemetaan	083
		087
		090
3309	Pelayanan Tanah Wakaf dan Hibah	025
3310	Pembinaan Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh	025
3311	Penyelenggaraan Urusan Agama dan Bimas Kristen	025
3312	Penyelenggaraan Urusan Agama dan Bimas Katolik	025
3313	Penyelenggaraan Urusan Agama dan Bimas Budha	025
3314	Penyelenggaraan Urusan Agama dan Bimas Hindu	025
3315	Penyelenggaraan Urusan Agama Islam	025
3316	Penyelenggaraan Pengelolaan Zakat	025
3317	Pemberdayaan Wakaf Produktif	025
3318	Penyelenggaraan Pengkajian Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	025
3319	Pembinaan dan Pemberian Bantuan Tempat Ibadah	025
3320	Penyelenggaraan Informasi Pelayanan Kehidupan Beragama	025
3321	Penyelenggaraan Bimbingan dan Pembinaan Keagamaan	025
3322	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan Wabah (Jalur Agama)	025
3323	Pengadaan Peralatan Fungsional (Pelayanan Keagamaan)	025
3324	Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Balai Nikah	025
3325	Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Teknis Keagamaan dan Masyarakat	025
3326	Penyelenggaraan Atase Haji	025
3439	Pelayanan Pelaksanaan Ibadah Haji (Biaya Tidak Langsung)	025
3327	Pengelolaan Zakat/Dana Punia/Gita Sukaya/Kolekte	025
3328	Pemberdayaan Wakaf Produktif Keagamaan	025
3329	Penyelenggaraan Kegiatan Agama Budha	025



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
3330	Penyelenggaraan Informasi Nilai Nilai Keagamaan	025
3331	Penyelenggaraan Dakwah Agama dan Pemberdayaan Tempat Ibadah	025
3332	Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Teknis Keagamaan	025
3333	Penyelenggaraan Kegiatan Agama Kristen	025
3334	Penyelenggaraan Kegiatan Agama Katolik	025
3335	Penyelenggaraan Kegiatan Agama Hindu	025
3336	Penyelenggaraan Kegiatan Agama Islam	025
3337	Bantuan Sosial dan Lembaga Sosial Keagamaan	025
3338	Internalisasi Ajaran Agama dan Sosialisasi Wawasan Multikultural Kalangan Umat Beragama	025
3339	Pembangunan Hubungan Antar Umat Beragama, Majelis Agama dengan Pemerintah	025
3340	Pendirian dan Pembinaan Sekretariat Bersama Antar Umat Beragama	025
3341	Rekonsiliasi Tokoh-Tokoh Agama dan Pembinaan Umat Beragama pada Daerah Pasca Konflik	025
3342	Pengadaan Peralatan Fungsional Daerah Konflik	025
3343	Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Teknis dan Masyarakat Daerah Konflik	025
3344	Penyelenggaraan Pengkajian Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	025
3345	Identifikasi dan Perumusan Indikator Kinerja Pembangunan Bidang Agama	025
3346	Pengembangan Hasil-Hasil Penelitian (Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama)	025
3347	Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan	025
3348	Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren	025
3349	Pembinaan dan Pemberian Bantuan Sosial Keagamaan Masyarakat	025
3350	Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren	025
3351	Penyelenggaraan Pendidikan Pada Masyarakat, Bantuan Kepada Pontren, dan Bantuan Orsos Keagamaan/LSM Keagamaan	025
3352	Pengadaan Peralatan Fungsional, Peralatan Kesehatan, dan Sanitasi Lingkungan Pondok Pesantren	025
3353	Bantuan Lembaga Sosial Keagamaan Pondok Pesantren	025
2302	Peningkatan Manajemen Sekolah Dasar	023
2303	Pengembangan Sistem dan Standar Pengelolaan TK	023
2304	Perluasan dan Peningkatan Mutu TK	023
2305	Pemberian Bantuan Operasional PAUD	023
2306	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	023
2307	Perencanaan dan Penyusunan Program PAUD	023
3354	Pembangunan Sarana dan Prasarana RA/BA	025
3355	Pemberian Bantuan Operasional PAUD	025
3356	Pengembangan PAUD	025
3357	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	025
3358	Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama PAUD	025
3359	Penyelenggaraan Bimbingan dan Pembinaan Keagamaan	025
3360	Pengadaan Peralatan Fungsional Alat Peraga Keagamaan	025
3361	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	025
2315	Peningkatan Mutu dan Profesionalisme Guru (Program Wajar)	023
2316	Pengembangan dan Peningkatan Institusi Penjamin Mutu Pendidikan	023
2317	Pengembangan dan Peningkatan Mutu Institusi Pengembang Penataran Guru Pendidikan Menengah	023
2318	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	023
2319	Pengembangan Sekolah dengan Standar Nasional dan Internasional	023
2320	Peningkatan Mutu Pembelajaran (Dikdasmen)	023
2321	Desentralisasi Peningkatan Pendidikan Dasar (ADB)	023
2322	Pengembangan SMP Terbuka dan Pendidikan Alternatif	023
2323	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	023
2324	Pembinaan Kesiswaan	023
2325	Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP	023
2326	Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar	023



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
2327	Pembinaan Teknis Bangunan Gedung Sekolah Dasar	023
2328	Peningkatan Olah Raga Sekolah Dasar	023
2329	Pengembangan Sistem dan Standar Pengelolaan Sekolah Dasar	023
2330	Pengembangan Sekolah Dasar Terpencil	023
2331	Perluasan dan Peningkatan Mutu Sekolah Dasar	023
2332	Peningkatan Mutu Pelajaran IPA (SEQIP)	023
2333	Pemberian Beasiswa Sekolah Dasar	023
2334	Pengembangan Pendidikan Berorientasi Keterampilan Hidup Sekolah Dasar	023
2335	Pengembangan Sistem dan Standar Pengelolaan Pend. Khusus dan Pend. Layanan Khusus (Tingkat Dasar)	023
2336	Perluasan dan Peningkatan Mutu Pend. Khusus dan Pend. Layanan Khusus (Tingkat Dasar)	023
2337	Pendidikan Terpadu Pend. Khusus dan Pend. Layanan Khusus (Tingkat Dasar)	023
2338	Pengembangan Pendidikan Berorientasi Keterampilan Hidup PK Dan PLK (Tingkat Dasar)	023
2339	Pelayanan Pendidikan Korban Narkoba dan HIV AIDS (Tingkat Dasar)	023
2340	Penyelenggaraan Pengkajian Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	023
2341	Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan dan Budi Pekerti	023
2342	Pembinaan Pendidikan Agama dan Akhlak Mulia	023
2343	Pembinaan Pendidikan Estetika	023
2344	Pengkajian Otonomi Dikdasmen	023
2345	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	023
2346	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	023
2347	Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran Menggunakan Teknologi Infokom	023
2348	Penyelenggaraan Pembinaan Perbukuan	023
2349	Pengembangan Akreditasi Sekolah Dasar	023
2350	Pengembangan Sekolah dengan Standar Nasional dan Internasional	023
3362	Pemberian Bea Siswa Bagi Siswa Miskin Jenjang MI & MTs	025
3363	Pengadaan Buku Pelajaran MI/MTs	025
3364	Pembangunan Perpustakaan Untuk MTs	025
3365	Penyelenggaraan Pendidikan Alternatif	025
3366	Penyelenggaraan Kegiatan Wajar Dikdas 9 Tahun pada Agama Budha	025
3367	Penyelenggaraan Kegiatan Wajar Dikdas 9 Tahun pada Agama Hindu	025
3368	Penyediaan Bea Siswa bagi Anak Putus Sekolah	025
3369	Penyediaan Bea Siswa bagi Anak Yang Belum Pernah Sekolah untuk Masuk MI/Paket A	025
3370	Penyediaan Bea Siswa Lulusan MI/Paket A untuk Melanjutkan Ke Jenjang MTs/Paket B	025
3371	Pembangunan Unit Sekolah Baru MI/MTs	025
3372	Penambahan Ruang Kelas Baru MI/MTs	025
3373	Penyediaan Biaya Operasional MI/MTs	025
3374	Penyelenggaraan Kegiatan Wajar Dikdas 9 Tahun pada MI/MTs	025
3375	Penyelenggaraan Kegiatan Wajar Dikdas 9 Tahun pada Pondok Pesantren	025
3376	Penyelenggaraan Kegiatan Wajar Dikdas 9 Tahun pada Agama Kristen	025
3377	Penyelenggaraan Kegiatan Wajar Dikdas 9 Tahun pada Agama Katolik	025
3378	Penyelenggaraan Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Pendidikan MI,MTs dan MAN	025
3379	Pembinaan Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum	025
3380	Penyelenggaraan Pembibitan Tenaga Kependidikan	025
3381	Pembinaan dan Pemberian Bantuan Kependidikan/Sosial Keagamaan	025
3382	Penyelenggaraan Pengembangan Ketenagaan dan Kesiswaan	025
3383	Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Tenaga Kependidikan	025
3384	Penyelenggaraan Pendidikan Informasi Pendidikan Dasar Yang Memadai	025
3385	Penyediaan Block Grant Peningkatan Mutu MI dan MTs (BOMM)	025



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
3386	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pendidikan MI/MTs	025
3387	Bantuan Pembangunan untuk MI/MTs	025
2351	Peningkatan Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Kependidikan	023
2352	Pengelolaan Pembinaan SMA	023
2353	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	023
2354	Pengembangan Keilmuan dan Penelitian	023
2355	Pengembangan Rintisan Sekolah Menengah	023
2356	Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA	023
2357	Pembinaan Kreatifitas Siswa	023
2358	Pengembangan Sistem dan Standar Pengelolaan SMK	023
2359	Pengembangan Sistem Evaluasi dan Kerja Sama Antar Institusi	023
2360	Pengembangan Penilaian dan Akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan	023
2361	Peningkatan Bakat dan Prestasi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan	023
2362	Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan	023
2363	Peningkatan Pemberdayaan Sekolah Menengah Kejuruan	023
2364	Rehabilitasi Gedung Sekolah Menengah	023
2365	Pembinaan Teknis Bangunan Gedung Sekolah Menengah	023
2366	Pengembangan Sistem dan Standar Pengelolaan Pend. Khusus dan Pend. Layanan Khusus (Tingkat Menengah)	023
2367	Perluasan dan Peningkatan Mutu Pend. Khusus dan Pend. Layanan Khusus (Tingkat Menengah)	023
2368	Pendidikan Terpadu Pend. Khusus dan Pend. Layanan Khusus (Tingkat Menengah)	023
2369	Pengembangan Pendidikan Berorientasi Keterampilan Hidup PK dan PLK (Tingkat Menengah)	023
2370	Pelayanan Pendidikan Korban Narkoba dan HIV AIDS (Tingkat Menengah)	023
2371	Pembangunan Pendidikan Daerah Bencana Alam dan Kerusakan	023
2372	Pengembangan Sekolah Berwawasan Lingkungan	023
2373	Pembangunan Pendidikan Daerah Khusus dan Perbatasan	023
2374	Pembinaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah	023
2375	Beasiswa Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif	023
3388	Pemberian Bea Siswa Bagi Siswa Miskin Jenjang MA	025
3389	Penambahan Ruang Kelas Baru MA	025
3390	Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) untuk MA	025
3391	Penyediaan Beasiswa Jenjang MA Bagi Keluarga Tidak Mampu	025
3392	Penyediaan Buku Pelajaran untuk MA	025
3393	Rehabilitasi MA	025
3394	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	025
3395	Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Proses Belajar dan Mengajar di MA	025
3396	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Menengah	025
3397	Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	025
3398	Penyelenggaraan Kegiatan dan Usaha pada Madrasah Aliyah	025
3399	Pembinaan MA dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum Tingkat Menengah	025
3400	Pembangunan Gedung Pendidikan	025
3401	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah pada Agama Kristen	025
3402	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah pada Agama Katolik	025
3403	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah pada Agama Hindu	025
3404	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah pada Agama Budha	025
3405	Bantuan Pembangunan Untuk MA	025
2376	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	023
2377	Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	023



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
2378	Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	023
2379	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	023
2380	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	023
2381	Pengembangan Pendidikan Kesetaraan	023
2382	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal	023
2383	Pengembangan Sertifikasi Pendidikan Non Formal	023
3406	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	025
3407	Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	025
3408	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal	025
3409	Penyelenggaraan Kursus dan Magang	025
0725	Evaluasi dan Pemantauan Penyelenggaraan Pendidikan	010
0726	Pengembangan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	010
0727	Penyelenggaraan Laboratorium	010
0728	Penyelenggaraan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pendidikan Kedinasan	010
0729	Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Lembaga Pendidikan Kedinasan	010
0730	Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan Kedinasan	010
0731	Pengembangan Standar Pendidikan Kedinasan Sesuai Standar Profesi	010
0732	Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Kedinasan	010
1268	Penyelenggaraan Pendidikan Ilmu Pemasarakatan	013
1269	Penyelenggaraan Pendidikan Ilmu Keimigrasian	013
1403	Penyelenggaraan Kegiatan dan Usaha Pendidikan Tinggi	015
		018
		020
2278	Pengadaan Sarana Latih Transportasi	022
		024
		027
		029
4320	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	033
4321	Pendidikan Penjurangan Struktural	033
4322	Evaluasi dan Pemantauan Penyelenggaraan Pendidikan	033
4323	Penyelenggaraan Pengembangan SDM dan Kelembagaan	033
4324	Rintisan Pendidikan Non Gelar	033
5065	Pendidikan dan Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup	043
5410	Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Tinggi Intelijen Negara	050
5453	Penyelenggaraan Pendidikan STSN	051
5666	Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional	056
6925	Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi Nuklir	080
7260	Penyelenggaraan Pengembangan SDM dan Kelembagaan	086
2308	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi	023
2309	Penyediaan Beasiswa	023
2310	Peningkatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	023
2311	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Unit Dasar Perguruan Tinggi	023
2312	Penyediaan Biaya Operasional Perguruan Tinggi	023
2313	Penyediaan Bahan Bacaan dan Operasional Perpustakaan	023
2314	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi	023
2384	Peningkatan Kerjasama Perguruan Tinggi dengan Instansi Lainnya	023
2385	Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan	023
2386	Pembinaan Ketenagaan Perguruan Tinggi dan Pendidikan Tenaga Kependidikan	023
2387	Pembinaan Institusi dan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	023
2388	Peningkatan Manajemen Pendidikan Tinggi	023
2389	Pengembangan Pendidikan Profesional dan Keahlian	023



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
2390	Pengembangan Relevansi dan Efisiensi Pendidikan Tinggi	023
2391	Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan	023
2392	Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi	023
2541	Peningkatan Kualitas SDM Pendidikan Tinggi	023
3410	Peningkatan Intensitas Penelitian	025
3411	Pengembangan Manajemen Sistem dan Informasi Perguruan Tinggi	025
3412	Penyediaan Insentif Dosen dan Tenaga Kependidikan	025
3413	Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa dan Dosen PTA	025
3414	Peningkatan Pelayanan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	025
3415	Pengembangan Manajemen Pendidikan Tinggi	025
3416	Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan PTA	025
3417	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan PTA	025
3418	Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga PTA	025
3419	Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Tinggi Agama	025
3420	Pembinaan Kerjasama Pendidikan Tinggi Luar Negeri	025
3421	Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Pendidikan	025
3422	Pembangunan Gedung Pendidikan Tinggi Agama	025
3423	Penyelenggaraan Kerjasama Internasional Program Pendidikan Tinggi	025
3424	Penataan, Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Jurusan dan Program Studi Perguruan Tinggi	025
3425	Penyediaan Beasiswa untuk Mahasiswa Miskin dan Beasiswa Prestasi	025
4325	Penyelenggaraan Kegiatan dan Usaha Pendidikan Tinggi	033
2394	Peningkatan Mutu dan Profesionalisme Guru (Program PMPTK)	023
2395	Pengembangan dan Peningkatan Institusi Penjamin Mutu Pendidikan (Program PMPTK)	023
2396	Pengembangan dan Peningkatan Mutu Institusi Pengembang Penataran Guru Pendidikan Menengah (Program PMPTK)	023
2397	Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik	023
2398	Peningkatan Mutu Profesi Pendidik Pendidikan Dasar dan Luar Biasa	023
2399	Peningkatan Mutu Profesi Pendidik Pendidikan Menengah	023
2400	Peningkatan Penghargaan dan Perlindungan Profesi Pendidik	023
2401	Peningkatan Mutu Layanan Ketatausahaan Profesi Pendidik	023
2402	Perencanaan dan Pengendalian Program Tenaga Kependidikan	023
2403	Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Luar Biasa	023
2404	Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah	023
2405	Peningkatan Mutu Layanan Ketatausahaan Tenaga Kependidikan	023
2406	Perencanaan dan Pengendalian Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal	023
2407	Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal	023
2408	Peningkatan Penghargaan dan Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal	023
2409	Peningkatan Mutu Layanan Ketatausahaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal	023
2410	Peningkatan Mutu Perencanaan dan Pengendalian Program Pembinaan Diklat	023
2411	Peningkatan Mutu Pengembangan Program Diklat	023
2412	Peningkatan Mutu Pengembangan SDM dan Lembaga Diklat	023
2413	Peningkatan Mutu Pengembangan Sarana Lembaga Diklat	023
2414	Peningkatan Mutu Layanan Ketatausahaan Pembinaan Diklat	023
3426	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Tenaga Kependidikan	025
3427	Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	025
2415	Peningkatan Perpustakaan Sekolah dan Pelajaran Sastra	023
2416	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	023
2417	Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Di Daerah	023
2450	Pembinaan Bahasa Nasional	023



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
5713	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	057
5714	Supervisi/Pembinaan/Stimulasi Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah	057
2419	Peningkatan Mutu Pendidik Pendidikan Non Formal	023
2420	Peningkatan Manajemen Dikdasmen	023
2421	Pengembangan Sistem Pendidikan Jarak Jauh Melalui Televisi Pendidikan	023
2422	Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Semua (PUS/EFA)	023
2423	Penyelenggaraan Pembinaan Grafika dan Penerbitan	023
2427	Penyelenggaraan Manajemen Pembinaan Perbukuan	023
2428	Pengembangan Pendidikan Jarak Jauh	023
2429	Peningkatan Kesegaran Jasmani Kecakapan Hidup dan Rekreasi	023
2430	Penyelenggaraan Efisiensi Perencanaan Pendidikan (Dekonsentrasi)	023
2431	Peningkatan Efisiensi Perencanaan Dana Dekonsentrasi	023
2432	Pengembangan, Penyelenggaraan dan Pembinaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	023
2433	Pengkajian, Penyusunan dan Pengembangan Pendidikan Keterampilan Hidup dan Pendidikan Kesehatan	023
2424	Pengembangan Multimedia Pendidikan	023
2425	Pengembangan Media Radio Pendidikan	023
2426	Pengembangan Media Televisi Pendidikan	023
2446	Pembinaan, Pengembangan Kegrafikaan dan Pendidikan	023
2447	Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Masyarakat	023
2448	Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Pendidikan	023
3428	Pembinaan Komite Sekolah dalam Pengelolaan Sumber Daya Pendidikan	025
3429	Pengembangan Pendidikan Untuk Semua	025
3430	Penyelenggaraan Pendidikan Agama Budha	025
3431	Pembinaan Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum	025
3432	Penyelenggaraan Pendidikan Agama Hindu	025
3433	Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat serta Pemberdayaan Masjid	025
3434	Penyelenggaraan Pendidikan Agama Katolik	025
3435	Penyelenggaraan Pendidikan Agama Kristen	025
3436	Peningkatan Mutu Madrasah Swasta dan Lembaga Pendidikan Keagamaan	025
3437	Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Madrasah	025
3438	Pemberian Bantuan Sarana, Peralatan, Buku Pelajaran Agama, Buku Bacaan Bernuansa Agama Lainnya	025
2434	Pengembangan Inovasi Proses Belajar Mengajar	023
2435	Pengembangan Sistem Pengujian pada Jalur Formal dan Non Formal	023
2436	Penyempurnaan, Desiminasi dan Pemantauan Implementasi Kurikulum	023
2437	Survei/Pemantauan Pemerataan Mutu Pendidikan	023
2438	Pengembangan Jarlit Lintas Sektor, Wilayah, Perguruan Tinggi	023
2439	Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Pendidikan Nasional	023
2440	Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian Pendidikan Nasional	023
2441	Pengembangan Inovasi Proses Belajar Mengajar	023
2442	Pengembangan Sistem Pengujian Jalur Formal dan Informal	023
2443	Pengembangan Jarlit Lintas Sektor/Wilayah/Unit Organisasi dan Semua Jenjang Pemerintahan	023
7202	Pemberdayaan Keluarga Miskin	027
7203	Pemberdayaan Fakir Miskin	027
7204	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	027
6303	Pemberdayaan Keluarga, Fakir Miskin Melalui Pelatihan Bimbingan Motivasi, Pelatihan Keterampilan Usaha Da	067
5251	Penyusunan Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KPA)	047
5252	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan KPAI	047



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
5253	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan KPA	047
5254	Penyusunan Materi dan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Anak, Perempuan, Gender	047
5255	Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan Anak dan Perempuan	047
5256	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Anak dan Perempuan	047
6613	Penyusunan Materi dan Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan	074
6614	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Tingkat Nasional, Prov	074
6368	Peningkatan Akses Informasi, Pembinaan Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	068
6365	Intensifikasi Advokasi dan KIE Program KB Nasional	068
6366	Peningkatan Kemampuan Tenaga Pengelola Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	068
6367	Peningkatan Akses Informasi dan Pelayanan Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	068
		005
		006
		013
2444	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	023
2445	Penyusunan Kebijakan PUG Pendidikan	023
		027
5226	Koordinasi dan Pengembangan Jejaring Kemitraan Antarlembaga Masyarakat	044
5257	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anak (PUA)	047
5258	Penyusunan Kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Anak	047
5259	Penyusunan Data Gender dan Anak	047
5260	Koordinasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	047
5261	Fasilitasi Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	047
6615	Koordinasi dan Pengembangan Jejaring Kemitraan Antarlembaga Masyarakat	074
6616	Sosialisasi tentang Perlindungan terhadap Wanita dan Anak	074
5262	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	047
5263	Penyusunan Kebijakan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	047
5264	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan KHPP	047
7205	Peningkatan Pelayanan/Rehabilitasi dan Perlindungan Anak	027
7206	Pelayanan/Rehabilitasi dan Perlindungan Penyandang Cacat	027
7207	Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	027
7208	Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak	027
7209	Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	027
7210	Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat	027
7211	Peningkatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial Lansia	027
7212	Pengembangan Kelembagaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	027
6207	Peningkatan Terapi dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba	066
		027
7213	Penyediaan Bantuan Dasar dan Fasilitas Tanggap Darurat	027
7214	Penyediaan Bantuan Stimulan Bahan Bangunan Rumah bagi Korban Bencana	027
7215	Penyiapan Bantuan bagi Daerah Penerima Pengungsi dan Pekerja Migran Bermasalah	027
7216	Pemberian Bantuan bagi Korban Tindak Kekerasan	027
7217	Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin, Penduduk Daerah Kumuh dan PMKS Lainnya	027
7218	Penyusunan dan Penetapan Standardisasi dan Akreditasi Pelayanan Kesejahteraan	027
7219	Pelaksanaan Pengkajian, Penelitian, Pelatihan dan Pendidikan Manajemen Pelayanan Kesejahteraan Sosial	027
		036
4801	Koordinasi Pengembangan/Pembangunan Kebijakan Kesra	036
4802	Bantuan Kesejahteraan Rakyat	036



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	NAMA KEGIATAN	DEPT
7220	Penyempurnaan Kebijakan Bantuan Sosial bagi Penduduk Miskin dan Rentan	027
7221	Pengembangan Model Kelembagaan Bentuk - Bentuk Kearifan Lokal Perlindungan Sosial	027
7222	Peningkatan Kerjasama Kelembagaan dan Dunia Usaha	027
7223	Pemberdayaan Organisasi Sosial	027
7224	Pemberdayaan Kerja Sosial Masyarakat Pelestarian dan Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan	027
7225	Sosial	027
7226	Pemberdayaan Karang Taruna	027
7227	Pengembangan Wahana Kesos Berbasis Masyarakat	027



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR KODE SUBKEGIATAN

KODE	NAMA SUBKEGIATAN
0001	Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi
0002	Administrasi Kegiatan
0003	Pembuatan Buku Literatur
0004	Penerbitan Majalah/Jurnal
0005	Pembuatan Leaflet/Poster
0006	Penerbitan Peraturan Perundang-undangan, Penempatan dalam Berita Negara/Lembaran Negara & Penyebarannya
0007	Penyusunan Naskah Buku Lainnya
0008	Pengadaan Kitab Suci dan Buku Agama Lainnya
0009	Pengadaan Buku-buku Perpustakaan
0010	Pengadaan Buku Lainnya
0011	Pendidikan dan Pelatihan Struktural
0012	Pendidikan dan Pelatihan Teknis
0013	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
0014	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
0015	Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat
0016	Pendidikan/Pengajaran/Perkuliahhan (Termasuk Penyelenggaraan Praktek)
0017	Penyusunan Kurikulum/Sylabus Pendidikan dan Pelatihan
0018	Rintisan Pendidikan Gelar
0019	Rintisan Pendidikan Non Gelar
0020	Pelatihan dan Penataran Instruktur
0021	Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja
0022	Pendidikan ABRI
0023	Pelatihan Kewirausahaan
0024	Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh/Uang Makan PNS
0025	Pemeriksaan Kesehatan Resiko Pekerja
0026	Poliklinik/Obat-obatan (Termasuk Honorarium Dokter dan Perawat)
0027	Biaya Pemakaman
0028	Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan
0029	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian
0030	Penyusunan Sistem Informasi Pendayagunaan Aparatur Negara
0031	Pengembalian Sumpah Jabatan Pejabat Negara
0032	Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai
0033	Pengadaan Pakaian Dinas Presiden, Wapres, Menteri, Ketua Lembaga, Pejabat Negara
0034	Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Perawat/Dokter/Satpam/Tenaga Teknis Lainnya
0035	Penelitian dan Pengembangan Hukum
0036	Penelitian Pengembangan Karya Ilmiah/Seminar/Iptek dan Seni
0037	Penelitian Pengembangan Bidang Sosial dan Ekonomi
0038	Pengembangan Design Komputer
0039	Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan/Perkuliahhan, Kurikulum dan Pola Ilmiah Pokok
0040	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
0041	Survey, Pemetaan, Master Plan, Studi Kelayakan dan Penatagunaan Tanah
0042	Penyelenggaraan Laboratorium
0043	Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi (SJDI) Hukum
0044	Penelitian Produk/Teknik Produksi
0045	Penelitian Peralatan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN SUB KEGIATAN
0046	Penelitian Ilmu Pengetahuan Dasar
0047	Penelitian Penguasaan Teknologi
0048	Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan
0049	Studi Kelayakan
0050	Penyusunan/Pengumpulan/Pengolahan/Updating/Analisa Data dan Statistik
0051	Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program
0052	Penyusunan/Perumusan Sistem dan Prosedur Teknis
0053	Penyusunan Master Plan
0054	Penyusunan Detail Desain
0055	Pendaftaran dan Seleksi
0056	Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan
0057	Pembinaan dan Evaluasi Hasil-hasil Pemeriksaan (LHP) dan Tindak Lanjut
0058	Pembinaan Mental dan Agama/Perguruan/Jurusan Agama
0059	Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan
0060	Eksposisi dan Pemetaan Visual
0061	Penyelenggaraan Humas dan Protokol
0062	Pameran/Visualisasi/Publikasi dan Promosi
0063	Pembuatan/Pemutaran Film/Slide
0064	Pergelaran/Pertunjukan/Pementasan Seni
0065	Penyuluhan dan Penyebaran Informasi
0066	Pembudayaan dan Pemasyarakatan
0067	Promosi Dagang, Industri dan Investasi
0068	Promosi Pariwisata
0069	Promosi Minat Keilmuan
0070	Bantuan Delegasi RI Ke Sidang Internasional
0071	Bantuan Hukum/Saksi/Penterjemah/Biaya Pengacara/Penyelesaian Perkara Hukum
0072	Bantuan Tugas Belajar dan Penyaringan Calon Mahasiswa
0073	Bantuan Penunjang Kegiatan/Akomodasi Pimpinan dan Anggota DPR
0074	Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR
0075	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif
0076	Bantuan untuk Orsos/Yayasan/LSM
0077	Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan
0078	Bantuan Sarana Peribadatan
0079	Bantuan Beasiswa
0080	Pemberian Subsidi
0081	Bantuan Penanggulangan Kemiskinan
0082	Dengar Pendapat Dengan Organisasi/Lembaga/Tokoh Masyarakat
0083	Evaluasi dan Pemantauan Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan
0084	Evaluasi/Laporan Kegiatan
0085	Penyelenggaraan Ceramah/Diskusi/Seminar/Sarasehan
0086	Penyelenggaraan Sidang/Konferensi Internasional di Dalam/Luar Negeri
0087	Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu
0088	Rapat-rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan Kelompok Kerja/Konsultasi
0089	Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah/Swasta/Lembaga Terkait
0090	Administrasi/Persiapan Bantuan Teknik Luar Negeri
0091	Penatausahaan, Pembukuan Verifikasi & Pelaksanaan Anggaran
0092	Penelitian Klasifikasi, Registrasi, Penerapan Sistem Kearsipan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN SUB KEGIATAN
0093	Pengawetan Buku-buku Peraturan/Pemeliharaan/Perawatan Buku & Peralatan Perpustakaan
0094	Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi
0095	Iklan/Pengumuman/Pemberitahuan
0096	Iuran Organisasi Lokal/Internasional
0097	Biaya Perijinan Langganan Ssb/Radio/Penyelenggaraan Frekuensi/CCTV
0098	Retribusi Listrik, Telepon, Gas dan Air (Ltga)
0099	Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit
0100	Dies Natalis/Wisuda
0101	Pemberian Tanda Jasa/Penghargaan/Kehormatan
0102	Penyelenggaraan Kegiatan Upacara Kenegaraan
0103	Penyelenggaraan Lomba, Sayembara dan Festival
0104	Kesekretariatan dan Kerja Sama Luar Negeri
0105	Pas Pelabuhan Laut/Udara dan Jasa Tol Tamu Negara
0106	Pengurusan Visa/Paspor
0107	Representasi/Pelayanan/Pengawasan Pimpinan
0108	Pengepakan/Pengiriman/Pengangkutan Barang
0109	Operator Radio
0110	Tindak Lanjut Po Box dan Pemeriksaan Serentak
0111	Sekretariat Asosiasi/Kelembagaan Formal
0112	Khusus Ketua Lembaga Tertinggi Negara
0113	Pemberantasan Korupsi
0114	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum
0115	Pemberian Status Badan Hukum/Hak Paten
0116	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
0117	Perencanaan/ Implementasi/ Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah
0118	Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
0119	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan
0120	Analisis/Pengkajian Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana
0121	Pengawasan/Supervisi Konstruksi
0122	Uji Coba Produk/Proses Produksi
0123	Uji Coba Peralatan
0124	Uji Coba Perangkat Konstruksi
0125	Uji Coba Perangkat Lunak
0126	Perekayasaan Produk/Proses Produksi
0127	Perekayasaan Peralatan
0128	Perekayasaan Perangkat Konstruksi
0129	Perekayasaan Perangkat Lunak
0130	Survei Bidang Industri
0131	Survei Bidang Pertanian
0132	Survei Pengairan
0133	Survei Bidang Perdagangan
0134	Survei Transportasi
0135	Survei Bidang Jasa dan Pariwisata
0136	Survei Penggunaan Energi
0137	Survei Bidang Kependudukan
0138	Survei Pertambangan
0139	Survei Iptek



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN SUB KEGIATAN
0140	Survei Kelautan/Kedirgantaraan
0141	Survei Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
0142	Survei Bidang Sosial Ekonomi
0143	Survei Kesehatan
0144	Survei Bidang Hukum
0145	Survei Bidang Politik Pertahanan & Keamanan
0146	Survei Bidang Kearsipan
0147	Survei Geologi
0148	Pengembangan Usaha Ekonomi
0149	Pengembangan Kelembagaan
0150	Pembinaan Peranan Wanita
0151	Pembinaan Generasi Muda
0152	Pengembangan Usaha Tani
0153	Pelayanan Sosial Budaya Daerah Pemukiman Trans
0154	Peningkatan Mutu Pendidikan
0155	Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri
0156	Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil
0157	Pembinaan Tenaga Penggerak Pedesaan
0158	Pengembangan Kawasan Kelautan dan Perikanan
0159	Pengadaan Sarana Produksi
0160	Pengadaan Obat-obatan/Vaksin
0161	Pengadaan Perlengkapan Penanggulangan Bencana
0162	Pembangunan Gedung Kantor
0163	Pembangunan Rumah Negara
0164	Pembangunan Gedung Kesehatan
0165	Pembangunan Gedung Pendidikan
0166	Pembangunan Gedung Khusus
0167	Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Gedung
0168	Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Bersih/Limbah
0169	Peningkatan Prasarana dan Sarana Persampahan
0170	Pembangunan/Peningkatan Waduk/Bendungan/Embung/Bendung
0171	Pembuatan Bangunan Pengendali Sedimen
0172	Pembangunan Dermaga
0173	Pembangunan Terminal/Shelter
0174	Pembangunan Gudang/Lapangan Penumpukan Barang
0175	Pembangunan/Peningkatan Landasan
0176	Pembangunan Fasilitas Keselamatan Penerbangan
0177	Pembangunan Fasilitas Keselamatan LLJ
0178	Pembangunan Fasilitas Keselamatan Pelayaran
0179	Pembangunan Stasiun Meteorologi dan Geofisika
0180	Pembangunan Prasarana Pengendalian Air
0181	Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai
0182	Pembangunan Pasar/Waserda
0183	Pembangunan Stasiun Bumi/Peluncuran
0184	Pembangunan Rumah dan Fasilitas Umum Transmigrasi
0185	Pembangunan Fasilitas Operasional Pelabuhan
0186	Pembangunan Gardu Induk/Distribusi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN SUB KEGIATAN
0187	Pembangunan Pusat Pengatur Beban
0188	Pembangunan Fasilitas Pariwisata, Seni, dan Budaya
0189	Pembangunan Pembangkit Listrik
0190	Pembangunan Jalan Arteri
0191	Pembangunan Jalan Kolektor
0192	Pembangunan Jalan dan Jembatan Lokal
0193	Pembangunan Jalan Inspeksi
0194	Peningkatan Jalan Arteri
0195	Peningkatan Jalan Kolektor
0196	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kereta Api
0197	Pembangunan/Peningkatan Saluran Air & Jaringannya
0198	Pembangunan Jaringan Drainase
0199	Pembangunan Jaringan Penyediaan Air Bersih
0200	Pembangunan Jaringan Pembuangan Air Limbah
0201	Pembangunan Prasarana Tambak
0202	Pembangunan Jaringan Transmisi
0203	Pembangunan Listrik Masuk Desa
0204	Pembangunan Jaringan Distribusi Gas
0205	Perawatan Gedung Kantor
0206	Perawatan Rumah Negara
0207	Perawatan Gedung Kesehatan /Pendidikan
0208	Perawatan Gedung Khusus
0209	Rehabilitasi Waduk/Bendungan/Bendung/Embung
0210	Rehabilitasi Jaringan Irigasi
0211	Perawatan/Rehabilitasi Prasarana Pengendali Banjir
0212	Rehabilitasi Sarana Air Baku/Bersih
0213	Rehabilitasi Jaringan Rawa/Tambak
0214	Perawatan Jalan dan Jembatan KA.
0215	Perawatan Terminal
0216	Perawatan Landasan
0217	Perawatan Dermaga
0218	Perawatan Jembatan Timbang
0219	Perawatan Gudang/Lapangan Penumpukan
0220	Perawatan Prasarana Pengamanan Pantai
0221	Pembersihan Alur Sungai/Danau
0222	Operasional dan Pemeliharaan Waduk dan Bendungan
0223	Pemeliharaan Rutin Jalan Kolektor
0224	Operasi dan Pemeliharaan Sarana Air Baku/Bersih
0225	Operasi dan Pemeliharaan Sungai/Danau
0226	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa/Situ
0227	Oprs. & Pemel. Prasarana Pengendali Baji/Sedimen
0228	Pemeliharaan Rutin Jalan Arteri
0229	Pemeliharaan Alur Pelayaran
0230	Operasi & Pemeliharaan Fasilitas (OPF) Pendidikan
0231	Operasional Puskesmas
0232	Pelayanan Kesehatan/Perbaikan Gizi Ibu/Anak & KB
0233	Operasional dan Pemeliharaan Rumah Sakit



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN SUB KEGIATAN
0234	Pelayanan Rujukan Rumah Sakit
0235	Operasional dan Pemeliharaan Alat-alat Berat
0236	Operasional Penyuluh Pertanian
0237	Penanggulangan Hama/Penyakit Tanaman
0238	Oprs. & Pelayanan Unit Permukiman Transmigrasi
0239	Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium
0240	Operasional Penerangan
0241	Pelayanan Jaminan Hidup Transmigran
0242	Operasional & Pemel. Stasiun Bumi/Peluncuran
0243	Operasional Pelayanan Hukum
0244	Oprs. Pemel. Sarana Penyehatan Lingk. Permukiman
0245	Penataan Batas dan Penetapan Kawasan Hutan
0246	Operasi Pengamanan Hutan
0247	Operasional dan Pemeliharaan Instalasi Nuklir
0248	Pengamanan/Pengel. Laut, Pesisir & Pulau-pulau Kecil
0249	Operasional & Pemeliharaan Jar. Sistem Informasi
0250	Perawatan Alat Besar/Alat Bantu
0251	Perawatan Kendaraan Khusus
0252	Pengadaan Suku Cadang Kend.Berat/Alat Besar
0253	Perawatan Alat Angkutan Udara
0254	Perawatan Angkutan Air
0255	Perawatan Alat Utama Hankam
0256	Perbaikan Peralatan Kantor
0257	Perbaikan Peralatan Fungsional
0258	Penyus. Rutr, Bangunan, Kawasan & Penataan Lingkungan
0259	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
0260	Pemetaan
0261	Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
0262	Penyelenggaraan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai
0263	Penyelenggaraan Rehabilitasi Lahan Kritis
0264	Penyelenggaraan Rehabilitasi Kawasan Hutan
0265	Penyelenggaraan Rehabilitasi Kawasan Pantai
0266	Pengendalian/Pengelolaan Pencemaran Lingkungan
0267	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
0268	Inventarisasi Sumber Daya Alam
0269	Penanaman/Pemeliharaan Tanaman
0270	Pengelolaan Taman Nasional
0271	Konservasi Jenis dan Genetik
0272	Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung
0273	Pengadaan Meubelair
0274	Pengadaan Alat Pendidikan
0275	Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB
0276	Pengadaan Alat Pertanian
0277	Pengadaan Alat Pengolah Data
0278	Pengadaan Alat Pertambangan
0279	Pengadaan Alat Hankam
0280	Pengadaan Alat Meteorologi dan Geofisika



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN SUB KEGIATAN
0281	Pengadaan Alat Pemetaan
0282	Pengadaan Alat SAR
0283	Pengadaan Alat Kebudayaan, Kesenian dan OR
0284	Pengadaan Alat Bengkel/Ketrampilan
0285	Pengadaan Alat Laboratorium
0286	Pengadaan Alat Kaporlap ABRI
0287	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
0288	Pengadaan Anjing Pelacak
0289	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-2
0290	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-4/ Roda-6 / Roda-10
0291	Pengadaan Kendaraan Khusus
0292	Pengadaan Alat Angkutan Kereta Api
0293	Pengadaan Alat Angkutan Udara
0294	Pengadaan Alat Angkutan Air
0295	Pengadaan Alat Utama Militer
0296	Pengadaan Alat Berat/Alat Bantu
0297	Pengadaan Tanah
0298	Penyiapan dan Pematangan Lahan
0299	Pencetakan Sawah
0300	Penatausahaan Lahan
0301	Pembuatan Sertifikat Tanah
0302	Penataan Pertanahan
0303	Studi Kebijaksanaan
0304	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran
0305	Pengelolaan Kas Negara
0306	Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara
0307	Pengelolaan Surat Utang Negara
0308	Pengelolaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri
0309	Pengelolaan Penerusan Pinjaman
0310	Penyempurnaan Manajemen Keuangan Pemerintah
0311	Penyelenggaraan Akuntansi dan Informasi
0312	Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasi
0313	Pembinaan/Penyuluhan Pengelolaan Arsip/Dokumen Negara
0314	Pengawasan dan Pelacakan Arsip/Dokumen Negara
0315	Biaya Ganti Rugi Arsip/Dokumen Negara
0316	Laminasi/Reproduksi Arsip/Dokumen Negara
0317	Penerbitan Literatur Naskah Sumber Arsip/Dokumen Negara
0318	Produk Intelijen
0319	Teknologi Budi Daya Tanaman Pangan dan Holtikultura
0320	Teknologi Budi Daya Tanaman Industri
0321	Teknologi Budi Daya Perikanan
0322	Teknologi Budi Daya Peternakan
0323	Teknologi Pengembangan Agribisnis Pertanian Terpadu
0324	Teknologi Pengembangan Agribisnis Perikanan Laut
0325	Teknologi Produksi Alat Mesin dan Proses Pangan Olahan
0326	Teknologi Produksi Alat Mesin dan Proses Hasil Tanaman Industri
0327	Teknologi Produksi Alat Mesin dan Proses Hasil Perikanan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN SUB KEGIATAN
0328	Teknologi Produksi Alat Mesin dan Proses Hasil Peternakan
0329	Teknologi Produksi Pangan Fungsional
0330	Teknologi Produksi Biokatalis
0331	Teknologi Produksi Bahan Kimia Adi
0332	Teknologi Produksi Agromikrobiologi
0333	Teknologi Pengembangan Agribisnis Aloe Vera
0334	Teknologi Produksi Obat Bahan Alam
0335	Teknologi Produksi Bahan Baku Produksi
0336	Teknologi Produksi Alat Kesehatan
0337	Teknologi Produksi Pati untuk Pangan
0338	Teknologi Produksi Pati untuk Pakan
0339	Teknologi Produksi Pati untuk Energi
0340	Teknologi Produksi Pati untuk Bahan Baku Aneka Industri
0341	Teknologi Pengembangan Agribisnis Berbasis Pati
0342	Teknologi Produksi Bioteknologi Pertanian
0343	Teknologi Produksi Bioteknologi Kesehatan
0344	Teknologi Produksi Bioteknologi Industri
0345	Pengkajian Teknologi Mitigasi Bencana
0346	Pengkajian Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Lahan dan Kawasan Terpadu
0347	Pengkajian Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau Kecil
0348	Pengkajian Teknologi Pengelolaan Lahan Marjinal
0349	Pengkajian Teknoekonomi Sumber Daya Lahan
0350	Pengelolaan Pesisir dan Daerah Aliran Sungai (DAS)
0351	Rehabilitasi Daerah Resapan Air
0352	Teknologi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
0353	Konservasi dan Pemulihan Kualitas Lingkungan
0354	Pemodelan dan Standarisasi Lingkungan
0355	Pengkajian Teknologi Karakterisasi Sumber Daya Alam
0356	Pengkajian Teknologi Pemodelan Sumber Daya Alam
0357	Pengkajian Akuntansi dan Inventarisasi Sumber Daya Alam
0358	Pengkajian Teknologi Kelautan
0359	Operasionalisasi dan Pemeliharaan Laboratorium Teknologi Inventarisasi Sumber Daya Alam
0360	Survey Geologi
0361	Pemanfaatan Teknologi Sistem Iklim
0362	Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Alam Daerah
0363	Pemanfaatan Teknologi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis
0364	Pemanfaatan Teknologi Survey Tersetris Terpadu
0365	Pengkajian Kebijakan Inovasi Teknologi
0366	Pengkajian Kebijakan Disfusi Teknologi
0367	Pengkajian Kebijakan Pengembangan Unggulan Daerah
0368	Pengkajian Kebijakan Pengembangan Wilayah
0369	Rancangbangun Rekayasa Teknologi Industri dan Sistem Transportasi
0370	Rancangbangun Rekayasa Teknologi Industri Alat dan Mesin
0371	Rancangbangun Rekayasa Teknologi Industri Hankam
0372	Rancangbangun Rekayasa Teknologi Industri Proses
0373	Rancangbangun Rekayasa Termodinamika, Motor dan Propulsi
0374	Rancangbangun Rekayasa Produksi dan Otomasi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN SUB KEGIATAN
0375	Rancangbangun Rekayasa Aerodinamika
0376	Rancangbangun Rekayasa Kekuatan Struktur
0377	Rancangbangun Rekayasa Hidrodinamika
0378	Rancangbangun Rekayasa Struktur Pantai
0379	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Material Polimer
0380	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Material Keramik
0381	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Material Logam
0382	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Material Komposit
0383	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Konversi dan Konservasi Energi
0384	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Proses Energi
0385	Perencanaan Teknologi Energi
0386	Perekayasa Energi dan Biomassa
0387	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Mikrohidro
0388	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Panas Bumi
0389	Manajemen Teknologi
0390	Audit Teknologi
0391	Pemasyarakatan Teknologi
0392	Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
0393	Pengembangan Distribusi Nasional
0394	Pengembangan Usaha dan Lembaga Perdagangan
0395	Peningkatan Pengawasan Barang Beredar
0396	Peningkatan dan Pengembangan Kemetrolgian
0397	Pengembangan Fasilitas
0398	Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan
0399	Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Perkebunan
0401	Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Peternakan
0402	Penilaian dan Pelepasan Varietas Tanaman
0403	Perbanyak Benih/Bibit
0404	Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman
0405	Pengawasan Mutu Bibit Ternak
0406	Penjaringan Bibit Unggul Ternak
0407	Pengembangan Proteksi Tanaman
0408	Pengamatan, Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman dan Fenomena Iklim
0409	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
0410	Operasional Persidangan Mahkamah Konstitusi
0411	Pengamatan Penyakit Hewan
0412	Pengawasan Obat Hewan
0413	Pelayanan Kesehatan Hewan
0414	Pengembangan Sistem Jaminan Pangan Asal Hewan
0415	Peningkatan Kemampuan Analisa Resiko Keamanan Produk Peternakan
0416	Pembinaan Praktek Higiene-Sanitasi Produk Pangan Asal Hewan
0417	Pengembangan Profil Keamanan Pangan Asal Hewan
0418	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan
0419	Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
0420	Penambahan Baku Lahan
0421	Pengembangan Lahan Penyangga
0422	Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Perkebunan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN SUB KEGIATAN
0423	Penumbuhan Sentra Pemantapan Kawasan Holtikultura
0424	Penyebaran Ternak dan Pengembangan Kawasan Peternakan
0425	Pembinaan Perencanaan Irigasi di tingkat Usaha Tani
0426	Pembinaan Optimasi Irigasi di tingkat Usaha Tani
0427	Pembinaan Tata Air Mikro di Daerah Mikro
0428	Pengawasan Mutu Pupuk dan Pembinaan Aplikasi di Tingkat Petani
0429	Pengawasan Mutu Pestisida dan Pembinaan Aplikasi di tingkat Petani
0430	Pembinaan Ketersediaan Pangan
0431	Pembinaan Distribusi dan Harga Pangan
0432	Pengembangan Sumber Pangan Alternatif dan Konsumsi Pangan
0433	Pembinaan dan Pengembangan Keamanan Pangan
0434	Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Pangan
0435	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan
0436	Pemberdayaan Masyarakat Daerah Rawan Pangan
0437	Pengujian Mutu Produk Pertanian
0438	Perbaikan Mutu Hasil Pertanian
0439	Fasilitas Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian
0440	Fasilitas Perbaikan Sarana Pengolahan Hasil Pertanian
0441	Promosi Produk Pertanian
0442	Pengendalian Impor Produk Pertanian
0443	Fasilitasi Pengembangan Terminal Agribisnis
0444	Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan Usaha
0445	Pengembangan Kewirausahaan
0446	Pengembangan Sistem Layanan Informasi Agribisnis
0447	Fasilitas Investasi Usaha Pertanian
0448	Pengembangan Sarana Usaha Pertanian
0449	Pengembangan Kelembagaan Keuangan Mikro Agribisnis
0450	Pembinaan Pembangunan Pertanian Berwawasan Lingkungan
0451	Perlindungan Varietas Tanaman
0452	Standardisasi Pertanian
0453	Akreditasi Pertanian
0454	Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian
0455	Pemberdayaan Petani
0456	Pemberdayaan Pelaku Agribisnis
0457	Pemberdayaan Tenaga Muda Pertanian
0458	Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian
0459	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Tanah, Air Dan Agroklimat
0460	Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
0461	Penelitian dan Pengembangan Teknologitinggi dan Strategis Tanaman Pangan
0462	Penelitian dan Pengembangan Teknologitinggi dan Strategis Tanaman Holtikultura
0463	Penelitian dan Pengembangan Teknologitinggi dan Strategis Perkebunan
0464	Penelitian dan Pengembangan Teknologitinggi dan Strategis Peternakan
0465	Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
0466	Penelitian dan Pengembangan Mekanisme Pertanian
0467	Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian
0468	Penyusunan Pedoman
0469	Pengembangan Kelembagaan Litbang Pertanian



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN SUB KEGIATAN
0470	Pengembangan Sumberdaya Informasi Iptek, Desiminasi dan Jaringan Umpan Balik
0471	Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Kebijakan dan Program Pembangunan Pertanian
0472	Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Anggaran Pertanian
0473	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Pemb. Pertanian
0474	Pencetakan/Penerbitan/Penggandaan/Laminasi
0475	Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan Teknis Pengembangan Kepegawaian Negara
0476	Penerimaan dan Penyaringan Calon PPAT
0477	Penyusunan Data Penguasaan Tanah/Metodologi Pengawasan
0478	Pembuatan/Penggantian Peta Tanah/Peta Permasalahan Hukum
0479	Sistem Informasi Pertanahan
0480	Inventarisasi dan Penertiban Tanah-tanah Instansi Pemerintah
0481	Pembinaan Konsolidasi Tanah, Hak Pengelolaan Tanah
0482	Pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah
0483	Pembinaan/Pengendalian Petani Redistribusi
0484	Pembinaan/Bimbingan Teknis Geodesi, Teknis Yuridis, Teknis Administrasi dan Tata Usaha Pendaftaran Tanah
0485	Pembinaan dan Inventarisasi Hak Milik, Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Usaha
0486	Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan
0487	Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
0488	Biaya Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum dan Absente
0489	Operasional Penatagunaan Tanah
0490	Operasional Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform
0491	Pembuatan Titik Dasar Teknis dan Buku Tugu
0492	Panitia Pertimbangan Landreform
0493	Penyelesaian Perkara Pertanahan
0494	Pengendalian Pertanahan
0495	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanahan
0496	Rehabilitasi dan Pembangunan Cekdam
0497	Pembangunan Prasarana dan Jaringan Irigasi
0498	Pembangunan Prasarana dan Jaringan Irigasi Air Tanah
0499	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
0500	Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir
0501	Pembangunan Cekdam
0502	Pengadaan Pompa Banjir
0503	Pengembangan Kasiba/Lisiba
0504	Penanganan Paska Bencana Alam dan Kerusuhan Sosial
0505	Pengembangan Kawasan Perbatasan
0506	Pengembangan Pulau-pulau Kecil dan Daerah Tertinggal
0507	Pengembangan Lingkungan Perumahan Pada Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D)
0508	Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara
0509	Pengembangan Rumah Susun Sederhana Sewa
0510	Penanganan Tanggap Darurat
0511	Penguatan Kelembagaan Pengawasan Konstruksi dan Keselematan Bangunan Gedung
0512	Perumahan Swadaya
0513	Penataan Kembali Lingkungan Permukiman Tradisional
0514	Peningkatan Lingkungan Permukiman Kumuh
0515	Pelestarian Bangunan Bersejarah
0516	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Komunitas



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN SUB KEGIATAN
0517	Bantuan Langsung Masyarakat
0518	Pembinaan dan Penilaian Jabatan Fungsional
0519	Pembinaan Ketahanan Kampus
0520	Penyelesaian Tugas Mendesak
0521	Pembelian Hak Cipta, Penterjemah dan Penyusunan Naskah/Transkripsi
0522	Penyelenggaraan/Pengelolaan Laboratorium Kapal Latih
0523	Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi (SJDI) Hukum
0524	Pendataan Biografi, Sistem, Nilai, dan Lingkungan Budaya
0525	Operasional Sekolah/Satker Baru
0526	Evaluasi/Penel. Ijazah/Sttb & Pengesahan Salinan STTB Dalam/Luar Negeri
0527	Penyusunan Program dan Perhitungan Anggaran
0528	Pembinaan Purnareka Paskibraka, Purnacaraka Muda
0529	Pembinaan Sisdiksat Pada PTN
0530	Pembinaan Olahraga dan Kesenian
0531	Pembinaan, Pengembangan dan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat/Kuliah Kerja Nyata
0532	Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional/ Hari Pendidikan Nasional
0533	Bantuan Pembuatan Skripsi/Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa
0534	Pembinaan/Pemantapan Kegiatan Kopertis
0535	Pembinaan/Pengembangan Penyantunan Ujian Negara Pada PTS
0536	Penyelenggaraan Sidang Dewan Guru Besar, Evaluasi Karya Ilmiah
0537	Pertemuan Ilmiah/Konferensi/Kunjungan ke Objek Pendidikan
0538	Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru/Dosen/Widyaswara
0539	Penyelenggaraan Kegiatan dalam Rangka Penyelenggraan Tridharma PT
0540	Biaya Promosi/Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi
0541	Bantuan Pengobatan dan Musibah
0542	Dana Masyarakat Commitment/Dana Pendamping Program Kompetisi
0543	Biaya Kerohanian dan Keagamaan
0544	Pembinaan Kegiatan Karya Ilmiah
0545	Penghargaan Dosen/Mahasiswa/Pegawai Berprestasi
0546	Monitoring/Pengawasan Pelaksanaan Program/Kegiatan
0547	Bantuan Studi
0548	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Keluarga
0549	Pendayagunaan Sumber Dana Sosial
0550	Pemberdayaan Karang Taruna
0551	Pemberdayaan Orsos/LSM dan Organisasi Profesi
0552	Pemberdayaan Tenaga Kesos Berbasis Masyarakat
0553	Pengembangan Wahana Kesos Berbasis Masyarakat
0554	Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor Dunia Usaha
0555	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
0556	Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
0557	Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat
0558	Pelayanan dan Perlindungan Kesos Lanjut Usia
0559	Pembinaan dan Perlindungan Kesos Anak Tertantar
0560	Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan
0561	Pembinaan dan Perlindungan Kesos Anak Balita
0562	Pelayanan dan Rehabilitasi Anak Cacat
0563	Pelayanan dan Rehabilitasi Anak Nakal



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN SUB KEGIATAN
0564	Kesiapsiagaan Bencana
0565	Tanggap Darurat
0566	Rehabilitasi Sosial
0567	Pemberdayaan Sosial Korban Bencana
0568	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan
0569	Pemberdayaan dan Rujukan Korban Tindak Kekerasan
0570	Perlindungan Sosial Pekerja Migran
0571	Pemberdayaan dan Rujukan Pekerja Migran
0572	Santunan Sosial
0573	Akses Jaminan Sosial
0574	Pengembangan Kemitraan Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan
0575	Manajemen Pelayanan Kesos Fakir Miskin
0576	Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos)
0577	Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP)
0578	Peningkatan Kemampuan SDM
0579	Visualisasi Kewaspadaan Dini Tentang Bencana dan Penanggulangannya
0580	Penanggulangan Bencana
0581	Optimalisasi Jaringan Informasi dan Komunikasi Penanggulangan Bencana
0582	Informasi/Peringatan Dini Kepada Masyarakat Rawan Bencana
0583	Pemberian Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR)
0584	Pemantapan Ketahanan Sosial Masyarakat
0585	Pemulihan
0586	Pemberdayaan Sosial
0587	Pendampingan Sosial
0588	Penjalinan Kerjasama Dengan Institusi Lain
0589	Bimbingan Lanjut (After Care)
0590	Advokasi
0591	Inisiasi Regulasi Masalah Sosial
0592	Evakuasi
0593	Assesment
0594	Pemberian Jaminan Hidup
0595	Pemantapan Petugas Sosial
0596	Bimbingan Teknis Usaha Ekonomis Produktif (UEP)
0597	Pemberian Bantuan Sosial
0598	Fasilitasi Penguatan Organisasi
0599	Pungutan Modal Sosial
0600	Relokasi
0601	Kemitraan Sosial
0602	Pemulangan
0603	Terminasi
0604	Pelayanan Pendidikan dan Pengetahuan
0605	Akses Program Terpadu Bidang Keluarga
0606	Pelayanan Kepada Perintis Kemerdekaan/Keluarga Pahlawan/Pejuang
0607	Pemrosesan SK PK/JD PK
0608	Penguatan Transparansi Program Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha
0609	Penguatan Eksistensi Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha
0610	Pemantapan Petugas Pendamping



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN SUB KEGIATAN
0611	Kajian Hukum Adat
0612	Operasional, Forum Pokja dan Tokoh Masyarakat Adat
0613	Pembinaan, Bimbingan dan Pengembangan Sosial
0614	Bantuan Sarana Pelestarian Budaya Lokal
0615	Penataan Sanitasi Lingkungan Sosial
0616	Promosi Budaya dan Produksi Adat Lokal/Terpencil
0617	Perlindungan Komunitas Adat Terpencil
0618	Stimulan Keluarga Rentan
0619	Penyusunan Indikator Sasaran dan Indikator Keberhasilan
0620	Penyusunan dan Pengembangan Model
0621	Pengembangan Manajemen Kasus
0622	Seleksi dan Penetapan Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan
0623	Pelayanan Sosial Perintis Kemerdekaan/Keluarga Pahlawan/Pejuang
0624	Bimbingan Pelestarian Nilai K3 Kepada Guru
0625	Pembinaan Pemandu Ziarah Wisata
0626	Pekan/Bulan Bhakti dan Studi Karya Bhakti Sosial
0627	Pengembangan Jaringan Kerja Lintas Sektor dan Kemitraan
0628	Pelaksanaan dan Pengembangan Pendampingan Sosial
0629	Penguatan Jaringan Kerja dan Kemitraan
0630	Seleksi dan Pengembangan Karang Taruna, TKSM, dan Orsos/LSM Berprestasi
0631	Pemberdayaan Infrastruktur Sosial di Kawasan Tertentu
0632	Pemantapan dan Pengembangan PPNS Bidang Undian dan Sumbangan Sosial
0633	Pengembangan Mutu Usaha Perikanan Skala Kecil
0634	Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah Hasil Perikanan
0635	Peningkatan Tata Pemanfaatan Sumberdaya Ikan
0636	Pengembangan Prasarana Perikanan
0637	Pengembangan Sarana Perikanan
0638	Peningkatan Pelayanan Usaha dan Pengendalian Perizinan Perikanan
0639	Pengembangan Statistik Perikanan
0640	Kerjasama Internasional di Bidang Perikanan dan Kelautan
0641	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan
0642	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Pembudidayaan Ikan
0643	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha Perikanan Budidaya
0644	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
0645	Pengembangan Budidaya Udang
0646	Peningkatan Sarana Prasarana Pengawasan
0647	Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan
0648	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas
0649	Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan
0650	Pengembangan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (Siswasmas)
0651	Penataan dan Penegakan Hukum
0652	Riset Pengelolaan Produk dan Sosek Kelautan dan Perikanan
0653	Diseminasi dan Asimilasi Hasil Riset Kelautan Perikanan
0654	Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Perikanan dan Kelautan
0655	Penyusunan Naskah Perundang-undangan
0656	Pengembangan Sistem Informasi
0657	Pemantauan dan Evaluasi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN SUB KEGIATAN
0658	Pengelolaan Garam Industri
0659	Pengelolaan Pasir Laut
0660	Pengelolaan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam
0661	Pengelolaan Sumberdaya Deep Sea Water
0662	Optimalisasi Pendayagunaan Potensi Pulau-pulau Kecil
0663	Rehabilitasi Ekosistem Pulau-pulau Kecil
0664	Penguatan Infrastruktur Pulau-pulau Kecil
0665	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
0666	Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat Pesisir
0667	Pendayagunaan Sumberdaya Pesisir
0668	Mitigasi Lingkungan
0669	Pengendalian Pencemaran
0670	Rehabilitasi Ekosistem
0671	Pembinaan Program
0672	Penguatan Kelembagaan
0673	Penerapan Program Mitra Bahari
0674	Penyusunan Rencana Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
0675	Penyusunan Kebijakan & Pedoman Bidang Tata Ruang Laut, Pesisir & Pulau-pulau Kecil Serta Pemanfaatannya
0676	Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Konservasi Laut
0677	Pengelolaan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut (Jenis dan Genetik)
0678	Pengembangan Jaringan Kerjasama Regional dan Internasional Pengelolaan Konservasi Laut
0679	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan MMTc Yogyakarta
0680	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kominfo
0681	Meningkatkan Kerjasama Internasional di berbagai Bidang Komunikasi, Telematika dan Penyiaran
0682	Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Kominfo
0683	Melakukan Pengkajian dalam Rangka Pengembangan Kebijakan Bidang Komunikasi dan Informasi
0684	Melakukan Evaluasi Terhadap Pengimplementasian Arah Kebijakan dan Pengembangan di Bidang Kominfo
0685	Menentukan Mekanisme dan Besaran Bant. Pem. kpd Penyel. Telematika dlm Rangka Pelak.Program PSO dan USO
0686	Pengembangan dan Peningkatan Mutu Fasilitas Kerja Kementerian Kominfo
0687	Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi MMTc Yogyakarta
0688	Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informasi MMTc Yogyakarta
0689	Pengintegrasian Teknis Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kerja
0690	Menyediakan Fasilitas Kebutuhan Kerja Pimpinan
0691	Menyelenggarakan Koordinasi dan Konsultasi Rencana Program Kerja Kementerian Kominfo
0692	Mengembangkan Sistem, Prosedur dan Standarisasi Administrasi Pendukung Pelayan Kementerian Kominfo
0693	Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kominfo
0694	Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kementerian Kominfo
0695	Meningkatkan Kualitas SDM Kementerian Kominfo
0696	Pengembangan ICT di Daerah dalam Rangka Dekonsentrasi
0697	Kegiatan Anggaran Rutin
0698	Melakukan Pemeliharaan,Peremajaan,Rehab. dan Pening.Kemampuan (Upgrading) Sarana dan Prasarana Gedung MMTc
0699	Pengadaan Sarana Penunjang Operasional (Kendaraan Roda-4 dan Roda-2) Kominfo
0700	Melakukan Rehabilitasi,Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Kominfo
0701	Penyusunan dan Pengendalian Program Kominfo
0702	Mengembangkan Koordinasi dan Kerjasama Komunitas Kominfo



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN SUB KEGIATAN
0703	Mengembangkan Pemanfaatan Jaringan Komunikasi Sosial di Pusat dan Daerah
0704	Pemberdayaan dan Kepedulian Peran Jarkomsos dlm Rangka Peningkatan Akses Diseminasi Informasi sbg Media
0705	Menjembatani Peningkatan, Pemanfaatan ICT untuk Menanggulangi Kesenjangan Digital
0706	Membangun Sarana dan Prasarana Telematika Hingga Ke Saerah PSO dan USO, Trmasuk TVRI dan RRI
0707	Memfasilitasi Pengembangan dan Pemanfaatan IT Security, IT Audit dan Registrasi Internet Indonesia
0708	Pembuatan Standar Interopabilitas Data dan Informasi Pemerintah (Government Interopability Frame World/GIF)
0709	Menyediakan Community Access Point Secara Bertahap yang Tersebar dan Terjangkau di Beberapa Desa
0710	Menyediakan Jrgn Kominfo yg Handal, Aman & Terjangkau Guna Mendorong Tersedianya Disaster Recovery Center
0711	Pengembangan Infrastruktur untuk Peningkatan Penetrasi Internet (Wartel/Warintek)
0712	Mendorong Diselesaikannya Peraturan Perundangan Tentang Media Massa
0713	Mendorong Pengembangan Kualitas dan Kuantitas Lembaga Pemantau Media
0714	Meningkatkan Pemerataan Informasi Melalui Pemanfaatan Media
0715	Menyediakan Informasi dan Akses Informasi Mengenai Pelaksanaan Hubungan Luar Negeri
0716	Memfasilitasi Review Atas Aspek-aspek Politik
0717	Menyelesaikan Peraturan Pemerintah di bidang Penyiaran
0718	Menyempurnakan dan Menyusun Berbagai Perangkat Peraturan Pendukung Restrukturisasi Telematika
0719	Menyelesaikan Pengalihan Status Kelembagaan TVRI dan RRI
0720	Peningkatan Program Satu Sekolah Satu Laboratorium Komputer (OSOL)
0721	Pengembangan Manajemen Pendidikan Berbasis Telematika
0722	Peningkatan Pendidikan Kedinasan Berbasis Telematika
0723	Peningkatan Literasi Masyarakat di Bidang Telematika
0724	Peningkatan Kualitas SDM Bidang Telematika
0725	Fasilitasi Sinergi dan Pengembangan Standar Kompetensi SDM Bidang Telematika
0726	Mengembangkan Chief Information Officer
0727	Mendorong dan Melaksanakan Early Warning System untuk Merespon Berbagai Persoalan Konflik Sosial
0728	Melaksanakan Sosialisasi untuk Meningkatkan Rasa Kebangsaan Indonesia Melalui Media Secara Serentak
0729	Peningkatan Citra Positif Indonesia Melalui Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama Internasional
0730	Melakukan Koordinasi dan Kerjasama Dengan Dinas Infokom di Daerah
0731	Melaksanakan Fasilitasi dan Sosialisasi Pembangunan Karakter Bangsa (Nation And Character Building)
0732	Membentuk Pusat Layanan Informasi Ekonomi Kawasan Timur Indonesia
0733	Menyiapkan Perangkat Pelaksanaan Perundangan Tentang KMP
0734	Menyusun Standarisasi Layanan Publik Bagi Instansi/Lembaga Publik
0735	Melakukan Pendataan dan Inventarisasi Kebijakan Instansi/Lembaga Publik
0736	Melakukan Supervisi Implementasi Standar Layanan Informasi Ke Instansi/Lembaga Publik
0737	Memperluas Jangkauan Pelayanan Telematika Ke Seluruh Lapsan Masyarakat
0738	Menyempurnakan Perangkat Peraturan
0739	Fasilitasi Pengembangan Layanan Informasi Ekonomi Bagi UKM
0740	Peningkatan Sarana E-Government untuk Pemda
0741	Menyusun Berbagai Peraturan Pelaksana untuk Mendukung Pelaksanaan UU ITE
0742	Pengembangan dan Penerapan Pilot Project E-GOV di Pusat dan Daerah
0743	Pengembangan Sistem Penilaian Kesesuaian untuk Akreditasi dan Sertifikasi Bidang Teknologi Informasi
0744	Pengembangan E-Commerce Melalui Multipurpose Community Internet Center (MCI Center)
0745	Menyelesaikan Penyusunan Blue Print E-Government



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

11
A

KODE	URAIAN SUB KEGIATAN
0746	Pengembangan E-Government untuk Instansi Pusat dan Daerah
0747	Pembentukan NCA Bidang Teknologi Informasi
0748	Pengembangan Sistem Jaringan Internet
0749	Bant. Pemulangan/Pengungsian Korb.Benc.Alam, Kecelakaan Perahu & Org Indonesia Trdampar/Terlantar/Pasien
0750	Bantuan Kepada Sekolah Republik Indonesia
0751	Pembinaan dan Penggalangan Masalah Hubsosbudpen di Luar Negeri
0752	Biaya Khusus Perwakilan RI dan Biaya Pengiriman Dokumen
0753	Sandi (Termasuk Peralatannya)
0754	Kebijakan Pengembangan Ilmu Sosial Politik dan Kemasyarakatan Riptek
0755	Kebijakan Pengembangan Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Hukum Riptek
0756	Kebijakan Pengembangan Ilmu Sastra, Budaya, Filsafat dan Agama
0757	Insentif Riset Unggulan Kemanusiaan dan Kemasyarakatan
0758	Kebijakan Pengembangan Kimia dan Material Riptek
0759	Kebijakan Pengembangan Fisika dan Matematika Riptek
0760	Kebijakan Pengembangan Geologi dan Sumber Daya Mineral Riptek
0761	Insentif Pengembangan Riset Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam
0762	Kebijakan Pengembangan Ilmu Pertanian Riptek
0763	Kebijakan Pengembangan Biologi dan Bioteknologi
0764	Kebijakan Pengembangan Teknologi Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati
0765	Kebijakan Pengembangan Iptek Manufaktur dan Transportasi
0766	Kebijakan Pengembangan Ilmu Informatika dan Mikroelektronika dan Telekomunikasi
0767	Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Industri Riptek
0768	Kebijakan Pengembangan Ilmu Kedokteran Dasar Riptek
0769	Kebijakan Pengembangan Ilmu Kedokteran Klinis dan Komunitas Riptek
0770	Kebijakan Pengembangan Ilmu Obat, Pengobatan dan Gizi Riptek
0771	Insentif Iptek Kedokteran dan Kesehatan
0772	Insentif Pengembangan Kapasitas Masyarakat
0773	Kebijakan Pengembangan Teknologi Tepat Guna
0774	Kebijakan Lingkungan Iptek
0775	Kebijakan Pengelolaan Potensi Sumberdaya Lokal dan Regional
0776	Insentif Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat
0777	Kebijakan Ekonomi Riptek
0778	Kebijakan Industri Riptek
0779	Kebijakan Sosial Politik Riptek
0780	Kebijakan Iptek Budaya Adat
0781	Kebijakan Sosialisasi Budaya Iptek
0782	Kebijakan Budaya Masyarakat Industri
0783	Kebijakan Etika Keilmuan Riptek
0784	Kebijakan Kebebasan Akademis Riptek
0785	Kebijakan Organisasi Profesi Riptek
0786	Pemetaan dan Peningkatan Kompetensi SDM Iptek
0787	Jabatan Fungsional SDM Iptek
0788	Kelembagaan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Iptek
0789	Kebijakan Strategis dan Utama Nasional
0790	Peningkatan Kapasitas Riptek
0791	Peningkatan Sarana dan Kelembagaan Riptek
0792	Kebijakan Riptek Unggulan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN SUB KEGIATAN
0793	Kebijakan Riptek Strategis
0794	Kebijakan Program Kemitraan
0795	Kebijakan Koordinasi Perencanaan dan Program Lembaga Riptek
0796	Insentif Riset Unggulan Terpadu
0797	Insentif Riset Unggulan Remaja
0798	Insentif Riset Kebutuhan Dasar Masyarakat
0799	Kebijakan Jaringan Riptek Internasional
0800	Kebijakan Investasi Riptek Internasional
0801	Kebijakan Kebijakan Riptek Internasional
0802	Insentif Riset Unggulan Terpadu Internasional
0803	Kerjasama Riptek Internasional
0804	Evaluasi Kapasitas dan Produktifitas Lembaga Riptek
0805	Evaluasi Efektifitas Lembaga Riptek
0806	Standardisasi Evaluasi Kinerja Lembaga Riptek
0807	Insentif Pemeliharaan dan Pembaharuan Fasilitas Laboratorium
0808	Kebijakan Riptek dan Pertumbuhan Ekonomi, Daya Saing
0809	Kebijakan Riptek dan Struktur Pasar, Perdagangan
0810	Kebijakan Riptek dan Struktur Industri, Ketenagakerjaan
0811	Insentif Pengembangan Katalis Iptek
0812	Penyusunan Indikator Sistem Iptek
0813	Kebijakan Jaringan Sistem Iptek
0814	Kebijakan Lingkungan Sistem Iptek
0815	Kebijakan Investasi Pusat Iptek
0816	Pengembangan dan Pengelolaan LBM Eijkman
0817	Pengembangan dan Pengelolaan Bio-Island
0818	Kebijakan Sistem Kelembagaan
0819	Kebijakan Kemitraan Iptek
0820	Kebijakan Jaringan Kelembagaan Iptek
0821	Kebijakan Pengelolaan Pusat-pusat Iptek
0822	Pengembangan dan Pengelolaan Agrotechno-Park
0823	Kebijakan Sistem Insentif Riset
0824	Kebijakan Sistem Insentif Teknologi Industri
0825	Kebijakan Sistem Insentif Investasi Iptek
0826	Kebijakan Sistem Akreditasi Pusat Iptek
0827	Insentif Riset Unggulan Strategis Nasional
0828	Insentif Technopreneurship (Start-Up Company)
0829	Kebijakan Pengelolaan Kawasan Puspitek
0830	Kebijakan Pemasaran Hasil Riptek
0831	Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Peragaan Iptek
0832	Legalisasi Kelembagaan Iptek
0833	Legalisasi Peningkatan Kemampuan Iptek
0834	Legalisasi Pemanfaatan Iptek
0835	Kebijakan Pemetaan Potensi Iptek
0836	Kebijakan Transfer Teknologi
0837	Kebijakan Unggulan Iptek dan Industri
0838	Insentif Dayarida
0839	Insentif Pengembangan dan Pengelolaan Business Technology Center



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN SUB KEGIATAN
0840	Kebijakan Difusi Iptek
0841	Kebijakan Pemberdayaan Iptek Industri
0842	Kebijakan Pemberdayaan Iptek Daerah
0843	Insentif Riset Unggulan Kemitraan
0844	Insentif Idamantek
0845	Kebijakan Pengembangan Promosi Iptek
0846	Kebijakan Pengembangan Pemasaran Iptek
0847	Kebijakan Pembudidayaan Iptek
0848	Insentif Sentra Promptek
0849	Insentif Sentra Inotek
0850	Kebijakan Pengembangan HKI
0851	Kebijakan Perlindungan Kekayaan Intelektual
0852	Kebijakan Pengembangan Standardisasi
0853	Insentif Sentra HKI
0854	Insentif Standlab
0855	Insentif Standling
0856	Insentif Lintrad
0857	Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Jaringan Informasi
0858	Kebijakan Pengembangan Kerjasama dan Jasa Jaringan Informasi
0859	Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Informasi
0860	Kebijakan dan Pengelolaan Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
0861	Insentif Indonesia Go-Open-Source
0862	Pengembangan Kawasan Budidaya Laut
0863	Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau
0864	Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar
0865	Penyelenggaraan Pendidikan Salafiyah dan Pengembangan Santri
0866	Penyelenggaraan Hisab Rukyat dan Perlengkapannya
0867	Pembinaan dan Pendataan Sekolah Swasta
0868	Pembinaan Pendidikan Agama Pada Sekolah Umum
0869	Pembinaan/Pemantapan Kegiatan Kopertais
0870	Bimbingan Bidang Produk Halal
0871	Pembinaan dan Bimbingan Ibadah Sosial
0872	Bimbingan dan Pembinaan Kemitraan Umat
0873	Pembinaan dan Bimbingan Lembaga Zakat dan Wakaf, Zakat, Infaq, Sodaqoh (ZIS) dan Wakaf
0874	Bimbingan dan Pembinaan Haji, Umrah dan Petugas Haji
0875	Bimbingan Lembaga dan Sarana
0876	Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk
0877	Pelayanan Ibadah Haji
0878	Pembinaan dan Pelayanan Pontren
0879	Pembinaan Keluarga Sakinah
0880	Bimbingan Pemberdayaan Fungsi dan Manajemen Masjid
0881	Pembinaan Pelayanan dan Keesaan Gereja
0882	Pembinaan Penyuluh Agama
0883	Penyelesaian dan Biaya Angkut Barang Sitaan/Penahanan Lelang/Pelaksanaan Lelang/Klembaden
0884	Sertifikasi/Akreditasi Jaringan PSDPU
0885	Pendidikan Alqur'an dan Penyelenggaraan MTQ



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN SUB KEGIATAN
0886	Tim Pendataan Tanah Wakaf
0887	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
0888	Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur Dep. Agama
0889	Akuntansi Keuangan Negara dan Inventaris Kekayaan Negara
0890	Peningkatan Kesehatan Masyarakat & Reproduksi Remaja
0891	Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Tempat Ibadah
0892	Bimbingan dan Dakwah Agama
0893	Bantuan Operasional Juru Penerang Agama
0894	Peningkatan Pengkajian Kerukunan Umat Beragama
0895	Peningkatan Kualitas Tenaga Pengelola Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan
0896	Penelitian, Pengkajian dan Pelaksanaan Terapan
0897	Pesantren Kilat SD dan SLTP, Cerdas Cermat Siswa, Pembinaan Igra
0898	Bantuan Operasional Manajemen Mutu
0899	Pasraman Kilat
0900	Pengembangan Mutu Pendidikan (PLN)
0901	Peningkatan Luar Sekolah Pada Pondok Pesantren
0902	Pendidikan Lura Sekolah Pada Masyarakat
0903	Penelitian Pendidikan Keagamaan
0904	Pengabdian Pada Masyarakat
0905	Kerjasama Pendidikan Tinggi Agama
0906	Peningkatan Manajemen Perencanaan Pelayanan Pendidikan
0907	Penyusunan Kebijakan Pendidikan Agama
0908	Riset Teknologi Kelautan
0909	Riset Perikanan Tangkap
0910	Riset Perikanan Budidaya
0911	Riset Wilayah Laut dan Sumber Daya Non Hayati
0912	Penelitian, Pengkajian, Survei dan Sejenisnya di Bidang Standardisasi
0913	Peningkatan Sistem dan Perumusan, Penetapan dan Mutu SNI
0914	Peningkatan dan Pengembangan Kerjasama Standardisasi di Tingkat Bilateral, Regional dan Internasional
0915	Peningkatan Sistem dan Penerapan SNI
0916	Pengembangan Akreditasi dan Kelembagaan Penilaian Kesesuaian (PK)
0917	Pengemb., Peningk. Pengakuan Sist. Akreditasi, Sertifikasi Standar, PK Tingkat Bilateral, Regional, Inter
0918	Pengembangan dan Peningkatan Efektivitas Informasi dan Promosi SNI
0919	Perluasan Akses Masyarakat dalam Proses Standardisasi
0920	Peningkatan Kemampuan SDM Masyarakat Standardisasi
0921	Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Standardisasi
0922	Pengkajian dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Standardisasi
0923	Pendidikan Pembentukan POLRI
0924	Rintisan Pendidikan dan Pelatihan
0925	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan
0926	Pengadaan Perlengkapan Kantor (Atk, Barang Cetak, Alat, RT, Langganan Majalah)
0927	Pengadaan Alsus POLRI
0928	Pemeliharaan Perdamaian Dunia/Peace Keeping Operation
0929	Deteksi Kegiatan Masyarakat
0930	Membentuk dan Pembinaan Jaringan Informasi
0931	Pembinaan Pengamanan POLRI
0932	Pendataan dan Pengawasan Orang Asing



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN SUB KEGIATAN
0933	Penertiban, Pendataan dan Pengawasan Senpi, Handak dan Obat Tertarang
0934	Pendataan dan Pengawasan Pelaku Tindak Pidana
0935	Pengkajian dan Penyusunan Typologi Potensi Konflik dan Sistem Penanggulangannya
0936	Pemberdayaan Kemitraan Dengan Lembaga Pend, Masy, Tkh Masy, Insts, Swasta, Jasa Pengaman, Tkh Agama & LSM
0937	Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Perigamanan Swakarsa
0938	Bantuan Pelayanan Masyarakat
0939	Menyelenggarakan Pengamanan Kepolisian
0940	Dukungan Operasional Kepolisian
0941	Menyelenggarakan Bimbingan, Pengayoman dan Linmas
0942	Menyelenggarakan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli
0943	Menyelenggarakan Operasi Kepolisian
0944	Penelitian dan Pengembangan Keamanan
0945	Pengadaan Kapor POLRI
0946	Penataan Manajemen Kelembagaan
0947	Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
0948	Bantuan Teknik Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
0949	Kerjasama, Pembinaan dan Pengawasan Teknis Penyelidikan
0950	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamaan LLAJ
0951	Pengadaan dan Pemasangan Peralatan PKB
0952	Pengadaan dan Pemasangan Peralatan PKB Keliling
0953	Pengadaan dan Pemasangan Jembatan Timbang
0954	Pengadaan Sarana Transportasi Jalan
0955	Pembangunan Terminal
0956	Pembangunan Gedung/Prasarana Jembatan Timbang
0957	Pembangunan Gedung/Prasarana PKB
0958	Rehabilitasi Terminal
0959	Rehab. Gedung/Prasarana Jembatan Timbang
0960	Rehab Gedung/Prasarana PKB
0961	Rehab. Fasilitas Keselamatan LLAJ
0962	Rehab. Sarana Transportasi Jalan
0963	Pengadaan Kendaraan Operasional LLAJ
0964	Pengadaan Sarana Komunikasi LLAJ
0965	Survei Teknis Penelitian dan Peningkatan LLAJ
0966	Penyusunan Rencana Teknis Angkutan Jalan dan Perkotaan
0967	Monitoring dan Evaluasi
0968	Studi Kebijakan LLAJ
0969	Penyusunan Pedoman Teknis LLAJ
0970	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
0971	Survei Teknis Keperintisan Angkutan Jalan
0972	Subsidi Pengoperasian Bus Perintis
0973	Penelitian dan Pengembangan Keperintisan
0974	Pembangunan Jalan dan Jembatan KA
0975	Pembangunan Sintelis
0976	Pembangunan Gedung Operasional
0977	Peningkatan Jalan dan Jembatan KA
0978	Peningkatan Sintelis



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN SUB KEGIATAN
0979	Peningkatan/Modifikasi Gedung Operasional
0980	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan KA
0981	Rehabilitasi Sintelis
0982	Rehabilitasi Gedung Operasional
0983	Pembangunan/Pengadaan Sarana KA
0984	Peningkatan/Modifikasi Sarana KA
0985	Rehabilitasi Sarana KA
0986	Rehabilitasi/Modifikasi Sarana KA
0987	Survei Teknis Desain Jalan dan Jembatan KA
0988	Studi Kebijakan Perkeretaapian
0989	Penyusunan Rencana Teknis Perkeretaapian
0990	Penyusunan Pedoman Teknis Perkeretaapian
0991	Sistem Manajemen dan Informasi Perkeretaapian
0992	Pembangunan Dermaga Penyeberangan
0993	Pembangunan Dermaga Danau
0994	Pembangunan Dermaga Sungai
0995	Pembangunan SBNP
0996	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai/Danau
0997	Pengadaan Pembangunan Kapal
0998	Rehabilitasi Kapal
0999	Rehabilitasi Dermaga SDP
1000	Rehabilitasi SBNP
1001	Pengerukan/Pembersihan Alur Pelayaran
1002	Studi Perencanaan Teknis
1003	Studi Kebijaksanaan LLASDP
1004	Penyusunan Pedoman Teknis SDP
1005	Sistim Manajemen dan Informasi SDP
1006	Studi Kebijakan Transportasi Darat
1007	Sistem Manajemen dan Informasi Transportasi Darat
1008	Pengadaan Peralatan Penunjang Operasional
1009	Pengadaan Bus Perintis
1010	Survei Teknis Penelitian dan Peningkatan Anggkutan Perkotaan
1011	Survei Teknis Keperintisan Anggkutan Perkotaan
1012	Penyusunan Rencana Teknis Angkutan Jalan Perkotaan
1013	Studi Kebijakan Angkutan Perkotaan
1014	Penyususnan Pedoman Teknis Angkutan Perkotaan
1015	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Perkotaan
1016	Penyelenggaraan Scheme PSO-IMO-TAC
1017	Pengadaan Sarana Kereta Api Ekonomi
1018	Pengadaan Peralatan/Fasilitas Perkeretaapian
1019	Studi LLASDP
1020	Studi Kebijakan LLASDP
1021	Penyusunan Pedoman Teknis SDP
1022	Sistem Manajemen dan Informasi SDP
1023	Studi Design Dan Supervisi
1024	Studi SID
1025	Studi Penyusunan Spesifikasi Lintas SDP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN SUB KEGIATAN
1026	Survei Teknis Keperintisan Angkutan SDP
1027	Pengadaan Kapal Perintis
1028	Subsidi Pengoperasian Kapal Perintis
1029	Pengembangan Tenaga Kediklatan Kehutanan
1030	Rehabilitasi Kapal Penyeberangan
1031	Pembinaan Manajemen Kepolisian
1032	Bantuan Sarana dan Prasarana
1033	Perpindahan dan Penempatan
1034	Penyusunan Rencana Teknis
1035	Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
1036	Pembinaan dan Fasilitator
1037	Sosialisasi dan Koordinasi Upaya Kesehatan
1038	Pengujian Kalibrasi Peralatan Medik dan Monitoring Film Badge
1039	Penanggulangan GAKY
1040	Pengadaan Bahan Makanan Tambahan Pengganti Asi, Bahan Gizi dan Sejenisnya
1041	Pengembangan Sistem Aplikasi Database Online
1042	Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Online
1043	Pemeliharaan dan Peremajaan Software/Hardware Komputer
1044	Pemeliharaan dan Peremajaan Website
1045	Perumusan/Revisi Standar Nasional Indonesia
1046	Pemberlakuan/Penerapan Standardisasi
1047	Pembinaan Standardisasi
1048	Kerjasama Standardisasi
1049	Penyiapan dan Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan Produksi
1050	Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hutan Alam
1051	Pengembangan Hutan Tanaman
1052	Pengembangan Sertifikasi dan Pengujian Hasil Hutan
1053	Pembinaan dan Pengendalian Produksi Pengolahan Hasil Hutan
1054	Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu
1055	Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
1056	Pembinaan & Pengendalian Kualitas Pengelolaan Hutan Lestari & Produk Hasil Hutan
1057	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan
1058	Penelaahan, Evaluasi dan Penataan Peraturan Perundang-undangan Kehutanan
1059	Pencegahan, Pemadaman serta Penanganan Dampak Kebakaran Hutan
1060	Pengelolaan Kawasan Konservasi Lainnya
1061	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi
1062	Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Perbenihan Tanaman Hutan
1063	Pengembangan Hutan Kemasyarakatan
1064	Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan Usaha Perhutanan Sosial
1065	Pengembangan Usaha Hasil Hutan Non Kayu
1066	Peningkatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Kehutanan
1067	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan
1068	Peningkatan Penyelenggaraan Diklat Kehutanan Bagi Aparatur
1069	Pengembangan Materi dan Teknologi Diklat Kehutanan
1070	Peningkatan Penyelenggaraan Diklat Kehutanan Bagi Non Aparatur
1071	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
1072	Penatagunaan Kawasan Hutan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN SUB KEGIATAN
1073	Perencanaan Pembangunan Kehutanan
1074	Pengendalian Pembangunan Kehutanan
1075	Operasi Pemulihan Keamanan
1076	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah
1077	Pembangunan Jembatan
1078	Peningkatan Jembatan
1079	Pemeliharaan Rutin Jembatan
1080	Pemeliharaan Berkala Jalan Arteri
1081	Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor
1082	Pemeliharaan Berkala Jembatan
1096	Penyusunan dan Pemutakhiran Data Base Perencanaan Pembangunan
1097	Peningkatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan
1098	Optimalisasi Penggunaan Upah Pungut Pajak Bumi dan Bangunan
1099	Perencanaan Tata Ruang dan Kajian Lingkungan
1100	Pemantauan dan Evaluasi Manfaat
1101	Perencanaan Umum
1102	Manajemen Prakontrak dan Pengadaan
1103	Penunjang Perencanaan
1104	Infrastruktur
1105	Iuran Pemerintah
1106	Penguatan Modal Usaha Ekonomi Pedesaan
1120	Bantuan Penunjang Kegiatan/Akomodasi Pimpinan dan Anggota MPR
1121	Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MPR
1122	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kolektoral
1123	Pemberian Jaminan Sosial
1124	Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman dan Dampak Bencana Alam
1125	Pembinaan Penganekaragaman dan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat
1126	Pemberdayaan Petani di Kawasan Agribisnis
1127	Pemberdayaan Tenaga Muda Terdidik untuk Menggeluti Pertanian
1128	Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian di Kawasan Agribisnis
1129	Peningkatan Manajemen Pendidikan Tinggi
1130	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan Tinggi
1131	Pengembangan Institusi dan Kelembagaan Pendidikan Tinggi
1132	Pembinaan dan Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat
1133	Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan PT
1134	Penyelenggaraan Persiapan Beasiswa Luar Negeri
1135	Pembinaan Akademik dan Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan
1136	Pengembangan Pendidikan Profesional dan Keahlian
1137	Pengembangan Pendidikan Jarak Jauh
1138	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 / 6 / 10
1139	Rehabilitasi Gedung
1140	Peningkatan Produktivitas Padi
1141	Peningkatan Produktivitas Jagung
1142	Peningkatan Produktivitas Kedelai
1143	Peningkatan Produktivitas Ubi Kayu
1144	Peningkatan Produktivitas Ubi Jalar
1145	Peningkatan Produktivitas Kacang Tanah



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN SUB KEGIATAN
1146	Peningkatan Produktivitas Kacang Hijau
1147	Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Alternatif
1148	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Padi
1149	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Jagung
1150	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Kedelai
1151	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ubi Kayu
1152	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ubi Jalar
1153	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Kacang Tanah
1154	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Kacang Hijau
1155	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Tanaman Pangan Lainnya
1156	Pengembangan Usaha Tani Terpadu Lahan Kering
1157	Peningkatan Mutu Intensifikasi
1158	Pembinaan dan Pengembangan Pupuk
1159	Pembinaan dan Pengembangan Pestisida
1160	Pembinaan dan Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
1161	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatausahaan
1162	Pembinaan dan Pengembangan Humas Dan Hukum
1163	Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan
1164	Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Perlengkapan
1165	Operasional Pelaksanaan Satker
1166	Pengembangan Pasca Panen Hasil Pertanian
1167	Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian
1168	Pengembangan Terminal Agribisnis/Sub Terminal Agribisnis
1169	Pengembangan Pasar Domestik Hasil Pertanian
1170	Pengembangan Pasar Internasional Hasil Pertanian
1171	Pengelolaan Lahan
1172	Pengelolaan Air
1173	Perluasan Areal
1175	Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKA-KL)
1176	Penyusunan RKA-KL, SRAA dan DIPA
1177	Integrasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi
1178	Pembinaan Program dan Rencana Kerja
1179	Pemantapan Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan
1180	Penyelenggaraan Koordinasi Ketahanan Pangan
1181	Evaluasi dan Pengendalian Ketahanan Pangan
1182	Pengkajian, Perumusan Kebijakan dan Pemantauan Produksi Pangan
1183	Pengkajian, Perumusan Kebijakan dan Pemantauan Cadangan Pangan
1184	Pengkajian, Perumusan Kebijakan dan Pemantauan Pencegahan Kerawanan Pangan
1185	Pengkajian, Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Pemantapan Sistem Distribusi Pangan
1186	Pengkajian, Perumusan Kebijakan dan Pemantauan Analisis Harga Pangan
1187	Pengkajian, Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Pemantapan Analisis Akses Pangan
1188	Pengkajian, Perumusan Kebijakan dan Pemantauan Pemanfaatan Sumber-sumber Pangan
1189	Pengkajian, Perumusan Kebijakan dan Pemantauan Kebutuhan dan Pemantapan Pola Konsumsi
1190	Pengkajian, Perumusan Kebijakan dan Pemantauan Keamanan dan Penerimaan Pangan
1191	Pengkajian, Perumusan Kebijakan dan Pemantauan Kredit Program
1192	Pengkajian, Perumusan Kebijakan dan Pemantauan Pola Pembiayaan
1193	Pengkajian, Perumusan Kebijakan dan Pemantauan Pola Kerja Sama Kelembagaan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN SUB KEGIATAN
1194	Penguatan Modal Usaha Kelompok
1195	Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Bidang Perekonomian
1196	Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Bidang Polsoskam
1197	Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Bidang Keuangan Daerah
1198	Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Bidang Akuntan Negara
1199	Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Bidang Investigasi
1200	Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bidang Perekonomian
1201	Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bidang Polsoskam
1202	Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bidang Keuangan Daerah
1203	Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bidang Akuntan Negara
1204	Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bidang Investigasi
1205	Pengembangan Kebijakan Ilmu Sosial dan Politik
1206	Pengembangan Kebijakan Ilmu Kemasyarakatan
1207	Pengembangan Kebijakan Ilmu Ekonomi dan Manajemen
1208	Analisis Pengembangan Kebijakan Ilmu Hukum
1209	Pengembangan Kebijakan Bidang Ilmu Sastra dan Budaya
1210	Pengembangan Kebijakan Ilmu Filsafat dan Agama
1211	Pengkajian dan Pengembangan Riptek Bidang Fisika dan Matematika
1212	Pengkajian dan Pengembangan Riptek Bidang Kimia dan Material
1213	Analisis Pengembangan Litbangrap Ilmu dan Teknologi NANO
1214	Analisis Pemanfaatan Teknik Budidaya Pertanian yang Menunjang Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Dev)
1215	Kebijakan Prioritas Pengembangan Riset Biologi Nasional dalam Rangka Mempertahankan Potensi Biodiversitas
1216	Kebijakan Prioritas Pengembangan Sentra Pemulyaan untuk Menunjang Ketahanan Pangan
1217	Kebijakan Riset untuk Teknik Perawatan Kualitas Lingkungan
1218	Pengembangan Kebijakan Riset Iptek Kedokteran Pencegahan
1219	Pengembangan Kebijakan Riset Iptek Kedokteran Pengobatan
1220	Konsep Perkemb Sist Kerjasama Pertukaran/Perpindahan Smbrody Hayati/Smbrody Genetik dlm Kerjasama Internas
1221	Pengembangan Kebijakan Bioinformatika sbg Pendukung Early Warning System Wabah DBD
1222	Landmark Pembangunan Ketahanan Pangan
1223	Landmark Penciptaan dan Pemanfaatan Sumber Energi Baru dan Terbarukan
1224	Landmark Pengembangan Teknologi dan Manajemen Transportasi
1225	Landmark Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
1226	Landmark Pengembangan Teknologi Pertahanan
1227	Landmark Pengembangan Teknologi Kesehatan dan Obat-obatan
1228	Mitigasi Bencana
1229	Pengembangan Produk Lokal dan Iptekda
1230	Bio Etika Nasional
1231	Bio Terrorism
1232	Kebijakan Pengembangan dan Perkembangan Riptek Energi
1233	Kebijakan Pengembangan Manufaktur Pendukung Industri Pangan
1234	Analisis Penyusunan Arah Perkembangan Riptek Masa Depan
1235	Pengembangan dan Pemberdayaan Kekuatan Nasional Bidang Jasa Iptek
1236	Arah Kebijakan Pengembangan Iptek Transportasi Nasional
1237	Keterpaduan Riset Perguruan Tinggi Dengan Program Litbang Daerah
1238	Kebijakan Open IT Standard
1239	Kebijakan Standardisasi Infrastruktur Industri untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN SUB KEGIATAN
1240	Pengkajian, Pemetaan dan Pemantauan Teknologi Proses, Produksi dan Manufaktur
1241	Pengkajian, Pemetaan dan Pemantauan Teknologi Prasarana untuk Meningkatkan Peran Masy dan UMKM dlm Pemb
1242	Kajian Perkembangan Tata Kelola Lingkungan
1243	Pengembangan Lembaga Sosialisasi Budaya Iptek
1244	Pkajian Ttg Pengetahuan Trad & Kearifan Lingk Masy Peladang Berotasi dlm Hubnya Dgn Ketahanan Pgn Masy Desa
1245	Penyusunan & Penyel Kebijakan Pembudayaan Iptek: Sosialisasi Industr Listrik & Desalinasi Bagi Masy Madura
1246	Pemetaan dan Inventarisasi Lembaga Pembudayaan Iptek
1247	Strategi Implementasi Gerakan Nasional Sadar Iptek
1248	Visi Knowledge Base Society (KBS)
1249	Membangun Masyarakat yang Berbudaya Iptek
1250	Kebijakan Sd Genetik, Pengeth Trad&Folklore dlm Memantapkan Kpastian Prlndung Hkm&Upaya Mentktkan Pend Daer
1251	Roadmap Litbangrap Iptek Produk Jamu untuk Mendukung Ketersediaan Obat Nasional
1252	Pentktan Daya Tarik Investasi Di Daerah Berbasis Litbang Pengeth Trad Guna Mentktkan Pertumb Eko di Daerah
1253	Pemanfaatan Riptek untuk Prediksi Gempa
1254	Pengukuran Waktu dan Percepatan Grafitasi Serta Pemanfaatannya dalam Aspek Spacial
1255	Pengembangan Kebijakan Publik dlm Bid Ekonomi, Industri, Sosial dan Politik
1256	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Implementasi Jakstranas dan Advokasi Jakstrada
1257	Jaringan Sistem Iptek
1258	Pengembangan Sistem Kelembagaan Iptek
1259	Pengembangan Kemitraan
1260	Jaringan Kelembagaan Iptek
1261	Pengembangan dan Pemanfaatan Sarana Difusi Iptek
1262	Pola Hubungan Kelembagaan Iptek Pusat dan Daerah
1263	Penyusunan dan Pengembangan Kebijakan Pemberdayaan Sumber Daya Lokal Melalui Peran Strategis Balitbangda
1264	Peningkatan Kapasitas Iptek Daerah dalam Upaya Pengembangan Industri Daerah
1265	Studi Peran Pembelanjaan Pemerintah Daerah dalam Difusi Iptek
1266	Peningkatan Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Pemasarakatan Iptek
1267	Pengembangan Repository Basis Data Iptek di Lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi dan LPND
1268	Penilaian Peningkatan Kapasitas Iptek di Daerah
1269	Riset Unggulan Terpadu (RUT-PD)
1270	Riset Pengembangan Kapasitas (RPK-PD)
1271	Riset Matematika Ilmu Pengetahuan Alam (RMIPA)
1272	Riset Unggulan Kemanusiaan dan Kemasyarakatan (RUKK-A)
1273	Riset Unggulan Terpadu (RUT-PT)
1274	Riset Pengembangan Kapasitas (RPK-PT)
1275	Riset Unggulan Kemanusiaan dan Kemasyarakatan (RUKK-B)
1276	Riset Unggulan Terpadu Internasional (RUTI)
1277	Perumusan Kebijakan Bidang Pangan
1278	Perumusan Kebijakan Bidang ICT
1279	Perumusan Kebijakan Bidang Ekindag
1280	Perumusan Kebijakan Bidang HKI
1281	Perumusan Kebijakan Bidang Pendidikan
1282	Pengembangan Data Base Riptek



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN SUB KEGIATAN
1283	Sosialisasi Hasil Kajian Dinamika Masyarakat
1284	Pengembangan Strategi Promosi sebagai Upaya Percepatan Pemasyarakatan Iptek
1285	Peningkatan Desiminasi Teknologi dan Spesifik Lokasi
1286	Media Advokasi
1287	Penyusunan dan Pengembangan Kebijakan Pemberdayaan Sumber Daya Lokal Melalui Peran Strategis Balitbangda
1288	Peningkatan Kapasitas Iptek Daerah dalam Upaya Pengembangan Industri Daerah
1289	Studi Peran Pembelanjaan Pemerintah Daerah dalam Difusi Iptek
1290	Pengembangan Repository Basis Data Iptek di Lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi dan LPND
1291	Penilaian Peningkatan Kapasitas Iptek di Daerah
1292	Riset Pengembangan Kapasitas (RPK-DT)
1293	Pendayagunaan HKI
1294	Pendayagunaan Standarisasi
1295	Warintek Plus, IGOS, E-GOV, Rebranding Aplikasi Perkantoran, GSI
1296	Pemasyarakatan Iptek
1297	Revitalisasi Kelembagaan Ilmu-ilmu Sosial dan Kemanusiaan
1298	Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
1299	Evaluasi Efektivitas Program Lembaga Riptek
1300	Kebijakan Peningkatan Sarana dan Kelembagaan Iptek
1301	Reposisi Kelembagaan Iptek
1302	Pengembangan Sistem Akreditasi Pusat Iptek
1303	Pengembangan Pusat Iptek Internasional di Indonesia
1304	Pengembangan Pusat-pusat Iptek
1305	Pengemb dan Pengelolaan BTC (Business Technology Center) sbg Simpul Dari Pusat Pertumbuh Industri Daerah
1306	Pengembangan Jejaring BTC untuk Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Litbang Daerah
1307	Pengembangan Legislasi Kelembagaan Iptek
1308	Pengembangan Legislasi Peningkatan Kemampuan Iptek
1309	Pengembangan Iptek dan Komersialisasi Iptek
1310	Pengembangan Legislasi Pemanfaatan Iptek
1311	Perlindungan Terhadap Pelaku Iptek dalam Alih Teknologi
1312	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi
1313	Pengembangan Sistem Insentif Riset
1314	Pengembangan Sistem Insentif Teknologi Industri
1315	Pengembangan Sistem Insentif Investasi Iptek
1316	Penyusunan Instrumen Bioetika Nasional Bidang Pertanian, Peternakan dan Pangan
1317	Pemapanan Etika Teknologi Informasi
1318	Penyusunan Pedoman dan Pelaksanaan Kebebasan Akademis di Perguruan Tinggi dan Lemlit
1319	Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Profesi Iptek & Pengemb Jaringan Kelembagaan ddi Pusat & Daerah
1320	Pengembangan Buah-buahan Unggulan
1321	Pengembangan Teknologi Informasi dan Mikroelektronika
1322	Pengembangan Teknologi Kelautan-Kerapu
1323	Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit
1324	Diversifikasi Pangan Pokok
1325	Pengembangan Engine Aluminium Paduan
1326	Pengembangan Energi
1327	Pengembangan Sapi Perah Berbasis Lokal



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN SUB KEGIATAN
1328	Bio-Island
1329	Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan (KNAPPP)
1330	Kekayaan Intelektual, Tradisional Knowledge, Strandarisasi
1331	Peningkatan Kapasitas Iptek Produksi dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing
1332	Pola Pengembangan dan Dukungan Lembaga Kewirausahaan dalam Meningkatkan Penetrasi Hasil Riptek
1333	Penguatan Struktur Modal Ventura sbg Sarana Pengemb Start Up Capital Bagi Komersialisasi Hasil Litbang
1334	Pengembangan dan Penguatan Inovasi Iptek di Industri Hankam
1335	Pemanfaatan Paten Domestik dan Paten Kadaluarsa dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Ekonomi
1336	Kebijakan Hasil-hasil Litbangrap Iptek untuk Memperkuat Struktur Pasar dan Perdagangan
1337	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kapasitas SDM Iptek di Masyarakat
1338	Pengembangan Riset Unggulan untuk Membangun Kompetensi SDM Secara Terlembaga
1339	Kajian & Koord Kerjasama Riptek Internasional (Multilateral & Bilateral) utk Mentktkan Kualitas SDM Iptek
1340	Analisis Pemberdayaan SDM Iptek Perguruan Tinggi dan Litbang
1341	Kebijakan Pemberdayaan SDM Iptek di Sektor Industri
1342	Evaluasi Kapasitas dan Produktivitas Lembaga Riptek
1343	Evaluasi Indikator Kinerja Lembaga Riptek
1344	Identifikasi dan Pemetaan Kebutuhan Riset dan Teknologi Bagi Pengembangan Inovasi Daerah
1345	Strategi Pemenuhan Kebutuhan Iptek untuk Penguatan Indikator Pertumbuhan Industri di Daerah
1346	Pengembangan Manajemen Pengetahuan Berbasis OSS di Warintek
1347	Pengembangan Teknologi Domestik Berbasis Kekayaan Intelektual Tradisional dan Sumberdaya Genetik
1348	Ptktan Kemampuan Ikmk Berbasis Teknologi Berpola Alih Teknlg utk Mentktkan Kapasitas Iptek Sist Produksi
1349	Pengkajian dan Pemberdayaan Potensi Sumberdaya Lokal
1350	Riset Unggulan Kemitraan (RUK)
1351	Krenova
1352	Riset Unggulan Terpadu (RUT-Inovasi)
1353	Riset Kebutuhan Dasar Manusia (RKDM)
1354	Katalis Iptek
1355	Pengembangan Teknologi Pertahanan Dalam Negeri dalam Menunjang Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista)
1356	Pengembangan Teknologi Kedirgantaraan
1357	Intranet KRT
1358	Hakteknas
1359	Asean Cost
1360	Koordinasi Instiusional
1361	Sistem Informasi Program dan Anggaran (SIPA)
1362	Penerapan Teknolgi Pengembangan Hortikultura
1363	Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi
1364	Penyiapan/Pelelangan Unit Kelola Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
1365	Pembinaan Rencana Kerja Unit Kelola Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
1366	Pembinaan Kelembagaan dan Investasi Unit Kelola Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
1367	Pembinaan dan Pengendalian Produksi Hutan Alam
1368	Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sosial Hutan Alam
1369	Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam
1370	Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu
1371	Pembinaan dan Pengendalian Produksi Hutan Tanaman
1372	Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sosial Hutan Tanaman



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN SUB KEGIATAN
1373	Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman
1374	Pengembangan Hutan Tanaman Jenis Unggulan Lokal
1375	Pemolaan Industri Primer Hasil Hutan
1376	Penilaian Kinerja Industri Hasil Hutan
1377	Pengembangan Pemasaran Hasil Hutan
1378	Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Penertiban Hasil Hutan Illegal
1379	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengujian dan Penata Usahaan Hasil Hutan
1381	Pengembangan Sistem dan Deteksi Dini Penanggulangan Kebakaran Hutan
1382	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan
1383	Inventarisasi Flora dan Fauna
1384	Pembinaan Habitat
1385	Konservasi Ekosistem Esensial
1386	Penangkaran dan Peredaran Satwa dan Tumbuhan
1387	Pengembangan Pemanfaatan Wisata Alam
1388	Pengembangan Bina Cinta Alam
1389	Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan
1390	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Hutan
1391	Penyelesaian Kasus Hukum Pelanggaran/ Kejahatan Hutan
1392	Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
1393	Perubahan/Peruntukan Fungsi Kawasan Hutan
1394	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Antar Sektor
1395	Sosialisasi Pelaksanaan dan Pemantauan Perjanjian Internasional
1396	Penyusunan Rencana Makro Kehutanan
1399	Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan
1400	Penyelenggaraan Penghijauan
1401	Pengembangan Hutan Rakyat
1402	Pengembangan Sipil Teknis Konservasi Tanah
1403	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan DAS dan RRL
1404	Penyusunan Rencana dan Evaluasi Pengelolaan DAS
1405	Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Kehutanan
1406	Pemberdayaan Masyarakat Sasaran
1407	Pengembangan Jaringan Kerja dan Kemitraan Penyuluhan Kehutanan
1408	Penyusunan dan Pengembangan Data SDA Hutan
1409	Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA)
1411	Pengembangan Standar Bidang Kehutanan
1412	Peningkatan Standar Mutu dan Lingkungan
1413	Pengembangan Pengendalian Kerusakan Lingkungan
1414	Litbang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
1415	Litbang Pembangunan dan Pengelolaan Hutan Tanaman
1416	Litbang Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Lahan Kritis
1417	Litbang Pengelolaan Kawasan yang Dilindungi dan Pelestarian Keaneka Ragaman Hayati
1418	Litbang Pengembangan Hutan Rakyat dan Hutan Kemasyarakatan
1419	Litbang Peningkatan Budi Daya Hasil Hutan Bukan Kayu untuk Mendukung Usaha Kecil dan Menengah
1420	Litbang Tekno Ekonomi Pemanfaatan Hasil Hutan
1421	Litbang Pemanfaatan dan Pemasaran Jasa Hutan
1422	Litbang Biologi Hutan dan Sifat Dasar Hasil Hutan
1423	Litbang Pemantapan Kelembagaan Sektor Kehutanan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN SUB KEGIATAN
1424	Desimnisasi Hasil Kerjasama dan Jejaring Kerja Litbang
1425	Pemantapan Kelembagaan Sistem Perencanaan dan Evaluasi Litbang
1426	Administrasi Umum dan Peningkatan Sarana Litbang
1427	Pengembangan Sistem dan Kelembagaan Pengawasan
1428	Pengembangan Kualitasi SDM Auditor
1429	Peningkatan Penyelenggaran dan Pengelolaan Pendidikan Kehutanan
1430	Pengembangan Organisasi dan Institusi Kediklatan Kehutanan
1431	Pengembangan Sarana dan Prasarana Litbang
1432	Pengembangan Sumber Benih
1433	Pengendalian Peredaran Perbenihan Tanaman Hutan
1434	Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)
1435	Pengkajian dan Desimenasi Teknologi Spesifikasi Lokasi
1436	Penyusunan Renja KL dan Anggaran
1437	Pengintegrasian Teknis Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kerja
1438	Pengembangan Kerjasama Program
1439	Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan
1440	Penyusunan Rencana Pengkajian, Pedoman dan Pemantauan Produksi Pangan
1441	Penyusunan Rencana Pengkajian, Pedoman dan Pemantauan Cadangan Pangan
1442	Penanganan Daerah Rawan Pangan
1443	Pengembangan Kelembgaaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Ketahanan Pangan
1444	Perluasan Areal
1445	Pengelolaan Lahan
1446	Pengelolaan Air
1447	Perumusan Rencana Pengkajian, Pemantauan dan Pemantapan Sistem Distribusi Pangan
1448	Perumusan Rencana Pengkajian, dan Pemantapan Analisis Harga Pangan
1449	Perumusan Rencana Pengkajian, Pemantauan dan Pemantapan Sistem Analisis Akses Pangan
1450	Pengembangan Usaha Ekonomi
1451	Perumusan Rencana Pengkajian, Pemantauan dan Pemantapan Sumber-sumber Pangan
1452	Perumusan Rencana Pengkajian, Pemantauan Kebutuhan dan Pamantapan Pola Konsumsi
1453	Perumusan Rencana Pengkajian, Pemantapan Keamanan dan Penerimaan Pangan
1454	Pengembangan Standar Operasi dan Prosedur
1455	Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hutan Tanaman
1456	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kediklatan
1457	Bantuan Teknis Perdagangan Luar Negeri WTO
1458	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Hukum dan HAM
1459	Pendidikan dan Pelatihan Teknis HKI
1460	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pemasarakatan
1461	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Keimigrasian
1462	Pembinaan Manajemen Pengembangan Perkebunan
1463	Pembinaan Perlindungan Perkebunan
1464	Pembinaan dan Pengendalian OPT Perkebunan
1465	Pembinaan Perbenihan Perkebunan
1466	Pembinaan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Tahunan Perkebunan
1467	Pembinaan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Semusim Perkebunan
1468	Pembinaan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Rempah dan Penyegar Perkebunan
1469	Pembinaan Penanggulangan Gangguan Usaha dan Kebakaran Perkebunan
1470	Pembinaan Sarana dan Prasarana Perkebunan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN SUB KEGIATAN
1474	Pemberdayaan/Penggerakan Masyarakat
1475	Pemberdayaan/Penggerakan Generasi Muda
1476	Pengembangan Media dan Sarana Promosi Kesehatan
1477	Pengembangan Pendekatan dan Teknologi Promkes
1478	Pengembangan Model Promosi Kesehatan
1481	Peningkatan Kemitraan Dengan LS/LSM/Swasta dan Dunia Usaha
1482	Penyusunan Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
1483	Pengintegrasian Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
1484	Pengembangan Mekanisme Perlindungan Anak
1485	Pelaksanaan Kie Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan
1486	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
1487	Penyusunan Kebijakan Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
1488	Monitoring dan Evaluasi Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
1489	Penyusunan Kebijakan Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak
1490	Pengintegrasian Kebijakan Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak
1491	Pengembangan Mekanisme Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak dan Pemerintah dan Masyarakat
1492	Pelaksanaan Kie Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak
1493	Monitoring dan Evaluasi Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak
1494	Penyusunan dan Penyempurnaan Kebijakan Afirmasi di Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1495	Pengintegrasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1496	Penyusunan Sistem Penanganan Tindak Kekerasan
1497	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Pornografi dan Pornoaksi
1498	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1499	Penyusunan Kerangka dan Materi Kebijakan Promosi Kesehatan
1500	Peningkatan Kemampuan Tenaga Pengelola Program
1501	Pemantauan Kinerja Pengendalian Pencemaran Lingkungan
1502	Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kegiatan Industri dan Jasa
1503	Administrasi Pengendalian Limbah B3
1504	Penanganan Media Tercemar Limbah B3
1505	Pengembangan Standarisasi, Teknologi dan Produksi Bersih
1506	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
1507	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
1508	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air
1509	Pengendalian Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut
1511	Pengendalian Perencanaan Ruang dan Lingkungan
1512	Pengawasan Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan
1513	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1514	Pengkajian Dampak Lingkungan
1515	Penegakan Hukum Pidana dan Administrasi Lingkungan
1516	Penegakan Hukum Perdata dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
1517	Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Lingkungan
1518	Pengembangan Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian Internasional Lingkungan Hidup
1519	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Lingkungan
1520	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
1521	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan di Bidang Lingkungan Hidup
1522	Pengembangan Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN SUB KEGIATAN
1523	Pemantauan Kualitas Air
1524	Pemantauan Kualitas Udara
1525	Pengembangan Insentif dan Pendanaan Lingkungan
1526	Peningkatan Kinerja dan Akuntabilitas di Bidang Lingkungan Hidup
1527	Pengembangan Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1528	Peningkatan Kapasitas Kerjasama Luar Negeri di Bidang Lingkungan Hidup
1529	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1627	Pengembangan Sistem dan Model Pelatihan Jarak Jauh untuk Guru Pendidikan Dasar dan Menengah
1628	Pengembangan Pusat Sumber Belajar (Learning Resources Center/PSB)
1629	Pembuatan Buku Juknis/Juklak
1630	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
1631	Pengadaan Obat, Alat Kesehatan/Kedokteran dan Perbekalan RS
1632	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit di Daerah Tertinggal
1633	Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
1634	Peningkatan Peran Sektor Swasta dalam Upaya Kesehatan Perorangan
1635	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Dokter Keluarga
1910	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
1911	Operasional Menteri/Ketua Lembaga
1912	Pemberdayaan Perbenihan Skala Kecil
1913	Perbenihan Skala Besar
1914	Pengawasan Benih
1915	Induk dan Benih
1916	Standardisasi dan Sertifikasi Perbenihan
1917	Revitalisasi Perbenihan
1918	Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Hasil Perikanan
1919	Akreditasi Laboratorium
1920	Pengendalian Mutu
1921	Standardisasi
1922	Penyerasian Standar
1923	Pengendalian Hama Penyakit Ikan
1924	Standardisasi Kesehatan Ikan
1925	Obat Ikan dan Kimia
1926	Pengembangan Sistem dan Model Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh
1929	Pengembangan Sistem dan Model Pembelajaran
1930	Pengembangan Model-model Media untuk Pembelajaran
1931	Pengembangan Sistem dan Model Pemanfaatan Media Pembelajaran utk Pend Usia Dini, Dasar, Menengah, dan PLS
1932	Pengemb dan Pemanapan Jaringan Pend Jarak Jauh di Indonesia (Indonesia Distance Learning Network/Idln)
1933	Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pendidikan
1934	Pembinaan Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya
1935	Pembinaan Tata Pembangunan Prasarana Perikanan Budidaya
1936	Pembinaan Tata Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Perikanan Budidaya
1937	Pembinaan Pengembangan Informasi Geografis Prasarana Perikanan Budidaya
1938	Pembinaan Pola Pengembangan Budidaya
1939	Pembinaan dan Pengendalian Sarana Budidaya
1940	Pembinaan Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi Pembudidaya Ikan
1941	Pembinaan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Skala Kecil



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN SUB KEGIATAN
1942	Pembinaan Pengembangan Investasi dan Permodalan Perikanan Budidaya
1943	Pembinaan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya
1944	Pembinaan Ketenagakerjaan Pembudidaya Ikan
1945	Pembinaan Akreditasi Perikanan Budidaya
1946	Pembinaan Peningkatan dan Penanganan Hasil Perikanan Budidaya
1947	Pengembangan dan Pemantapan Jaringan Pendidikan Jarak Jauh di Indonesia (Ind. Distance Learning Network
1995	Peningkatan Permukiman Wilayah I
1996	Peningkatan Permukiman Wilayah II
1997	Penataan Lingkungan Wilayah I
1998	Penataan Lingkungan Wilayah II
1999	Penyelenggaraan Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir
2000	Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir
2001	Penyusunan Peraturan Tentang Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir
2002	Pelayanan Perijinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir
2003	Sewa Gedung Kantor / Peralatan / Kendaraan
2004	Pengawasan/Supervisi Kegiatan
2005	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2
2006	Perawatan Sarana Gedung
2007	Langganan Daya dan Jasa
2008	Penguatan Kerjasama & Saling Pemahaman Dgn Negara-negara Lain dlm Upaya Mengatasi Disintegrasi Wil. NKRI
2009	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri Pelaksanaan Politik Luar Negeri
2010	Jasa-jasa Kekonsuleran, Keprotokolanan dan Fasilitas Keamanan Diplomatik RI di Luar Negeri
2011	Penyusunan Rancangan Kebijakan Teknis dalam Penyelenggaraan Hubungan LN dan Pelaksanaan Politik LN
2012	Perumusan Kebijakan Politik Luar Negeri
2013	Pelaksanaan Dialog Peradaban Lintas Agama dan Budaya
2014	Penguatan Institusi Diplomasi
2015	Perumusan Strategi Penyusunan Perjanjian Internasional
2016	Peningkatan Prakarsa dan Kepemimpinan Indonesia
2017	Peningkatan Upaya Penanganan Kejahatan Transnasional dan Terorisme Internasional
2018	Pelaksanaan Komitmen Indonesia dalam Pemajuan Ham dan Pembangunan Berkelanjutan
2019	Pelaksanaan Partisipasi Aktif Indonesia dalam Penciptaan dan Penjagaan Perdamaian Dunia
2020	Penyelenggaraan Kerjasama Produktif Dengan LSM Asing
2021	Peningkatan Peran dan Kontribusi Indonesia dalam Penyelesaian Masalah Palestina
2022	Pelaksanaan Kerjasama di Kawasan Asean
2023	Penyelenggaraan Kerjasama Dengan Mitra Asean
2024	Peningkatan Peran Indonesia dalam Forum Regional, Bilateral dan Multilateral
2025	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan
2026	Pelaksanaan Kerjasama Penanganan Selat Malaka dan Pengelolaan Masalah Laut Cina Selatan
2027	Pelaksanaan Gagasan Kerjasama Kemitraan Strategis Kawasan Asia Afrika dan Kawasan Lain
2028	Penyelenggaraan Kerjasama Policy Planning Dengan Negara Sahabat
2029	Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional
2030	Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Pusat/Perwakilan RI di LN
2031	Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Deplu dan Perwakilan RI di LN
2032	Peningkatan Kualitas Kinerja Deplu dan Perwakilan RI di LN
2033	Penyelenggaraan Informasi Pengawasan Aparatur Negara



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN SUB KEGIATAN
2034	Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem, Struktur Kelembagaan dan Prosedur Pengawasan
2035	Pengembangan Penerapan Pemeriksaan Berbasis Kinerja
2036	Peningkatan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Secara Hukum
2037	Peningkatan Intensitas dan Kualitas Pelaksanaan Pemeriksaan
2038	Pengemb. & Peningk Sist. Inf. Aparat Pengawasan Fungsional (APFA) & Perbaikan Kualitas Inf Hsl Pengawasan
2039	Pengembangan Tenaga Pemeriksaan Profesional
2040	Peningkatan Koordinasi Pengawasan yg Lebih Komprehensif
2041	Peningkatan Tatalaksana dan SDM
2042	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
2043	Sekolah Dinas Luar Negeri (Sekdilu)
2044	Sekolah Staf Diplomat Luar Negeri (Sesdilu)
2045	Sekolah Staf dan Pimpinan Departemen Luar Negeri (Sesparlu)
2046	Penyelenggaraan Diklat Pendukung Tugas Pada Perwakilan RI di LN
2047	Promosi dan Kerjasama Diklat (DI dan LN)
2048	Evaluasi dan Penyusunan Formasi PNS
2049	Penerimaan PNS
2050	Penataan SDM Aparatur
2051	Penyempurnaan Peraturan dan Kebijakan Manajemen Kepegawaian
2052	Penyempurnaan Sistem Manajemen Pengelolaan SDM Aparatur
2053	Evaluasi Jabatan Fungsional
2054	Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur
2055	Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM
2056	Penyempurnaan Sistem Pegawai Negeri dan Kualitas SDM
2057	Penyusunan Statistik dan Dokumentasi Masalah Kepegawaian
2058	Pemeliharaan Database Formasi PNS
2059	Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun dan Pengadaan PNS
2060	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pekonsuleran dan Informasi Politik LN
2061	Pembuatan Kartu Tanda Pengenal
2062	Operasional Penyelesaian Pengurusan Ijin Nikah, Perceraian dan Kematian
2063	Penyelenggaraan Foreign Policy Breakfast
2064	Perjalanan Dinas
2065	Litbang Iptek Propelan Raket
2066	Litbang Iptek Propulsi Raket
2067	Litbang Iptek Struktur Raket
2068	Litbang Iptek Kendali Raket
2069	Litbang Iptek Pengujian Raket
2070	Pengembangan Sistem Informasi dan Multimedia
2071	Pengujian dan Peningkatan Kualitas Produk Iptek Dirgantara
2073	Pengkajian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra
2074	Pengkajian/Penelitian Aspek Kebahasaan dan Kesastraan Kesastraan
2075	Penyusunan Hasil Kodifikasi Bahasa dan Sastra
2076	Penyusunan Buku Acuan dan Pedoman Kebahasaan dan Kesastraan
2077	Pengadaan Studio TV, Penyiaran TVE, Studio Mini, Studio Audio, Studio Multimedia dan Pendukung TI
2078	Pengembangan dan Pemanfaatan Edukasi Net untuk SMP/SMA/MA
2079	Penyelenggaraan Bimbingan Ujian Nasional Online
2080	Pengembangan dan Penyelenggaraan Telekolaborasi Edukasinet
2081	Pengembangan Bahan Belajar Berbasis Teknologi Informasi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN SUB KEGIATAN
2082	Pengembangan dan Pemanfaatan E-TV
2083	Pengembangan Materi Siaran Reguler dan Unggulan TVE
2084	Temukarya Kemitraan dan Kerjasama Antar Provider Asing dan Nasional
2085	Temukarya Pengembangan Materi Siaran Kerjasama Dengan Unit Utama Depdiknas
2086	Pengembangan Kuis Edukasi TV Swasta
2087	Analisis Kebutuhan Model, Pembinaan dan Evaluasi Pemanfaatan Siaran TVE
2088	Pengembangan Bahan Penyerta Siaran dan ETV
2089	Penyelenggaraan, Pengembangan Materi, Sosialisasi dan Pemanfaatan Siaran Radio Edukasi
2090	Pengembangan Sistem, Model dan Media Pembelajaran Paud, SD, SMP
2091	Standarisasi Pengembangan, Pemanfaatan dan Produk Media Pembelajaran
2092	Eksperimen Software Mutakhir
2093	Pelaksanaan Produksi (Bil) TI/TP/TK
2094	Pemanfaatan Multimedia Pembelajaran Interaktif (MPI0 untuk Paud)
2095	Pengembangan/Pengkajian Program Peningkatan Kemampuan Guru Multimedia
2096	Pelaksanaan Legalisasi Produk Multimedia
2097	Pengembangan Naskah, Penulisan dan Penerjemahan Buku
2098	Pengendalian Mutu Buku Pendidikan
2099	Pengelolaan Informasi Perbukuan
2100	Koordinasi danfasilitasi Perbukuan
2101	Kajian Teknologi Kefrafikaan dan Penerbitan
2102	Pengujian Mutu Bahan dan Produk Kefrafikaan dan Penerbitan
2103	Layanan Jasa dan Kerjasama Kefrafikaan dan Penerbitan
2104	Penerbitan Buku Kefrafikaan dan Penerbitan
2105	Informasi Kefrafikaan dan Penerbitan
2106	Apresiasi Produk Kefrafikaan dan Penerbitan
2107	Tutorial Kefrafikaan dan Penerbitan
2108	Pembinaan Lembaga Pendidikan Kefrafikaan dan Penerbitan
2109	Pembinaan University Press, Instansi Pemerintah dan Masyarakat Grafika
2110	Pameran Kefrafikaan dan Penerbitan
2111	Seminar Kefrafikaan dan Penerbitan
2112	Pengembangan Standar Kompetisi Grafika dan Penerbitan
2113	Pemetaan Industri Grafika dan Penerbitan
2114	Peningkatan Mutu SDM Pengelola Kefrafikaan dan Penerbitan
2115	Pengembangan Mutu Layanan Diklat Grafika dan Penerbitan
2116	Penelitian Kebijakan Pendidikan
2117	Pengembangan Bank Soal Nasional
2118	Pengembangan Profil Kemajuan Hasil Belajar Siswa
2119	Pengembangan Model Penilaian dan Ujian Adaptif dalam Pendidikan Formal & Non Formal
2120	Pengembangan Lembaga Penilaian Pada Satuan Pendidikan
2121	Pengembangan Model Kurikulum Pendidikan
2122	Bantuan Profesional dan Implementasi Kurikulum
2123	Piloting Pengembangan Kurikulum di Satuan Pendidikan
2124	Penyiapan Institusi Pendidikan dan Pelatihan SDM dalam Rangka Kerjasama Internasional
2125	Peningkatan Manajemen Kerjasama Internasional
2126	Pengembangan Mutu Kelembagaan
2127	Penelitian Kebijakan dan Pengembangan Kemampuan Dasar
2128	Pengembangan Jarlit Pendidikan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN SUB KEGIATAN
2129	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
2130	Pengembangan dan Penyelenggaraan Siaran TVE
2131	Pengembangan Model dan Format Media Radio Pendidikan
2132	Pengembangan Model dan Format Media Televisi Pendidikan
2133	Pengembangan Model dan Format Multimedia Pendidikan
2134	Pengadaan Bahan Makanan Tahanan / Napi
2135	Penyelenggaraan Pengawasan / Penyimpanan Barang Sitaan
2136	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan DAS dan RHL
2137	Penyusunan Rencana dan Evaluasi Pengelolaan DAS Prioritas
2138	Penyelenggaraan Penghijauan di DAS Prioritas
2139	Pengembangan Hutan Rakyat di DAS Prioritas
2140	Pengembangan Hutan Rakyat di DAS Prioritas
2141	Pengembangan Sipil Teknis dan Konservasi Tanah di DAS Prioritas
2142	Penyelenggaraan Rehabilitasi DAS
2143	Penyelenggaraan Rehabilitasi Kawasan Hutan di DAS Prioritas
2144	Pengembangan Perbenihan
2145	Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Perbenihan Tanaman Hutan
2146	Pengembangan Sumber Benih
2147	Pengendalian Peredaran Perbenihan Tanaman Hutan
2148	Pengembangan Hutan Kemasyarakatan
2149	Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan Usaha Perhutanan Nasional
2150	Pengembangan Usaha Hasil Hutan Non Kayu
2151	Peningkatan Mutu Tenaga Kebahasaan dan Kesastraan
2152	Pemasyarakatan Bahasa dan Sastra
2153	Pengembangan Bahan Informasi Kebahasaan dan Kesastraan
2154	Peningkatan Apresiasi Sastra Masyarakat
2155	Penyelenggaraan Star Project
2156	Supervisi Sekolah dan Atdikbud di Luar Negeri
2157	Pelatihan Kantor Sendiri
2158	Desk Audit
2159	Penyelenggaraan/Pengelolaan SIM
2160	Pembiayaan Pemeriksaan At Cost
2161	Penegakan Kode Etik Auditor
2162	Penyusunan Bahan Rapim dan Rakernas
2163	Dekonsentrasi Pengawasan
2164	Penyelenggaraan SPI
2165	Pemutakhiran Data
2166	Pengumpulan, Pengklarifikasian, Pengolahan LHP
2167	Magang dalam dan Luar Negeri
2168	Pengawasan Daerah
2169	Pengawasan Dini
2170	Pengawasan dan Pemeriksaan
2171	Pemeriksaan Khusus
2172	Pengawasan Tematik
2173	Gelar Hasil Pengawasan/Expose
2174	Rekonsiliasi
2175	Pengadaan Peralatan Kantor (Inventaris Kantor)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN SUB KEGIATAN
2176	Jasa Keamanan / Kebersihan
2177	Jasa Perhubungan Khusus/Pos Diplomatik / Radio Komunikasi/Telegram
2178	Jasa Pos / Giro / Sertifikat



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK AKUN

KODE	URAIAN
4	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
41	Penerimaan Perpajakan
411	Pendapatan Pajak Dalam Negeri
4111	Pendapatan Pajak penghasilan
4112	Pendapatan Pajak pertambahan nilai
4113	Pendapatan Pajak bumi dan bangunan
4114	Pendapatan BPHTB
4115	Pendapatan Cukai
4116	Pendapatan Pajak Lainnya
412	Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional
4121	Pendapatan Bea masuk
4122	Pendapatan Pajak/pungutan ekspor
42	Penerimaan Negara Bukan Pajak
421	Penerimaan Sumber Daya Alam
4211	Pendapatan Minyak bumi
4212	Pendapatan Gas Bumi
4213	Pendapatan Pertambangan Umum
4214	Pendapatan Kehutanan
4215	Pendapatan Perikanan
4216	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi
422	Pendapatan Bagian Laba BUMN
4221	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN
423	Pendapatan PNBPN Lainnya
4231	Pendapatan Penjualan dan Sewa
4232	Pendapatan Jasa
4233	Pendapatan Bunga
4234	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan
4235	Pendapatan Pendidikan
4236	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi
4237	Pendapatan Iuran dan Denda
4239	Pendapatan Lain-lain
424	Pendapatan BLU
4241	Pendapatan Jasa Badan Layanan Umum
4242	Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum
4243	Pendapatan Hasil Kerja sama Badan Layanan Umum
43	Penerimaan Hibah
431	Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri
4311	Pendapatan Hibah Dalam Negeri
4312	Pendapatan Hibah Luar Negeri
5	BELANJA NEGARA
51	Belanja Pegawai
511	Belanja Gaji dan Tunjangan
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
5112	Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

5114	Belanja Gaji Dokter PTT
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS
512	Belanja Honorarium/Lembur/Vakasi/Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito
5121	Belanja Honorarium
5122	Belanja Lembur
5123	Belanja Vakasi
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito
513	Belanja Kontribusi Sosial
5131	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu
5132	Belanja Asuransi Kesehatan
5133	Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran
5134	Belanja Cadangan Perubahan Sharing
52	Belanja Barang
521	Belanja Barang
5211	Belanja Barang Operasional
5212	Belanja Barang Non Operasional
522	Belanja Jasa
5221	Belanja Jasa
523	Belanja Pemeliharaan
5231	Belanja Pemeliharaan
524	Belanja Perjalanan
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri
525	Belanja Badan Layanan Umum
5251	Belanja Barang Badan Layanan Umum
53	Belanja Modal
531	Belanja Modal Tanah
5311	Belanja Modal Tanah
532	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
533	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
534	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
535	Belanja Pemeliharaan Yang Dikapitalisasi
5351	Belanja Pemeliharaan Yang Dikapitalisasi
536	Belanja Modal Fisik Lainnya
5361	Belanja Modal Fisik Lainnya
5362	Belanja Dana Bergulir
54	Belanja Pembayaran Bunga Utang
541	Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri
5411	Belanja Pembayaran Bunga Utang DN - Jangka Pendek
5412	Belanja Pembayaran Bunga Utang DN - Jangka Panjang
5413	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri
5414	Belanja Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri- Jangka Panjang
5415	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri
542	Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri
5421	Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri
543	Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Luar Negeri



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

5431	Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Luar Negeri
544	Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption
5441	Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Dalam Negeri
545	Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri
5451	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri
546	Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri
5461	Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri
55	Belanja Subsidi
551	Belanja Subsidi Perusahaan Negara
5511	Belanja Lembaga Keuangan
5512	Belanja Lembaga Non-Keuangan - BBM
5513	Belanja Lembaga Non-Keuangan - Non BBM
5514	Belanja Lembaga Non-Keuangan - PSO
552	Belanja Subsidi Perusahaan Swasta
5521	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
5522	Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan
56	Belanja Hibah
561	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
5611	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
562	Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
5621	Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
563	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
5631	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
57	Belanja Bantuan sosial
571	Belanja Bantuan kompensasi sosial
5711	Belanja Bantuan kompensasi sosial
572	Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan dan Peribadatan
5721	Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan
5722	Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan
573	Belanja Lembaga Sosial Lainnya
5731	Belanja Lembaga Sosial Lainnya
58	Belanja Lain-lain
581	Belanja Lain-lain
5811	Belanja Lain-lain
6	TRANSFER KE DAERAH
61	Transfer Dana Perimbangan
611	Transfer Dana Bagi Hasil
6111	Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
6112	Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
612	Transfer Dana Alokasi Umum
6121	Transfer Dana Alokasi Umum
613	Transfer Dana Alokasi Khusus
6131	Transfer DAK



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

62	Belanja Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
621	Transfer Dana Otonomi Khusus
6211	Transfer Dana Otonomi Khusus
622	Transfer Dana Penyesuaian
6221	Transfer Dana Penyesuaian
7	PEMBIAYAAN
71	Penerimaan Pembiayaan
711	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri
7111	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri
7112	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Non Perbankan
7113	Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
7114	Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara/Obligasi
712	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri
7121	Penarikan Pinjaman Program
7122	Penarikan Pinjaman Proyek
7123	Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara
713	Penerimaan dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
7131	Penerimaan dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
714	Penerimaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
7141	Penerimaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
715	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman
7151	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri
7152	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri
719	Penerimaan Pembiayaan Lain-lain
7161	Penerimaan Pembiayaan Lain-lain
72	Pengeluaran Pembiayaan
721	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri
7211	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan
7212	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Non-Perbankan
7213	Pengeluaran untuk Pembayaran / Pelunasan Surat Utang Negara/Obligasi
722	Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri
7221	Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri-Pinjaman Program
7222	Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri-Pinjaman Proyek
7223	Pengeluaran untuk Pelunasan Surat Berharga Negara
723	Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali
7231	Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali-Pinjaman Program
7232	Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali - Pinjaman Proyek
7233	Pelunasan Bunga Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali - Pinjaman Proyek
724	Penyertaan Modal Negara
7241	Penyertaan Modal Negara pada BUMN
7242	Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional
7243	Penyertaan Modal Negara Lainnya
725	RDI/RPD
7251	Penerusan Pinjaman Dalam Negeri RDI/RPD
7252	Penerusan Pinjaman Luar Negeri
726	Dukungan Infrastruktur
7261	Dukungan Infrastruktur



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

729	Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain
7291	Koreksi Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain
8	NON ANGGARAN
81	Penerimaan Non Anggaran
811	Penerimaan Non Anggaran PFK
8111	Penerimaan PFK 10 % Gaji
8112	Penerimaan PFK 2 % Gaji Terusan
8113	Penerimaan PFK Beras BULOG
8114	Penerimaan PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda
8115	Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT
8116	Penerimaan PFK 2 % Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/POLRI
8117	Penerimaan PFK Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (PFK DTP Migas)
8119	Penerimaan PFK Lain-lain
812	Penerimaan Wesel Pemerintah
8121	Penerimaan Wesel Pemerintah
813	Penerimaan Reimbursement Dalam Rangka Prefinancing (PP) dan PFK BUN Lainnya
8131	Penerimaan Reimbursement Dalam Rangka Prefinancing (PP) dan PFK BUN Lainnya
814	Penerimaan Kiriman Uang
8141	Penerimaan Kiriman Uang
8142	Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus
8143	Penerimaan Pemindahbukuan
815	Penerimaan Transito
8151	Penerimaan Transito
816	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga
8161	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga
82	Pengeluaran Non Anggaran
821	Pengeluaran Non Anggaran PFK
8211	Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 10% Gaji
8212	Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan
8213	Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Beras Bulog
8214	Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda
8215	Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT
8216	Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/POLRI
8217	Pengembalian Penerimaan Dana Tabungan Peangon Tenaga kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (PFK DTP Migas)
8219	Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain
822	Pelunasan Wesel Pemerintah
8221	Pelunasan Wesel Pemerintah
823	Pembayaran PFK Prefinancing dan PFK BUN Lainnya
8231	Pembayaran PFK Prefinancing dan PFK BUN Lainnya
824	Pengeluaran Kiriman Uang
8241	Pengeluaran Kiriman Uang
8242	Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus
8243	Pengeluaran Pemindahbukuan
825	Pengeluaran Transito
8251	Pengeluaran Transito



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

826	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga
8261	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum



Kepala Staf T.U. Departemen

Antonius Suharto
NID 041107

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI